



PEMERINTAH
KABUPATEN PACITAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG

RPJPD

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025 - 2045





SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 6 TAHUN 2024**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025 - 2045**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 Nomor 1);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN
dan
BUPATI PACITAN**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pacitan yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045 yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Timur.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari Wilayah Daerah, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi Penataan Ruang Wilayah Daerah, rencana Struktur Ruang Wilayah Daerah, rencana Pola Ruang Wilayah Daerah, penetapan Kawasan strategis Daerah, arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Daerah, dan ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Daerah.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. Arah Pembangunan Daerah adalah strategi untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.

Pasal 2

- (1) RPJPD ini merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW, serta menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi dan program pembangunan Daerah bagi calon Bupati.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada RPJPN dan RPJPD Provinsi.

Pasal 3

Tujuan disusunnya RPJPD Tahun 2025-2045 ini adalah:

- a. untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang rasional, proporsional, efektif dan efisien dalam melaksanakan pembangunan;
- b. untuk menjamin adanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- c. sebagai pedoman bagi Calon Bupati dalam menyusun visi dan misi Bupati; dan
- d. sebagai pedoman dalam penyusunan RPJMD.

Pasal 4

- (1) RPJPD Tahun 2025-2045 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I mengenai pendahuluan;
 - b. bab II mengenai gambaran umum kondisi daerah;
 - c. bab III mengenai permasalahan dan isu strategis;
 - d. bab IV mengenai visi dan misi daerah;
 - e. bab V mengenai arah kebijakan dan sasaran pokok; dan
 - f. bab VI mengenai penutup.
- (2) RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan bertanggungjawab atas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJPD hanya dapat dilakukan apabila :
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain :
 1. terjadinya bencana alam;
 2. goncangan politik;
 3. krisis ekonomi;
 4. konflik sosial budaya;
 5. gangguan keamanan;
 6. pemekaran daerah; atau
 7. perubahan kebijakan nasional.
- (2) Perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, RPJMD, RKPD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah yang telah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya peraturan perundang-undangan Daerah baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Diundangkan di Pacitan
pada tanggal 17 – 9 - 2024

BUPATI PACITAN,

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

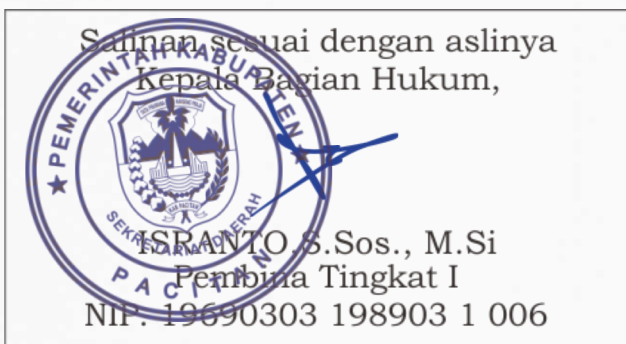
**Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 17 – 9 - 2024**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN,**

ttd

HERU WIWOHO SP

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024 NOMOR 6



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 6 TAHUN 2024**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025 – 2045**

I. UMUM

Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia menjadi lebih baik lagi. Proses pembangunan dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, serta monitoring dan evaluasinya. Perencanaan yang baik dan berkualitas sebagai cikal bakal untuk mewujudkan pembangunan yang baik, tepat guna dan tepat sasaran. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang mampu diimplementasikan oleh seluruh pelaku pembangunan serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Proses perencanaan tersebut akan menghasilkan berbagai pilihan keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai dasar oleh pemerintahan daerah guna menentukan skala prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan. Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah diantaranya Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	x

BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-2
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.3. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan	I-4
1.4. Maksud dan Tujuan.....	I-6
1.5. Sistematika Penulisan.....	I-6

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	II-1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi.....	II-2
2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah.....	II-2
2.1.2 Wilayah Rawan Bencana	II-23
2.1.3 Kondisi Demografi	II-31
2.1.4 Potensi Sumber Daya	II-34
2.1.5. Daya Dukung dan Daya Tampung.....	II-38
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-48
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-48
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial dan Budaya	II-54
2.3 Aspek Pelayanan Umum	II-61
2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar	II-61
2.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar	II-74
2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan.....	II-102
2.3.4 Fokus Layanan Penunjang Urusan Pemerintah	II-108
2.3.5 Fokus Layanan Pengawasan Urusan Pemerintah	II-114
2.3.6 Fokus Layanan Pemerintah Umum.....	II-115
2.4 Aspek Daya Saing	II-115
2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-115
2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur.....	II-118
2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi.....	II-119
2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia.....	II-122
2.5 Evaluasi RPJPD 2005 - 2025	II-125
2.5.1. Evaluasi Berdasarkan Periode RPJPD.....	II-125
2.5.2. Capaian Indikator Kinerja Makro	II-130
2.5.3. Faktor Penghambat dan Pendorong Pencapaian Kinerja.....	II-136

2.6	Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana	
	Pelayanan Publik.....	II-146
2.6.1.	Proyeksi Kependudukan.....	II-146
2.6.2.	Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana.....	II-157
2.7.	Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Arah Kewilayahan	II-173
2.7.1	Arah Pembangunan Kewilayahan Nasional	II-174
2.7.2	Arah Pembangunan Kewilayahan Provinsi Jawa Timur.....	II-176
2.7.3	Arah Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Pacitan.....	II-180

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS..... III-1

3.1.	Permasalahan Pembangunan	III-2
3.2.	Telaah Isu RPJP Nasional Tahun 2025-2045	III-12
3.3.	Telaah Isu RPJPD Provinsi Jawa Timur 2025-2045	III-15
3.4.	Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	III-19
3.5.	Isu Strategis.....	III-24

BAB IV VISI DAN MISI..... IV-1

4.1.	Telaah Visi Dan Misi RPJPN 2025-2045	IV-2
4.2.	Telaah Visi Dan Misi RPJPD Provinsi Jawa Timur 2025-2045	IV-7
4.3.	Visi Dan Misi RPJPD Kabupaten Pacitan 2025-2045	IV-9

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN ARAH PEMBANGUNANV-1

5.1.	Arah Kebijakan Periodisasi 5 Tahunan.....	V-2
5.1.1.	Arah Kebijakan Periodisasi 5 Tahunan Misi 1: Mewujudkan Transformasi Sosial secara merata	V-2
5.1.2.	Arah Kebijakan Periodisasi 5 Tahunan Misi 2: Mewujudkan Transformasi Ekonomi berbasis Potensi Lokal	V-3
5.1.3.	Arah Kebijakan Periodisasi 5 Tahunan Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Yang Efektif dan Adaptif.....	V-4
5.1.4.	Arah Kebijakan Periodisasi 5 Tahunan Misi 4: Meningkatkan Ketahanan Sosbud Ekologi.....	V-5
5.1.5.	Arah Kebijakan Periodisasi 5 Tahunan Misi 5: Mewujudkan Pemerataan Pembangunan dan Infrastruktur Berkelanjutan	V-6
5.2.	Arah Pembangunan.....	V-7
5.2.1.	Arah Pembangunan Misi 1.....	V-7
5.2.2.	Arah Pembangunan Misi 2.....	V-12
5.2.3.	Arah Pembangunan Misi 3.....	V-18
5.2.4.	Arah Pembagnunan Misi 4.....	V-20
5.2.5.	Arah Pembangunan Misi 5.....	V-24

BAB VI PENUTUP	VI-1
6.1. Pedoman Transisi	VI-2
6.2. Kaidah Pelaksanaan	VI-2
6.3. Kerangka Pengendalian	VI-3

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Pacitan Tahun 2023	II-3
Tabel 2. 2 Tinggi Wilayah Kabupaten Pacitan Berdasarkan Kondisi Topografi (ha)	II-5
Tabel 2. 3 Luas Wilayah Kabupaten Pacitan Berdasarkan Kondisi Hidrologi.....	II-10
Tabel 2. 4 Anak Sungai DAS Grindulu Kabupaten Pacitan.....	II-12
Tabel 2. 5 Luas Wilayah Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Pacitan.....	II-16
Tabel 2. 6 Kondisi Suhu, Kelembaban dan Kecepatan Angin di Kabupaten Pacitan tahun 2023	II-17
Tabel 2. 7 Penggunaan Lahan (Ha) Kabupaten Pacitan.....	II-19
Tabel 2. 8 Penggunaan Lahan (Ha) Kabupaten Pacitan.....	II-20
Tabel 2. 9 Penggunaan Lahan (Ha) Kabupaten Pacitan.....	II-20
Tabel 2. 10 Penggunaan Lahan (Ha) Kabupaten Pacitan	II-21
Tabel 2. 11 Neraca Luas Pola Ruang Revisi RTRW Kabupaten Pacitan.....	II-22
Tabel 2. 12 Luas Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah	II-24
Tabel 2. 13 Luas Kawasan Rawan Bencana Tsunami	II-25
Tabel 2. 14 Luas Kawasan Rawan Bencana Banjir	II-26
Tabel 2. 15 Luas Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi.....	II-27
Tabel 2. 16 Luas Kawasan Rawan Bencana Kekeringan	II-28
Tabel 2. 17 Luas Kawasan Rawan Gelombang Pasang dan Abrasi.....	II-29
Tabel 2. 18 Luas Kawasan Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan.....	II-29
Tabel 2. 19 Luas Kawasan Rawan Bencana Epidemi dan Wabah.....	II-30
Tabel 2. 20 Luas Kawasan Rawan Bencana Cuaca Ekstrem.....	II-31
Tabel 2. 21 Kondisi Demografi Kabupaten Pacitan Tahun 2023	II-32
Tabel 2. 22 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pacitan Tahun 2023	II-32
Tabel 2. 23 Daya Dukung Permukiman Kabupaten Pacitan.....	II-39
Tabel 2. 24 Daya Dukung Lahan Bangunan Per Kecamatan di Kabupaten Pacitan	II-41
Tabel 2. 25 Distribusi Status Daya Dukung Air Kabupaten Pacitan Tahun 2023	II-42
Tabel 2. 26 Luas Status Daya Dukung Air Kabupaten Pacitan Tahun 2023.....	II-42
Tabel 2. 27 Luas Status Daya Dukung Pangan Kabupaten Pacitan	II-46
Tabel 2. 28 Hasil analisis <i>location quotient</i> (LQ) pada 17 sektor PDRB Kabupaten Pacitan 2023	II-50
Tabel 2. 29 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2023	II-63

Tabel 2. 30 Indikator Kinerja Urusan Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun 2013-2023	II-65
Tabel 2. 31 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan Tahun 2017-2023	II-66
Tabel 2. 32 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pacitan Tahun 2017-2023	II-68
Tabel 2. 33 Capaian Indikator Kinerja Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pacitan Tahun 2015-2023	II-71
Tabel 2. 34 Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosia Kabupaten Pacitanl Tahun 2013-2023 .	II-73
Tabel 2. 35 Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Pacitan Tahun 2017-2023	II-75
Tabel 2. 36 Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten Pacitan tahun 2013-2023	II-78
Tabel 2. 37 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun 2013-2023	II-79
Tabel 2. 38 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pangan di Kabupaten Pacitan Tahun 2017-2023	II-81
Tabel 2. 39 Perhitungan Surplus/Defisit ketersediaan Pangan Utama Kabupaten Pacitan Tahun 2019-2023	II-81
Tabel 2. 40 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanahan Kabupate Pacitan Tahun 2017-2023	II-86
Tabel 2. 41 Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	II-87
Tabel 2. 42 Capaian Indikator Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan Tahun 2015-2023	II-89
Tabel 2. 43 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kependudukan Kabupaten Pacitan Tahun 2013-2023	II-91
Tabel 2. 44 Capian Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pacitan Tahun 2013-2023	II-93
Tabel 2. 45 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2017-2023	II-94
Tabel 2. 46 Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan tahun 2017-2023	II-94
Tabel 2. 47 Capaian Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2023	II-95

Tabel 2. 48 Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Pacitan Tahun 2013-2023	II-96
Tabel 2. 49 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2016-2023	II-97
Tabel 2. 50 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan Tahun 2017-2023	II-98
Tabel 2. 51 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Pacitan Tahun 2017-2023	II-99
Tabel 2. 52 Capaian Indikator Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Pacitan Tahun 2017-2023	II-99
Tabel 2. 53 Capaian Indikator Kinerja Urusan Persandian Kabupaten Pacitan Tahun 2017-2022	II-100
Tabel 2. 54 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Pacitan Tahun 2015-2023	II-100
Tabel 2. 55 Capaian Indikator Urusan Kearsipan Kabupaten Pacitan Tahun 2015-2023 .	II-101
Tabel 2. 56 Capaian Indikator Urusan Pertanian dan Peternakan Serta Perkebunan Kabupaten Pacitan Tahun 2013-2023	II-103
Tabel 2. 57 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan Tahun 2013-2023	II-105
Tabel 2. 58 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pacitan Tahun 2015-2023	II-109
Tabel 2. 59 Capaian Indikator Kinerja Urusan Keuangan Kabupaten Pacitan Tahun 2013-2023	II-111
Tabel 2. 60 Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pacitan Tahun 2013-2023	II-113
Tabel 2. 61 Capaian Indikator Kinerja Urusan Inspaktorat Kabupaten Pacitan Tahun 2015-2022	II-114
Tabel 2. 62 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan Tahun 2013-2022	II-115
Tabel 2. 63 Indikator Fokus Wilayah dan Infrastruktur Bidang Penataan Ruang Tahun 2010-2023	II-119
Tabel 2. 64 Skor Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2023	II-121
Tabel 2. 65 Capaian Angka Literasi dan Numerasi di Kabupaten Pacitan Tahun 2023	II-122

Tabel 2. 66 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di Kabupaten Pacitan	
Tahun 2021-2023	II-123
Tabel 2. 67 Proyeksi Komposisi Penduduk berdasarkan Kelompok Usia Kabupaten Pacitan	
Tahun 2025-2045	II-150
Tabel 2. 68 Proyeksi Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Pacitan 2025-2045	II-151
Tabel 2. 69 Proyeksi Kepadatan Penduduk berdasarkan perkiraan jumlah penduduk	
Kabupaten Pacitan 2025-2045.....	II-152
Tabel 2. 70 Proyeksi Penduduk berdasarkan Kecamatan.....	II-157
Tabel 2. 71 Proyeksi Kebutuhan Air	II-158
Tabel 2. 72 Sebaran Ketersediaan Air Kabupaten Pacitan Tahun 2023	II-160
Tabel 2. 73 Proyeksi Kebutuhan Air Berdasarkan Kecamatan	II-160
Tabel 2. 74 Proyeksi Kebutuhan Lahan Permukiman.....	II-161
Tabel 2. 75 Ketersediaan Laus Lahan Layak Pemukiman Kabupaten Pacitan	
Tahun 2022.....	II-162
Tabel 2. 76 Proyeksi Kebutuhan Lahan Permukiman Berdasarkan Kecamatan.....	II-163
Tabel 2. 77 Proyeksi Timbunan Sampah dan Kebutuhan TPST	II-164
Tabel 2. 78 Persentase penanganan sampah Kabupaten Pacitan tahun 2017 - 2023	II-165
Tabel 2. 79 Proyeksi Timbunan Sampah Berdasarkan Kecamatan.....	II-167
Tabel 2. 80 Luas Status Daya Dukung Pangan Kabupaten Pacitan	II-168
Tabel 2. 81 Proyeksi Kebutuhan Energi Listrik Kabupaten Pacitan 2025-2045	II-169
Tabel 2. 82 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kabupaten Pacitan 20 Tahun	
Mendatang	II-170
Tabel 2. 83 Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana Pendidikan Kabupaten Pacitan	
20 Tahun Mendatang	II-172
Tabel 2. 84 Game Changer dan program pembangunan di Kabupaten Pacitan	
Tahun 2013-2022	II-176
Tabel 2. 85 Indikasi Program RTRW Kabupaten Pacitan.....	II-181
Tabel 3. 1 Telaah KLHS RPJPD Kabupaten Pacitan Tahun 2025 - 2045.....	III-19
Tabel 3. 2 Permasalahan / Isu KLHS RPJPD Kabupaten Pacitan Tahun 2025 – 2045.....	III-22
Tabel 3. 3 Keterkaitan Isu Nasional, Isu Provinsi, Isu KLHS, dan Isu	
Kabupaten Pacitan	III-30
Tabel 5. 1 Indikator Sasaran Pokok Misi 1 disertai Target.....	V-8
Tabel 5. 2 Arah Kebijakan Misi 1	V-9
Tabel 5. 3 Indikator Sasaran Pokok Misi 2 disertai Target.....	V-12
Tabel 5. 4 Arah Kebijakan Misi 2	V-13
Tabel 5. 5 Indikator Sasaran Pokok Misi 3 disertai Target.....	V-18

Tabel 5. 6 Arah Kebijakan Misi 3.....	Halaman
Tabel 5. 7 Indikator Sasaran Pokok Misi 4 disertai Target.....	V-20
Tabel 5. 8 Arah Kebijakan Misi 4.....	V-21
Tabel 5. 9 Indikator Sasaran Pokok Misi 5 disertai Target.....	V-24
Tabel 5. 10 Arah Kebijakan Misi 5.....	V-25

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan	I-5
Gambar 2. 1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Pacitan	II-2
Gambar 2. 2 Luas Area Kabupaten Pacitan Berdasarkan Kecamatan	II-3
Gambar 2. 4 Curah Hujan Kabupaten Pacitan	II-18
Gambar 2. 5 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Pacitan	II-19
Gambar 2. 6 Peta Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Pacitan	II-23
Gambar 2. 7 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pacitan Tahun 2015-2023	II-33
Gambar 2. 8 Peta Status Daya Dukung Air Kabupaten Pacitan.....	II-43
Gambar 2. 9 Peta Ketersediaan Air Kabupaten Pacitan	II-44
Gambar 2. 10 Peta Kebutuhan Air Kabupaten Pacitan.....	II-44
Gambar 2. 11 Peta Kebutuhan Air Untuk Domestik.....	II-45
Gambar 2. 12 Peta Kebutuhan Air Untuk Kegiatan Ekonomi Berbasis Lahan Kabupaten Pacitan	II-45
Gambar 2. 13 Peta Status Daya Dukung Pangan Kabupaten Pacitan	II-47
Gambar 2. 14 Peta Ketersediaan Pangan Kabupaten Pacitan.....	II-47
Gambar 2. 15 Peta Kebutuhan Pangan Kabupaten Pacitan.....	II-48
Gambar 2. 16 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pacitan Tahun 2005 - 2023	II-49
Gambar 2. 17 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2023	II-49
Gambar 2. 18 Indeks Gini Kabupaten Pacitan, 2024	II-51
Gambar 2. 19 Gini Rasio Kabupaten / Kota di Jawa Timur Tahun 2023	II-52
Gambar 2. 20 PDRB Per Kapita Kabupaten Pacitan.....	II-53
Gambar 2. 21 PDRB Per Kapita Kabupaten / Kota di Jawa Timur, 2024	II-53
Gambar 2. 22 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pacitan Tahun 2005 – 2023	II-54
Gambar 2. 23 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pacitan tahun 2020-2023 (Long Form SP2020)	II-55
Gambar 2. 24 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten / Kota di Jawa Timur (<i>long form</i>) Tahun 2023	II-56
Gambar 2. 25 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Pacitan.....	II-57
Gambar 2. 26 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2023	II-58
Gambar 2. 27 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten / Kota di Jawa Timur Tahun 2023	II-59

Gambar 2. 28 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pacitan Tahun 2005 – 2023	II-60
Gambar 2. 29 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten / Kota di Jawa Timur Tahun 2023	II-60
Gambar 2. 30 Capaian Realisasi Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Pacitan Tahun 2013-2023.....	II-61
Gambar 2. 31 Capaian Realisasi Indikator Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Pacitan Tahun 2013-2023.....	II-62
Gambar 2. 32 Angka Umur Harapan Hidup di Kabupaten Pacitan Tahun 2013-2023	II-64
Gambar 2. 33 Capaian Persentase Penegakan PERDA Kabupaten Pacitan Tahun 2017-2023.....	II-69
Gambar 2. 34 Capaian Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018-2022.....	II-70
Gambar 2. 35 Persentase PMKS yang Tertangani di Kabupaten Pacitan Tahun 2014-2023.....	II-72
Gambar 2. 36 Capaian Realisasi Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Pacitan tahun 2017-2023	II-75
Gambar 2. 37 Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Pacitan Tahun 2013-2023	II-76
Gambar 2. 38 Capaian Indikator Rasio KDRT di Kabupaten Pacitan Tahun 2013-2023	II-79
Gambar 2. 39 Capaian Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan Tahun 2018-2023..	II-80
Gambar 2. 40 Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kabupaten Pacitan Tahun 2017-2022.....	II-85
Gambar 2. 41 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Pacitan Tahun 2015-2023.....	II-87
Gambar 2. 42 Rasio Penduduk Ber-KTP Per-Satuan Penduduk di Kabupaten Pacitan Tahun 2013-2023.....	II-90
Gambar 2. 43 Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmetneed) Tahun 2015-2022.....	II-92
Gambar 2. 44 Produktivitas Pertanian Per-Hektar Per-Tahun di Kabupaten Pacitan Tahun 2013-2022.....	II-102
Gambar 2. 45 Produksi Produk Hasil Olahan Perikanan (Ton) Kabupaten Pacitan Tahun 2013-2023.....	II-104
Gambar 2. 46 Pertumbuhan Industri di Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2023.....	II-106
Gambar 2. 47 Cakupan Bina Kelompok Perdagangan Atau Usaha Informal Kabupaten Pacitan Tahun 2013-2023.....	II-107
Gambar 2. 48 Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Pacitan Tahun 2019-2022	II-108

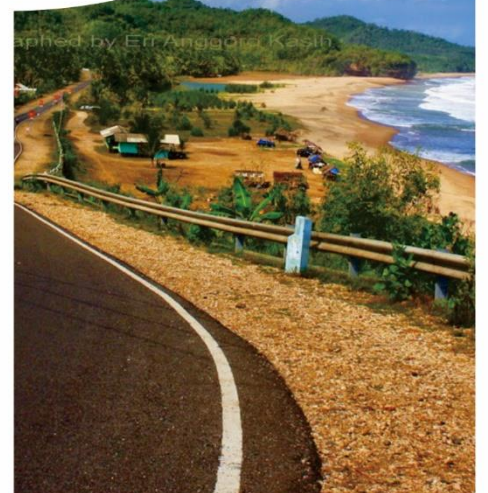
Gambar 2. 49 Rasio PAD Terhadap Total Pendapatan di Kabupaten Pacitan Tahun 2013-2022.....	II-110
Gambar 2. 50 Persentase ASN yang Indisipliner di Kabupaten Pacitan Tahun 2013-2022.....	II-112
Gambar 2. 51 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kabupaten Pacitan Tahun 2007-2021.....	II-116
Gambar 2. 52 Capaian Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita Kabupaten Pacitan Tahun 2007-2021	II-117
Gambar 2. 53 Capaian Nilai Tukar Petani Kabupaten Pacitan Tahun 2007-2020	II-118
Gambar 2. 54 Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum di Kabupaten Pacitan Tahun 2010-2021	II-118
Gambar 2. 55 Angka Kriminalitas di Kabupaten Pacitan tahun 2014-2022.	II-120
Gambar 2. 56 Jumlah Demo di Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2022.....	II-121
Gambar 2. 57 Rasio Kualitas Tenaga Kerja Kabupaten Pacitan tahun 2006-2021.	II-123
Gambar 2. 58 Angka Ketergantungan Kabupaten Pacitan Tahun 2006-2021.....	II-124
Gambar 2. 59 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pacitan Tahun 2005 – 2025	II-130
Gambar 2. 60 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten / Kota di Jawa Timur Tahun 2022	II-131
Gambar 2. 61 Angka Kemiskinan Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2022.....	II-131
Gambar 2. 62 Angka Kemiskinan Kabupaten / Kota di Jawa Timur Tahun 2022	II-132
Gambar 2. 63 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pacitan Tahun 2005 - 2022	II-132
Gambar 2. 64 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten / Kota di Jawa Timur	II-133
Gambar 2. 65 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pacitan Tahun 2005 - 2022	II-133
Gambar 2. 66 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten / Kota di Jawa Timur Tahun 2022.....	II-134
Gambar 2. 67 Indeks Gini Kabupaten Pacitan Tahun 2022	II-134
Gambar 2. 68 Gini Rasio Kabupaten / Kota di Jawa Timur Tahun 2022	II-135
Gambar 2. 69 PDRB Perkapita Kabupaten Pacitan (ribu rupiah).....	II-135
Gambar 2. 70 PDRB Per Kapita Kabupaten / Kota di Jawa Timur Tahun 2022.....	II-136
Gambar 2. 71 Proyeksi Penduduk Kabupaten Pacitan Tahun 2023	II-147
Gambar 2. 72 Proyeksi Penduduk Kabupaten Pacitan Tahun 2025, 2030, 2035, 2040 dan 2045	II-148
Gambar 2. 73 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Pacitan 2023-2045	II-149
Gambar 2. 74 Piramida Penduduk Kabupaten Pacitan Tahun 2018 dan 2022.....	II-150

Gambar 2. 75 Peta Proyeksi Kepadatan Penduduk Kabupaten Pacitan di setiap Kecamatan Tahun 2045	II-152
Gambar 2. 76 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Pacitan 2025-2030	II-153
Gambar 2. 77 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Pacitan 2031-2035	II-154
Gambar 2. 78 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Pacitan 2036-2040	II-155
Gambar 2. 79 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Pacitan 2041-2045	II-156
Gambar 2. 80 Peta Kebutuhan Sarana Prasarana Kabupaten Pacitan pada Tahun 2045	II-158
Gambar 2. 81 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih	II-159
Gambar 2. 82 Proyeksi Kebutuhan Lahan Permukiman (M ²)	II-162
Gambar 2. 83 Total Timbulan Sampah Kab. Pacitan berdasarkan Laporan SIPSN Tahun 2019-2023	II-164
Gambar 2. 84 Sumber dan Jenis Sampah di Kabupaten Pacitan tahun 2023	II-165
Gambar 2. 85 Proyeksi Timbunan Sampah	II-166
Gambar 2. 86 Proyeksi Kebutuhan TPST dan TPA Kabupaten Pacitan 20 Tahun Mendatang.....	II-167
Gambar 2. 87 Proyeksi Kebutuhan Listrik Kabupaten Pacitan 2025-2045	II-170
Gambar 2. 88. Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Pulau Jawa	II-174
Gambar 2. 89. Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Jawa Timur Berdasarkan Kawasan	II-175
Gambar 2. 90. Fokus Pengembangan Kawasan Prioritas di Jawa Timur	II-179
Gambar 2. 91. Peta Pembangunan Kawasan Prioritas Melalui Koridor Pembangunan di Jawa Timur	II-180
Gambar 2. 92 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Pacitan	II-185
Gambar 2. 93 Peta Kawasan Strategis Sosio Kultural	II-187
Gambar 2. 94 Peta Kawasan Strategis Ekonomi Kabupaten Pacitan	II-188
Gambar 4. 1 Kerangka Pikir RPJPN 2025 – 2045.....	IV-2
Gambar 4. 2 Visi Indonesia Emas 2045.....	IV-3
Gambar 4. 3 Lima Sasaran Utama Visi Indonesia Emas 2045	IV-6
Gambar 4. 4 17 (Tujuh Belas) Arah (Tujuan) Pembangunan.....	IV-7
Gambar 4. 5 Visi RPJPD Kabupaten Pacitan Tahun 2025 - 2045	IV-11
Gambar 4. 6 Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Pacitan Tahun 2025 - 2045	IV-13
Gambar 4. 7 Linearitas Sasan Visi RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Timur dan RPJPD Kabupaten Pacitan.....	IV-13
Gambar 4. 8 Misi RPJPD Kabupaten Pacitan Tahun 2025 – 2045.....	IV-14

Gambar 4. 9	Linearitas Misi RPJPN, RPJPD Provinsi dan RPJPD Kabupaten Pacitan Tahun 2025 – 2045	IV-16
Gambar 5. 1	Arah Kebijakan Periodisasi 5 Tahunan Misi 1 RPJPD Kabupaten Pacitan Tahun 2025 - 2045	V-2
Gambar 5. 2	Arah Kebijakan Periodisasi 5 Tahunan Misi 2 RPJPD Kabupaten Pacitan Tahun 2025 - 2045	V-3
Gambar 5. 3	Arah Kebijakan Periodisasi 5 Tahunan Misi 3 RPJPD Kabupaten Pacitan Tahun 2025 – 2045	V-4
Gambar 5. 4	Arah Kebijakan Periodisasi 5 Tahunan Misi 4 RPJPD Kabupaten Pacitan Tahun 2025 – 2045	V-5
Gambar 5. 5	Arah Kebijakan Periodisasi 5 Tahunan Misi 5 RPJPD Kabupaten Pacitan Tahun 2025 – 2045	V-6
Gambar 5. 6	Arah Pembangunan RPJPD Kabupaten Pacitan Tahun 2025 – 2045.....	V-7
Gambar 5. 7	Arah Pembangunan Misi 1 RPJPD Kabupaten Pacitan Tahun 2025 – 2045...	V-8
Gambar 5. 8	Sasaran Pokok Misi 2 RPJPD Kabupaten Pacitan Tahun 2025 – 2045	V-12
Gambar 5. 9	Sasaran Pokok Misi 3 RPJPD Kabupaten Pacitan Tahun 2025 – 2045	V-18
Gambar 5. 10	Sasaran Pokok Misi 4 RPJPD Kabupaten Pacitan Tahun 2025 – 2045	V-20
Gambar 5. 11	Sasaran Pokok Misi 5 RPJPD Kabupaten Pacitan Tahun 2025 – 2045	V-24

BAB I

PENDAHULUAN





1.1. Latar Belakang

Dalam pelaksanaan pembangunan dewasa ini sangat diperlukan suatu bentuk konsep pembangunan yang bersifat terpadu dan berkelanjutan, artinya bahwa dalam setiap tindakan pembangunan haruslah dilaksanakan secara terus menerus dan berkembang tanpa harus berhenti. Hal ini jika berdasarkan pada suatu pengalaman di masa lalu, bahwa jika aktivitas atau kegiatan pembangunan tersebut dilakukan hanya pada satu kurun waktu tanpa ada kegiatan lebih lanjut, maka cenderung pembangunan tersebut tidak dapat memberi manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Tahapan-tahapan pembangunan yang telah dilaksanakan diharapkan akan menjadi dasar bagi suatu proses pembangunan berkelanjutan dan berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pacitan seperti tercermin dalam berbagai indikator ekonomi dan sosial. Proses pembangunan pada kurun waktu tersebut sangat berorientasi pada output dan hasil akhir. Sementara itu proses dan terutama kualitas institusi yang mendukung dan melaksanakan tidak terganggu baik secara teknis dan fungsi. Ketertinggalan pembangunan dalam sistem dan kelembagaan politik dan sosial menyebabkan hasil pembangunan menjadi timpang dari sisi keadilan dan dengan sendirinya mengancam keberlanjutan proses pembangunan itu sendiri. Untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, maka penyusunan perencanaan harus memperhatikan aspek-aspek Sustainable Development Goal's dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Untuk itu, seluruh masyarakat Kabupaten Pacitan sebagai bagian dari masyarakat Indonesia sepakat untuk menyusun perencanaan pembangunan di daerah yang mengacu pada sistem perencanaan pembangunan melalui Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) yang meliputi perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Berdasarkan UU SPPN disusunlah rencana pembangunan daerah untuk 20 tahun kedepan yang diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah tersebut, perlu ditetapkan visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Pacitan.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran dari tujuan pembangunan di Kabupaten Pacitan dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai tahun 2025 hingga tahun 2045.

RPJPD dibagi menjadi 4 tahapan/periode pembangunan, RPJPD Kabupaten Pacitan tahun 2025-2045 tentunya menjadi acuan masing-masing periode khususnya kepala daerah dalam menetapkan arah pembangunan 5 tahunannya yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. Penahapan rencana pembangunan daerah disusun dalam masing-masing periode RPJMD sesuai dengan visi, misi dan program Bupati yang dipilih secara langsung oleh masyarakat Kabupaten Pacitan. RPJMD Kabupaten Pacitan memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan



umum, program Bupati serta kerangka ekonomi yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh. RPJMD Kabupaten Pacitan dijabarkan ke dalam rencana tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro serta program Kepala Perangkat Daerah.

Penyusunan RPJPD Kabupaten Pacitan juga telah memperhatikan muatan dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), memastikan RPJPD terintegrasi dengan dokumen KLHS yang menjadi langkah strategis untuk mengidentifikasi dampak lingkungan dari berbagai kebijakan dan program pembangunan yang dirumuskan. Dokumen KLHS menyediakan analisis mendalam terkait daya dukung dan daya tampung. Dengan mengintegrasikan pendekatan dokumen KLHS dalam RPJPD, pemerintah Kabupaten Pacitan dapat lebih efektif merencanakan dan mengelola sumber daya alam, mencegah potensi kerusakan lingkungan, dan memastikan keberlanjutan pembangunan yang sejalan dengan prinsip-prinsip ekologis.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang menjadi pertimbangan disusunnya evaluasi dokumen perencanaan jangka panjang daerah Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 Nomor 1);

1.3. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

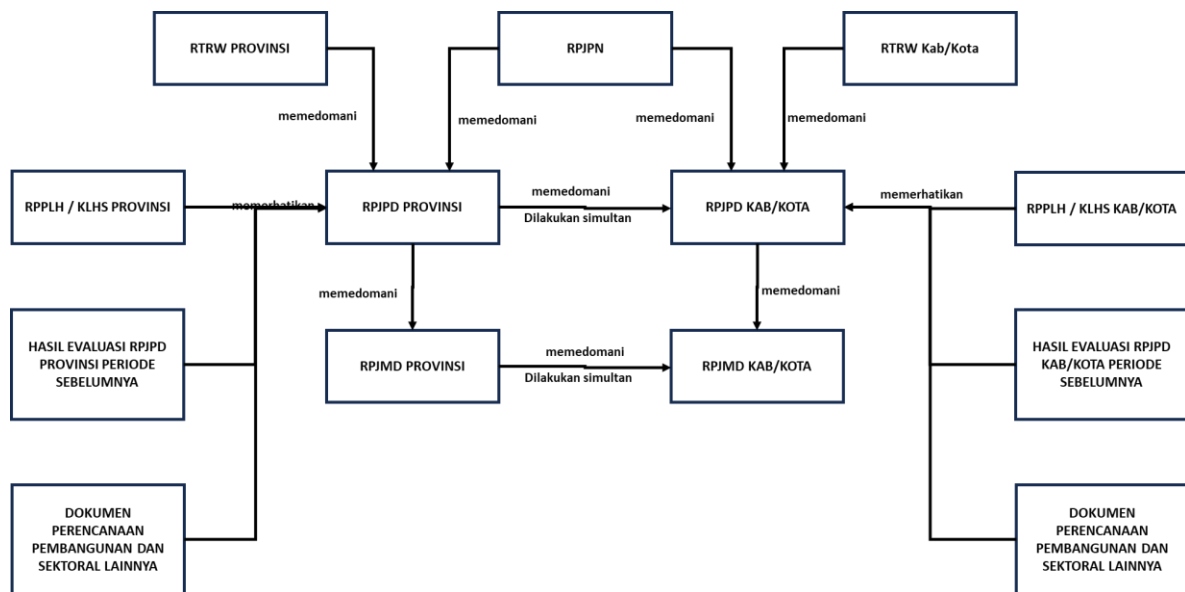
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun dan selanjutnya akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahunan.

RPJPD merupakan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, sebagai koridor dalam penyusunan visi, misi dan program calon kepala daerah.

Dokumen RPJPD ini bersifat makro yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah dengan proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur pembangunan. Adapun secara garis besar bagan keterkaitan dokumen Perencanaan Nasional dan Perencanaan Daerah sebagai berikut :



Gambar 1. 1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan



Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045 yaitu:

1. Arah kebijakan kewilayahan, arah pembangunan, dan kinerja/indikator pada RPJPN Tahun 2025-2045, sesuai dengan kewenangan, karakteristik, inovasi, dan pengembangan daerah.
2. RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045 disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJPN Tahun 2025-2045.
3. RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045 disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045 dan RPJPN Tahun 2025-2045.
4. Hasil capaian pembangunan dan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025 untuk penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045.
5. Kebijakan pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam serta kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), dan/ atau tujuan pembangunan berkelanjutan, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta isu-isu strategis dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Tahun 2025-2045.
6. Berpedoman pada rencana tata ruang wilayah, dan dilakukan secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RTRW atau revisi RTRW.
7. Dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya, seperti Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP), Rencana Induk Perindustrian, Rencana Induk Pariwisata, Rencana Umum Energi Daerah, dan sebagainya.



1.4. Maksud dan Tujuan

RPJPD Kabupaten Pacitan sebagai dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Pacitan untuk jangka waktu 20 tahun ke depan, ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Pacitan (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) didalam mewujudkan cita-cita dan tujuan sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan melengkapi satu dengan lainnya didalam satu pola sikap dan pola tindak.

1.5. Sistematika Penulisan

Penyajian dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah dapat disajikan dengan mengacu pada sistematika pada peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 yang terdiri dari 8 bab pembahasan. Namun demikian dalam rangka penyusunan RPJPD ini telah dikeluarkan pedoman yang mengatur lebih teknis mengenai penyajian dokumen RPJPD, sehingga sistematika yang digunakan dalam penyajian dokumen RPJPD menjadi 6 bab pembahasan. Mengacu pada pedoman tersebut, maka sistematika yang digunakan dalam penyajian RPJPD Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antardokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Pada bab ini memuat Refleksi Pembangunan berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005- 2025, Uraian kondisi daerah dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan, aspek daya saing, dan aspek pelayanan umum. Selan itu dijelaskan dinamika kependudukan yang harus diperhatikan untuk dilayani dan dipenuhi kebutuhan sarana prasarana oleh pemerintah daerah. Pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan indikasi program/proyek strategis yang dapat mempengaruhi perkembangan daerah serta arah kebijakan pembangunan wilayah dan sarana prasarana berdasarkan Undang-Undang tentang RPJPN 2025-2045 juga dijelaskan pada bab ini.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Pada bab ini diuraikan permasalahan hasil evaluasi dan telaah lainnya, serta permasalahan yang digali lebih dalam melalui metode FGD serta disajikan uraian hasil perumusan isu strategis jangka panjang daerah.



BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

Pada bab ini diuraikan visi dan misi daerah untuk pembangunan jangka panjang sebagai bentuk harapan dan cita-cita yang ini dicapai dalam 20 tahun kedepan.

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

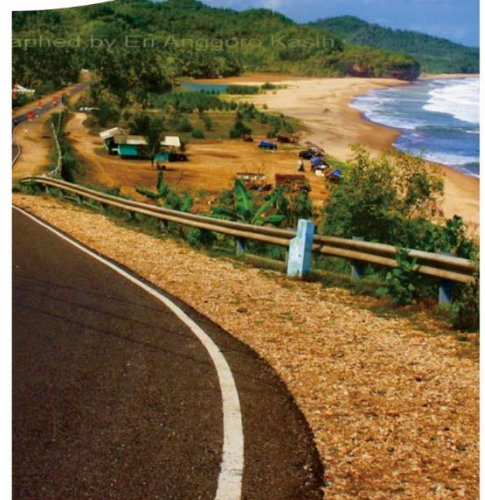
Pada bab ini diuraikan mengenai kerangka kerja pembangunan per lima tahun dalam rangka pencapaian visi daerah. Yakni periode pembangunan tahun 2025-2045. Selain itu diuraikan sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 yang merupakan rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD Tahun 2025-2045 serta kinerja wajib jangka panjang daerah.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini diuraikan beberapa point penting catatan sebagai tindak lanjut atas penyusunan dokumen RPJPD ini, serta diuraikan mengenai kaidah pelaksanaan atas RPJPD ini sebagai Upaya dalam menjaga keterhubungan antar dokumen perencanaan dari jangka panjang, menengah dan tahunan

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH





2.1. Aspek Geografi dan Demografi

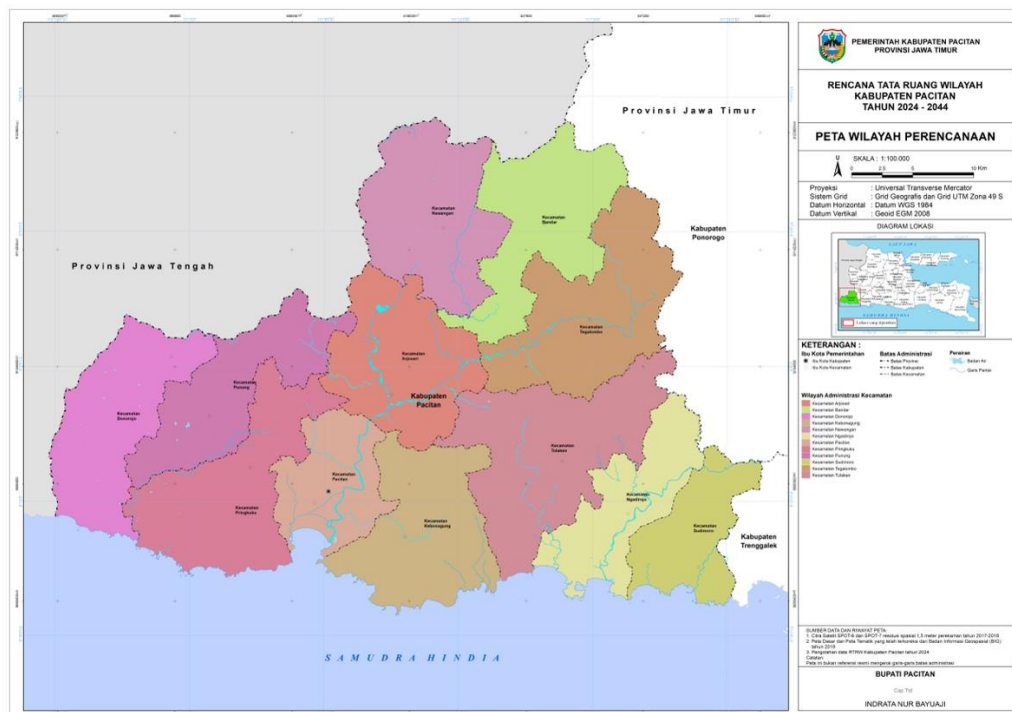
2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Karakteristik lokasi dan wilayah memberikan gambaran dan hasil analisis mengenai keadaan wilayah yang ada lingkup wilayah Kabupaten Pacitan. Karakteristik lokasi dan wilayah meliputi luas wilayah dan letak geografis wilayah, kondisi topografi, keadaan geologi Kabupaten Pacitan, kondisi hidrologi, keadaan klimatologi, penggunaan wilayah, kerentanan wilayah terhadap bencana, serta potensi penggunaan wilayah di Kabupaten Pacitan.

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

3.

Gambar 2. 1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Pacitan

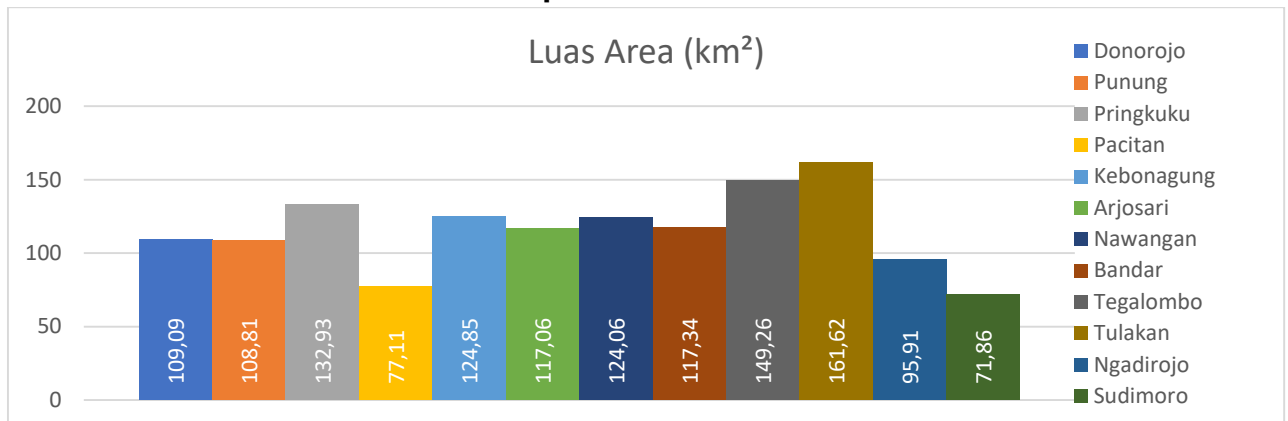


Sumber: RTRW Kabupaten Pacitan, Tahun 2024-2044

Kabupaten Pacitan merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur dengan luas sebesar 143.360,6 hektar. Kabupaten Pacitan secara administratif terbagi menjadi 12 kecamatan yang terdiri dari 5 kelurahan dan 167 desa. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Tulakan, yaitu 16.079,38 ha. Sedangkan kecamatan dengan luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Sudimoro, yaitu seluas 7.564,08 ha. Kabupaten Pacitan memiliki lahan sawah seluas 12.783 ha yang terdiri dari 8.565 ha (67%) lahan sawah irigasi dan 4.218 ha (33%) lahan sawah non irigasi. Sebagian besar dari tanah sawah adalah sawah tadah hujan sebesar 51,53%. Berikut disajikan grafik dan tabel untuk luas wilayah masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Pacitan:



Gambar 2. 2 Luas Area Kabupaten Pacitan Berdasarkan Kecamatan



Sumber: BPS Kabupaten Pacitan, 2024

Rata-rata Kecamatan di Kabupaten Pacitan memiliki luas area lebih dari 70 km² dengan luas area terluas yakni Kecamatan Tulakan dengan luas wilayah sebesar 161,62km². Sedangkan untuk Kecamatan Sudimoro merupakan Kecamatan dengan luas area terkecil dengan luas wilayah sebesar 71,86 km². Berikut di bawah ini terdapat rincian luas total area dan persentase terhadap luas Kabupaten:

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Pacitan Tahun 2023

Kecamatan	Luas Total Area (ha)	Persentase terhadap Luas Kabupaten
Arjosari	12.539,93	8,75%
Bandar	12.573,76	8,77%
Donorojo	12.100,87	8,44%
Kebonagung	12.839,90	8,96%
Nawangan	13.079,25	9,12%
Ngadirojo	9.397,03	6,55%
Pactan	7.797,22	5,44%
Pringkuku	13.706,42	9,56%
Punung	10.750,19	7,50%
Sudimoro	7.564,08	5,28%
Tegalombo	14.932,03	10,42%
Tulakan	16.079,38	11,22%
Kabupaten Pacitan	143.360,06	100%

Sumber: RTRW Kabupaten Pacitan, Tahun 2024-2044

3.1.1.1. Kondisi Geografis

Berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten Pacitan terletak di sebelah Barat Daya Provinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Memiliki luas wilayah seluas 14.360,06 Ha, sebagian besar wilayah Kabupaten Pacitan berupa bukit dan gunung, jurang terjal dan termasuk deretan Pegunungan Seribu yang



membujur sepanjang Pulau Jawa. Sedangkan jika dilihat secara astronomis, Kabupaten Pacitan terletak antara 7°92'-8°29' Lintang Selatan dan 110°90'-111°43' Bujur Timur. Selanjutnya secara administratif, wilayah Kabupaten Pacitan berbatasan dengan beberapa daerah seperti berikut:

1. Sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah
2. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Samudera Hindia
3. Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah
4. Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur

3.1.1.2. Kondisi Topografi

Kondisi topografi Kabupaten Pacitan sebagian besar adalah berupa pegunungan dan perbukitan sehingga menjadikan penggunaan lahan yang ideal pada kawasan tersebut berupa kawasan hutan. Kondisi ini menyimpan potensi hutan yang cukup besar. Dari potensi hutan ini, sebagian akan dihasilkan berbagai jenis kayu yang tidak hanya diminati oleh masyarakat sekitar, tetapi juga dipasarkan keluar daerah Kabupaten Pacitan. Hutan di Kabupaten Pacitan terbagi menjadi hutan produksi yang luasnya mencapai 87,89% dari luas hutan yang ada, sedangkan sisanya 12,10% adalah hutan lindung.

Luas areal hutan rakyat meningkat dikarenakan adanya penanaman tanaman kayu-kayuan yang cukup besar terutama karena adanya kegiatan pengembangan baik dari dukungan APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN maupun bantuan dari mitra usaha, pembuatan bedengan tanaman secara swadaya dan pembuatan kebun bibit rakyat. Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat untuk turut serta dalam pelestarian hutan semakin meningkat. Berikut adalah rincian dari kondisi topografi Kabupaten Pacitan:

- 0-2% merupakan daerah tepi pantai;
- 2-15% baik untuk usaha pertanian dengan memperhatikan usaha pengawetan tanah dan air;
- 15-40% sebaiknya untuk usaha tanaman tahunan; dan
- 40% ke atas merupakan daerah yang harus di fungsikan sebagai kawasan penyangga tanah dan air serta menjaga keseimbangan ekosistem di wilayah Kabupaten Pacitan.

Untuk mengetahui kondisi tinggi wilayah masing-masing kecamatan di Kabupaten Pacitan telah disajikan dalam tabel berikut:



Tabel 2. 2 Tinggi Wilayah Kabupaten Pacitan Berdasarkan Kondisi Topografi (ha)

Kecamatan	0-2%	2-15%	15-40%	>40%	Jumlah
Arjosari	0,00	6,86	0,00	12.533,07	12.539,93
Bandar	0,00	7.588,75	0,00	4.985,00	12.573,76
Donorojo	752,84	5.913,96	2.370,68	3.063,39	12.100,87
Kebonagung	903,53	6.379,55	0,00	5.556,81	12.839,90
Nawangan	0,00	2.924,92	0,00	10.154,33	13.079,25
Ngadirojo	0,00	1.714,55	3.185,58	4.496,89	93.97,03
Pacitan	2.090,59	2.766,96	32,18	2.907,49	7.797,21
Pringkuku	0,00	4.902,80	3.174,74	5.628,88	13.706,42
Punung	0,00	6.248,42	0,00	4.501,77	10.750,19
Sudimoro	0,00	3,73	4.904,14	2.656,21	7.564,09
Tegalombo	0,00	4.831,58	0,00	10.100,45	14.932,03
Tulakan	580,43	9.366,55	326,30	5.806,11	16.079,38
Jumlah	4.327,38	52.648,63	13.993,63	72.390,42	143.360,06

Sumber: Pacitan Dalam Angka, Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Kecamatan Pacitan merupakan daerah tepi pantai terluas yaitu 2.090,59 ha, Kecamatan Tulakan merupakan wilayah terluas yang baik untuk pertanian dengan memanfaatkan pengawetan tanah dan air seluas 9.366,55 ha, Kecamatan Sudimoro memiliki wilayah terluas untuk pertanian tahunan seluas 4.904,14 ha, dan Kecamatan Nawangan merupakan wilayah terluas untuk kawasan penyangga tanah dan air serta untuk menjaga ekosistem Kabupaten Pacitan seluas 10.154,33 ha.

3.1.1.3. Kondisi Geologi

Kondisi geologi Kabupaten Pacitan jika ditinjau berdasarkan pada struktur dan jenis tanah, terdiri dari Asosiasi Litosol Mediteran Merah, Aluvial kelabu endapan liat, Litosol campuran Tuf dengan Vulkan serta komplek Litosol Kemerahan yang banyak mengandung potensi bahan galian mineral. Kabupaten Pacitan termasuk salah satu daerah pegunungan yang terletak di ujung timur Pegunungan Seribu. Tanah Pegunungan Seribu memiliki ciri khas yang tanahnya didominasi oleh endapan gamping bercampur dengan koral. Berikut merupakan struktur batuan geologi di wilayah Kabupaten Pacitan meliputi:

a. Aluvial

Alluvial merupakan satuan batuan yang mengalami proses sedimentasi yaitu pembentukan endapan, pelapukan, transportasi yang dibentuk dari batuan sebelumnya. Banyak terdapat di dataran rendah, di sekitar muara sungai, rawa-rawa, lembah-lembah, maupun di kanan kiri aliran sungai besar. Tanah ini banyak mengandung pasir dan liat, tidak banyak mengandung unsur-unsur zat hara. Ciri-cirinya berwarna kelabu dengan struktur yang sedikit lepas-lepas dan peka terhadap erosi. Kadar kesuburannya sedang hingga



tinggi tergantung bagian induk dan iklim. Di Indonesia tanah alluvial ini merupakan tanah yang baik dan dimanfaatkan untuk tanaman pangan (sawah dan palawija) musiman hingga tahunan. Persebarannya di Kabupaten Pacitan meliputi Kecamatan Donorojo, Pacitan, Kebonagung, Arjosari, Ngadirojo, dan Sudimoro.

b. Dasit

Dasit merupakan batuan beku yang termasuk dalam jenis vulkanik, karena dasit dalam proses pembentukannya mengalami pendinginan magma yang cepat. Proses terbentuknya dasit pada suhu sekitar 900°C – 1200°C (Bishop & Hamilton, 1999). Kandungan silika yang terdapat pada dasit berkisar diantara 52% – 66%. Dalam proses pembentukannya dasit adalah batuan ekstrusif felsik yang menengah dalam komposisi antara Andesit dan Riolit (Dietrich, 1924). Dalam pembentukannya sering ditemukan bergabung dengan Andesit dan membentuk aliran lava, serta tanggul (Suharwanto, 2014). Dasit banyak dipergunakan sebagai sebagai batu ornamen dinding maupun lantai bangunan gedung atau untuk batu belah untuk pondasi bangunan. Persebarannya di Kabupaten Pacitan meliputi Kecamatan Nawangan dan Bandar.

c. Batuan Terobosan

Batuan terobosan termasuk batuan beku intrusi. Batu ini terbentuk dari pembekuan magma permukaan (hyoabisal). Komposisi mineral penyusun batu ini hampir sama dengan basal & gabro, yaitu : piroksen (hitam) dan plagioktas (putih) dengan tekstur lebih kasar dari basal, tetapi lebih halus dari gabro. Ciri batu ini bertekstur diabasic, yaitu mineral piroksen dan plagioktas yg berbentuk jarum dengan letak yg bersilang, seperti ampas kelapa yang ditaburkan. Batuan ini merupakan formasi batuan yang terbesar di Kabupaten Pacitan yang meliputi Kecamatan Donorojo, Punung, Pringkuku, Pacitan, Kebonagung, Arjosari, Tegalombo, Tulakan, Ngadirojo, dan Sudimoro.

d. Formasi Arjosari

Merupakan salah satu dari dua formasi yang membentuk formasi Besole yang terdiri dari perselingan batu pasir dan breksi yang diendapkan pada lingkungan laut dangkal. Persebarannya di Kabupaten Pacitan meliputi Kecamatan Donorojo, Punung, Pringkuku, Pacitan, Kebonagung, Arjosari, Tegalombo, Tulakan, Ngadirojo, dan Sudimoro.

e. Formasi Mandalika

Merupakan formasi batuan yang membentuk formasi Besole bersama formasi arjosari yang tersusun oleh perselingan breksi, batupasir, serta lava bantal diendapkan pada lingkungan laut dalam. Persebarannya di Kabupaten Pacitan meliputi Kecamatan Punung, Kebonagung, Arjosari, Nawangan, Bandar, Tegalombo, Tulakan, Ngadirojo, dan Sudimoro.



f. Formasi Jaten

Merupakan formasi batuan yang tersusun oleh konglomerat, batupasir kuarsa, batulempung (mengandung fosil *Gastrophoda*, *Pelecypoda*, *Coral*, *Bryozoa*, *Foraminifera*), dengan sisipan tipis lignit. Ketebalan satuan ini mencapai 20-150 m. Diendapkan pada lingkungan transisi-neritik tepi pada Masa Miosen Tengah. Persebarannya di Kabupaten Pacitan meliputi Kecamatan Punung, Pringkuku, Pacitan, Kebonagung, Arjosari, Tegalombo, Tulakan, dan Ngadirojo.

g. Formasi Wuni

Merupakan formasi batuan yang tersusun oleh breksi, aglomerat, batupasir tufan, lanau, dan batu gamping. Berdasarkan fauna koral satuan ini berumur Miosen Bawah (Te.5 –Tf.1), berdasarkan hadirnya *Globorotalia siakensis*, *Globigerinoides trilobus* & *Globigerina praebuloides* berumur Miosen Tengah (N9-N12). Ketebalan Formasi Wuni mencapai 150-200 m. Satuan ini terletak selaras menutupi Formasi Jaten, dan selaras di bawah Formasi Nampol. Persebarannya di Kabupaten Pacitan meliputi Kecamatan Donorojo, Punung, Pringkuku, Pacitan, Kebonagung, Arjosari, dan Tulakan.

h. Formasi Dayakan

Perulangan batu pasir dan batu lempung setebal beberapa puluh meter yang merupakan endapan turbidit yang berlapis baik dan tersingkap setebal lebih dari 600 m. Sebagian batu pasir bersifat tufan dan berwarna merah hati. Batu lempungnya mengandung fosil yang menunjukkan umur Oligosen-Miosen Bawah. Kumpulan *Foraminifera* bentos yang dijumpai pada batu lempung menunjukkan lingkungan pengendapan laut dalam. Satuan ini menjemari dengan Formasi Watupatok dan bagian atasnya menjemari dengan Formasi Semilir dan Formasi Nglanggaran, setempat diterobos oleh dasit. Persebarannya di Kabupaten Pacitan meliputi Kecamatan Nawangan dan Bandar.

i. Formasi Nampol

Merupakan formasi batuan dengan susunan sebagai berikut: bagian bawah terdiri dari konglomerat, batu pasir tufan, dan bagian atas terdiri dari perselingan batu lanau, batu pasir tufan, dan sisipan serpih karbonan dan lapisan lignit. Diendapkan pada Masa Miosen Awal (Sartono, 1964) atau Nahrowi (1979), Pringgoprawiro (1985), Samodaria & Gafoer (1990) menghitungnya berumur Miosen Awal – Miosen Tengah. Ketiga formasi (Jaten, Wuni, dan Nampol) berhubungan jari-jemari dengan bagian bawah Formasi Punung. Formasi Nampol ini tersebar di Kabupaten Pacitan meliputi Kecamatan Donorojo, Punung, Pringkuku, Pacitan, Kebonagung, Nawangan, Bandar, dan Tulakan.



j. Formasi Semilir

Formasi ini berlokasi tipe di G. Semilir, sebelah selatan Klaten. Litologi penyusunnya terdiri dari tuf, tuf lapili, lapili batuapung, breksi batuapung dan serpih. Komposisi tuf dan batuapung tersebut bervariasi dari andesit hingga dasit. Di bagian bawah satuan batuan ini, yaitu di K. Opak, Dusun Watuadeg, Desa Jogotirto, Kec. Berbah, Kab. Sleman, terdapat andesit basal sebagai aliran lava bantal (Bronto dan Hartono, 2001). Penyebaran lateral Formasi Semilir ini memanjang dari ujung barat Pegunungan Selatan, yaitu di daerah Pleret-Imogiri, di sebelah barat G. Sudimoro, Piyungan-Prambanan, di bagian tengah pada G. Baturagung dan sekitarnya, hingga ujung timur pada tinggian G. Gajahmungkur, Wonogiri. Ketebalan formasi ini diperkirakan lebih dari 460 meter. Disimpulkan, Formasi Semilir ini berada pada masa Miosen Awal-Miosen Tengah bagian bawah. Formasi Semilir ini menindih secara selaras Formasi Kebo-Butak, namun secara setempat tidak selaras (van Bemmelen, 1949). Formasi ini menjemari dengan Formasi Nglanggran dan Formasi Sambipitu, namun tertindih secara tidak selaras oleh Formasi Oyo (Surono, dkk., 1992). Dengan melimpahnya tuf dan batuapung dalam volume yang sangat besar, maka secara vulkanologi Formasi Semilir ini dihasilkan oleh letusan gunung api yang sangat besar dan merusak, biasanya berasosiasi dengan pembentukan kaldera letusan (Bronto dan Hartono, 2001). Persebarannya di Kabupaten Pacitan meliputi Kecamatan Nawangan dan Bandar.

k. Formasi Watupatok

Formasi Watupatok (Tomw) merupakan batuan yang terdiri dari lava, sisipan batupasir, batu lempung dan rijang. Formasi Watupatok ini merupakan bagian dari batuan Oligosen Akhir-Miosen Awal yang menjemari dan ditindih selaras oleh formasi Semilir kumpulan sedimen turbidit asal gunung api yang berumur Miosen Awal. Persebarannya di Kabupaten Pacitan meliputi Kecamatan Bandar dan Tegalomobo.

l. Formasi Wonosari

Formasi ini oleh Surono dkk., (1992) dijadikan satu dengan Formasi Punung yang terletak di Pegunungan Selatan bagian timur karena di lapangan keduanya sulit untuk dipisahkan, sehingga namanya Formasi Wonosari-Punung. Formasi ini tersingkap baik di daerah Wonosari dan sekitarnya, membentuk bentang alam Subzona Wonosari dan topografi karts Subzona Gunung Sewu. Ketebalan formasi ini diduga lebih dari 800 meter. Kedudukan stratigrafinya di bagian bawah menjemari dengan Formasi Oyo, sedangkan di bagian atas menjemari dengan Formasi Kepek. Formasi ini didominasi oleh batuan karbonat yang terdiri dari batu gamping berlapis dan batu gamping terumbu, sedangkan sebagai sisipan adalah napal. Sisipan tuf hanya terdapat di bagian timur.



Berdasarkan kandungan fosil foraminifera besar dan kecil yang melimpah, diantaranya *Lepidocyclina* sp. dan *Miogypsina* sp., ditentukan umur formasi ini adalah Miosen Tengah hingga Pliosen. Lingkungan pengendapannya adalah laut dangkal (zona neritik) yang mendangkal ke arah selatan (Surono dkk, 1992).

Persebarannya di Kabupaten Pacitan meliputi Kecamatan Donorojo, Punung, Pringkuku, Pacitan, Kebonagung, Tulakan, Ngadirojo, dan Sudimoro.

m. Formasi Oyo

Lokasi tipe formasi ini berada di K. Oyo. Batuan penyusunnya pada bagian bawah terdiri dari tuf dan napal tufan, sedangkan ke atas secara berangsur dikuasai oleh batu gamping berlapis dengan sisipan batulempung karbonatan. Batu gamping berlapis tersebut umumnya kalkarenit, namun kadang-kadang dijumpai kalsirudit yang mengandung fragmen andesit membulat. Formasi Oyo tersebar luas di sepanjang K. Oyo. Ketebalan formasi ini lebih dari 140 meter dan kedudukannya menindih secara tidak selaras di atas Formasi Semilir, Formasi Nglanggran dan Formasi Sambipitu serta menjemari dengan Formasi Oyo.

Formasi Oyo umumnya berlapis baik, sedangkan fosil yang dijumpai antara lain *Cyclocypeun annulatus* Martin, *Lepodocyclina rutteni* Vlerk, *Lepidocyclina ferreroi* Provale, *Miogypsina polymorpha* Rutten, dan *Miogypsina thecidaeformis* Rutten yang menunjukkan umur Miosen Tengah hingga Miosen Akhir (Bothe, 1929). Lingkungan pengendapannya pada laut dangkal (zona neritik) yang dipengaruhi kegiatan gunung api.

Formasi ini tersebar di wilayah Kabupaten Pacitan meliputi Kecamatan Punung, Pringkuku, Pacitan, Kebonagung, Tulakan, Ngadirojo, dan Sudimoro.

n. Formasi Kalipucang

Formasi Kalipucang adalah formasi batuan yang tersusun atas batu gamping foraminifera dengan sisipan tipis napal. Formasi Kalipucang berumur Miosen Tengah berdasarkan zonasi Blow (1969) dari beberapa fosil seperti *Globorotalia fohsi*, *Globorotalia siakensis*, dan *Globigerinoides subquadratus*. Persebarannya di Kabupaten Pacitan hanya berada di Kecamatan Punung.

Formasi Kalipucang (Tmkl). Formasi ini terdiri dari batu gamping terumbu, putih kelabu muda, padu, keras dan berongga, setempat juga berlapis. Batuan ini tersusun oleh mineral kalsit, aragonit, apatit dan sedikit lempung. Tebal maksimum satuan ini sekitar 300 m. Batuan terumbu ini cukup berkembang dan minindih secara tidak selaras di atas formasi jampang dan formai Nusakambangan.



2.1.1.5 Kondisi Hidrogeologi

Kabupaten Pacitan pada dasarnya memiliki 3 jenis hidrologi yakni:

a. Produktivitas akuifer kecil

Akuifer adalah suatu tubuh batuan yang mempunyai susunan sedemikian rupa, sehingga dapat menyimpan dan mengalirkan air yang berarti di bawah kondisi lapangan. Dengan demikian batuan ini berfungsi sebagai lapisan pembawa air yang bersifat permeabel. Contoh: pasir, batupasir, kerikil, batu gamping dan lava yang berlubang-lubang. Jenis hidrogeologi ini memiliki karakteristik akuifer dengan keterusan rendah, setempat pada daerah yang serasi, air tanah dapat diperoleh dengan debit kecil. Penyebarannya di Kabupaten Pacitan meliputi di hampir semua kecamatan kecuali di Kecamatan Donorojo, Nawangan, Bandar, dan Tegalombo.

b. Air tanah langka

Pada dasarnya air tanah langka berada pada akuifer kecil. Penyebarannya meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Pacitan.

c. Setempat akuifer produktif

Karakteristik dari jenis hidrogeologi ini adalah akuifer dengan keterusan sedang, debit beragam, muka air tanah umumnya dalam. Penyebarannya di Kabupaten Pacitan meliputi Kecamatan Donorojo, Punung, Pringkuku, dan Pacitan.

Tabel 2. 3 Luas Wilayah Kabupaten Pacitan Berdasarkan Kondisi Hidrologi

No.	Kecamatan	Air Tanah Langka	Produktivitas Akuifer Kecil	Setempat Akuifer Produktif	Jumlah
1	Donorojo	122,38	-	12.360,28	12.482,66
2	Punung	4.760,44	263,31	5.280,74	10.304,50
3	Pringkuku	2.677,87	1.640,92	9.698,22	14.017,01
4	Pacitan	4.499,99	3.469,63	0,60	7.970,21
5	Kebonagung	2.980,84	9.615,02	-	12.595,86
6	Arjosari	10.481,25	1.822,04	-	12.303,29
7	Nawangan	13.524,42	-	-	13.524,42
8	Bandar	12.141,54	-	-	12.141,54
9	Tegalombo	14.857,19	-	-	14.857,19
10	Tulakan	12.398,70	3.712,07	-	16.110,77
11	Ngadirojo	5.457,52	3.924,25	-	9.381,77
12	Sudimoro	4.292,15	3.266,09	-	7.558,23
	Jumlah	88.194,29	27.713,32	27.339,84	143.247,44
	Persentase	61,57%	19,35%	19,09%	100,00%

Sumber: RTRW Kabupaten Pacitan, Tahun 2024-2044



2.1.1.6. Kondisi Hidrologi

Pada dasarnya, Kabupaten Pacitan termasuk dalam 3 wilayah daerah aliran sungai (DAS), yaitu:

a. DAS Bengawan Solo Hulu

Sungai Bengawan Solo merupakan sungai terbesar dan terpanjang di Pulau Jawa dengan dua hulu sungai, yaitu dari daerah Gunung Sewu, Wonogiri dan Ponorogo selanjutnya bermuara di daerah Gresik. Sungai Bengawan Solo ini memiliki 3 wilayah DAS, yaitu hulu, tengah, hilir. Wilayah DAS Bengawan Solo Hulu membentang dari Kabupaten Wonogiri yang merupakan hulu utama pertama (dengan daerah tangkapan airnya di Waduk Gajah Mungkur), Karanganyar, Ponorogo yang merupakan hulu utama kedua (dengan daerah tangkapan airnya di Kali Madiun), Boyolali, Sragen, dan Klaten.

Daerah ini mayoritas meliputi daerah hulu kali Tenggar, hulu kali Muning, hulu Waduk Gajah Mungkur serta sebagian kabupaten Wonogiri dengan penampang sungai yang berbentuk V. Vegetasi pada daerah ini didominasi oleh tumbuhan akasia. Aktivitas yang banyak dilakukan di daerah ini adalah pertanian, seperti padi dan kacang tanah. Dinding sungai pada daerah ini rata-rata bertebing curam dan tinggi. Karena banyak digunakan untuk pertanian, daerah sekitar sungai pada bagian ini banyak mengalami erosi dan sedimentasi yang cukup tinggi.

Sedangkan, DAS Bengawan Solo Hulu di wilayah Kabupaten Pacitan berada di sebelah utara yang hanya meliputi Kecamatan Bandar dan Tegalombo saja.

b. DAS Grindulu

DAS Grindulu memiliki topografi datar hingga bergunung dengan elevasi tertinggi 1.100 m di atas permukaan air laut (Gunung Gembes) dan mempunyai wilayah paling besar yaitu meliputi 10 kecamatan yaitu Kecamatan Donorojo, Punung, Pringkuku, Pacitan, Kebonagung, Arjosari, Nawangan, Bandar, Tegalombo, dan Tulakan. Luas DAS kurang lebih 1.500 km² dengan panjang kurang lebih 52 km.

Dominasi penguasaan lahan tegalan oleh penduduk setempat telah berdampak pada perkembangan kondisi tanah permukaan lahan DAS Grindulu yaitu 61,29% merupakan tanah dengan solum sangat tipis dan dijumpai singkapan batuan induk litosol. Kondisi demikian mengakibatkan mudah terkikisnya lapisan top soil yang berdampak pada tingginya tingkat sedimentasi yang terjadi di DAS Grindulu. Hasil perhitungan erosi secara kasar dengan memperhatikan karakteristik tanah, pola penggunaan lahan dan pengelolaan lahan serta kondisi topografi menunjukkan bahwa tingkat erosi di DAS Grindulu sangat tinggi setiap tahun paling tidak akan terangkut tanah kurang lebih 60 ton ha/tahun (maks yang dapat ditolerir 12,5 ton/ha/th).

**Tabel 2. 4 Anak Sungai DAS Grindulu Kabupaten Pacitan**

No.	DAS / DPS	Nama Sungai	Panjang Max (Km)
A	Sub DAS Grindulu		
1		K. Grindulu	70,00
2		K.Kebonagung	18,43
3		K.Siwilan	4,44
4		K.Jelok	-
5		K.Jati	2,65
6		K.Gundi	2,46
7		K.Punjung	4,67
8		K.Pakel	3,49
9		K.Jambu	2,11
10		K.Waru	2,01
11		K.Kresek	2,65
12		K.Wates	1,55
13		K.Gawang	2,73
14		K.Sriten	3,56
15		K.Watugateng*	1,14
16		K.Grojogan	-
17		K.Demeling	-
18		K.Ponggok	13,87
19		K.Dawung	-
20		K.Nglejoh	-
21		K.Bareng	1,69
22		K.Glinggangan	3,10
23		K.Kedungmalang	4,03
24		K.Sempon	1,70
25		K.Bobrok	-
26		K. Kuncen*	-
27		K.Pelahan	-
28		K.Dendong	1,78
29		K.Sumber*	1,69
30		K.Mendungan	-
31		K.Jatirono	-
32		K.Jati*	-
33		K.Kalilo	-
34		K.Ngrendeng	4,19
35		K.Sumber	-
36		K.Salam	-
37		K.Banaran*	-
38		K.Kedungprau	3,36
39		K.Klisat	-
40		K.Sat	5,46
41		K.Dungpanggung	-
42		K.Patusan	-
43		K.Penggung*	-
44		K.Bendo	-
45		K.Duren Padang	-



No.	DAS / DPS	Nama Sungai	Panjang Max (Km)
46		K.Salak	-
47		K.Guwo	-
48		K.Sucodandang*	-
49		K.Asem Gandok	28,22
50		K.Kanogan	3,06
51		K.Luwuk/Kamagan	4,13
52		K.Tinatar	11,74
53		K.Kacangan	2,35
54		K.Mlati	-
55		K.Bangrubuh	-
56		K.Salamrejo	-
57		K.Mojo	-
58		K.Telu	3,85
59		K.Supehan	-
60		K.Glonggong*	-
61		K.Dawe	-
62		K.Widodaren*	-
63		K.Ijo	-
64		K.Niten	-
65		K.Panguran	-
66		K.Gading*	-
67		K.Karang	-
68		K.Ngresik	-
69		K.Pengkol	-
70		K.Nglangsep	-
71		K.Dompyong	-
72		K.Tretes	-
73		K.Kedungaren	-
74		K.Dungasang*	-
75		K.Ngalian	5,61
76		K.Ngasin	1,57
77		K.Balek	1,35
78		K.Balong	1,03
79		K.Gepok	0,75
80		K.Pronggo	8,48
81		K.Tempuran	-
82		K.Mijil*	-
83		K.Nalangan	2,97
84		K.Tengi	8,31
85		K.Jurangpapel	1,56
86		K.Kebon	2,83
87		K.Gligak	-
88		K.Jurugsuren	-
89		K.Sempor*	3,35
90		K.Ngepoh	31,34
91		K.Tempel	-
92		K.Sringin	-



No.	DAS / DPS	Nama Sungai	Panjang Max (Km)
93		K.Jarak	-
94		K.Blimbing	-
95		K.Bodeh/Dungbiru	-
96		K.Pasang/Juranggalo	-
97		K.Mider	-
98		K.Sempu	-
99		K.Ngledok*	-
100		K.Jurug Pakis	-
101		K.Pengkol	-
102		K.Dawuhan	-
103		K.Suren	-
104		K.Bebekan	-
105		K.Banaran	-
106		K.Kerdu	-
107		K.Dungaren	-
108		K.Samin	-
109		K.Gentong	-
110		K.Sobo	-
111		K.Sono*	-
112		K.Masong	2,62
113		K.Sepatan	2,26
114		K.Duren	3,74
115		K.Pengkol	2,26
116		K.Grenjeng	2,34
117		K.Jurug Teleng	2,51
118		K.Salat	3,70
119		K.Ngresik	4,32
120		K.Blimbing	9,51
121		K.Sengon	-
122		K.Salam	-
123		K.Grigak	-
124		K.Dawung	-
125		K.Ngembel*	-
126		K.Nglodo	2,96
127		K.Cabol	2,91
128		K.Nglumbu	2,73
129		K.Jabak	1,49
130		K.Sambi	2,64
131		K.Jebuk	1,91
132		K.Pinak/Pulutan	5,31
133		K.Puring	-
134		K.Ploso*	-
135		K.Grigak	-
136		K.Cikul	-
137		K.Jurang*	-
138		K.Tahunan	-
139		K.Kandangan	5,54



No.	DAS / DPS	Nama Sungai	Panjang Max (Km)
140		K.Tempuran/Jurug	4,13
141		K.Ngadioro	-
142		K.Jajar	-
143		K.Klitik	4,07
144		K.Picisan	2,45
145		K.Plaosan	13,32
146		K.Seten	4,08
147		K.Kodo	1,89
148		K.Gedangan	1,34
149		K.Tempuran	1,95
150		K.Geblengan	-
151		K.Pletes*	-
152		K.Jurug Carik	6,32
153		K.Ngreceh*	
154		K.Wates	2,40
155		K.Jumbleng	7,99
156		K.Kalialang	-
157		K.Polomas*	-
158		K.Ngadiopo	5,41
159		K.Sobo*	-
160		K.Petung	2,45
161		K.Tahunan	8,34
162		K.Ploso	8,30
163		K.Kenu	-
164		K.Guwo*	-
165		K.Gunting*	-
166		K.Jurang	-
167		K.Peweng	1,38
168		K.Jetis	-
169		K.WatuGong	3,01
170		K.Tanjung	3,42
171		K.Gondang	-
172		K.Pait	5,36
173		K.Petung Wulung	3,79
174		K.Teklik	3,27
175		K.Kemonggo	-
176		K.Pelem sengir	1,63
177		K.Juno* (huluGrind.)	-
178		K.Teleng	5,59
179		K.Kunir	6,80
180		K.Tani	3,83
Jumlah			456,47

Sumber: RTRW Kabupaten Pacitan, Tahun 2024-2044



c. DAS Lorok

Wilayah DAS Lorok di Kabupaten Pacitan merupakan yang terbesar kedua setelah DAS Grindulu, yang meliputi wilayah Kabupaten Pacitan di sebelah timur dan selatan. Kecamatan-kecamatan di wilayah Kabupaten Pacitan yang termasuk dalam DAS Lorok meliputi Kecamatan Kebonagung, Tegalombo, Tulakan, Ngadirojo, dan Sudimoro.

Tabel 2. 5 Luas Wilayah Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Pacitan

No.	Kecamatan	DAS Bengawan Solo Hulu	DAS Grindulu	DAS Lorok	Jumlah
1	Donorojo	-	12.482,66	-	12.482,66
2	Punung	-	10.304,50	-	10.304,50
3	Pringkuku	-	14.017,01	-	14.017,01
4	Pacitan	-	7.970,22	-	7.970,22
5	Kebonagung	-	7.104,20	5.491,66	12.595,86
6	Arjosari	-	12.303,29	-	12.303,29
7	Nawangan	-	13.524,42	-	13.524,42
8	Bandar	974,58	11.166,97	-	12.141,55
9	Tegalombo	556,32	13.278,91	1.021,97	14.857,19
10	Tulakan	-	2.126,39	13.984,37	16.110,76
11	Ngadirojo	-	-	9.381,77	9.381,77
12	Sudimoro	-	-	7.558,23	7.558,23
	Jumlah	1.530,89	104.278,57	37.438,00	143.247,45
	Persentase	1,07%	72,80%	26,14%	100,00%

Sumber: RTRW Kabupaten Pacitan, Tahun 2024-2044

Selain DAS, di Kabupaten Pacitan terdapat danau, waduk, situ, dan embung yang berjumlah 112 dengan total luas yaitu 118,41 Ha. Volume danau, waduk, situ, dan embung secara keseluruhan mencapai 164.993.299,40 m³. Dari jumlah danau, waduk, situ, dan embung yang ada, yang memiliki luas terbesar yaitu Wareng dengan luas 11,02 Ha dan memiliki volume sebanyak 275.500,00 m³. sedangkan yang memiliki luas dan volume air paling kecil yaitu Karet seluas 0,05 Ha atau sekitar 500 m² dengan volume air 750 m³.

Kabupaten Pacitan memiliki 110 sumber daya air yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk. Sumber daya air ini dapat digunakan untuk pengairan pertanian, pemenuhan kebutuhan rumah tangga, kelestarian lingkungan dan memperlancar perekonomian penduduk Kabupaten Pacitan. Sumber daya air ini tersebar di seluruh kecamatan yang berada di Kabupaten Pacitan dan dapat dimanfaatkan oleh 15.244 KK dengan sumber daya air terbesar yaitu bernama Ngumbul, Desa Mantren, Kecamatan Punung yang dapat dimanfaatkan oleh 2181 KK. Berikut merupakan daftar lokasi pemanfaatan sumber daya air di Kabupaten Pacitan.



2.1.1.7. Kondisi Klimatologi

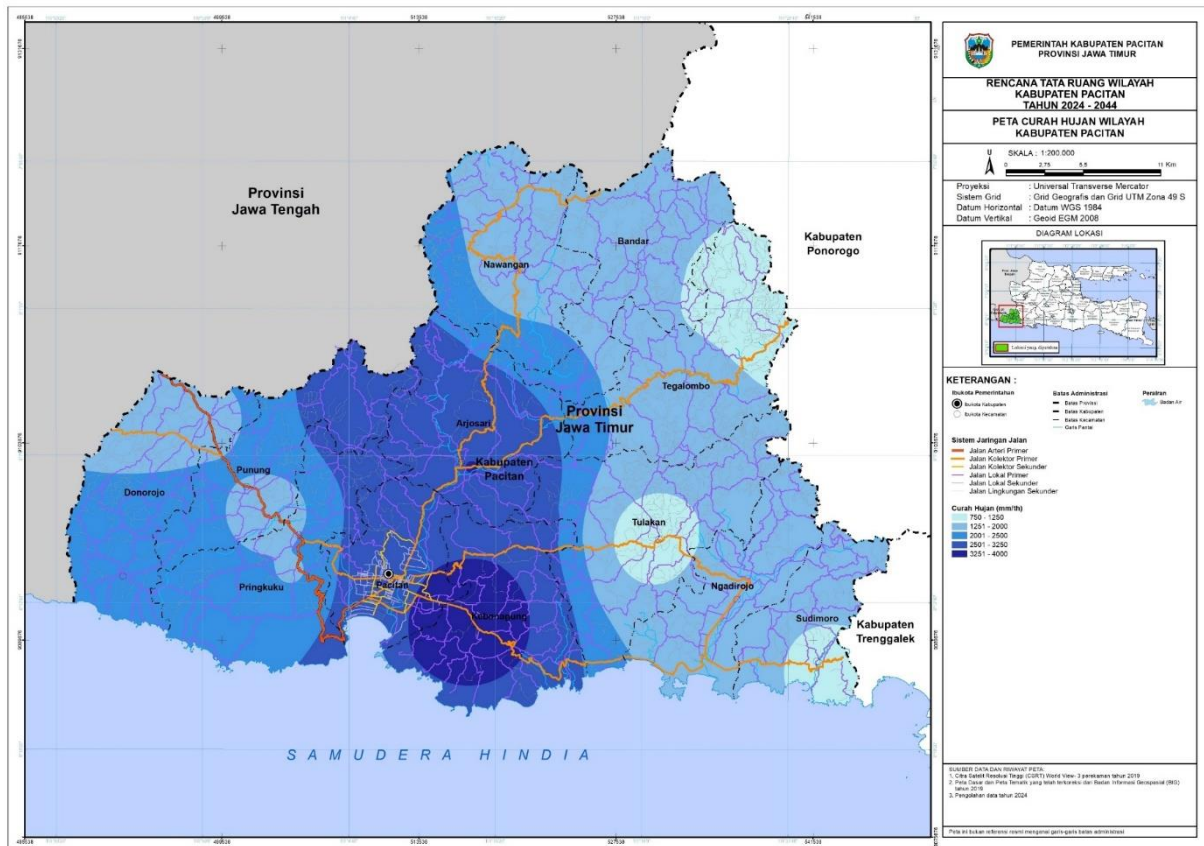
Kondisi Iklim di Kabupaten Pacitan termasuk iklim tropis yang ditandai dengan adanya 2 (dua) musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Kondisi iklim di Kabupaten Pacitan dapat digambarkan berdasarkan keadaan suhu tiap bulan dalam tahun terakhir, keadaan kelembaban udara, kecepatan angin, jumlah curah hujan, jumlah hari hujan dan juga keadaan penyinaran matahari setiap bulannya. Berikut tabel yang menggambarkan kondisi klimatologi Kabupaten Pacitan pada tahun 2023:

Tabel 2. 6 Kondisi Suhu, Kelembaban dan Kecepatan Angin di Kabupaten Pacitan tahun 2023

Bulan	Suhu (°C)			Kelembaban (%)			Kecepatan Angin (m/det)
	Min	Rata-Rata	Maks	Min	Rata-Rata	Maks	Rata-Rata
Januari	28	31	34	25	25,5	26	68,88
Februari	24	29	34	25	25,5	26	45,84
Maret	28	32,5	37	25	25,5	26	76,98
April	28	32,5	37	25	25,5	26	94,80
Mei	28	31,5	35	25	25,5	26	119,28
Juni	28	32,5	37	25	25,5	26	118,44
Juli	28	32,5	37	25	25,5	26	104,28
Agustus	28	32,5	37	25	25,5	26	153,84
September	28	32	36	25	25,5	26	190,20
Oktober	27	31,5	36	25	25,5	26	164,04
November	28	32	36	25	25,5	26	175,56
Desember	28	32	36	25	25,5	26	162,48

Sumber: Kabupaten Pacitan dalam Angka, Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui jika suhu di Kabupaten Pacitan pada tahun 2023 maksimal mencapai 32.50°C yang terjadi setiap bulannya. Selanjutnya jika dilihat berdasarkan pada keadaan kelembaban, maksimal mencapai 26.00%. Kecepatan angin di Kabupaten Pacitan dengan rata-rata tertinggi terjadi di bulan September yang mencapai 190,20 m/det, dan terendah terjadi di bulan Februari dengan besaran 45,84 m/det.

**Gambar 2. 3 Curah Hujan Kabupaten Pacitan**

Sumber: RTRW Kabupaten Pacitan, 2024-2044

2.1.1.6 Penggunaan Lahan

Kabupaten Pacitan memiliki bentang alam yang beragam, mulai dari dataran rendah, perbukitan, hingga pegunungan, yang menciptakan variasi dalam penggunaan lahan di wilayah tersebut. Area dataran rendah sering dimanfaatkan untuk pertanian dan pemukiman, sementara perbukitan dan pegunungan lebih banyak digunakan untuk kehutanan dan perkebunan. Keberagaman ini tidak hanya mencerminkan potensi alam yang dimiliki Pacitan, tetapi juga tantangan dalam pengelolaan lahan yang harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem. Selain itu, kawasan pesisir di Pacitan juga memberikan peluang untuk pengembangan sektor perikanan dan pariwisata, yang semakin memperkaya fungsi lahan di daerah ini.

Wilayah Kabupaten Pacitan memiliki kondisi bentang alam yang beragam yang menyebabkan beragam pula penggunaan lahan yang ada. Berikut adalah tabel penggunaan lahan Kabupaten Pacitan.

No	Kecamatan	Bangunan Industri	Embung	Hamparan Pasir Pantai	Hutan Lindung	Hutan Produksi	Hutan Produksi Terbatas
1	Donorojo	-	13,70	-	-	83,18	1,37
2	Punung	-	12,49	-	-	105,26	1,32
3	Pringkuku	3,25	8,06	-	49,74	715,66	-
4	Pacitan	23,12	-	21,48	106,19	214,17	-
5	Kebonagung	-	1,27	-	-	26,24	-
6	Arjosari	-	-	-	-	87,29	-
7	Nawangan	-	1,27	-	1,04	189,54	-
8	Bandar	-	0,60	-	11,00	441,33	-
9	Tegalombo	-	-	-	8,97	69,81	-
10	Tulakan	2,69	3,07	-	-	20,74	-
11	Ngadirojo	-	1,03	-	-	20,11	-
12	Sudimoro	56,15	5,29	-	-	137,52	-
	Jumlah	85,21	46,79	176,94	176,94	2.110,84	2,69
	Persentase	0,06%	0,03%	0,12%	0,12%	1,47%	0,002%

Sumber : RTRW Kabupaten Pacitan, Tahun 2024-2044


Tabel 2. 8 Penggunaan Lahan (Ha) Kabupaten Pacitan

No	Kecamatan	Hutan Rakyat	Kebun Campuran	Ladang/Tegalan	Lahan Terban gun	Lahan Terbuka Lain	Pelabuhan Laut
1	Donorojo	-	6.908,22	1.305,68	-	-	-
2	Punung	1,44	2.678,09	3.604,43	-	-	-
3	Pringkuku	240,36	6.662,50	3.146,58	-	0,92	-
4	Pacitan	1.725,62	1.198,91	781,24	11,11	-	8,67
5	Kebonagung	4.654,25	2.488,52	1.037,88	-	-	-
6	Arjosari	4.388,45	2.960,75	973,40	-	-	-
7	Nawangan	570,24	2.017,27	5.451,70	3,82	-	-
8	Bandar	178,85	930,64	4.909,78	-	-	-
9	Tegalombo	1.378,55	1.436,82	6.383,37	-	20,50	-
10	Tulakan	2.717,83	1.862,37	5.539,21	-	-	-
11	Ngadirojo	4.085,72	880,99	1.030,75	-	-	-
12	Sudimoro	2.432,98	655,16	2.163,79	-	-	-
	Jumlah	22.374,29	30.680,24	36.327,81	14,93	21,42	8,67
	Persentase	15,62%	21,42%	25,36%	0,01%	0,01%	0,01%

Sumber : RTRW Kabupaten Pacitan, Tahun 2024-2044

Tabel 2. 9 Penggunaan Lahan (Ha) Kabupaten Pacitan

No	Kecamatan	Perkebunan	Permukiman	Sawah	Semak Belukar	Sungai	Tambak Ikan
1	Donorojo	-	1.998,67	2.018,85	143,05	9,94	-
2	Punung	-	2.432,56	1.253,40	184,82	30,69	-
3	Pringkuku	-	1.818,02	1.166,71	159,09	44,08	-
4	Pacitan	-	1.862,48	1.849,46	10,04	146,80	10,93
5	Kebonagung	-	1.631,97	1.805,10	929,47	21,15	-
6	Arjosari	-	1.497,72	874,78	1.256,75	230,38	-
7	Nawangan	14,58	2.710,90	2.473,92	43,79	46,36	-
8	Bandar	2,39	1.755,89	3.891,16	0,41	19,50	-
9	Tegalombo	-	2.089,38	2.263,80	1.094,23	111,77	-
10	Tulakan	-	3.255,84	1.752,38	893,20	63,42	-
11	Ngadirojo	-	1.813,94	926,15	472,08	137,36	3,40
12	Sudimoro	-	1.425,84	315,63	331,00	34,87	-
	Jumlah	16,96	24.293,21	20.591,33	5.517,91	896,32	14,33
	Persentase	0,01%	16,96%	14,37%	3,85%	0,63%	0,01%

Sumber : RTRW Kabupaten Pacitan, Tahun 2024-2044



Tabel 2. 10 Penggunaan Lahan (Ha) Kabupaten Pacitan

No	Kecamatan	TPA	Waduk
1	Donorojo	-	-
2	Punung	-	-
3	Pringkuku	2,04	-
4	Pacitan	-	-
5	Kebonagung	-	-
6	Arjosari	-	33,78
7	Nawangan	-	-
8	Bandar	-	-
9	Tegalombo	-	-
10	Tulakan	-	-
11	Ngadirojo	-	-
12	Sudimoro	-	-
	Jumlah	2,04	33,78
	Persentase	0,001%	0,02%

Sumber : RTRW Kabupaten Pacitan, Tahun 2024-2044

Berdasarkan data yang ada, penggunaan lahan di Kabupaten Pacitan tidak merata di semua kecamatan. Jenis lahan seperti kebun campuran, ladang/tegalan, permukiman, sawah, semak belukar, dan sungai adalah yang tersebar di seluruh kecamatan. Ladang/tegalan mendominasi wilayah Kabupaten Pacitan dengan luas 36.327,81 hektar atau 25,36% dari total luas wilayah. Kebun campuran menjadi lahan terbesar kedua, mencakup 30.680,24 hektar atau 21,42% dari total wilayah. Sebaliknya, lahan yang paling kecil adalah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan luas hanya 2,04 hektar, yang terletak di Kecamatan Pringkuku dan hanya mencakup 0,001% dari luas keseluruhan Kabupaten Pacitan. Lahan yang terlihat mendominasi wilayah Kabupaten Pacitan adalah ladang/tegalan dengan luas sebesar 36.327,81 ha atau 25,36% dari luas wilayah Kabupaten Pacitan dan lahan yang terbesar kedua setelah ladang/tegalan adalah kebun campuran dengan luas sebesar 30.680,24 ha atau 21,42% dari luas wilayah Kabupaten Pacitan, sedangkan untuk luas lahan terkecil di Kabupaten Pacitan adalah TPA dengan luas sebesar 2,04 ha yang hanya berada di Kecamatan Pringkuku dengan persentase 0,001% dari luas wilayah Kabupaten Pacitan.

Berdasarkan perencanaan pola ruang pada Kabupaten Pacitan yang telah dijabarkan, akan disusun neraca luas pola ruang yang membandingkan luasan pola ruang pada Perda No. 3/2010 tentang RTRW Kabupaten Pacitan, penggunaan lahan kondisi eksisting Kabupaten Pacitan pada tahun 2015, dan luasan pola ruang pada revisi RTRW Kabupaten Pacitan.



Tabel 2. 11 Neraca Luas Pola Ruang Revisi RTRW Kabupaten Pacitan

No.	Kawasan	Perda 3/2010 (Ha)	Eksisting 2015 (Ha)	Revisi Perda RTRW (Ha)
Kawasan Lindung				
1	Badan air			1.103
2	Kawasan hutan lindung	0	177	268
3	Kawasan Bentang Alam Karst Gunungsewu(*)/Geologi	21.867,80	0	0
4	Kawasan perlindungan setempat	0	0	3.517
5	Kawasan suaka alam dan cagar budaya	1.254,13	0	0
Kawasan Budi Daya				
6	kawasan hutan produksi	1.484,39	2.114	1.996
7	kawasan perkebunan rakyat	65.951	22.374	40.077
8	kawasan pertanian	13.033	93.134	64.344
9	kawasan perikanan	0	14	71
10	kawasan industri	0	85	2.964
11	kawasan pariwisata	0	0	0
12	kawasan permukiman	16.253,31	24.293	28.953
13	kawasan pertahanan keamanan	0	0	67

Sumber: RTRW Kabupaten Pacitan, Tahun 2024-2044

Dari neraca pola ruang di atas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan luasan kawasan peruntukan lindung dan kawasan peruntukan budi daya di dalam perda 3/2010, tutupan lahan eksisting tahun 2015, dan revisi RTRW Kabupaten Pacitan. Perbedaan luasan pola ruang perda 3/2010 dengan tutupan lahan eksisting tahun 2015 mengindikasikan bahwa terdapat simpangan pola ruang yang terjadi. Simpangan-simpangan rencana pola ruang terjadi bisa karena beberapa hal, salah satunya adalah kualitas gambar citra yang digunakan pada saat proses perencanaan pada tahun 2010 tidak sebagus gambar citra yang digunakan untuk mengidentifikasi penggunaan lahan pada tahun 2015 sehingga mempengaruhi luasan pola ruang perda 3/2010. Untuk luasan rencana pola ruang pada perda 3/2010 dengan revisi raperda RTRW Kabupaten Pacitan terdapat perbedaan terjadi dikarenakan beberapa faktor, antara lain:

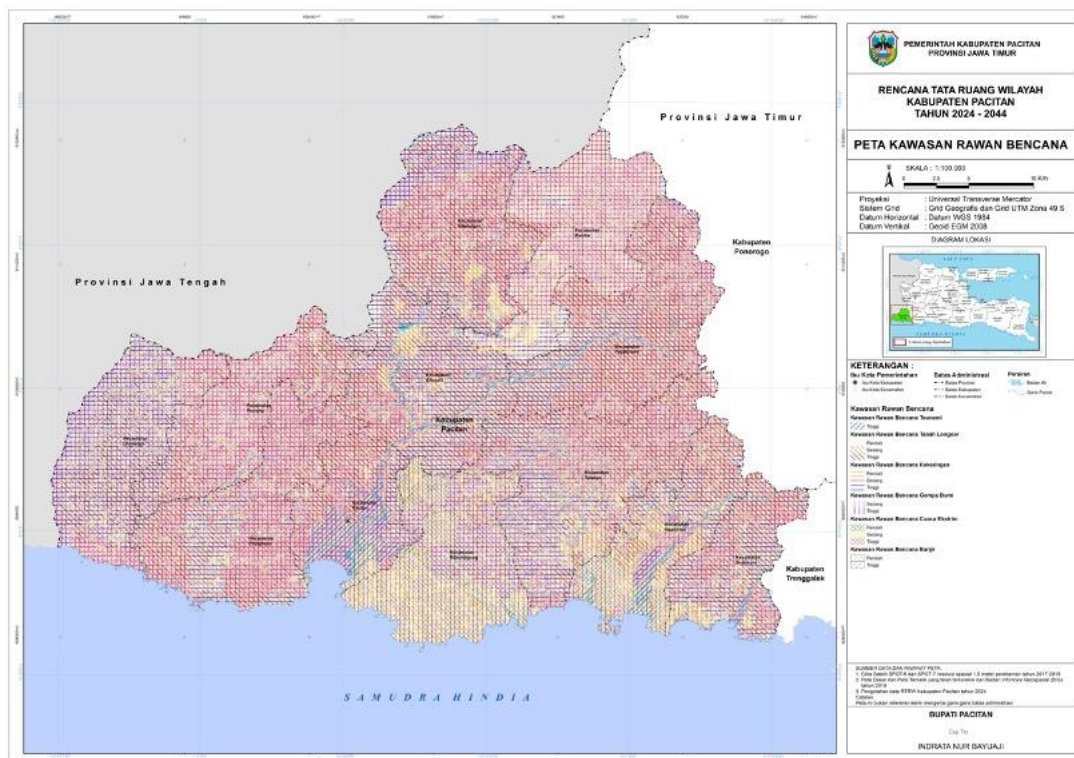
1. Kualitas gambar citra satelit yang digunakan menjadi dasar di dalam proses perencanaan perda 3/2010 dengan revisi RTRW Kabupaten Pacitan. Perbedaan kualitas gambar citra satelit tersebut menentukan bagaimana rencana-rencana peruntukan tiap kawasan disusun.
2. Perkembangan pembangunan Kabupaten Pacitan yang semakin pesat seiring bertambahnya waktu. Perkembangan pembangunan yang termasuk di dalamnya perkembangan jumlah penduduk menyebabkan perubahan kebutuhan dari masing-masing kawasan peruntukan.



2.1.2 Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Pacitan dikenal sebagai salah satu wilayah di Indonesia yang rawan terhadap berbagai jenis bencana alam, terutama tanah longsor, banjir, dan gempa bumi. Kondisi geologis Pacitan yang berbukit dan berada di kawasan pegunungan membuatnya rentan terhadap tanah longsor, terutama saat musim hujan tiba. Selain itu, sungai-sungai besar yang mengalir melalui kabupaten ini dapat meluap dan menyebabkan banjir di area dataran rendah. Lokasinya yang berada di dekat pertemuan lempeng tektonik juga menjadikan Pacitan rentan terhadap gempa bumi. Kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat serta upaya mitigasi dari pemerintah setempat sangat penting untuk mengurangi risiko dan dampak dari bencana-bencana tersebut.

Gambar 2. 5 Peta Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Pacitan



Sumber: RTRW Kabupaten Pacitan, Tahun 2024-2044

Selain Kabupaten Pacitan memiliki potensi alam atau kawasan yang menjanjikan dengan berbagai potensi yang dimiliki, Kabupaten Pacitan juga memiliki potensi bencana alam. Terutama dengan kondisi daerah yang dekat dengan pantai dan jalur pegunungan. Berikut potensi bencana dan kawasan **rawan bencana di wilayah** Kabupaten Pacitan:

1. Gerakan Tanah, kawasan yang memiliki kerawanan terhadap bencana longsor ditetapkan penggunaan lahannya sebagai hutan lindung. Sesuai dengan pembahasan terdahulu, kawasan yang memiliki kerawanan terhadap bencana longsor ditetapkan penggunaan lahannya sebagai hutan lindung. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar tanah di sekitar daerah rawan longsor



menjadi lebih stabil karena diikat oleh akar-akar tumbuhan. Pada dasarnya, Kabupaten Pacitan berada pada kawasan rawan bencana longsor/gerakan tanah, yang terbagi menjadi KRB Gerakan Tanah Rendah, KRB Gerakan Tanah Sedang, dan KRB Gerakan Tanah Tinggi. Luas wilayah Kabupaten Pacitan di masing-masing KRB gerakan tanah adalah 52.918,48 Ha berada di KRB gerakan tanah tinggi, 29.324,18 berada pada KRB gerakan tanah sedang, dan 25.710.47 Ha berada pada KRB gerakan tanah sangat rendah.

Tabel 2. 12 Luas Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah

No	Kecamatan	Klasifikasi KRB (Ha)			Total
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1	Kecamatan Arjosari	388,30	2.210,16	7.596,57	10.195,03
2	Kecamatan Bandar	9.408,24	219,90	431,45	10.059,59
3	Kecamatan Donorojo	257,84	3.020,91	3.384,07	6.662,82
4	Kecamatan Kebonagung	9.798,95	62,43	51,28	9.912,66
5	Kecamatan Nawangan	480,36	3.678,13	6.993,85	11.152,35
6	Kecamatan Ngadirojo	1.954,65	1.662,08	3.629,64	7.246,37
7	Kecamatan Pacitan	518,93	1.208,73	2.407,81	4.135,47
8	Kecamatan Pringkuku	439,61	4.721,63	4.544,28	9.705,52
9	Kecamatan Punung	302,23	2.438,73	3.594,86	6.335,82
10	Kecamatan Sudimoro	485,39	1.928,12	3.934,06	6.347,57
11	Kecamatan Tegalombo	646,70	2.695,03	10.070,52	13.412,25
12	Kecamatan Tulakan	1.029,26	5.478,34	6.280,08	12.787,68
	Total	25.710,47	29.324,18	52.918,48	107.953,13

Sumber: RTRW Kabupaten Pacitan, Tahun 2024-2044

2. Tsunami, meliputi daerah yang terletak di bibir pantai teluk Pacitan dan daerah hilir dari DAS Grindulu yang masuk dalam wilayah Kecamatan Pacitan. Tsunami merupakan gelombang pasang yang disebabkan oleh gempa bumi atau longsor di lereng dasar laut. Gelombang pasang semacam ini bisa melanda daerah pantai sampai puluhan meter tingginya dan ratusan hingga ribuan meter jauhnya dari pantai sehingga menyapu dan merusak segala apa yang ada di pantai dan di daratan. Kabupaten Pacitan terletak di jalur gempa tektonik yang pada akhirnya akan menimbulkan tsunami memanjang di sepanjang pantai selatan Jawa. Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa pantai Selatan Kabupaten Pacitan merupakan kawasan rawan bencana tsunami tinggi. Untuk itu penggunaan dan pengembangan lahan di sepanjang pantai Kabupaten Pacitan harus direncanakan sedemikian rupa agar dapat meminimalkan dampak yang akan terjadi jika ada tsunami. Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2005-2020, pantai di Kabupaten Pacitan dimasukkan ke dalam daerah bahaya I (satu) terhadap bencana tsunami sehingga ketentuan pengaturan sempadan harus memperhatikan bahaya tsunami. Adapun kecamatan yang merupakan kawasan rawan bencana tsunami dan perlu diatur penggunaan lahannya adalah wilayah pantai di bagian selatan Kecamatan Donorojo, Kecamatan Pringkuku, Kecamatan Pacitan, Kecamatan Kebonagung,



Kecamatan Tulakan, Kecamatan Ngadirojo dan Kecamatan Sudimoro. Lokasi yang diarahkan penggunaan lahannya sebagai bahaya I tsunami adalah seluruh pantai yang terletak di Kabupaten Pacitan bagian Selatan dengan kemiringan lahan yang landai sekitar 0-15%. Pantai-pantai tersebut berada di bagian Selatan beberapa kecamatan berikut ini: Pantai Klayar di Kecamatan Donorojo, Pantai Watukarung dan Pantai Srau di Kecamatan Pringkuku, Pantai Tamperan dan Pantai Teleng Ria di Kecamatan Pacitan, Pantai Bakung dan Pantai Wawaran di Kecamatan Kebonagung, Pantai Jetak di Kecamatan Tulakan, Pantai Sidomulyo dan Pantai Taman di Kecamatan Ngadirojo serta Pantai Ngobyok di Kecamatan Sudimoro.

Tabel 2. 13 Luas Kawasan Rawan Bencana Tsunami

No	Kecamatan	Klasifikasi KRB (Ha)
		Tinggi
1	Kecamatan Arjosari	-
2	Kecamatan Bandar	-
3	Kecamatan Donorojo	31,73
4	Kecamatan Kebonagung	130,30
5	Kecamatan Nawangan	-
6	Kecamatan Ngadirojo	976,48
7	Kecamatan Pacitan	2.761,24
8	Kecamatan Pringkuku	116,76
9	Kecamatan Punung	-
10	Kecamatan Sudimoro	164,76
11	Kecamatan Tegalombo	-
12	Kecamatan Tulakan	3,11
	Total	4184,37

Sumber: RTRW Kabupaten Pacitan, Tahun 2024-2044

- Banjir, sering terjadi di semua wilayah Kecamatan Pacitan dan sepanjang DAS Kabupaten Pacitan, terutama di DAS Grindulu. Bahaya bencana banjir selain merupakan bahaya bencana yang disebabkan oleh proses alamiah siklus air, juga banyak dipengaruhi oleh perbuatan manusia dalam mengolah alam dan sumber dayanya yang menyebabkan keseimbangan ekosistem dan alam menjadi tidak stabil. Salah satu penyebab terjadinya banjir yang terjadi di wilayah Kabupaten Pacitan adalah adanya perilaku merusak (*vandalism*) yang dilakukan oleh manusia antara lain pengrusakan hutan, kawasan penyangga, dan daerah aliran sungai yang mengakibatkan siklus air yang secara alami terjadi menjadi tidak seimbang antara *run off* dan serapan serta antara hulu dan hilir yang mengakibatkan bencana banjir dan juga tanah longsor. Titik-titik rawan kejadian banjir di wilayah Kabupaten Pacitan sangat erat kaitannya dengan keberadaan sungai-sungai utama yang ada yaitu Sungai Baksoko, Sungai Lorog, Sungai Pagotan, Sungai Bawur dan terutama Sungai Grindulu. Sungai yang sering mengalami banjir dalam DAS Grindulu adalah Grindulu Hilir, Asem



Gandok dan Kebonagung. Di Kecamatan Pacitan, wilayah yang dilalui oleh Kali Bengkal dan Kali Tani yang merupakan anak Sungai Grindulu juga termasuk sebagai Kawasan Rawan Banjir. Hampir semua kecamatan di Kabupaten Pacitan termasuk wilayah banjir baik rendah, sedang, maupun tinggi. Namun, ada 2 kecamatan di Kabupaten Pacitan yang tidak masuk KRB banjir, yaitu Kecamatan Nawangan dan Bandar. Saat ini penggunaan lahan di kawasan rawan banjir di Kabupaten Pacitan adalah sebagai kawasan permukiman. Penggunaan lahan di Kawasan yang rawan banjir direncanakan tidak akan berubah, namun untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya banjir adalah dengan meningkatkan luasan ruang hutan kota dan kawasan terbuka hijau, terutama di daerah hulu, guna meningkatkan penyerapan air hujan ke dalam tanah dan meminimalkan air limpasan (*run off*), serta dengan melakukan pengembangan sistem prasarana drainase. Di Kabupaten Pacitan, ada daerah yang belum mengalami banjir namun berpotensi untuk mengalami banjir selain lokasi- lokasi yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu daerah yang memiliki kemiringan lahan yang landai sekitar 0-8%. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya banjir di masa yang akan datang maka daerah resapan air perlu dipertahankan dan dengan perencanaan sistem drainase harus dilakukan sesuai dengan perkembangan wilayah. Berikut adalah luasan wilayah kecamatan di Kabupaten Pacitan yang masuk KRB Banjir.

Tabel 2. 14 Luas Kawasan Rawan Bencana Banjir

No	Kecamatan	Klasifikasi KRB		Total
		Rendah	Tinggi	
1	Kecamatan Arjosari	252,89	1.150,47	1.403,36
2	Kecamatan Bandar	2,74		2,74
3	Kecamatan Donorojo	34,49	52,29	86,78
4	Kecamatan Kebonagung	1.430,57	192,19	1.622,75
5	Kecamatan Nawangan			-
6	Kecamatan Ngadirojo	40,01	1.533,65	1.573,66
7	Kecamatan Pacitan	191,77	2.923,42	3.115,19
8	Kecamatan Pringkuku	1.782,56	66,91	1.849,47
9	Kecamatan Punung	238,29		238,29
10	Kecamatan Sudimoro	238,45	144,37	382,81
11	Kecamatan Tegalombo	92,36	38,19	130,55
12	Kecamatan Tulakan	1.710,74	139,43	1.850,18
	Total	6.014,85	6.240,92	12.255,78

Sumber: RTRW Kabupaten Pacitan, Tahun 2024-2044

4. Gempa Bumi, mencakup semua wilayah yang ada di Kabupaten Pacitan. Secara keseluruhan, seluruh wilayah Kabupaten Pacitan termasuk dalam KRB Gempa Bumi sedang, tinggi dan sangat tinggi, namun apabila dilihat dari luasannya, maka terlihat yang paling mendominasi adalah KRB Gempa Bumi tinggi. Kawasan koridor Pantai Selatan Jawa yang merupakan bagian dari Lempeng



Eurasia di bagian utara garis equator mempunyai potes zona tumbukan (subduktif aktif) dengan Lempeng Indo-Australia di bagian selatan garis equator di Samudera Hindia. Potensi tumbukan ini dapat menimbulkan gempa tektonik mengingat gerakan alami lempeng menuju garis equator sebagai akibat gaya sentrifugal putaran bola bumi. Daerah Kabupaten Pacitan yang berada di atas lempeng Indo-Australia kondisinya saat ini sangat rapat karena mendapat tekanan dari lempeng Eropa-Asia. Kondisi lempeng Jawa Selatan yang rapat dan tertekan itu sewaktu-waktu bisa patah sehingga menimbulkan gempa. Berdasarkan hal tersebut, maka seluruh wilayah Kabupaten Pacitan termasuk ke dalam kawasan rawan gempa bumi dan perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang manajemen resiko bencana dengan mitigasi bencana. Secara keseluruhan, seluruh wilayah Kabupaten Pacitan termasuk dalam KRB Gempa Bumi sedang, tinggi dan sangat tinggi, namun apabila dilihat dari luasannya, maka terlihat yang paling mendominasi adalah KRB Gempa Bumi tinggi dengan luasan sebesar 51.115,90 Ha atau sekitar 36% dari keseluruhan wilayah Kabupaten Pacitan, sedangkan sisanya termasuk dalam wilayah KRB Gempa Bumi sedang dengan luas sebesar 45.277,76 Ha atau sekitar 33% dari keseluruhan wilayah Kabupaten Pacitan. Luasan masing-masing kecamatan di wilayah Kabupaten Pacitan yang termasuk dalam KRB Gempa Bumi dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2. 15 Luas Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi

No	Kecamatan	Klasifikasi KRB			Total
		Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1	Kecamatan Arjosari	8.815,93	1.846,71	1.911,77	12.574,41
2	Kecamatan Bandar	2.701,68	1.603,22	8.119,57	12.424,46
3	Kecamatan Donorojo	2.496,24	8.503,36	1.098,72	12.098,33
4	Kecamatan Kebonagung	283,68	12.224,31	4,82	12.512,81
5	Kecamatan Nawangan	3.079,49	1.333,85	8.664,94	13.078,28
6	Kecamatan Ngadirojo	3.963,24	4.085,44	1.428,82	9.477,50
7	Kecamatan Pacitan	518,37	7.214,83	50,63	7.783,83
8	Kecamatan Pringkuku	4.322,61	2.729,57	6.651,79	13.703,97
9	Kecamatan Punung	2.393,98	2.422,82	5.932,53	10.749,32
10	Kecamatan Sudimoro	4.094,61	1.933,07	1.472,91	7.500,58
11	Kecamatan Tegalombo	4.259,83	4.589,41	6.032,46	14.881,70
12	Kecamatan Tulakan	8.348,12	2.629,31	5.576,68	16.554,11
	Total	45.277,76	51.115,90	46.945,64	143.339,30

5. Kekeringan, sering terjadi di Kecamatan Donorojo (Widoro, Sawahan, Kalak, dan Belah), Kecamatan Nawangan (Penggung). Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan. Penyebab terjadinya kekeringan adalah menurunnya curah hujan pada periode yang lama disebabkan oleh interaksi atmosfer dan laut serta akibat ketidakaturan suhu permukaan laut.



Bahaya kekeringan berpotensi terjadi di semua wilayah Kabupaten Pacitan dengan kategori kelas bahaya rendah hingga tinggi. Hal ini terjadi pada kedua belas kecamatan yang berada di Kabupaten Pacitan. Luas bahaya tinggi terbesar terjadi pada Kecamatan Donorojo sebesar 8.621,77 Ha sedangkan Kecamatan Sudimoro memiliki luas bahaya rendah terkecil yaitu 1093,92 Ha. Secara keseluruhan Kabupaten Pacitan memiliki potensi bahaya kekeringan kategori kelas tinggi.

Tabel 2. 16 Luas Kawasan Rawan Bencana Kekeringan

No	Kecamatan	Klasifikasi KRB			Total
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1	Kecamatan Arjosari	1.893,59	3.020,49	7.660,34	12.574,42
2	Kecamatan Bandar	1.653,81	9.281,81	1.488,82	12.424,43
3	Kecamatan Donorojo	1.735,94	1.740,61	8.621,77	12.098,33
4	Kecamatan Kebonagung	8.489,43	3.914,18	109,40	12.513,01
5	Kecamatan Nawangan	1.905,70	7.389,46	3.783,35	13.078,50
6	Kecamatan Ngadirojo	5.006,59	2.659,62	1.811,34	9.477,54
7	Kecamatan Pacitan	2.388,59	4.352,30	1.043,01	7.783,90
8	Kecamatan Pringkuku	1.376,18	9.301,04	3.026,61	13.703,82
9	Kecamatan Punung	1.999,55	7.148,65	1.601,07	10.749,27
10	Kecamatan Sudimoro	1.093,92	2.836,31	3.570,37	7.500,60
11	Kecamatan Tegalombo	1.420,71	10.118,79	3.342,14	14.881,64
12	Kecamatan Tulakan	3.025,62	7.272,30	6.256,17	16.554,09
	Total	31.989,62	69.035,55	42.314,38	143.339,55

Sumber: RTRW Kabupaten Pacitan, Tahun 2024-2044

6. Gelombang Pasang dan Abrasi, yang dirimbulkan karena efek terjadinya siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam. Gelombang pasang atau badai adalah gelombang tinggi yang ditimbulkan karena efek terjadinya siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam. Indonesia bukan daerah lintasan siklon tropis tetapi keberadaan siklon tropis akan memberikan pengaruh kuat terjadinya angin kencang, gelombang tinggi disertai hujan deras, sedangkan Abrasi memiliki pengertian proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, namun manusia sering disebut sebagai penyebab utama abrasi. Kabupaten Pacitan sebagian wilayahnya berada di sekitar pantai selatan Jawa. Hal ini mengakibatkan adanya potensi bahaya gelombang pasang dan abrasi. Berikut merupakan luasan kawasan rawan bencana gelombang pasang dan abrasi di Kabupaten Pacitan.



Tabel 2. 17 Luas Kawasan Rawan Gelombang Pasang dan Abrasi

No.	Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)			Jumlah
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1	Arjosari	-	-	-	-
2	Bandar	-	-	-	-
3	Donorojo	-	157,05	-	157,05
4	Kebonagung	-	533,25	-	533,25
5	Nawangan	-	-	-	-
6	Ngadirojo	-	309,69	-	309,69
7	Pacitan	-	156,87	-	156,87
8	Pringkuku	-	431,82	-	431,82
9	Punung	-	-	-	-
10	Sudimoro	-	279,81	-	279,81
11	Tegalombo	-	-	-	-
12	Tulakan	-	73,44	-	73,44
	Jumlah	-	1.941,93	-	1.941,93
	Persentase	-	100%	-	100%

Sumber: RTRW Kabupaten Pacitan, Tahun 2024-2044

7. Kebakaran Hutan dan Lahan, berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Kecamatan Pacitan, wilayah Kecamatan Ngadirojo yang dekat dengan DAS, dan Kecamatan Donorojo bagian utara. Bencana kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan di mana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan. Bencana ini dapat dipicu dengan aktifitas manusia yang menggunakan api dikawasan hutan atau lahan, jenis tanaman yang sejenis yang memiliki titik bakar yang rendah, angin ataupun cuaca, serta topografi yang terjal. Di Kabupaten Pacitan terdapat sepuluh kecamatan memiliki kelas bahaya kebakaran hutan dan lahan dalam kategori kelas tinggi. Wilayah yang dimaksud yaitu Kecamatan Arjosari, Kecamatan Bandar, Kecamatan Donorojo, Kecamatan Kebonagung, Kecamatan Nawangan, Kecamatan Pacitan, Kecamatan Pringkuku, Kecamatan Punung, Kecamatan Sudimoro, Kecamatan Tulakan, sedangkan dua kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Ngadirojo dan Kecamatan Tegalombo memiliki kelas bahaya kebakaran hutan dan lahan kategori kelas sedang. Kecamatan Tulakan memiliki luas bahaya terbesar yaitu 16.637,40 Ha. Secara keseluruhan disimpulkan bahwa Kabupaten Pacitan memiliki potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan dalam kategori kelas tinggi. Untuk lebih lanjut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 18 Luas Kawasan Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan

No.	Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)			Jumlah
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1	Arjosari	-	2.668,86	9.540,54	12.209,40
2	Bandar	-	3.776,85	8.066,52	11.843,37
3	Donorojo	-	944,82	10.559,79	11.504,61
4	Kebonagung	-	4.423,32	8.499,51	12.922,83
5	Nawangan	-	5.017,14	8.110,71	13.127,85
6	Ngadirojo	-	4.830,93	4.692,06	9.522,99



No.	Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)			Jumlah
		Rendah	Sedang	Tinggi	
7	Pacitan	-	3.164,04	4.758,66	7.922,70
8	Pringkuku	-	6.749,91	7.054,83	13.804,74
9	Punung	-	3.830,67	8.024,49	11.855,16
10	Sudimoro	-	3.518,64	4.106,61	7.625,25
11	Tegalombo	-	8.192,43	7.064,37	15.256,80
12	Tulakan	-	6.280,29	10.357,11	16.637,40
	Jumlah	-	53.397,90	90.835,20	144.233,10
	Persentase		37.02%	62.98%	100%

Sumber: RTRW Kabupaten Pacitan, Tahun 2024-2044

8. Epidemi dan Wabah, timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Epidemi, wabah, atau kejadian luar biasa (KLB) adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Status Kejadian Luar Biasa diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 949/MENKES/SK/VII/2004. Epidemi atau wabah dan KLB merupakan ancaman bencana yang diakibatkan oleh menyebarnya penyakit menular yang berjangkit di suatu daerah tertentu dalam waktu tertentu. Secara keseluruhan wilayah Kabupaten Pacitan memiliki potensi terjadinya bahaya epidemi dan wabah penyakit. Hanya saja pada semua wilayah potensi bahaya ini tidak terjadi pada kategori kelas bahaya sedang dan tinggi. Wilayah dengan luasan bahaya terbesar adalah Kecamatan Tulakan yaitu sebesar 16.669,95 Ha dengan kategori kelas bahaya rendah. Kabupaten Pacitan memiliki bahaya epidemi dan wabah penyakit kategori kelas rendah. Berikut merupakan data luasan KRB epidemi dan wabah.

Tabel 2. 19 Luas Kawasan Rawan Bencana Epidemi dan Wabah

No.	Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)			Jumlah
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1	Arjosari	12.212,92	-	-	12.212,92
2	Bandar	11.848,14	-	-	11.848,14
3	Donorojo	11.531,34	-	-	11.531,34
4	Kebonagung	12.965,97	-	-	12.965,97
5	Nawangan	13.140,99	-	-	13.140,99
6	Ngadirojo	9.625,38	-	-	9.625,38
7	Pacitan	8.078,80	-	-	8.078,80
8	Pringkuku	13.849,64	-	-	13.849,64
9	Punung	11.862,69	-	-	11.862,69
10	Sudimoro	7.685,73	-	-	7.685,73
11	Tegalombo	15.262,47	-	-	15.262,47
12	Tulakan	16.669,95	-	-	16.669,95
	Jumlah	144.734,01	-	-	144.734,01
	Persentase	100,00%	-	-	100,00%

Sumber: RTRW Kabupaten Pacitan, Tahun 2024-2044



9. Cuaca Ekstrim, sering terjadi di daerah sepanjang bibir pantai Teluk Pacitan, Kecamatan Tulakan bagian barat, dan di Kecamatan Kebonagung bagian utara. Bencana cuaca ekstrim merupakan pusaran angin kencang dengan kecepatan angin 120 km/jam atau lebih yang sering terjadi di wilayah tropis diantara garis bilik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat dekat dengan khatulistiwa. Bencana ini disebabkan oleh perbedaan tekanan dalam suatu sistem cuaca. Angin paling kencang yang terjadi di daerah tropis ini umumnya berpusat dengan radius ratusan kilometer disekitar daerah sistem tekanan rendah yang ekstrim. Kabupaten Pacitan memiliki potensi terjadinya bahaya cuaca ekstrim dengan luasan bahaya cuaca ekstrim terbesar adalah Kecamatan Tulakan dan wilayah dengan luasan terkecil adalah Kecamatan Sudimoro. Secara keseluruhan, Kabupaten Pacitan memiliki potensi bahaya cuaca ekstrim kategori kelas sedang. Berikut merupakan tabel luasan KRB cuaca ekstrim.

Tabel 2. 20 Luas Kawasan Rawan Bencana Cuaca Ekstrim

No	Kecamatan	Rendah	Sedang	Tinggi	Total
1	Kecamatan Arjosari	98,75	9.832,75	2.642,91	12.574,40
2	Kecamatan Bandar	10,16	7.410,13	5.004,31	12.424,61
3	Kecamatan Donorojo	77,96	7.378,87	4.641,67	12.098,50
4	Kecamatan Kebonagung	8.527,01	3.945,26	40,51	12.512,78
5	Kecamatan Nawangan	19,90	8.431,04	4.627,54	13.078,48
6	Kecamatan Ngadirojo	1.983,43	5.936,14	1.557,93	9.477,50
7	Kecamatan Pacitan	521,20	3.394,56	3.868,10	7.783,87
8	Kecamatan Pringkuku	6,43	6.290,23	7.407,23	13.703,88
9	Kecamatan Punung	19,03	4.789,36	5.940,90	10.749,28
10	Kecamatan Sudimoro	29,11	5.549,40	1.922,12	7.500,63
11	Kecamatan Tegalombo	23,36	11.293,33	3.564,89	14.881,58
12	Kecamatan Tulakan	188,01	11.101,59	5.264,58	16.554,17
	Total	11.504,36	85.352,65	46.482,68	143.339,69

Sumber: RTRW Kabupaten Pacitan, Tahun 2024-2044

10. Tanah Longsor, potensi di Kecamatan Punung (Kebonsari, Gondosari, Tinatar), semua wilayah Kecamatan Arjosari dan Tegalombo, Kecamatan Tulakan (Kalikuning, Bubakan, Losari), Kecamatan Ngadirojo (Wonokarto, Wonoasri, Nogosari, Wonodadi Kulon, Wonodadi Wetan, Bodag, Tanjung Lor, Pagerrejo, Ngadirojo, Bogoharjo), dan juga di Kecamatan Sudimoro (Sembowo, Klepu, Ketanggung, Karang Mulyo).

2.1.3 Kondisi Demografi

Jumlah dari penduduk Kabupaten Pacitan berdasarkan pada hasil Sensus Penduduk tahun 2023 berjumlah 597,39 ribu jiwa. Kemudian untuk besarnya angka rasio jenis kelamin pada tahun 2023, penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan mencapai sebesar 100,32. Tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Pacitan di tahun 2023 mencapai 430 jiwa/km². Tingkat kepadatan penduduk di 12 kecamatan yang ada cukup beragam, kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan



penduduk tertinggi yaitu Kecamatan Pacitan yang mencapai 1.018 jiwa/km², sedangkan yang terendah pada Kecamatan Donorojo sebesar 236 jiwa/km². Berikut disajikan tabel terkait kondisi demografi Kabupaten Pacitan di tahun 2023:

Tabel 2. 21 Kondisi Demografi Kabupaten Pacitan Tahun 2023

Kecamatan	Penduduk (ribu)	Distribusi Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²	Rasio Jenis Kelamin
Donorojo	38,10	6,38	236	97,92
Punung	32,93	5,51	303	98,44
Pringkuku	37,60	6,29	283	97,98
Pacitan	78,50	13,14	1018	98,28
Kebonagung	46,91	7,85	376	104,06
Arjosari	42,12	7,05	360	101,92
Nawangan	52,56	8,80	424	100,88
Bandar	45,57	7,63	388	101,36
Tegalombo	52,70	8,82	353	100,57
Tulakan	87,17	14,59	539	101,57
Ngadirojo	48,32	8,09	504	99,19
Sudimoro	34,92	5,85	486	100,93
Kabupaten Pacitan	597,39	100,00	430	100,32

Sumber: RTRW Kabupaten Pacitan, Tahun 2024-2044

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui jika jumlah penduduk Kabupaten Pacitan terbanyak berdomisili di Kecamatan Tulakan dengan jumlah mencapai 87,17 ribu jiwa atau sebesar 14,59% dari jumlah penduduk secara keseluruhan. Sedangkan paling sedikit berdomisili di Kecamatan Punung sebanyak 32,93 ribu jiwa atau sebesar 5,51% dari keseluruhan jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Pacitan tahun 2023. Berikut dibawah ini disajikan jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin:

Tabel 2. 22 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pacitan Tahun 2023

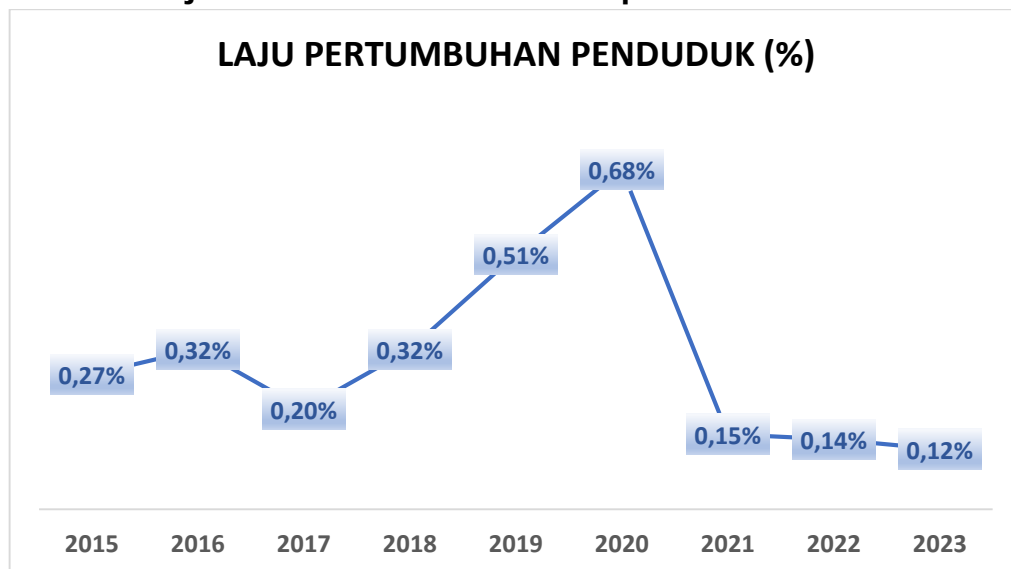
Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Total
0-4	15.740	14.830	30.570
5-9	17.220	16.300	33.520
10-14	20.360	19.090	39.450
15-19	19.350	18.320	37.670
20-24	21.300	20.170	41.470
25-29	21.400	20.030	41.430
30-34	20.500	19.670	40.170
35-39	21.260	20.300	41.560
40-44	21.330	20.600	41.930
45-49	18.700	18.800	37.510

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Total
50-54	23.090	23.370	46.460
55-59	20.550	21.660	42.210
60-64	19.130	19.920	39.050
65<	39.230	45.180	84.400
Kabupaten Pacitan	299.170	298.220	597.400

Sumber: Kabupaten Pacitan dalam Angka, Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin, total penduduk Kabupaten Pacitan tercatat sebanyak 597.400 jiwa, dengan 299.170 laki-laki dan 298.220 perempuan. Distribusi penduduk terbagi dalam berbagai kelompok umur, dengan kelompok umur terbesar adalah penduduk berusia 65 tahun ke atas, yang mencapai 84.400 jiwa, terdiri dari 39.230 laki-laki dan 45.180 perempuan. Sementara itu, kelompok umur yang relatif besar lainnya termasuk penduduk berusia 50-54 tahun dengan total 46.460 jiwa, dan kelompok umur 20-24 tahun yang mencapai 41.470 jiwa. Data ini menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Pacitan tersebar merata di berbagai kelompok umur, namun ada kecenderungan peningkatan jumlah penduduk pada usia tua, terutama di kelompok usia 65 tahun ke atas.

Gambar 2. 6 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pacitan Tahun 2015-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan, 2024

Grafik laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Pacitan dari tahun 2015 hingga 2023 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2015, laju pertumbuhan penduduk berada di angka 0,27% dan mengalami peningkatan menjadi 0,32% pada tahun 2016. Namun, laju pertumbuhan ini menurun menjadi 0,20% pada tahun 2017. Tren pertumbuhan kembali naik pada tahun 2018 dan 2019, masing-masing sebesar 0,32% dan 0,51%. Puncak laju pertumbuhan terjadi pada tahun 2020



dengan angka tertinggi sebesar 0,68%. Setelah itu, laju pertumbuhan mengalami penurunan tajam, menjadi 0,15% pada tahun 2021 dan terus menurun menjadi 0,14% pada tahun 2022 serta 0,12% pada tahun 2023. Penurunan yang berkelanjutan setelah tahun 2020 menunjukkan adanya perlambatan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pacitan dalam beberapa tahun terakhir.

2.1.4 Potensi Sumber Daya

A. Produk Unggulan

Kabupaten Pacitan memiliki potensi produk unggulan sesuai yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Pacitan yakni sebagai berikut:

1. Batu Mulia
2. Batik Tulis Pacitan
3. Kayu Olahan
4. Ikan Olahan
5. Gula Kelapa

B. Pariwisata

Wisata Pantai merupakan salah satu kekuatan sektor pariwisata Kabupaten Pacitan yang akan terus di kembangkan. Tepat di teluk Pacitan terdapat Pantai Teleng Ria dengan garis pantai yang membentang dan ombaknya yang tidak terlalu besar, menjadikan Pantai Teleng Ria kekuatan utama sektor pariwisata di Kabupaten Pacitan. Selain Pantai Teleng Ria terdapat pula Pantai Srau. Pantai Srau berjarak kurang lebih 25 km ke arah barat pusat kota Kabupaten Pacitan. Pantai ini sangat dikenal sebagai lokasi yang sangat cocok untuk arena pancing samudera. Kolaborasi antara pantai berpasir putih dan tebing-tebing yang curam mampu memanjakan setiap wisatawan yang datang ke pantai ini. Alam yang masih asri di pantai ini menjadi keunggulan Pantai Srau sehingga Pantai ini bisa menjadi pilihan wisatawan. Pantai Teleng Ria dan Pantai Srau merupakan contoh dari pantai – pantai yang ada di Kabupaten Pacitan. Tidak hanya pantai, Kabupaten Pacitan juga memiliki destinasi pariwisata berupa goa – goa, salah satunya adalah Goa Gong. Goa yang terletak di Dusun Pule, Desa Bomo, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan merupakan salah satu destinasi pariwisata yang terkenal. Masih banyak lagi destinasi pariwisata yang berpotensi mendukung perekonomian di Kabupaten Pacitan.

C. Cagar Budaya

Menurut UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, menjelaskan bahwa Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang



geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas. Kawasan Cagar Budaya di Kabupaten Pacitan berupa Kawasan Gunung Sewu terletak di Punung (Ds. Wereng, Ds. Punung, Ds. Bomo, Ds. Piton), Donorojo (Ds. Sendang, Ds. Sekar), Pringkuku (Ds. Watukarung, Candi), Kabupaten Pacitan. Pacitan merupakan satu daerah di Jawa Timur yang kaya akan tinggalan masa prasejarah terutama dari kurun waktu Paleolitik dan Mesolitik. Letaknya dalam gugusan kawasan Gunung Sewu menjadikan tempat ini sebagai daerah yang memiliki sebaran situs dengan keragaman budaya yang secara teknologis membentuk suatu garis evolusi dari bentuk-bentuk yang kasar menuju bentuk yang lebih sempurna. Keanekaragaman tersebut mencerminkan sejarah penghunian yang panjang sejak kehadiran manusia pertama kalinya pada tingkatan budaya Paleolitik berlanjut hingga tingkat Mesolitik.

Kawasan Cagar Budaya di Kabupaten Pacitan berupa Kawasan Gunung Sewu yang terletak di Kecamatan Punung, Kecamatan Donorojo, dan Kecamatan Pringkuku.

Kawasan Cagar Budaya di Kabupaten Pacitan termuat dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/106/KPTS/013/2015 tentang Penetapan Satuan Ruang Geografis Kawasan Gunung Sewu Sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Provinsi dan SK Nomor: HK.701/1169/UPT/KKP/2010 tentang Penetapan Goa Tabuhan sebagai Cagar Budaya.

Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.

Selain bangunan, struktur dan situs cagar budaya, juga terdapat Objek yang Diduga Cagar Budaya. Objek yang Diduga Cagar Budaya adalah benda, bangunan, struktur dan/atau lokasi yang diduga memiliki kriteria sebagai Cagar Budaya.

D. Infrastruktur

Dalam mendukung kehidupan perekonomian Kabupaten Pacitan menyediakan sarana dan prasarana yang terus dikembangkan sebagai penyokong arus transportasi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Pacitan telah menyediakan terminal bus yang melayani jalur antar kota dan provinsi. Selain itu pelabuhan kapal tangkap ikan juga telah di siapkan untuk mendorong semakin berkembangnya industri kelautan. Jalur



Alternatif Jawa juga sudah di bangun untuk menghubungkan Kabupaten Trenggalek. Sarana Akomodasi juga telah dikembangkan, hotel dan penginapan terus diarahkan guna menjadikan Pacitan sebagai daerah tujuan wisata yang lengkap. Gelanggang Olahraga dengan skala nasional juga sudah dibangun di Kabupaten Pacitan yang mampu memfasilitasi seluruh kegiatan olahraga bagi masyarakat Kabupaten Pacitan dan sekitarnya. Kabupaten Pacitan juga memiliki PLTU di Kecamatan Sudimoro berdaya 2 X 315 Mega Watt yang diperkirakan mampu membantu supply kebutuhan listrik di Pulau Jawa dan Bali..

E. Perikanan

Kabupaten Pacitan yang merupakan kabupaten yang berbatasan dengan Samudera Hindia di bagian selatan. Kecamatan-kecamatan yang berada di bagian selatan Kabupaten Pacitan sangat berpotensi untuk dikembangkan menjadi kawasan perikanan. Pada kondisi eksisting, sudah berkembang dengan pesat perikanan budidaya berupa tambak dengan komoditas Udang Vanname yang berada di kecamatan-kecamatan tersebut adalah:

1. Kecamatan Donorojo dengan luas 13.200 m²
2. Kecamatan Pringkuku dengan luas 49.252 m²
3. Kecamatan Pacitan dengan luas 45.178 m²
4. Kecamatan Kebonagung dengan luas 16.220 m²
5. Kecamatan Ngadirojo dengan luas 217.559 m²
6. Kecamatan Sudimoro dengan luas 61.079 m²

Selain luasan tambak tersebut, di Kecamatan Tulakan juga sudah ada beberapa investor yang mulai memproses izin untuk usaha tambak di wilayah tersebut.

F. Kehutanan

Pacitan adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur bagian barat, berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten ini memiliki kawasan hutan seluas 23.890,72 Ha. Kabupaten yang didominasi oleh perbukitan (termasuk dalam deretan pegunungan kapur selatan) ini terbagi dalam 12 kecamatan dengan karakter yang cukup berbeda sesuai dengan ketinggian tempat dan iklim mikro yang sedikit berbeda pada setiap tempat. Karena kondisi ketinggian dan iklim yang sedikit berbeda tersebut maka pada tiap lokasi mempunyai jenis tanaman yang bagus untuk jenis tertentu dan kurang bagus untuk jenis yang lain. Masing-masing berbeda satu sama lain sehingga muncul daerah-daerah dengan potensi besar untuk jenis jati seperti Kecamatan Arjosari, Kebonagung & Donorojo dan Punung. Sementara di tempat lain jati kurang bagus atau bahkan tidak bisa tumbuh terutama di daerah yang tinggi. Sengon bisa tumbuh di hampir semua lokasi, yaitu: Tulakan, Bandar, Nawangan, Donorojo, Punung, Pringkuku, Sudimoro dan Ngadirojo. Di daerah Tegalombo sengon kurang bagus. Tanaman akasia paling bagus di daerah Sudimoro, Donorojo, Punung dan Kebonagung. Sedang Mahoni di daerah Bandar, Nawangan,



Arjosari, Punung, Pringkuku dan Kebonagung. Pinus tumbuh di daerah-daerah yang tinggi seperti kecamatan Tulakan, Nawangan, Bandar dan Tegalombo. Oleh karena itu, berdasar karakteristik dan potensi pada masing-masing daerah ini, maka strategi dan pola usaha juga harus berbeda.

G. Kawasan Karst

Bentang alam karst Gunung Sewu merupakan kawasan karst yang cukup luas yang berada di antara Pantai Parangtritis di Kabupaten Gunung Kidul hingga Teluk Pacitan di Kabupaten Pacitan. Bentang alam karst Gunung Sewu melewati 3 kabupaten yaitu Kabupaten Gunung Kidul di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Wonogiri di Jawa Tengah dan Kabupaten Pacitan di Jawa Timur. Penamaan Gunung Sewu dikarenakan terdapat lebih dari 1.000 bukit karst yang tersebar di pesisir selatan Jawa yang melewati 3 kabupaten tersebut. Selain ditemukan banyak bukit karst, di kawasan ini juga terdapat puluhan goa dari yang vertikal hingga horizontal yang cukup menantang untuk dijelajahi ditambah dengan banyaknya pantai karst yang berpasir putih dan desiran ombak yang begitu kencang.

Di Indonesia sendiri terdapat 50 jenis ekosistem, salah satunya adalah ekosistem karst. Ekosistem ini tidak begitu dikenal, meskipun interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan alam karst di daerah Pacitan dan sekitarnya mulai terbentuk ketika batu gamping yang terendapkan di dasar laut, pada kedalaman antara 60-80 m, mulai terangkat ke permukaan sekitar 1,2 juta tahun lalu. Pengangkatan yang berkaitan dengan sifat dinamika bumi itu berjalan secara bertahap, hingga akhirnya seluruh cekungan laut dangkal berubah menjadi daratan sebagaimana dijumpai saat ini. Proses karst pun mulai berkembang, sehingga di permukaan dan di bawah permukaan lapisan batu gamping terbentuk bentang alam karst. Pada saat itulah permukaan kawasan mulai ditumbuhi oleh beberapa jenis vegetasi. Satwa yang hidup pada waktu yang hampir bersamaan tinggal di hutan – hutan tropis lembab yang menghampar di permukaan batu gamping karst.

Adanya kehidupan flora, fauna, dan hominid di Kawasan Karst Gunung Sewu beberapa ratus ribu tahun yang lalu dibuktikan dengan fosil yang diawetkan di dalam lapisan sedimen. Jenis-jenis flora dan fauna yang hidup, tumbuh dan berkembang di kawasan karst, baik yang berukuran mikro maupun makro, merupakan unsur – unsur dasar penyusun keanekaragaman hayati kawasan tersebut. Tingginya nilai keanekaragaman hayati kawasan karst yang banyak dicari dan kawasan dunia merupakan unsur yang tidak dapat di pisahkan dari keragaman nilai nirhayatinya. Interaksi antara unsur hayati dan nirhayati membentuk suatu ekosistem yang unik, baik mikro maupun makro. Terdapatnya kawasan karst di Kabupaten Pacitan berpengaruh terhadap perkembangan destinasi pariwisata. Destinasi pariwisata Kawasan Karst Gunung Sewu di Kabupaten Pacitan Bagian Barat Provinsi Jawa Timur merupakan wilayah yang khas akan wisata alam yang menyajikan banyak fenomena menarik. Hal ini karena sumber daya alam dengan tatanan tektonik yang didominasi



bentuk lahan karst. Formasi Wonosari mempunyai karakteristik Litologi yang terdiri dari batu gamping terumbu, batu gamping berlapis dan batu gamping konglomeratan; bersisipan batu gamping pasir dan napal. Kawasan Karst ini memiliki 10 destinasi pariwisata yang tersebar di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Donorojo, Kecamatan Punung, dan Kecamatan Pringkuku.

2.1.5. Daya Dukung dan Daya Tampung

A. Daya Dukung Permukiman

Daya dukung permukiman adalah kemampuan suatu wilayah dalam menyediakan lahan permukiman untuk menampung jumlah penduduk yang ada untuk bertempat tinggal secara layak. Konsep ini disusun dengan menggunakan pendekatan luas ruang yang layak sebagai permukiman bagi setiap orang. Sama halnya dengan pendekatan pada daya tampung demografis, pendekatan daya dukung permukiman ini lebih ditujukan pada luas kawasan yang cocok sebagai permukiman bukan keseluruhan luas wilayah.

Secara umum, daya dukung permukiman diperoleh dengan cara luas kawasan yang layak untuk kawasan permukiman dibagi dengan jumlah penduduk. Luas kawasan yang layak untuk kawasan permukiman bisa didapatkan dengan dua cara. Cara pertama adalah luas wilayah dikurangi dengan luas kawasan lindung dan luas kawasan rawan bencana. Cara kedua adalah dengan menggunakan hasil analisis kemampuan lahan. Kemampuan lahan dengan kelas I-IV dapat dan layak digunakan untuk permukiman. Kemudian hasil tersebut dibagi dengan koefisien luas kebutuhan ruang/kapita. Menurut SNI 3-1733-2004 kebutuhan ruang/kapita sebesar 26 m²/jiwa.

$$DDPm = \frac{\frac{LPm}{J}}{P}$$

Keterangan:

DDPm : Daya Dukung Permukiman

LPm : Luas Kawasan yang Layak Sebagai Permukiman

JP : Jumlah Penduduk

Kesimpulan:

DDPm > 1, mampu menampung penduduk untuk bermukim

DDPm = 1, terjadi keseimbangan antara penduduk yang bermukim dengan luas wilayah yang ada

DDPm < 1, tidak mampu menampung penduduk untuk bermukim di dalam wilayah tersebut

Dalam menghitung daya dukung permukiman Kabupaten Pacitan, luas kawasan yang layak sebagai permukiman merupakan kelas I-IV hasil analisis kemampuan lahan yang sudah dilakukan sebelumnya. Luas kawasan yang layak untuk permukiman di Kabupaten Pacitan sebesar 559.648.625 m². Jumlah penduduk Kabupaten Pacitan



tahun 2022 sebesar 592.916 jiwa. Maka daya dukung permukiman Kabupaten Pacitan tahun 2022 sebesar 36,30. Nilai daya dukung permukiman diatas 1, sehingga Kabupaten Pacitan pada tahun 2022 mampu menampung penduduk didalamnya untuk bermukim. Perhitungan proyeksi penduduk Kabupaten Pacitan di tahun 2042 sebanyak 875.530 jiwa. Maka daya dukung permukiman Kabupaten Pacitan tahun 2042 bernilai 24,59. Nilai daya dukung permukiman masih diatas 1, sehingga Kabupaten Pacitan pada tahun 2042 mendatang masih mampu menampung jumlah penduduk didalamnya untuk bermukim. Secara rinci, hasil perhitungan daya dukung permukiman Kabupaten Pacitan per Kecamatan dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2. 23 Daya Dukung Permukiman Kabupaten Pacitan

No	Kecamatan	Luas Lahan Layak Permukiman [LPm] (m2)	Jumlah Penduduk [JP]		Daya Dukung Permukiman [DDPm]		Kemampuan Menampung Hingga 2042
			2022	Proyeksi 2042	2022	Proyeksi 2042	
1	Arjosari	19711909,81	42140	62738	17,99	12,08	Masih Mampu
2	Bandar	52056238,84	44855	55743	44,64	35,92	Masih Mampu
3	Donorojo	58128060,42	38058	68330	58,74	32,72	Masih Mampu
4	Kebonagung	59654878,87	47041	93116	48,77	24,64	Masih Mampu
5	Nawangan	39536490,43	52092	117082	29,19	12,99	Masih Mampu
6	Ngadirojo	28174957,78	47634	53890	22,75	20,11	Masih Mampu
7	Pacitan	48318806,62	78865	64850	23,56	28,66	Masih Mampu
8	Pringkuku	86994624,89	33080	58622	101,15	57,08	Masih Mampu
9	Punung	57017408,96	37590	76094	58,34	28,82	Masih Mampu
10	Sudimoro	27605421,25	34512	64482	30,76	16,47	Masih Mampu
11	Tegalombo	25084707,19	52138	68414	18,50	14,10	Masih Mampu
12	Tulakan	57365119,67	84911	139816	25,98	15,78	Masih Mampu
Total		559648624,7	592916	875530	36,30	24,59	Masih Mampu

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2045

B. Daya Dukung Lahan Kawasan Terbangun

Daya dukung lahan untuk kawasan terbangun mempertimbangkan koefisien luas lahan terbangun, luas wilayah, dan luas lahan terbangun, dengan rumus penghitungan sebagai berikut:

$$DDLb = \frac{a * Lw}{LTb}$$

Dimana, LTb = LB+LTp

Keterangan:



DDLb : Daya dukung lahan terbangun

Lw : Luas wilayah (ha)

a : koefisien luas lahan terbangun maksimal yaitu 70% untuk lahan perkotaan sesuai UU Penataan Ruang No. 26 Tahun 2007. Sehingga 30% wajib digunakan untuk RTH. Sedangkan untuk pedesaan asumsi 50% (untuk kepentingan pertanian dan fungsi lindung).

LTb : Luas lahan terbangun (ha)

LB : Luas lahan bangunan (ha)

LTp : Luas lahan untuk infrastruktur seperti jalan, sungai drainase, dan lainnya (ha), dapat diasumsikan 20% dari luas bangunan.

Hasil perhitungan:

DDLb < 1 : daya dukung lahan permukiman terlampaui atau buruk

DDLb 1-3 : daya dukung lahan permukiman bersyarat atau sedang

DDLb > 3 : daya dukung lahan permukiman baik

Penghitungan daya dukung lahan terbangun Kabupaten Pacitan:

Lw : 143.247,45 ha

LB : 24.458,34 ha

LTp : 4.891,67 ha

LTb : 29.350,01 ha

$$\begin{aligned}DDLb &= \frac{a * Lw}{LTb} \\DDLb &= \frac{50\% * 143.247,45}{29.350,01} \\DDLb &= 2,44\end{aligned}$$

DDLb Kabupaten Pacitan secara keseluruhan sebesar 2,44 yang termasuk dalam daya dukung lahan permukiman bersyarat atau sedang. Hal tersebut dimaksudkan bahwa di Kabupaten Pacitan memiliki daya dukung untuk wilayah yang harusnya mulai untuk dibatasi menjadi kawasan terbangun, apalagi untuk kawasan – kawasan yang memang dipertahankan luasan dan fungsinya seperti kawasan – kawasan lindung. Selain menghitung secara keseluruhan kemampuan lahan permukiman yang ada di Kabupaten Pacitan. Distribusi daya dukung lahan permukiman di setiap kecamatan yang ada juga harus diperhatikan karena memiliki daya dukung lahan yang berbeda di setiap kecamatan. Berikut adalah kondisi eksisting



daya dukung lahan untuk bangunan di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Pacitan.

Tabel 2. 24 Daya Dukung Lahan Bangunan Per Kecamatan di Kabupaten Pacitan

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Luas Kawasan Terbangun (Ha)	LTp	LTb	DDLb	Status DDLb
1	Pacitan	12.303,29	1.908,83	381,77	2.290,60	2,69	Bersyarat
2	Arjosari	12.141,54	1.514,02	302,80	1.816,82	3,34	Baik
3	Nawangan	12.482,66	2.714,84	542,97	3.257,81	1,92	Bersyarat
4	Bandar	12.595,86	1.757,35	351,47	2.108,82	2,99	Bersyarat
5	Tegalombo	13.524,42	2.093,52	418,70	2.512,23	2,69	Bersyarat
6	Tulakan	9.381,77	3.260,24	652,05	3.912,29	1,20	Bersyarat
7	Ngadirojo	7.970,22	1.814,13	362,83	2.176,95	1,83	Bersyarat
8	Sudimoro	14.017,01	1.484,23	296,85	1.781,08	3,93	Baik
9	Kebonagung	10.304,50	1.631,88	326,38	1.958,25	2,63	Bersyarat
10	Pringkuku	7.558,23	1.822,32	364,46	2.186,78	1,73	Bersyarat
11	Punung	14.857,19	2.454,89	490,98	2.945,86	2,52	Bersyarat
12	Donorojo	16.110,77	2.002,09	400,42	2.402,50	3,35	Baik
	Jumlah	143.247,4 5	24.458,34	4.891,6 7	29.350,0 1	2,44	Bersyarat

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2045

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, hampir semua kecamatan di Kabupaten Pacitan masuk ke dalam kategori DDLB bersyarat, hanya Kecamatan Arjosari, Sudimoro, dan Donorojo yang termasuk ke dalam kategori DDLB baik. Nilai DDLB bersyarat di mayoritas kecamatan ini menunjukkan bahwa pembangunan kawasan terbangun masih dimungkinkan tetapi dengan mempertimbangkan aspek konservasi. Nilai DDLB paling tinggi berada di Kecamatan Sudimoro yaitu 3,93 dengan status DDLB yang baik bukan berarti pembangunan lahan menjadi terbangun dapat dilakukan maksimal namun juga tetap harus memperhatikan konservasi lingkungan agar dapat tetap menjaga status DDLB pada status baik dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

C. Daya Dukung Air

Status daya dukung air diperoleh dengan cara nilai kebutuhan air total di Kabupaten Pacitan selama 1 tahun dikurangi dengan ketersediaan air yang ada di Kabupaten Pacitan selama 1 tahun. Selain itu, dengan menggunakan metode penghitungan dan rumus yang sama, dihitung pula status daya dukung air per kecamatan, sehingga didapatkan hasil status daya dukung air lebih detail.

$$\text{daya dukung air} = \text{Ketersediaan air per tahun} - \text{kebutuhan air per tahun}$$



Berdasarkan hasil analisis spasial terhadap selisih antara angka kebutuhan air dengan angka ketersediaan air di Kabupaten Pacitan, diperoleh bahwa terdapat 2 Kecamatan yang masuk kategori status daya dukung airnya defisit dengan nilai yang bervariasi, kecamatan tersebut antara lain Kecamatan Donorojo dan Kecamatan Pacitan sedangkan kecamatan lainnya berstatus surplus. Secara rinci, distribusi status daya dukung air dirinci menurut wilayah Kecamatan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 25 Distribusi Status Daya Dukung Air Kabupaten Pacitan Tahun 2023

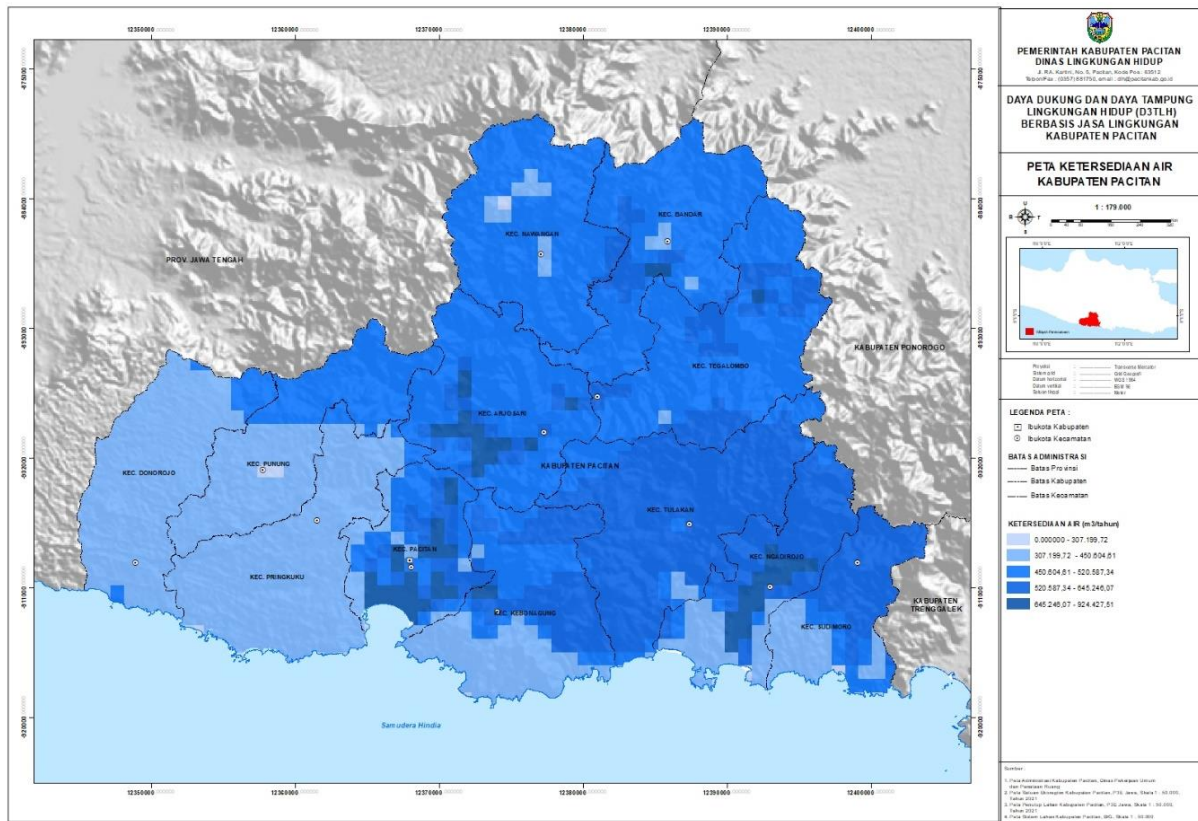
Kecamatan	Ketersediaan (m ³ /th)	Kebutuhan (m ³ /th)	Selisih (m ³ /th)	Surplus/Defisit
Arjosari	168,712,703.09	95,386,806.76	73,325,896.33	Surplus
Bandar	130,028,122.84	105,465,026.15	24,563,096.69	Surplus
Donorojo	124,712,591.40	130,970,521.83	-6,257,930.43	Defisit
Kebonagung	153,018,706.19	39,838,823.47	113,179,882.72	Surplus
Nawangan	139,632,726.69	70,009,667.63	69,623,059.06	Surplus
Ngadirojo	153,300,228.26	71,470,375.39	81,829,852.87	Surplus
Pacitan	152,925,858.74	173,565,608.08	-20,639,749.34	Defisit
Pringkuku	135,698,683.79	70,998,325.35	64,700,358.44	Surplus
Punung	116,947,433.32	106,541,693.22	10,405,740.09	Surplus
Sudimoro	88,910,394.04	31,331,602.32	57,578,791.72	Surplus
Tegalombo	162,249,041.50	94,367,042.14	67,881,999.36	Surplus
Tulakan	211,946,510.66	84,897,721.20	127,048,789.46	Surplus
Total	1,738,083,000.54	1,074,843,213.56	663,239,786.98	

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2045

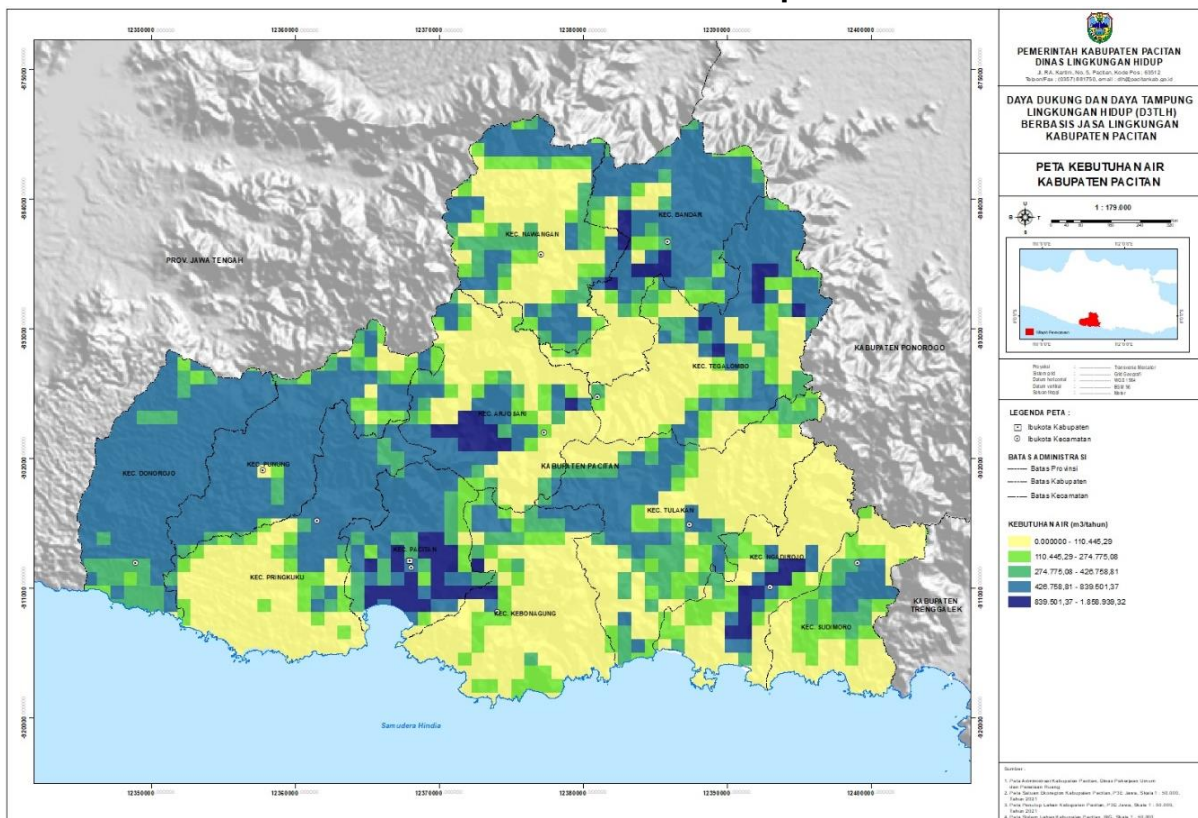
Berdasarkan luas lahan, status daya dukung air di Kabupaten Pacitan memiliki komposisi 73 % untuk lahan dengan status daya dukung air belum melampaui (surplus) dan 27 % untuk lahan dengan status daya dukung air terlampaui (defisit). Walaupun daya dukung air pada mayoritas kecamatan mengalami surplus, ketersediaan air tidak dimanfaatkan dengan optimal. Pasalnya, penggunaan air pada kecamatan tersebut hanya mencapai 70%.

Tabel 2. 26 Luas Status Daya Dukung Air Kabupaten Pacitan Tahun 2023

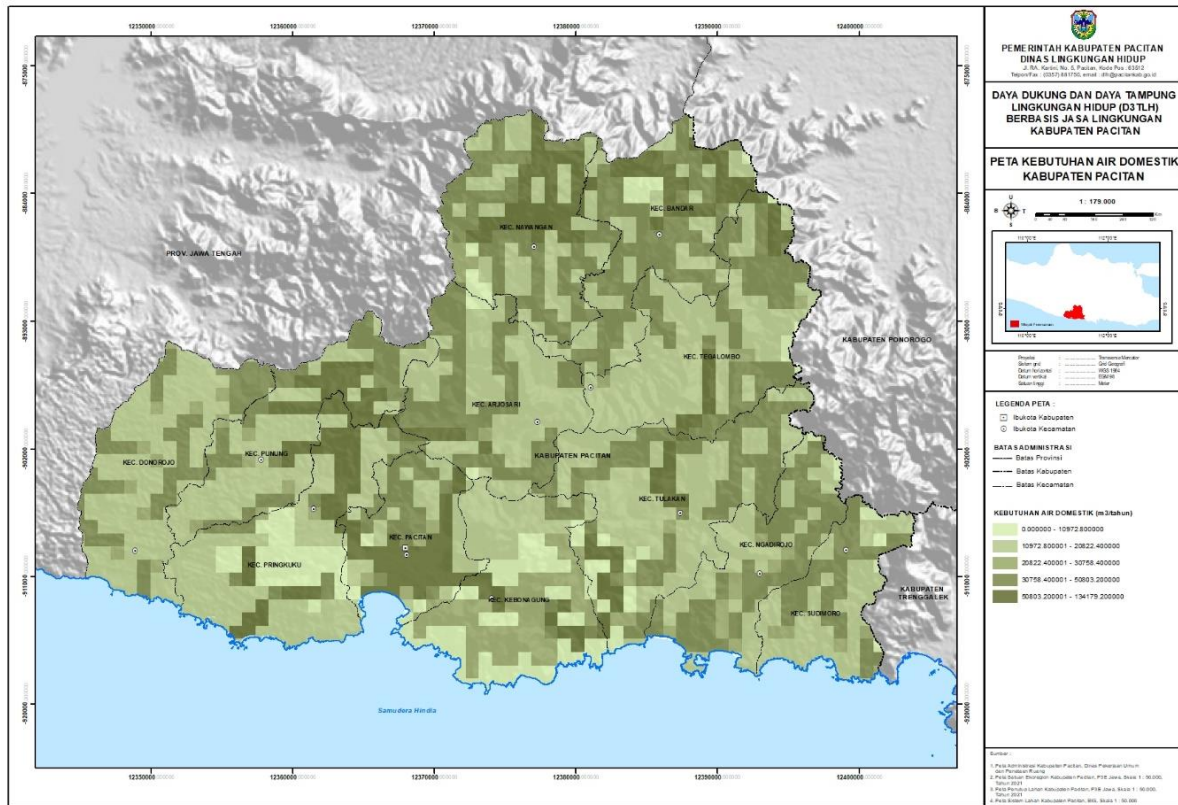
No.	Kecamatan	Luas Status D3T Air (Ha)	
		Surplus	Defisit
1	Arjosari	10,862.03	1,716.67
2	Bandar	8,113.29	4,307.22
3	Donorojo	1,613.18	10,484.84
4	Kebonagung	12,263.18	259.88
5	Nawangan	12,100.04	986.92
6	Ngadirojo	8,385.17	1,038.61
7	Pacitan	3,873.14	3,810.89
8	Pringkuku	8,974.68	4,756.65
9	Punung	3,480.84	7,237.88
10	Sudimoro	7,407.06	-


Gambar 2. 8 Peta Ketersediaan Air Kabupaten Pacitan


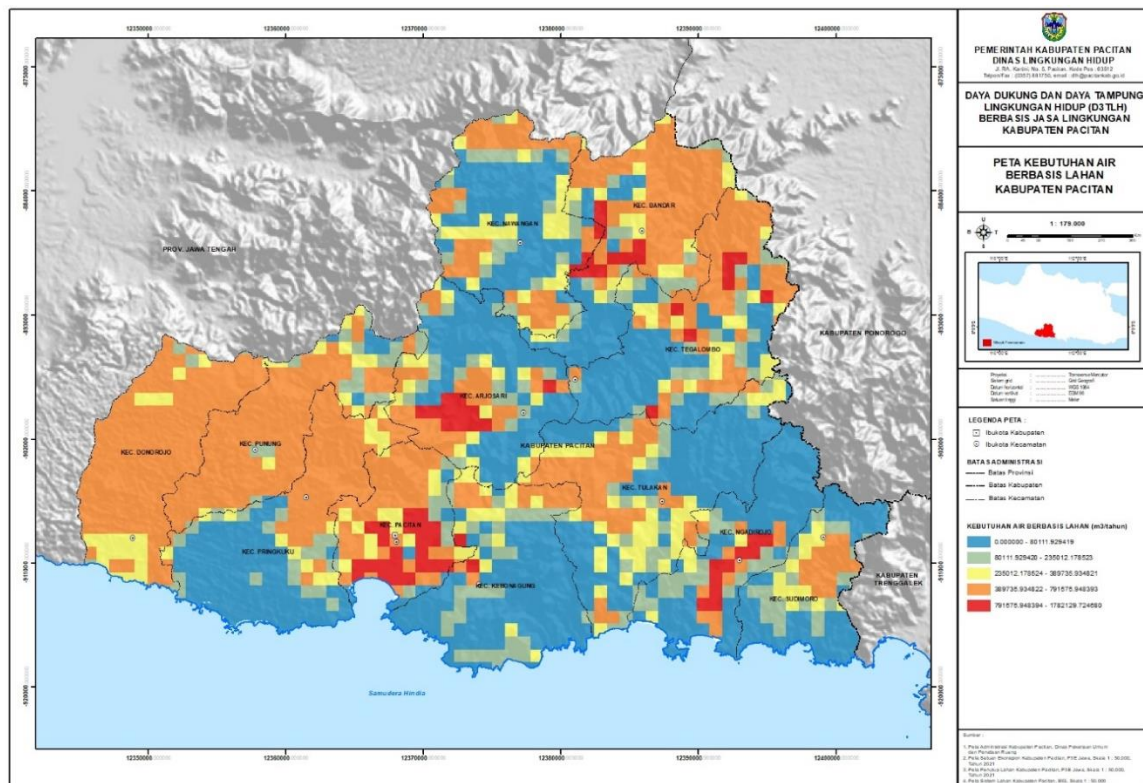
Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2045

Gambar 2. 9 Peta Kebutuhan Air Kabupaten Pacitan


Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2045


Gambar 2. 10 Peta Kebutuhan Air Untuk Domestik


Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2045

Gambar 2. 11 Peta Kebutuhan Air Untuk Kegiatan Ekonomi Berbasis Lahan Kabupaten Pacitan


Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2045



D. Daya Dukung Pangan

Status daya dukung pangan diperoleh dengan cara nilai kebutuhan pangan total di Kabupaten Pacitan selama 1 tahun dikurangi dengan ketersediaan pangan yang ada di Kabupaten Pacitan selama satu tahun. Kemudian dengan menggunakan metode penghitungan/rumus yang sama, dihitung pula status daya dukung pangan di tiap kecamatan.

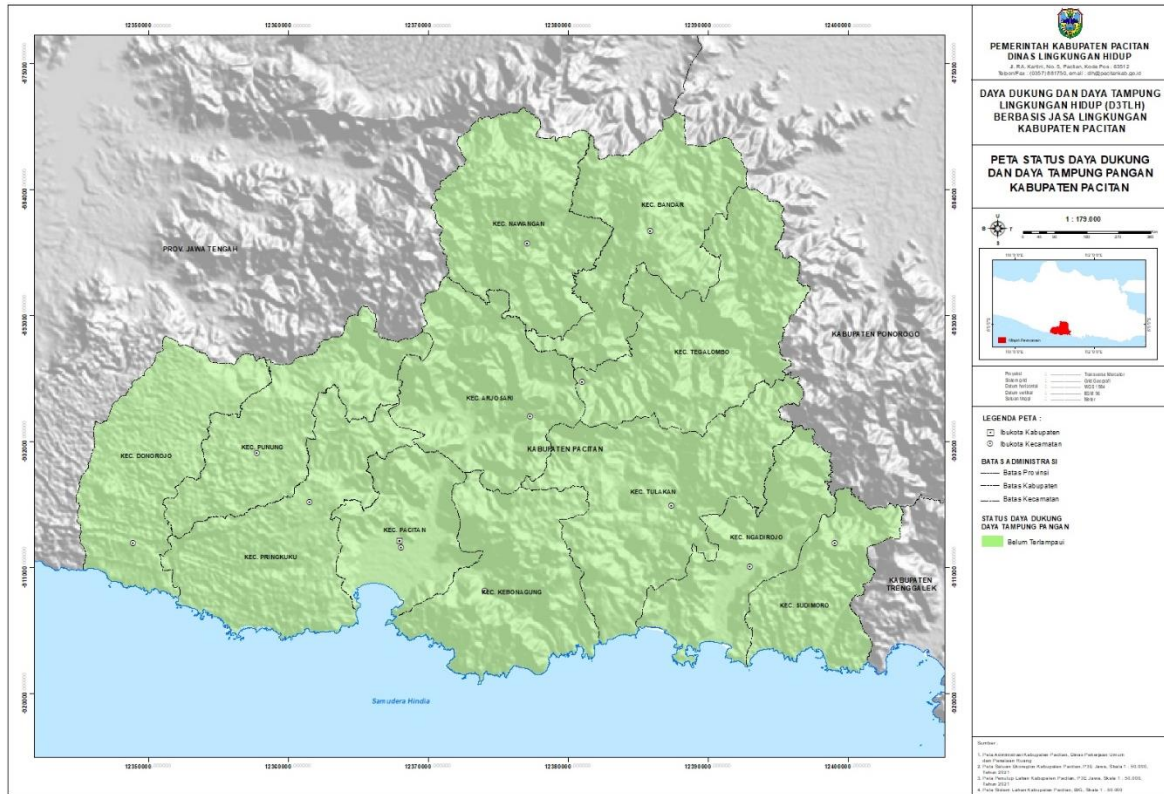
$$\text{daya dukung pangan} = \Sigma \text{ketersediaan pangan} - \Sigma \text{kebutuhan pangan}$$

Berdasarkan hasil analisis spasial terhadap selisih antara angka kebutuhan pangan dengan angka ketersediaan pangan serta luas lahan pada distribusi masing-masing grid di Kabupaten Pacitan, diperoleh hasil luas lahan daya dukung pangan memiliki status terlampaui untuk seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Pacitan. Berdasarkan nilai ketersediaan pangan dan kebutuhan pangan total terdapat nilai surplus sebesar 6.262.821.923.965,19 Kilo Kalori, dengan melihat angka ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa status daya dukung pangan Kabupaten Pacitan Sudah Melampaui atau Surplus. Kecamatan Tulakan merupakan wilayah dengan status daya dukung pangan Terlampaui (surplus) yang terbesar yaitu mencapai 11.55 % dari total luas wilayah Kabupaten Pacitan atau sebesar 16,893.18 ha. Secara rinci terkait distribusi luas lahan status daya dukung pangan di Kabupaten Pacitan disajikan pada tabel dan diagram berikut ini.

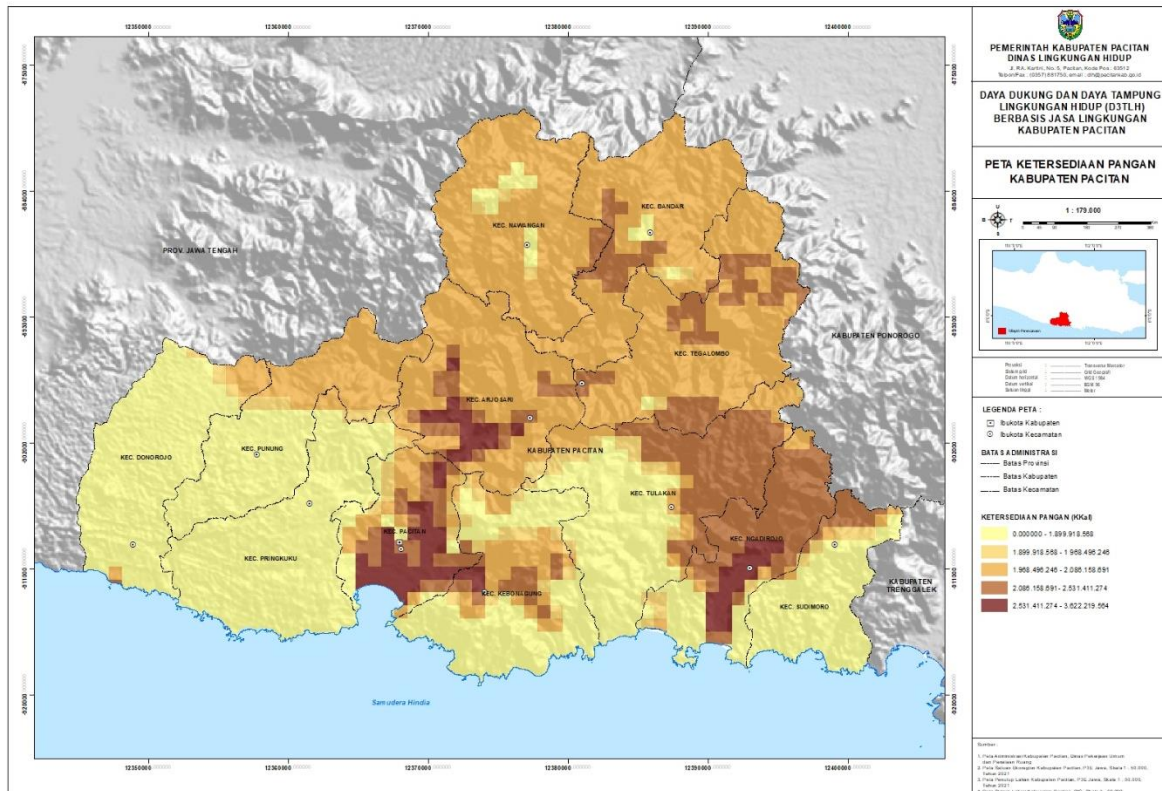
Tabel 2. 27 Luas Status Daya Dukung Pangan Kabupaten Pacitan

Kecamatan	Ketersediaan (Kkal)	Kebutuhan (Kkal)	Selisih (Kkal)	Luas (Ha)
Arjosari	686,553,440,360.95	76,726,577,000.00	609,826,863,360.95	12,827.40
Bandar	531,427,496,911.14	77,950,787,000.00	453,476,709,911.14	12,669.21
Donorojo	558,812,014,692.17	62,957,353,500.00	495,854,661,192.17	12,346.72
Kebonagung	631,930,744,420.12	54,823,419,750.00	577,107,324,670.12	12,771.76
Nawangan	578,027,495,044.37	92,133,573,750.00	485,893,921,294.37	13,335.67
Ngadirojo	603,330,105,878.45	66,374,939,750.00	536,955,166,128.45	9,672.48
Pacitan	651,266,320,329.46	111,966,560,500.00	539,299,759,829.46	7,932.72
Pringkuku	625,434,554,867.81	72,018,077,000.00	553,416,477,867.81	13,980.03
Punung	505,328,236,796.72	74,765,486,750.00	430,562,750,046.72	10,967.42
Sudimoro	349,894,934,091.81	37,924,613,250.00	311,970,320,841.81	7,655.76
Tegalombo	654,603,544,401.20	74,494,748,000.00	580,108,796,401.20	15,179.31
Tulakan	779,324,455,171.00	90,975,282,750.00	688,349,172,421.00	16,893.18
Grand Total	7,155,933,342,965.20	893,111,419,000.00	6,262,821,923,965.19	143,247.27

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2045


Gambar 2. 12 Peta Status Daya Dukung Pangan Kabupaten Pacitan


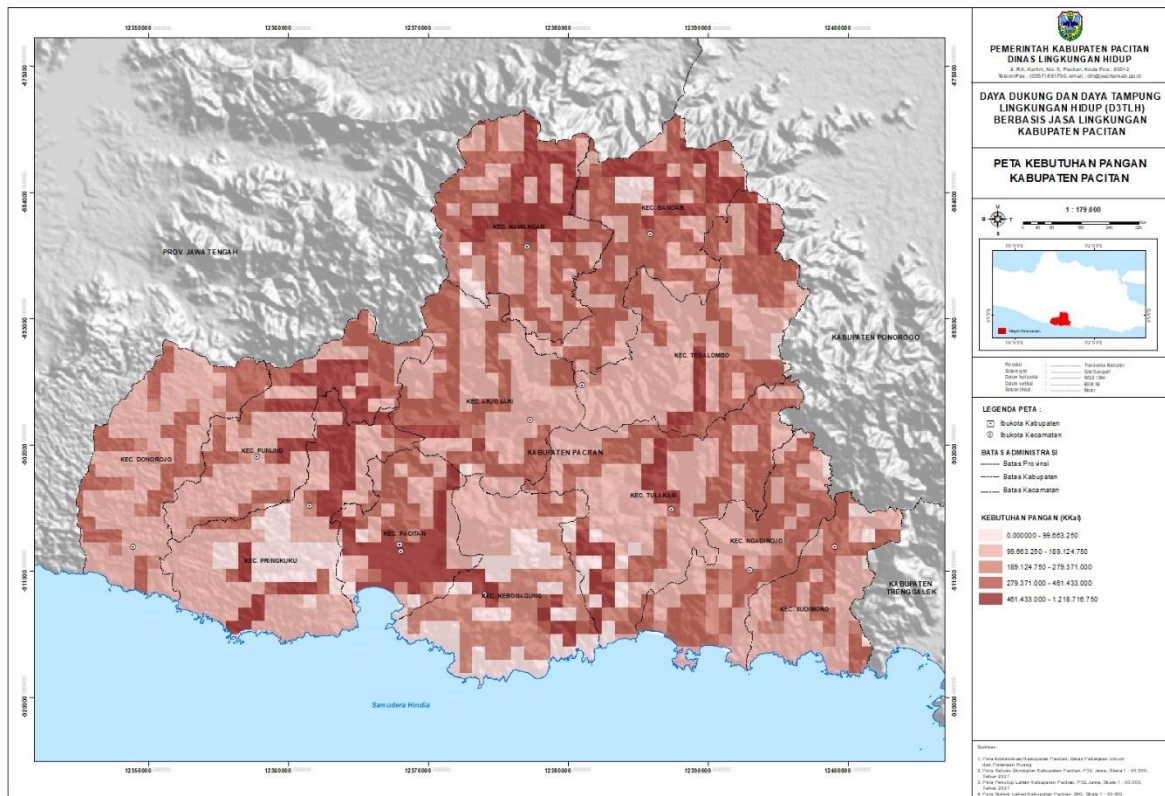
Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2045

Gambar 2. 13 Peta Ketersediaan Pangan Kabupaten Pacitan


Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2045



Gambar 2. 14 Peta Kebutuhan Pangan Kabupaten Pacitan



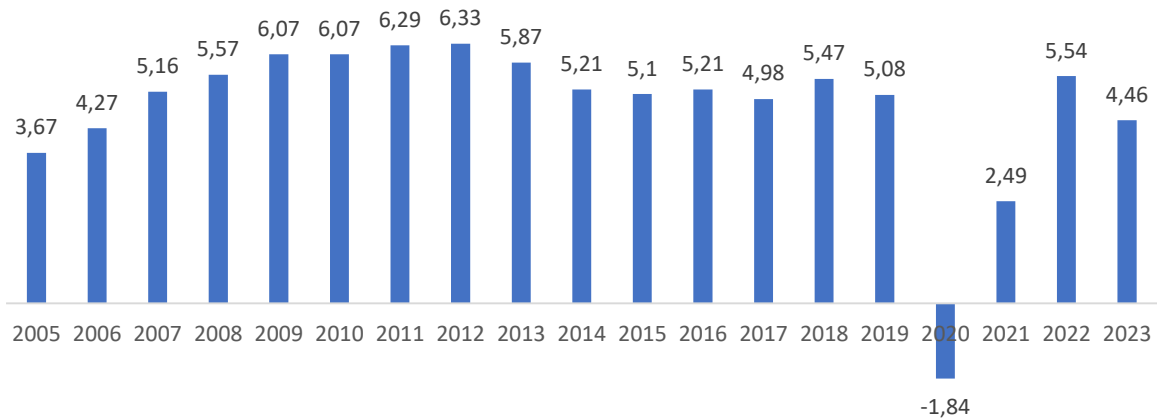
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang dihitung dari PDRB atas dasar harga konstan merupakan rata-rata tertimbang dari tingkat sektoralnya, artinya apabila sebuah sektor mempunyai peranan paling penting dan pertumbuhannya lambat, maka hal ini dapat mengakibatkan terhambatnya tingkat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Sebaliknya, apabila sebuah sektor mempunyai peranan penting dan pertumbuhannya tinggi, maka sektor tersebut dapat menjadi lokomotif yang menarik pertumbuhan ekonomi suatu daerah sehingga total pertumbuhan ekonomi menjadi besar. Dengan kata lain, gejala sekecil apa pun pada sektor yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB akan sangat berpengaruh terhadap pergerakan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Berikut merupakan data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pacitan tahun 2005 sampai 2023.

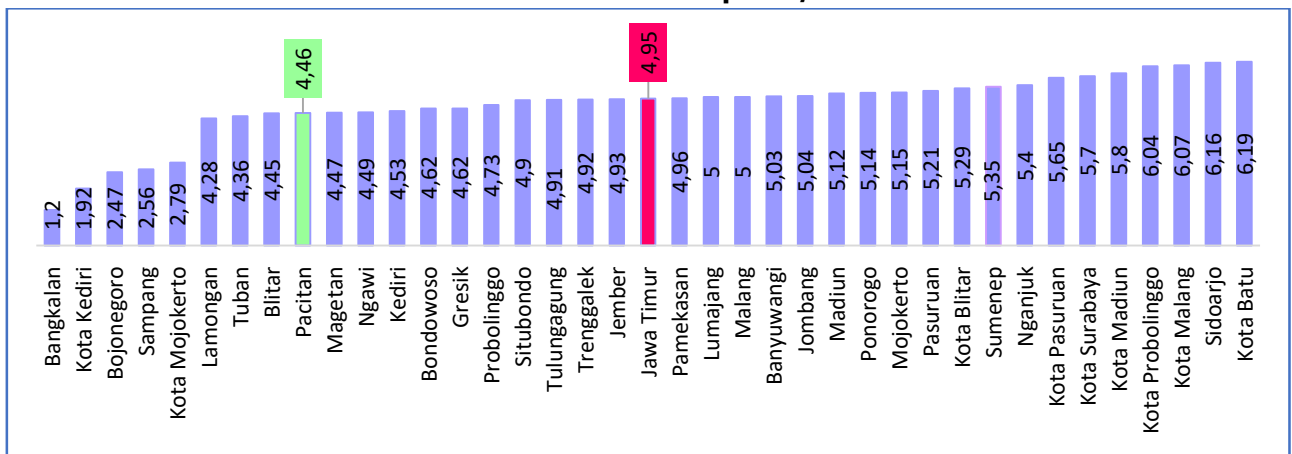
Gambar 2. 15 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pacitan Tahun 2005 - 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, tahun 2024

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pacitan dari tahun 2005 hingga 2023 mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat. Pertumbuhan ekonomi tahun 2005 sebesar 3,67 dan tahun 2023 menjadi 4,46. Pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada tahun 2020 dan 2021 karena adanya pandemi, sedangkan pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2012 dengan pertumbuhan mencapai 6,33.

Gambar 2. 16 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2024

Sedangkan, apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur di tahun 2023 yang mencapai 4,95, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pacitan memiliki capaian yang relatif lebih rendah sebesar 4,46. Capaian pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dibandingkan provinsi ini, disebabkan karena masih rendahnya keunggulan komparatif berbagai sektor perekonomian di Kabupaten Pacitan jika dibandingkan dengan sektor-sektor perekonomian sejenis di level provinsi Jawa Timur. Hal ini tercermin dari hasil analisis *location quotient* (*LQ*) pada 17 sektor PDRB Kabupaten Pacitan 2023 yang mayoritas memiliki nilai di bawah 1 atau berstatus non-basis, yang artinya sektor-sektor tersebut kurang berkembang di Kabupaten Pacitan dibandingkan dengan provinsi.



Tabel 2. 28 Hasil analisis *location quotient* (LQ) pada 17 sektor PDRB Kabupaten Pacitan 2023

NO	SEKTOR PDRB	LQ 2023	KETERANGAN
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,398	BASIS
2	Pertambangan & Penggalian	1,373	BASIS
3	Industri Pengolahan	0,240	NON BASIS
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,128	NON BASIS
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,993	NON BASIS
6	Konstruksi	1,656	BASIS
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,981	NON BASIS
8	Transportasi dan Pergudangan	0,996	NON BASIS
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,422	NON BASIS
10	Informasi dan Komunikasi	1,156	BASIS
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,742	NON BASIS
12	Real Estate	0,966	NON BASIS
13	Jasa Perusahaan	0,365	NON BASIS
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,957	BASIS
15	Jasa Pendidikan	1,872	BASIS
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,576	BASIS
17	Jasa lainnya	1,978	BASIS

Analisis *location quotient* (LQ) ini pada dasarnya berupaya memperbandingkan antara besaran peran masing-masing sektor ekonomi di Kabupaten Pacitan terhadap besaran peran sektor ekonomi yang sama di level Jawa timur. Sembilan (9) dari 17 sektor perekonomian/ sektor PDRB Kabupaten Pacitan memiliki nilai LQ <1, sehingga hal ini berpengaruh pada *positioning* Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pacitan di lingkup Provinsi Jawa Timur yang relatif rendah. Sektor-sektor yang memiliki status non-basis ini perlu perhatian khusus dalam perumusan kebijakan perekonomian jangka panjang Kabupaten Pacitan di masa mendatang. Untuk sektor-sektor seperti Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, serta Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang, intervensi kebijakan jangka panjang dapat difokuskan pada pengembangan infrastruktur dan teknologi. Pemerintah daerah perlu berinvestasi dalam membangun kawasan industri dan meningkatkan akses terhadap energi serta pengelolaan sumber daya air. Selain itu, penting untuk mendorong adopsi teknologi ramah lingkungan dan praktik industri yang efisien, guna menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja. Pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan khusus juga akan membantu meningkatkan daya saing sektor-sektor ini.

Untuk sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estate, serta Jasa Perusahaan, kebijakan jangka panjang harus difokuskan pada peningkatan akses pasar, promosi destinasi, dan penguatan ekosistem bisnis. Misalnya, sektor perdagangan dan transportasi dapat dioptimalkan dengan memperbaiki jaringan transportasi, serta mendorong digitalisasi perdagangan. Di sektor pariwisata, promosi

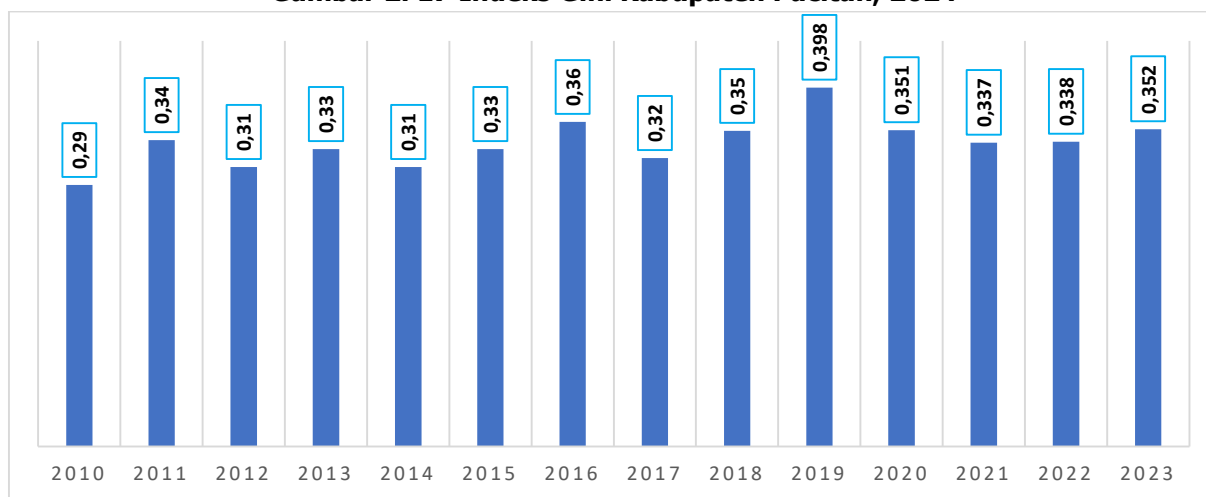


pariwisata Pacitan sebagai destinasi unggulan akan meningkatkan permintaan akan akomodasi dan jasa makan minum. Untuk sektor jasa keuangan dan real estate, perlu ada insentif untuk menarik investasi, sementara untuk jasa perusahaan, pembangunan kluster bisnis yang mendukung *start-up* dan perusahaan kecil akan memperkuat ekosistem kewirausahaan dan inovasi di Pacitan.

2.2.1.2 Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio)

Rasio Gini menggambarkan pemerataan dan ketimpangan secara keseluruhan, mulai dari pendapatan hingga distribusi. Secara metodologi, rasio gini merupakan suatu ukuran pemerataan yang dihitung dengan membandingkan luas antara diagonal dan kurva lorenz (daerah A) dibagi dengan luas segitiga di bawah diagonal. Rasio gini digunakan untuk mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk dengan rentang skor 0 - 1. Indeks 0 menunjukkan pemerataan total, sedangkan 1 terjadi ketidakmerataan atau ketimpangan sama sekali. Berikut merupakan capaian indeks gini Kabupaten Pacitan.

Gambar 2. 17 Indeks Gini Kabupaten Pacitan, 2024

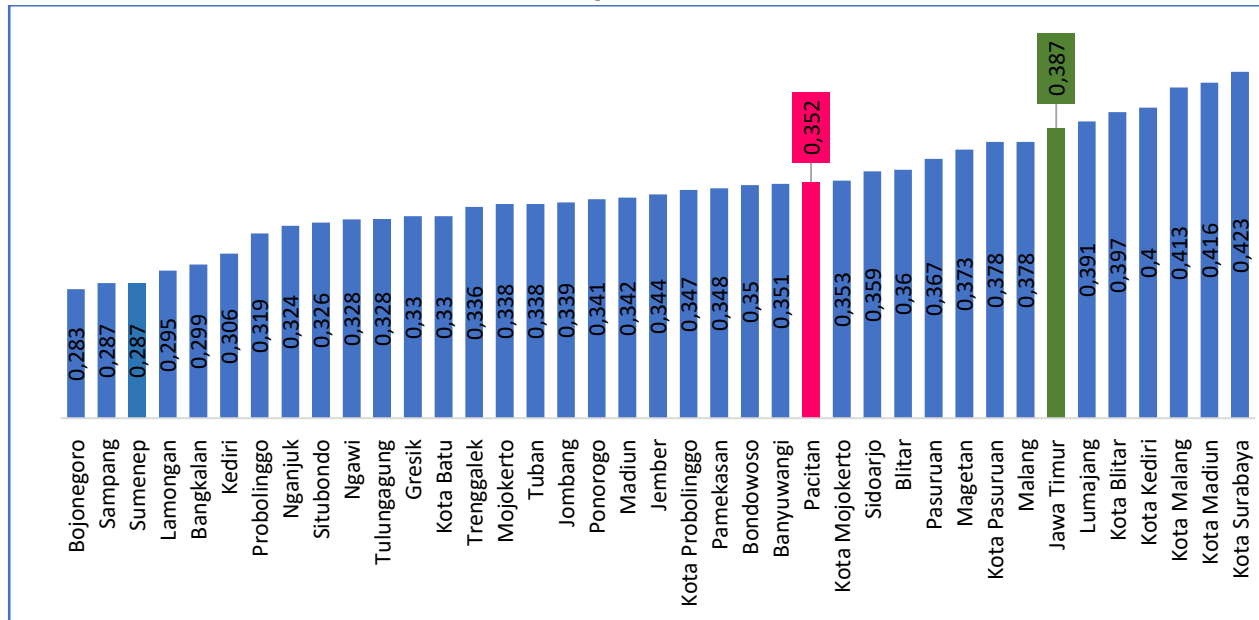


Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Tahun 2024

Indeks Gini sendiri mulai diukur pada tahun 2010 dengan capaian angka Gini rasio 0,29 yang kemudian meningkat menjadi 0,338 di tahun 2022. Capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan 0,48 yang artinya ketimpangan semakin meningkat dari tahun 2005 hingga 2022. Angka ketimpangan tertinggi terjadi tahun 2019 dengan ketimpangan mencapai 0,398. Sedangkan di tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 0,352 dan menjadi angka tertinggi semenjak tahun 2021. Apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota di Jawa Timur, Kabupaten Pacitan termasuk dalam kabupaten/kota dengan indeks gini di bawah rata-rata Jawa Timur. Berikut merupakan capaian indeks Gini pada kabupaten/kota di Jawa Timur.



Gambar 2. 18 Gini Rasio Kabupaten / Kota di Jawa Timur Tahun 2023



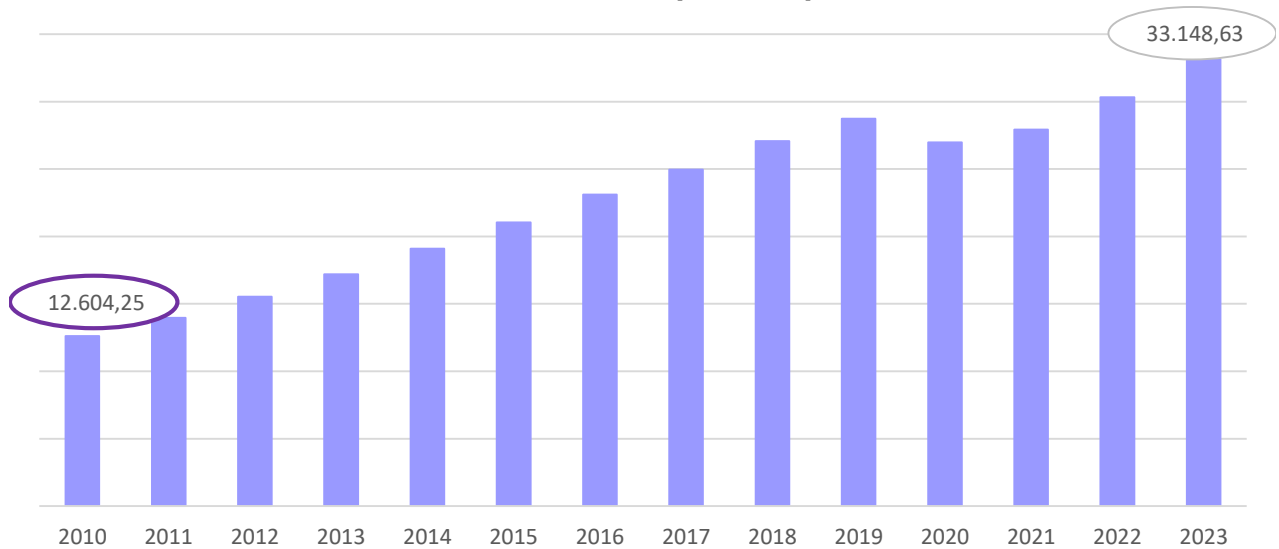
Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Tahun 2024

2.2.1.3 PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. Perhitungan dapat diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan. Data yang tersaji dalam bentuk ini merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah. Adapun data PDRB per kapita Kabupaten Pacitan sebagai berikut:



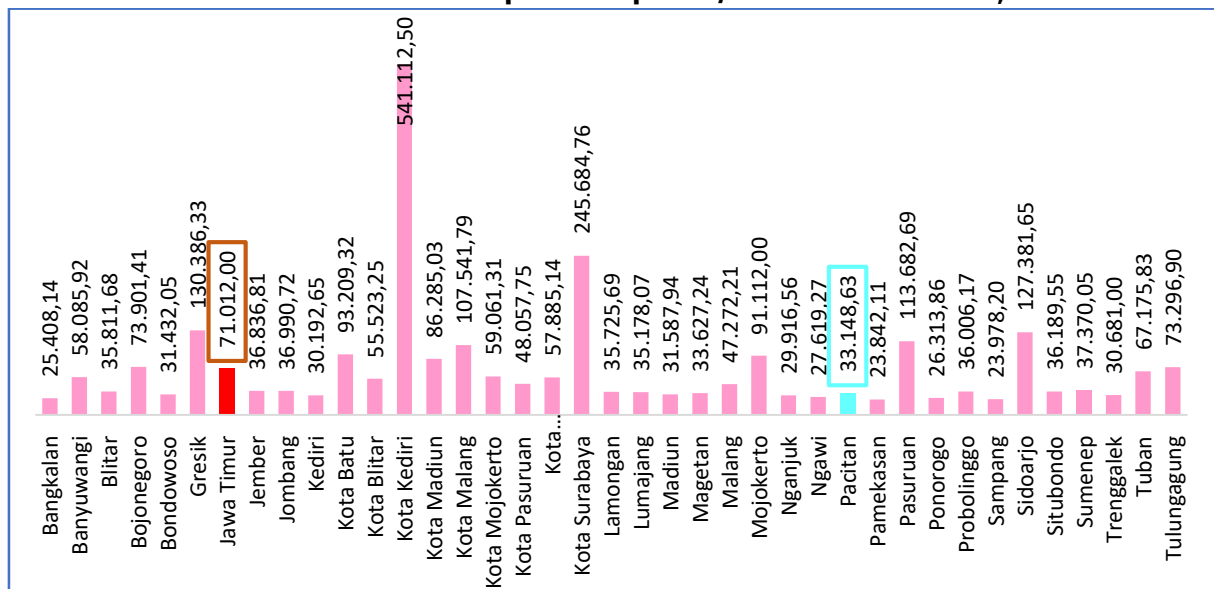
Gambar 2. 19 PDRB Per Kapita Kabupaten Pacitan



Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Tahun 2024

PDRB Per Kapita Kabupaten Pacitan dari tahun 2010 hingga 2023 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tahun 2010, PDRB per kapita sebesar 12.604.25 sedangkan tahun 2023 mencapai 33.148.63 yang artinya terjadi peningkatan sebesar 20.544,38. Berdasarkan capaiannya, Kabupaten Pacitan merupakan kabupaten/kota dengan PDRB Per Kapita di bawah Jawa Timur. Berikut merupakan capaian PDRB per kapita pada kabupaten/kota di Jawa Timur.

Gambar 2. 20 PDRB Per Kapita Kabupaten / Kota di Jawa Timur, 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Tahun 2024

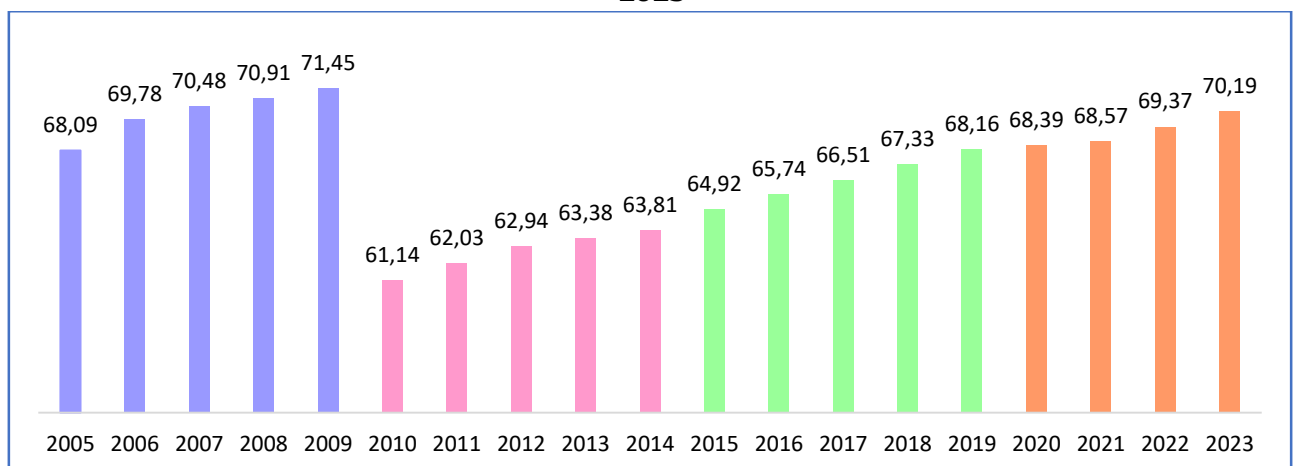


2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial dan Budaya

2.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu Kesehatan, Pendidikan dan Standar hidup layak. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah, oleh karena itu IPM menjadi salah satu indikator Makro dalam Evaluasi Kinerja RPJPD. Dalam mengukur IPM maka harus melihat 3 dimensi yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. IPM mengalami 2 kali perubahan metode sejak di hitung pada tahun 1990, adapun perubahannya yakni di tahun 1990 komponen IPM yang digunakan Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Produk Domestik Bruto per kapita dan menggunakan metode agregasi dengan rata-rata aritmatik. Sedangkan perubahan ke 2 di tahun 2010 UNDP mengubah metodologi dengan mengganti komponen perhitungan IPM yang digunakan yakni Angka Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah dan Produk Nasional Bruto per kapita serta menggunakan metode agregasi dengan rata-rata geometrik. Oleh sebab itu terdapat capaian IPM yang anomali antara tahun 2005-2009 dengan capaian IPM tahun 2010-2023. Adapun data IPM tahun 2005 hingga 2023 Kabupaten Pacitan sebagai berikut:

Gambar 2. 21 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pacitan Tahun 2005 – 2023



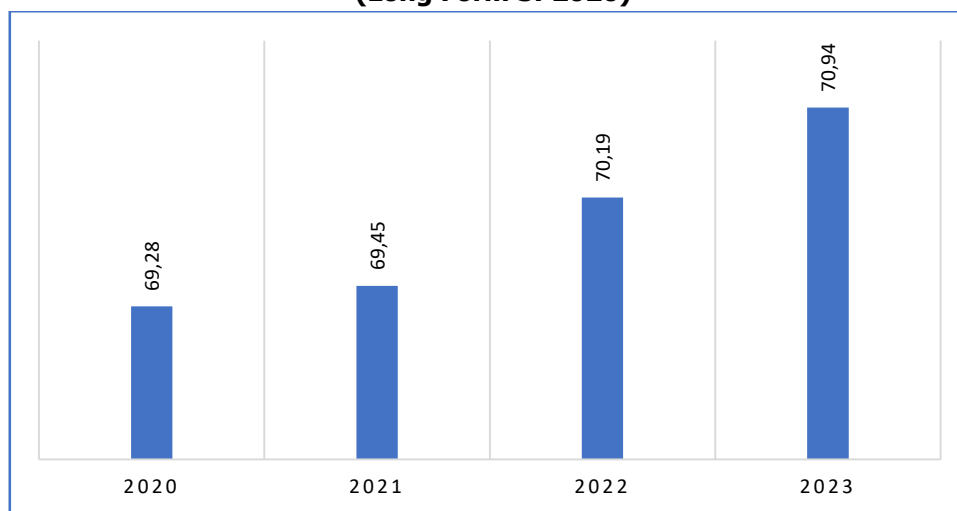
Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur

Pada grafik di atas, tahun 2005 hingga 2009 angka capaian IPM di Kabupaten Pacitan menggunakan metodologi lama yang perhitungannya didasarkan dengan angka melek huruf serta PDB per kapita, sedangkan di tahun 2010 hingga 2023 menggunakan metodologi terbaru yang didasarkan dengan rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah dan PNB per kapita. Melihat capaian IPM di tahun 2010 hingga



2023 terdapat peningkatan yang cukup konsisten. Hal ini menggambarkan bahwa IPM Kabupaten Pacitan setiap tahunnya bertumbuh dengan semakin baiknya segi pendidikan, kesehatan masyarakat dan standar hidup layak masyarakat Kabupaten Pacitan. Selain itu, perkembangan dimensi pembentuk IPM juga mengalami perubahan pada sumber data umur harapan hidup saat lahir yang menggunakan hasil *longform* SP2020. Sehingga angka IPM Tahun 2020 hingga 2023 terdapat perubahan apabila dibandingkan dengan data BPS di atas.

**Gambar 2. 22 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pacitan tahun 2020-2023
(Long Form SP2020)**

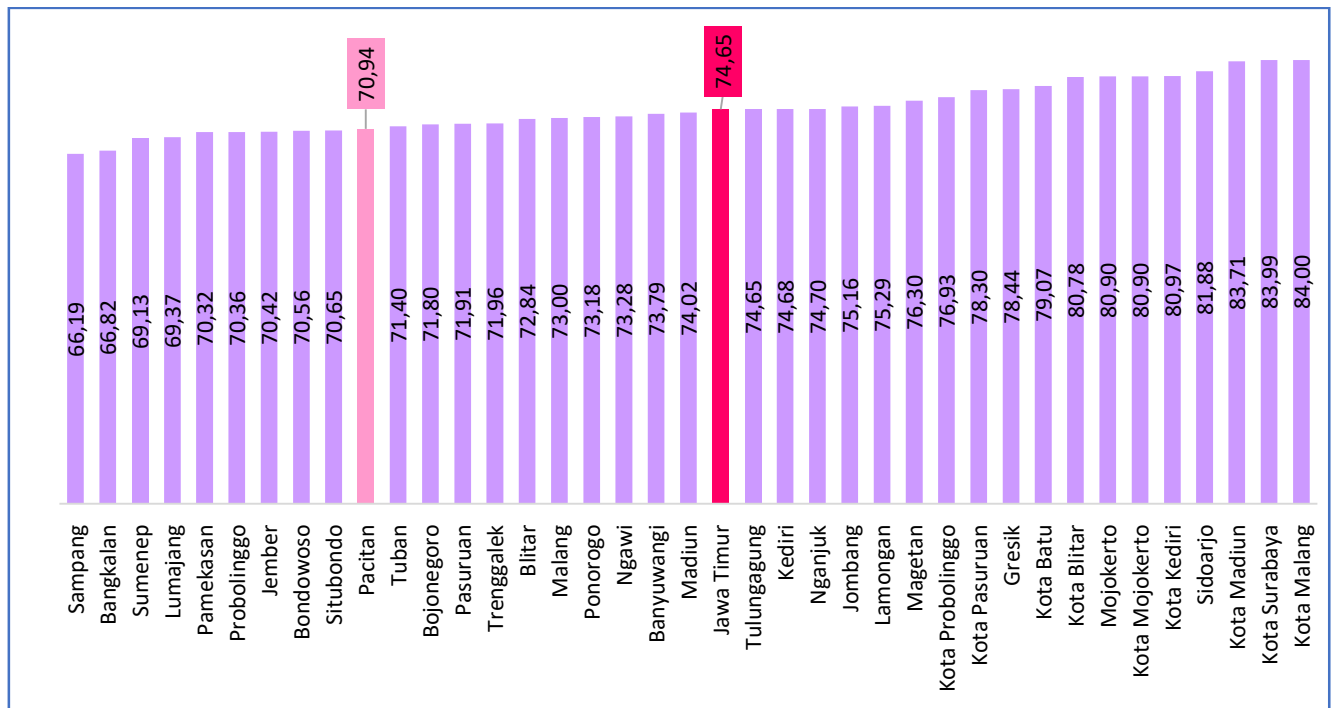


Sumber: Dokumen Berita Resmi Statistik, BPS Kabupaten Pacitan, 2024

Tahun 2023, IPM Kabupaten Pacitan yang menggunakan UHH *longform* SP2020 mengalami peningkatan yang cukup baik setiap tahunnya. Oleh karena itu capaian IPM Kabupaten Pacitan, apabila melihat dari data BPS Provinsi yang menggunakan metode baru maka dapat disajikan grafik di bawah ini dengan pembandingan Kabupaten/Kota di Jawa Timur (*Long Form*) Tahun 2023.



Gambar 2. 23 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten / Kota di Jawa Timur (*long form*) Tahun 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pacitan pada tahun 2023 yang sebesar 70,94, lebih rendah dibandingkan dengan capaian provinsi Jawa Timur yang mencapai 74,65, mencerminkan adanya tantangan dalam beberapa aspek pembangunan di Pacitan, salah satunya adalah rendahnya daya beli masyarakat. Daya beli, yang merupakan salah satu komponen penting dalam penghitungan IPM, sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan masyarakat, struktur ekonomi, serta akses terhadap peluang ekonomi. Di Kabupaten Pacitan, sektor-sektor ekonomi yang dominan, seperti pertanian, masih didominasi oleh usaha kecil dengan nilai tambah yang rendah, sehingga kontribusi sektor ini terhadap peningkatan pendapatan masyarakat juga terbatas. Kondisi ini diperparah dengan minimnya investasi di sektor-sektor produktif yang memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat.

Rendahnya daya beli ini juga mencerminkan keterbatasan akses masyarakat Pacitan terhadap pekerjaan yang memberikan upah layak dan stabilitas ekonomi. Keterbatasan ini mungkin disebabkan oleh kurangnya diversifikasi ekonomi dan rendahnya tingkat pendidikan serta keterampilan tenaga kerja, yang berdampak pada kesempatan kerja yang lebih terbatas dibandingkan dengan wilayah lain di Jawa Timur. Akibatnya, banyak penduduk Pacitan yang hanya memiliki akses terhadap pekerjaan dengan pendapatan yang rendah, yang secara langsung menurunkan daya beli mereka. Kondisi ini menghambat kemampuan masyarakat untuk mengakses barang dan jasa yang lebih baik, seperti kesehatan dan pendidikan, yang juga berperan dalam membentuk IPM. Tanpa intervensi yang fokus pada peningkatan pendapatan dan diversifikasi ekonomi, kesenjangan dalam daya beli ini akan terus

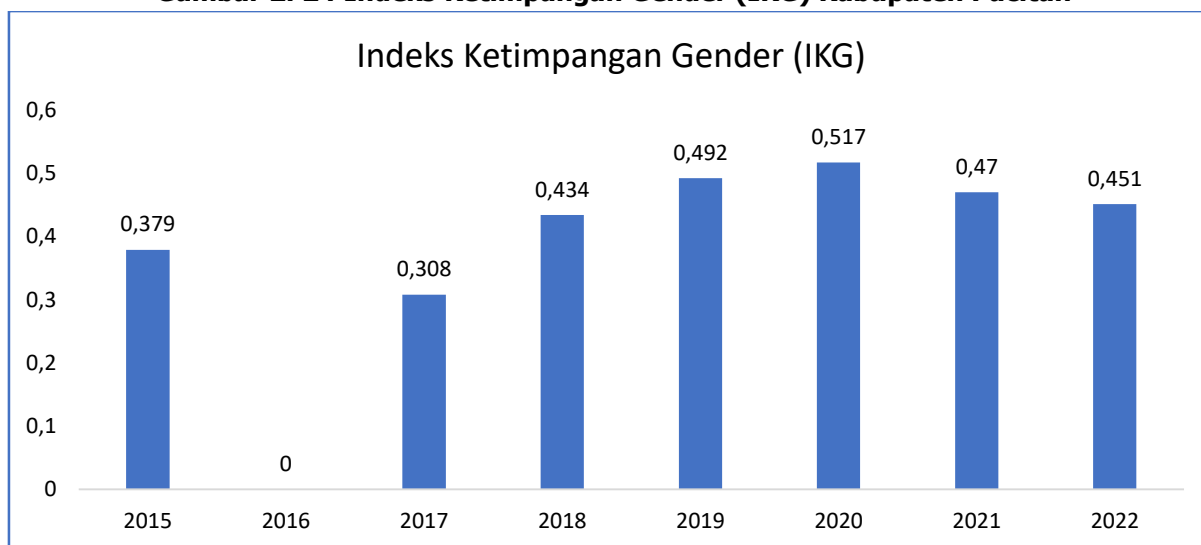


menjadi faktor yang menghambat peningkatan IPM Pacitan menuju angka yang setara dengan rata-rata provinsi.

2.2.2.2 Indeks Ketimpangan Gender.

Ketimpangan gender merupakan kondisi dimana perempuan dan laki-laki tidak memiliki kesetaraan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan dan politik. Ketimpangan gender dapat diukur menggunakan Indeks Ketimpangan Gender (IKG). Ketimpangan gender masih sangat signifikan di banyak negara, termasuk di Indonesia, dan memerlukan upaya serius untuk menguranginya. Masuknya kesetaraan gender sebagai salah satu tujuan pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) mencerminkan pengakuan secara global bahwa pembangunan berkelanjutan tanpa memerhatikan kesetaraan gender adalah hal yang tidak mungkin. Kesetaraan gender dipandang bukan hanya sekedar pemenuhan hak dasar bagi setiap manusia. Namun lebih daripada itu, kesetaraan gender merupakan suatu pilar penting untuk mewujudkan kehidupan yang lebih sejahtera. Kondisi ini menjamin bahwa tidak ada potensi sumber daya yang ada yang tidak termanfaatkan seoptimal mungkin. Dengan kata lain, kesetaraan gender mendorong suatu negara mengalokasikan seluruh sumber daya yang ada ke titik optimalnya, tidak ada satupun potensi yang ada dilemahkan. Berikut merupakan capaian indeks ketimpangan gender Kabupaten Pacitan:

Gambar 2. 24 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Pacitan



Sumber: Dokumen Ketimpangan Gender BPS, 2022

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kabupaten Pacitan telah mengalami perubahan signifikan dari tahun 2015 hingga 2022. Pada tahun 2015, indeks ketimpangan gender di Kabupaten Pacitan sebesar 0,379. Angka ini menunjukkan bahwa masih ada ketimpangan yang signifikan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan, dan akses ke sumber daya. Pada tahun 2020, indeks ketimpangan gender mencapai 0,517. Penambahan ini menunjukkan bahwa ketimpangan antara laki-laki dan perempuan semakin parah.

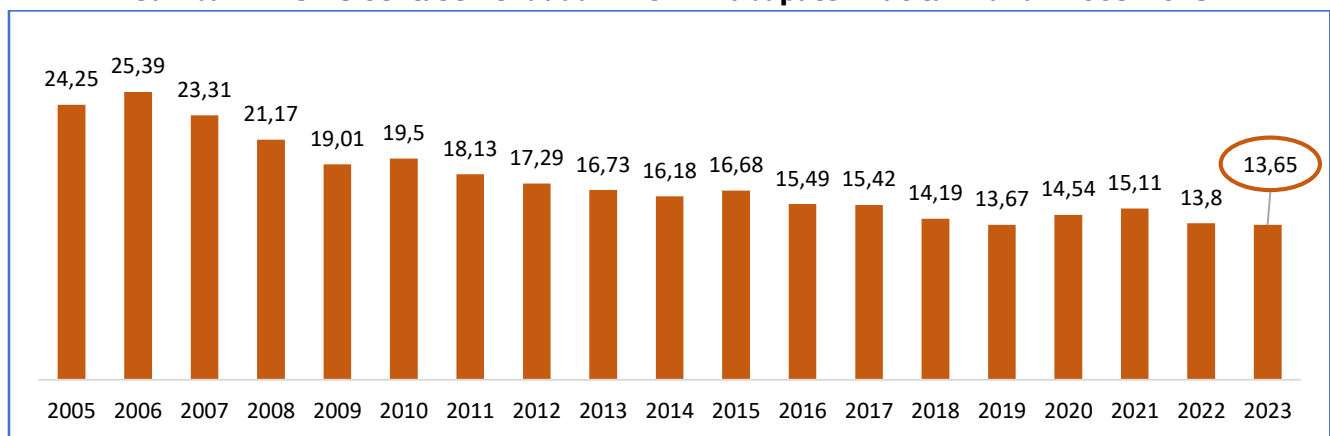


Perubahan dalam situasi ekonomi global dan lokal mungkin berkontribusi pada peningkatan ini. Sedangkan pada tahun 2022, indeks ketimpangan gender mencapai 0,451. Penurunan ini menunjukkan bahwa ada kemajuan dalam mengurangi ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Namun, masih ada permasalahan yang perlu diatasi untuk mencapai kesetaraan yang lebih tinggi.

2.2.2.3 Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan dari sisi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Sedangkan Penduduk miskin ialah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan daerah. Kemiskinan di Kabupaten Pacitan pada tahun 2005-2023 sebagai berikut:

Gambar 2. 25 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2023

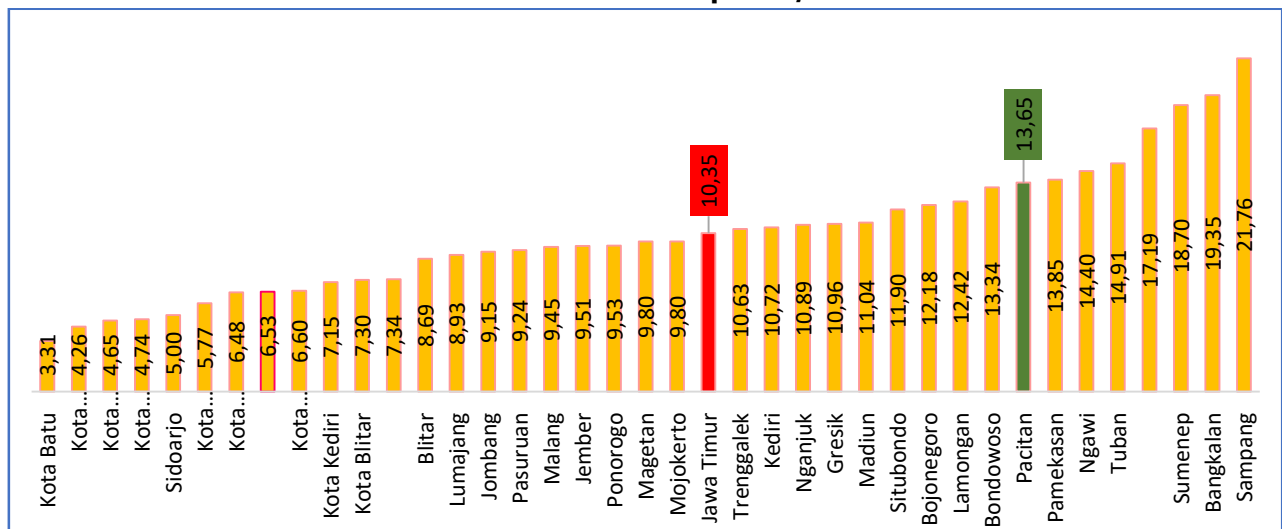


Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2024

Angka Kemiskinan Kabupaten Pacitan dari Tahun 2005 hingga 2023 mengalami penurunan yang cukup konsisten hingga mencapai nilai penurunan sebesar 10,6 poin, yang artinya Kabupaten Pacitan cenderung mengalami penurunan kemiskinan yang cukup signifikan dalam kurun waktu 18 tahun. Menurunnya kemiskinan secara konsisten ini merupakan buah dari implementasi strategi penanggulangan kemiskinan yang optimal dalam menurunkan beban pengeluaran penduduk miskin, meningkatkan pendapatan penduduk miskin serta mengentaskan kemiskinan yang spesifik menyasar pada wilayah yang menjadi kantong-kantong kemiskinan di Kabupaten Pacitan



Gambar 2. 26 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten / Kota di Jawa Timur Tahun 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2024

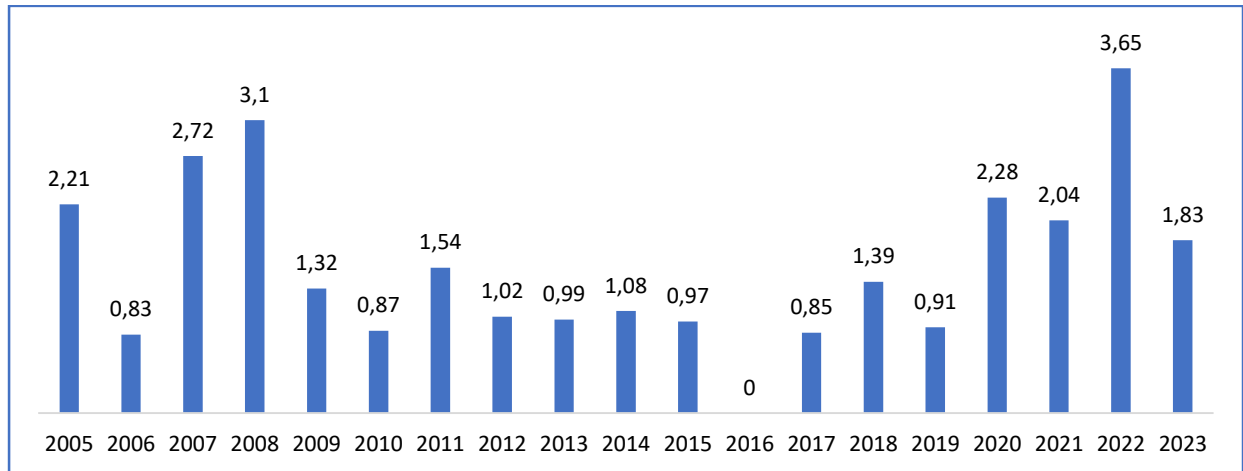
Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Jawa Timur, angka kemiskinan Kabupaten Pacitan relatif lebih tinggi di tahun 2023. Posisi kemiskinan yang relatif tinggi tersebut diindikasikan karena lemahnya daya beli masyarakat Kabupaten Pacitan yang pada akhirnya berdampak pada perhitungan rata-rata pengeluaran per kapita masyarakat Kabupaten Pacitan di tahun berkenaan. Hal ini tercermin dari gambaran pengeluaran per kapita Provinsi Jawa Timur di masa lalu yang mencatatkan pengeluaran riil per kapita yang telah mencapai Rp 11.707.000 di tahun 2021 sedangkan Kabupaten Pacitan hanya 8.887.000.

2.2.2.4 Angka Pengangguran

Angka Pengangguran atau direpresentasikan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan. Atau yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mempersiapkan usaha. Perhitungan TPT adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja dihitung penduduk usia produktif yaitu yang berusia 15 tahun hingga 64 tahun adalah penduduk yang digolongkan mampu memproduksi barang dan jasa. Sehingga mereka diharapkan dapat menanggung penduduk usia tidak produktif. Sayangnya penduduk usia produktif ini tidak seluruhnya berpenghasilan. Berikut merupakan data Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pacitan:



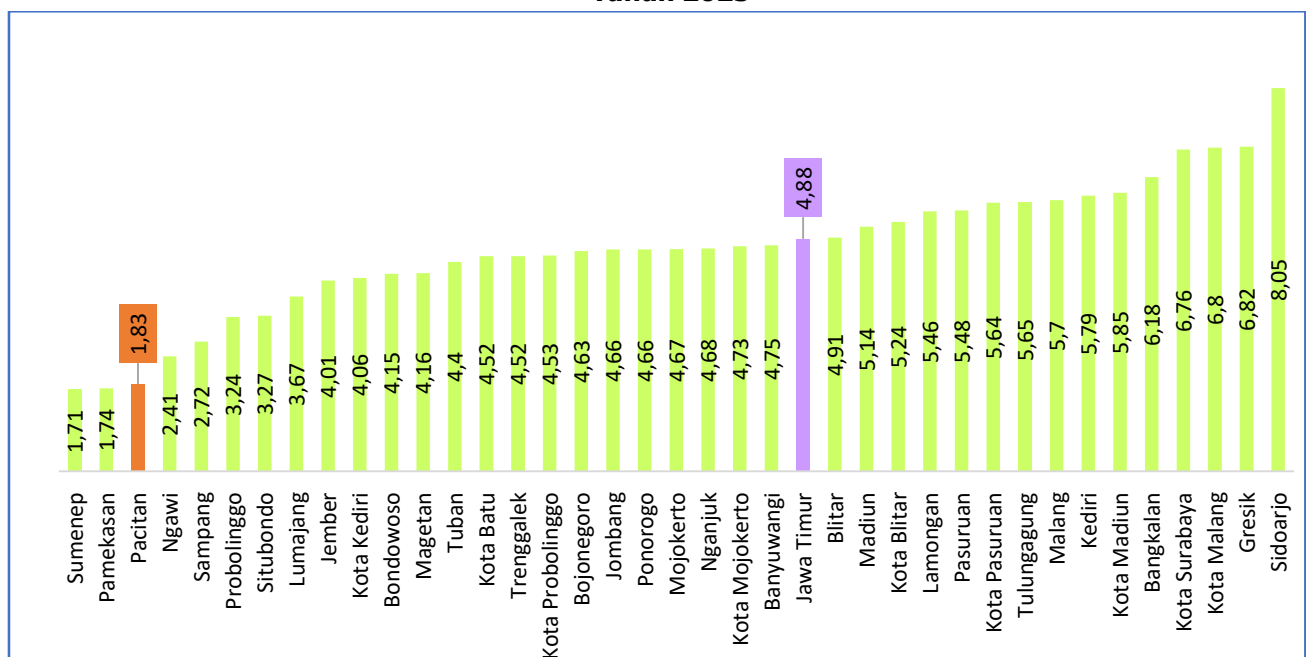
Gambar 2. 27 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pacitan Tahun 2005 – 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2024

Data TPT Kabupaten Pacitan menunjukkan adanya penurunan dari tahun 2005 dengan tahun 2023. Di tahun 2005 TPT Kabupaten Pacitan sebesar 2,21 sedangkan di tahun 2023 menurun menjadi 1,83. Akan tetapi dalam 18 tahun terakhir tersebut tahun 2022 merupakan angka tertinggi TPT yakni sebesar 3,65. Dibandingkan dengan Kabupaten / Kota di Jawa Timur, Kabupaten Pacitan termasuk dalam kategori kabupaten / kota dengan TPT dibawah Jawa Timur. Kondisi ini menunjukkan Kabupaten Pacitan pengangguran mengalami penurunan dan terdapat penyerapan tenaga kerja yang maksimal di tahun 2023.

Gambar 2. 28 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten / Kota di Jawa Timur Tahun 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur



2.3 Aspek Pelayanan Umum

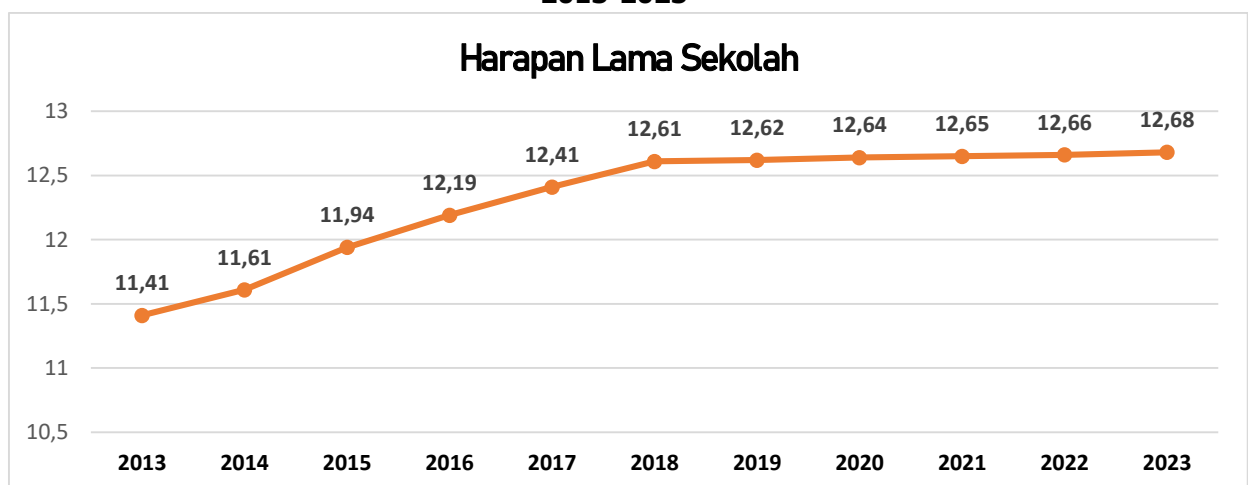
2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar

2.3.1.1 Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama Pembangunan suatu negara. Pendidikan menjadi salah satu urusan wajib dasar yang diampu oleh setiap daerah yang memiliki wilayah otonominya sendiri. Pendidikan merupakan salah satu dimensi yang membangun Indeks Pembangunan Manusia. Pendidikan saat ini merupakan salah satu unsur yang membantu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dengan meningkatnya pendidikan masyarakat maka peluang pekerjaan yang ada akan semakin beragam. Akan tetapi saat ini masih banyak permasalahan terkait Pendidikan yang harus ditangani di Indonesia. Beberapa masalah Pendidikan yang dihadapi di Indonesia tidak jauh dari permasalahan yang ada di setiap daerah di Indonesia salah satunya adalah Kabupaten Pacitan.

Saat ini pasca pandemi Covid-19 beberapa masyarakat masih belum pulih dengan kondisi perekonomiannya. Selain itu, kenaikan harga makanan pokok juga memberikan dampak tersendiri bagi masyarakat. Oleh karena itu, sebagian kecil masyarakat tidak menyekolahkan anaknya ke jenjang pra sekolah. Selain itu, karena bergesernya persepsi masyarakat, saat ini orang tua memilih menyekolahkan anak mereka di sekolah yang berbasis agama dibandingkan dengan sekolah negeri. Hal ini menyebabkan sekolah negeri yang ada kekurangan murid bahkan saat penerimaan siswa baru tidak mendapatkan murid. Dengan pertumbuhan sekolah dan kualitas sekolah yang beragam saat ini maka sekolah negeri yang murah sudah bukan menjadi pilihan utama masyarakat. Untuk melihat angka harapan lama sekolah di Kabupaten Pacitan maka dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Gambar 2. 29 Capaian Realisasi Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Pacitan Tahun 2013-2023

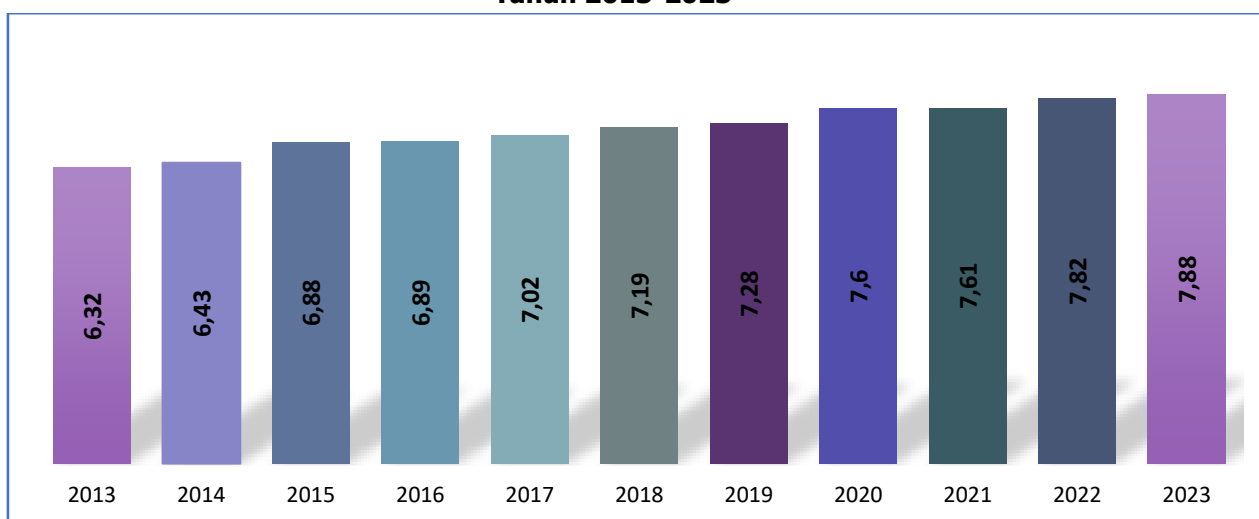


Sumber: Badan Pusat Statistik dan Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, Tahun 2024



Angka harapan lama sekolah dapat didefinisikan sebagai lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka Harapan Lama Sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi Pembangunan sistem Pendidikan di berbagai jenjang. Dapat diketahui bahwa angka harapan lama sekolah di Kabupaten Pacitan dalam sepuluh tahun terakhir mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi pemerintah dan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas Pendidikan di Indonesia telah berjalan cukup baik. Di bawah ini merupakan grafik rata-rata lama sekolah yang ada di Kabupaten Pacitan dalam sepuluh tahun terakhir:

Gambar 2. 30 Capaian Realisasi Indikator Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Pacitan Tahun 2013-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik dan Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, Tahun 2024

Kondisi Pendidikan di Kabupaten Pacitan saat ini masih perlu diperhatikan kembali, hal ini dikarenakan masih banyaknya anak putus sekolah dan tidak melanjutkan pada jenjang pendidikan selanjutnya. Akan tetapi apabila melihat data yang ada, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Pacitan setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Kenaikan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Pacitan ini tidak hanya didasari oleh masyarakat yang sudah sadar pentingnya Pendidikan tetapi juga sudah meratanya sekolah yang ada, selain itu sarana prasarana sekolah dirasa telah mencukupi kebutuhan anak untuk penunjang pendidikannya. Akan tetapi permasalahan saat ini tidak hanya ada pada anak di usia pelajar, tenaga pendidik juga memiliki permasalahannya sendiri terkait rendahnya insentif tenaga pendidik dan kualitas pendidik yang setiap tahunnya dituntut untuk terus meningkat. Perbandingan antara gaji yang diterima oleh tenaga pendidik dengan biaya yang dikeluarkan untuk sekolah ketingkat lebih tinggi membuat adanya kesenjangan.



Tabel 2. 29 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2023

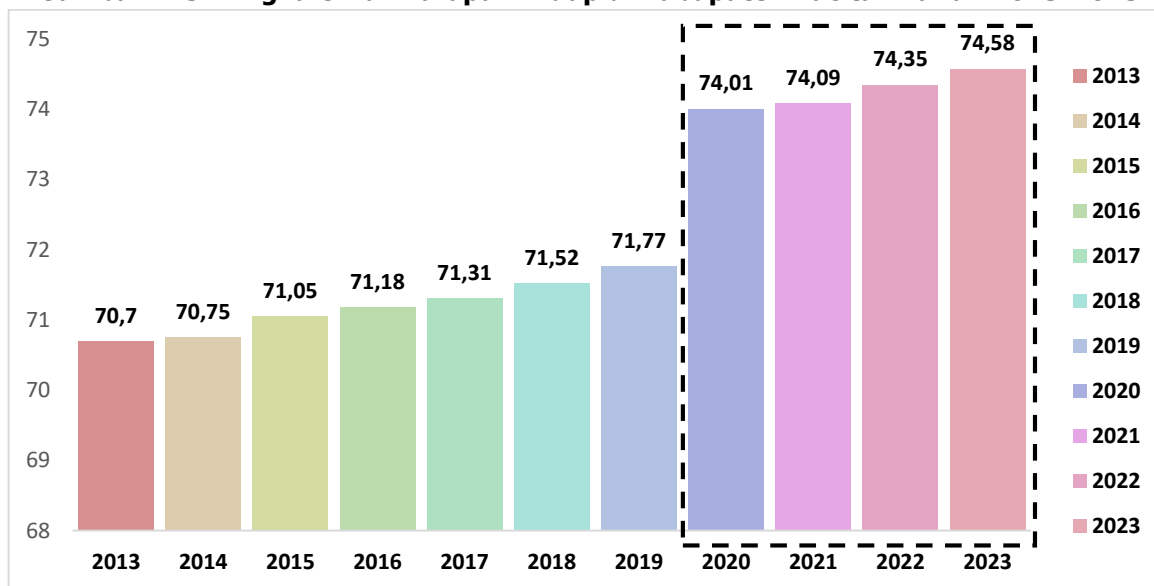
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	Tahun Realisasi		
	2021	2022	2023
Anak Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	16.835	9.905	17.019
Anak Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	65.990	53.790	50.253
Anak Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	3.510	386	2.180
Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	56,32	59,14	77,28
Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	42,72	46,47	64,01
Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	64,03	68,29	79,64
Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	54,72	56,29	55,68
Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	82,28	78,92	78,92
Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV	88,04	90,40	90,40
Iklim keamanan SD	80,04	85,69	74,23
Iklim keamanan SMP	82,87	81,84	69,34
Iklim kebinekaan SD	64,82	92,14	71,43
Iklim kebinekaan SMP	63,83	86,19	68,50
Iklim inklusivitas SD	76,37	80,02	58,61
Iklim inklusivitas SMP	69,68	75,81	56,24

Sumber : Standar Pelayanan Minimum Kabupaten Pacitan, 2024

2.3.1.2 Kesehatan

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Kesehatan merupakan salah satu dari enam urusan wajib pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Urusan pelayanan wajib dasar memiliki Standar Pelayanan Minimal yang sudah ditentukan, harapannya dengan adanya SPM maka pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat memenuhi standart yang ditetapkan dan memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi masyarakat. Meskipun Standart Pelayanan Minimal sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, permasalahan dalam urusan Kesehatan tetapi tidak dapat terelakkan. Tidak hanya skala nasional, permasalahan diskala lokal juga masih menjadi masalah yang belum dapat terselesaikan.

Kabupaten Pacitan memiliki jumlah penduduk meningkat setiap tahunnya, akan tetapi peningkatan penduduk ini tidak diikuti dengan harapan masyarakat akan pelayanan masalah kesehatan. Untuk melihat angka harapan hidup di Kabupaten Pacitan maka terdapat dua metode atau hasil yang digunakan untuk melihat capaian Usia Harapan Hidup. Tahun 2020 hingga 2023, UHH Kabupaten Pacitan menggunakan hasil long form SP2020 pada grafik di bawah ini:

**Gambar 2. 31 Angka Umur Harapan Hidup di Kabupaten Pacitan Tahun 2013-2023**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan

Angka Usia Harapan Hidup di Kabupaten Pacitan dalam sepuluh tahun menunjukkan peningkatan harapan hidup yang cukup signifikan. Hal ini dapat dikarenakan adanya perbaikan baik dari segi kualitas sarana dan prasarana fasilitas Kesehatan hingga kualitas kompetensi sumber daya Kesehatan. Selain itu dukungan dari Pemerintah Pusat dengan menyediakan fasilitas BPJS yang diberlakukan untuk seluruh masyarakat Indonesia memiliki peran dalam meringankan beban biaya masyarakat untuk biaya kesehatan. Bagi anak-anak, posyandu selalu menyediakan imunisasi dasar untuk mencegah berbagai penyakit untuk perkembangannya. Pemantauan terkait gizi balita rutin dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan pertumbuhan saat penimbangan balita di Posyandu. Kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan harapan hidup masyarakat selalu dilakukan rutin oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan harapan kesehatan masyarakat dapat terjamin dan terpenuhi dengan baik.

Berkembangnya kualitas pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak dapat mencakup 100% kepada masyarakat. Kondisi Demografi salah satunya masih menjadi penghambat untuk pemberian kualitas pelayanan Kesehatan yang maksimal. Selain itu kondisi iklim yang tidak memungkinkan setiap tahunnya juga memberikan dampak pada masyarakat terkait ketersediaan pangan yang semakin terbatas di beberapa wilayah terpencil. Oleh karena itu, ketersediaan makanan bergizi tinggi di beberapa wilayah juga masih belum tercukupi dengan baik. Hal ini dapat mempengaruhi Kesehatan masyarakat, baik balita hingga masyarakat berusia lanjut.

Informasi terkait Kesehatan saat ini dapat diakses dimanapun, tidak hanya lewat dokter yang bekerja di posyandu, puskesmas maupun rumah sakit, tetapi juga dapat diakses di jaringan internet. Banyaknya ahli gizi dan Kesehatan yang memberikan informasi secara cuma-cuma ternyata masih belum dapat menjangkau



kepada masyarakat secara keseluruhan. Oleh sebab itu, masyarakat yang tidak dapat mengakses informasi tersebut tidak memiliki pemahaman terkait pola asuh, lingkungan dan penyakit penyerta yang diderita. Kondisi atau wilayah tempat tinggal juga mempengaruhi kemudahan akan akses Kesehatan yang ada di wilayah Kabupaten Pacitan. Masih banyaknya permasalahan terkait

Kesehatan tersebut menuntut Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan untuk tetap memberikan kualitas pelayanan Kesehatan terbaik, baik dari segi sarana dan prasarana hingga dari segi tenaga Kesehatan yang berkualitas, serta pemenuhan pangan yang memiliki gizi bagi Kesehatan masyarakat.

Tabel 2. 30 Indikator Kinerja Urusan Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun 2013-2023

No	Aspek/Fokus /Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Tahun Realisasi										
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	50	66,67	66,67	66,67
2	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	81,85	81,9	87,81	79,55	92,35	90,26	91,52	95,31	90,02	87,81	93,11 %
3	Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					100	100,00	101,09	76,73	100,00	107,56	97,94 %
4	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	192,92	100	100	100	43,52	77,86	57,60	100,00	44,32	115,97	100
5	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	0	0	0	0	59,51	70,88	90,88	74,79	100,00	96,90	100
6	Angka Kematian Ibu	133,03	118,17	76,42	114,78	101,94	44,35	119,9	91,58	289,67	93	98,83
7	Angka kematian bayi	9,98	9,75	8,41	8,45	9,47	8,28	6,90	8,67	11,59	7,98	10,40
8	Angka Umur Harapan Hidup	70,70	70,75	71,05	71,18	71,31	71,52	71,77	71,94	72,07	72,48	74,58
9	Balita gizi buruk	0,03	0,31	0,2	0,18	0,11	0,21	0,2	0,16	0,16	0,52	0,20



No	Aspek/Fokus /Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Tahun Realisasi										
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
10	Prevalensi Stunting									22,7	20,6 %	20,6%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan

2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dapat dilihat dari kinerja penyelenggaraan jalan jembatan, penyediaan air bersih, dan keciptakaryaan. Pada aspek penyelenggaraan jalan dan jembatan terdapat peningkatan dalam persentase jalan dalam kondisi baik dari tahun 2017 hingga 2021, namun terdapat penurunan pada tahun 2022. Peningkatan persentase jalan dalam kondisi baik kembali meningkat pada tahun 2023. Pada infrastruktur jembatan hingga tahun 2022 menunjukkan kondisi yang cukup baik, pada tahun tersebut hampir seluruh jembatan berada dalam kondisi baik. Meskipun demikian, isu infrastruktur terbesar Kabupaten Pacitan sesungguhnya bukan pada pemenuhan kondisi infrastruktur di dalam wilayah melainkan infrastruktur yang berfungsi untuk menghubungkan Kabupaten Pacitan dengan Kabupaten lain. Infrastruktur tersebut sudah tersedia, namun dirasa masih kurang efisien, sehingga memberikan dampak yang cukup signifikan pada Kabupaten Pacitan sedangkan secara kewenangan, pengelolaan infrastruktur tersebut adalah kewenangan Provinsi Jawa Timur dan pemerintah pusat. Kondisi jalan yang berkelok menjadikan biaya distribusi barang lebih mahal.

Pada aspek selanjutnya, yaitu penyediaan akses terhadap air bersih menunjukkan progress yang cukup lambat. Akses penduduk terhadap air bersih selama 6 tahun terakhir hanya meningkat kurang dari 10%. Upaya penyediaan akses air bersih sangat bergantung pada ketersediaan sumber air dan partisipasi masyarakat. Upaya yang saat ini dilakukan sangat terkendala oleh kontur tanah atau kondisi geografis di Kabupaten Pacitan, dimana mayoritas kondisi wilayah dalam bentuk perbukitan dan memiliki struktur tanah yang labil, selain itu kondisi sosiologis masyarakat yang khawatir kekurangan pasokan air bersih menjadikan penyediaan air bersih semakin sulit.

Tabel 2. 31 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan Tahun 2017-2023

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	Tahun Realisasi						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	n/a	n/a	n/a	77%	78%	79%	80%
Persentase luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur	n/a	n/a	n/a	0.11	0	79	80



ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	Tahun Realisasi						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
pengaman pantai di WS kewenangan kab							
Persentase luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	51,16%	53,3%	55,80%	58,45%	60,97%	61,54%	63,71%
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	52,82%	72,3%	73,1%	75,20%	75,60%	76,51%	79,48%
Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	89,07%	90,6%	92,1%	93,59%	95,10%	96,51%	97,29%
Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	74,22%	74,37%	74,46%	74,78	74,94%	133,00	85,60%
Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota	59,86%	61,90%	63,82%	66,78%	68,06%	58,25%	59,65%
Persentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	n/a	n/a	n/a	0.64	62%	63%	64%
Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	0	0	0	0	0	1	1
Perkembangan kondisi jalan	59,86%	61,90%	63,82%	66,78%	68,06%	58,25%	59,65%
Persentase penduduk berakses air bersih	57,66%	58,71%	59,47%	60,59%	60,86%	0	79,48%
Persentase jalan dalam kondisi baik	59,86%	61,90%	63,82%	66,78%	68,06%	58,25%	59,65%
Persentase jembatan dalam kondisi baik	93,20%	93,30%	93,55%	93,54%	93,72%	93,85%	81,02%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas dari tahun 2017 hingga 2023, Kabupaten Pacitan menunjukkan kemajuan signifikan di bidang infrastruktur dan layanan publik. Kawasan permukiman yang terlindungi dari banjir dan abrasi meningkat hingga 80%. Daerah irigasi yang dilayani jaringan juga bertambah menjadi 63,71%, dan akses air minum untuk rumah tangga mencapai 79,48%. Sementara itu, layanan pengolahan air limbah meningkat menjadi 97,29%. Meski ada fluktuasi, kondisi jalan dan jembatan umumnya mengalami perbaikan, mencerminkan upaya pemerintah dalam memperbaiki infrastruktur secara berkelanjutan.

2.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kinerja penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman direpresentasikan melalui beberapa indikator kinerja yang bisa dilihat ditabel di bawah. Secara umum kinerja selama 6 tahun terakhir tidak semua indikator menunjukkan progress yang positif namun cenderung fluktuatif. Kinerja yang sangat perlu diperhatikan adalah penanganan kawasan permukiman kumuh dan pemerataan PSU



perumahan. Pengentasan permukiman kumuh cukup lambat dimana hanya sekitar 0.04% yang tertangani, sedangkan pada penyediaan PSU perumahan hanya mencapai 1%. Penanganan kawasan permukiman kumuh cukup sulit dientaskan dikarenakan kinerja untuk menangani Rumah tidak layak huni juga menurun. Selain itu kondisi rumah antar masyarakat cenderung berjarak cukup jauh, sehingga biaya yang diperlukan menjadi lebih mahal dan diperparah dengan kondisi geografis yang menjadikan umur infrastruktur menjadi lebih pendek. Selain kondisi geografis yang lebih sulit, kondisi legalitas aset rumah juga menjadi kendala, mengingat bantuan hanya bisa diberikan pada masyarakat dengan kepemilikan aset yang jelas/legal, sedangkan di Kabupaten Pacitan masih cukup banyak masyarakat yang mengabaikan aspek legalitas aset atau status kepemilikan tanah.

Tabel 2. 32 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pacitan Tahun 2017-2023

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	Tahun Realisasi						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	-	-	-	100%	100%	100%	100%
Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	-	-	-	50%	100%	100%	100%
Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten yang ditangani	0.02%	0.02%	-	0.01%	0.03%	0.04%	NA
Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)				28%	11.92%	10%	NA
Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)				0.86%	0	82,07	89,31

Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan

2.3.1.5 Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

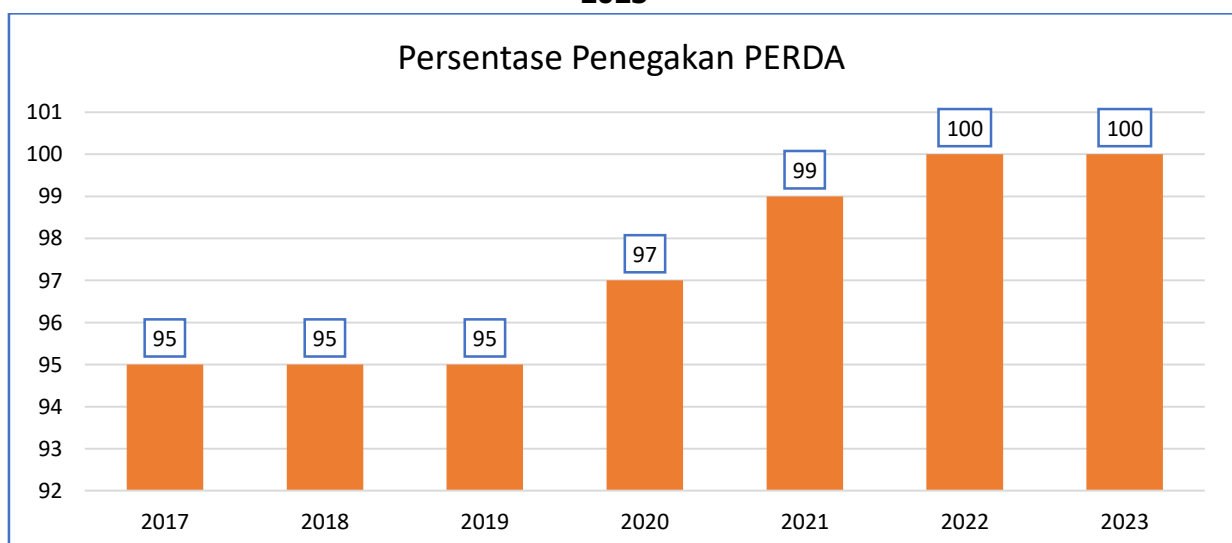
Selain karena urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib pelayanan dasar sesuai dengan Undang-undang 23 tahun 2014, urusan ini memiliki urgensi tinggi di daerah karena kondisi ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang ada di suatu daerah menjadi salah satu faktor rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang ada di daerah tersebut. Pemerintah perlu memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat terhadap ancaman maupun bahaya yang bisa mengancam keselamatan dan kehidupan masyarakat setempat. Begitu halnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan terkait dengan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Selain itu, upaya penanggulangan bencana juga perlu dilakukan Pemerintah terhadap kawasannya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakatnya.

Kabupaten Pacitan menghadapi tantangan serius terkait pelanggaran terhadap Peraturan Daerah (Perda), dimana ketidaktegasan dalam penegakan Perda



menyebabkan masyarakat merasa kebal terhadap sanksi yang ada. Keadaan ini mengakibatkan rendahnya kepatuhan terhadap aturan dan berpotensi mengikis tatanan sosial serta ketertiban masyarakat. Salah satu permasalahan utama adalah minimnya dasar hukum yang menguatkan pelaksanaan Perda di tingkat lokal. Penguatan dasar hukum dari Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang berlaku menjadi krusial guna memberikan landasan yang kokoh dalam penegakan aturan. Penyusunan Perkada yang bersifat detail dan jelas akan membantu meningkatkan efektivitas penegakan Perda, serta memberikan dasar hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum. Selain itu, diperlukan upaya pengawasan yang kuat dari masyarakat dan kesadaran terhadap Perda yang berlaku. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan Perda akan menjadi benteng pertahanan yang efektif dalam menjaga ketaatan terhadap aturan. Sosialisasi yang intensif dan berkesinambungan mengenai Perda juga akan membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Pendidikan hukum dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat perlu menjadi fokus utama dalam upaya menekan angka pelanggaran. Kesadaran akan konsekuensi hukum dari pelanggaran Perda dapat mengubah persepsi masyarakat terhadap pentingnya aturan tersebut, sehingga menciptakan lingkungan hukum yang lebih disiplin. Terakhir, diperlukan sinergitas dan kerja sama yang erat antara stakeholder terkait untuk deteksi dini, pengamanan, dan penanganan gangguan terhadap tatanan ketentraman, ketertiban umum dan masyarakat (Trantibumas). Koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, kepolisian, aparat penegak hukum, dan komunitas lokal akan meningkatkan efisiensi dalam menanggapi pelanggaran Perda. Upaya bersama ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, tertib, dan patuh terhadap aturan, menjadikan Kabupaten Pacitan sebagai wilayah yang lebih baik dalam menjalankan roda pemerintahan dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya.

Gambar 2. 32 Capaian Persentase Penegakan PERDA Kabupaten Pacitan Tahun 2017-2023



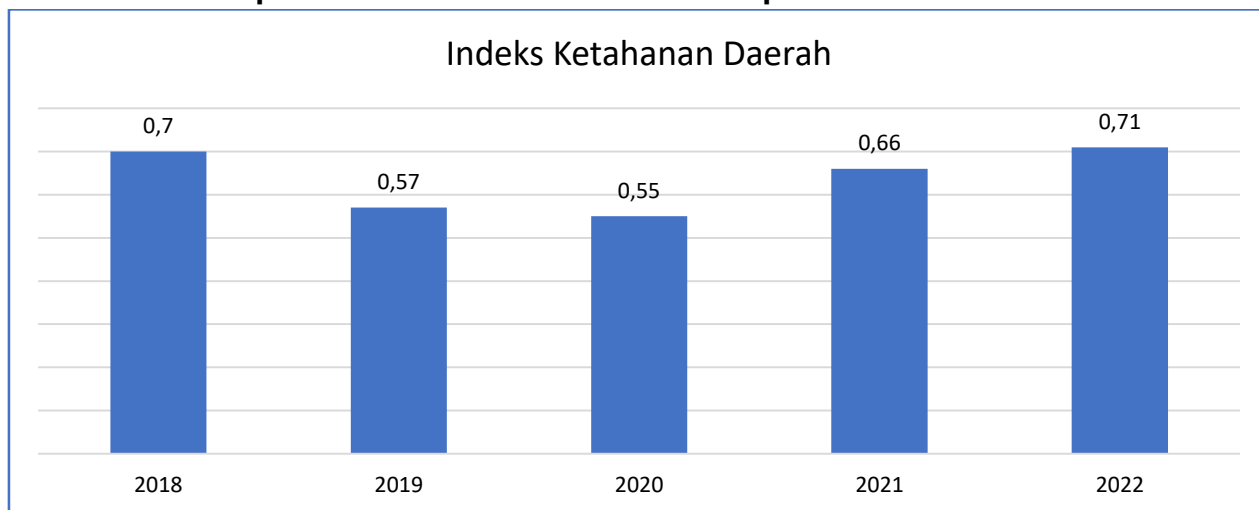
Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja



Isu ketangguhan bencana juga belum menjadi prioritas utama masyarakat di Kabupaten Pacitan menyoroti kurangnya kesadaran dan pemahaman akan pentingnya persiapan menghadapi bencana. Sebagai wilayah yang cukup berpotensi terkena berbagai jenis bencana, dari gempa bumi hingga banjir, kesiapsiagaan masyarakat menjadi krusial dalam mengurangi risiko dan dampak yang mungkin terjadi. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah peningkatan kualitas infrastruktur dan regulasi terkait kebencanaan. Infrastruktur yang tahan bencana, seperti bangunan yang memenuhi standar keamanan, dan regulasi yang memperkuat persiapan dan tanggap darurat, akan menjadi pondasi utama dalam menciptakan ketangguhan bencana di Kabupaten Pacitan.

Selain itu, peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana, khususnya kebakaran, menjadi langkah penting dalam melawan risiko bencana. Hal ini melibatkan penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan peningkatan sarana prasarana yang mendukung. Melalui pelatihan dan edukasi, masyarakat dapat diberdayakan untuk mengidentifikasi risiko, mengevaluasi potensi bahaya, dan merencanakan respons yang efektif dalam situasi darurat. Infrastruktur seperti sistem peringatan dini, jalur evakuasi, dan pemadam kebakaran yang memadai juga harus ditingkatkan untuk memastikan respons yang cepat dan efisien. Dengan pendekatan holistik yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat, penguatan kapasitas SDM, dan peningkatan sarana prasarana, Kabupaten Pacitan dapat mengarah ke arah yang lebih tangguh terhadap bencana, menciptakan lingkungan yang aman dan berdaya tahan.

Gambar 2. 33 Capaian Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018-2022



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Secara umum, terdapat beberapa indikator urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di daerah Kabupaten Pacitan yang diampu oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Kebencanaan Daerah. Adapun indikator-indikator tersebut sebagaimana tertuang pada tabel berikut:



Tabel 2. 33 Capaian Indikator Kinerja Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pacitan Tahun 2015-2023

No	Indikator Kinerja	Realisasi								
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk			1.21	1.1	1	0.83	1.66	1,87	1,87
2	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan			11.71	11.71	11.35	11.35	11.35	11,35	11,35
3	Persentase Penegakan PERDA			95	95	95	97	99	100	100
4	Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di			95	94	94	97	97	91,67	100
5	Persentase Petugas LINMAS terlatih			45	65	75	87	100	100	100
6	Persentase jumlah pembinaan, pengawasan dan penyelesaian pelanggaran PERDA			95	94	97	95	97	97	100
7	Jumlah patroli petugas Satpol PP dalam 24 jam (kali)			2	2	2	2	2	2	2
8	Cakupan desa dan kelurahan tangguh bencana (%)			7	9.4	64.91	64.91	67.25	73,68	75,44
9	Persentase Masyarakat Korban Bencana yang tertangani							95,5	89,68	100
10	Jumlah Desa Tangguh			47	21	64,91	64,91	67,26	73,68	75,44
11	Indeks Risiko Bencana	Tinggi 215.20	Tinggi 215.20	Tinggi 192.03	Tinggi 126.21	Tinggi 123.14	Tinggi 121.27	Sedang 131.88	Sedang 123.97	Sedang 128.57
12	Indeks Ketahanan Daerah				0,7	0,57	0,55	0,66	0,71	NA

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja

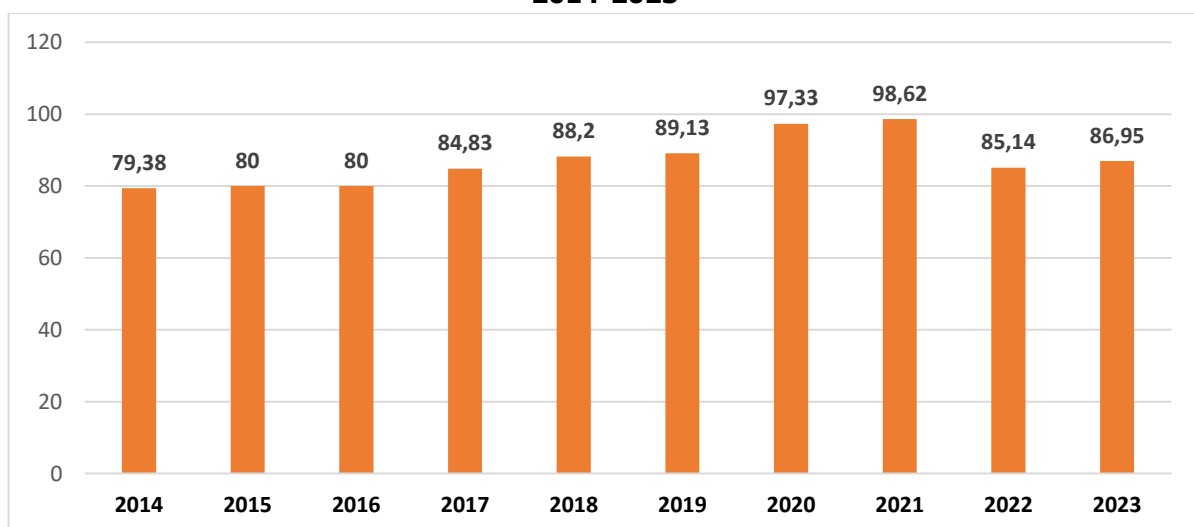


2.3.1.6 Sosial

Penyelenggaraan urusan sosial di Kabupaten Pacitan memiliki urgensi yang sangat penting terutama karena termasuk dalam kategori urusan Wajib Pelayanan Dasar dan diketahui sebagai urusan dengan standar pelayanan minimal. Kehadiran layanan sosial yang efektif di tingkat kabupaten adalah fondasi utama dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Ini tidak hanya menciptakan kondisi hidup yang lebih baik bagi warga, tetapi juga merangsang pertumbuhan dan perkembangan komunitas secara keseluruhan. Dengan memastikan penyelenggaraan urusan sosial yang berkualitas, Kabupaten Pacitan dapat membangun fondasi yang kuat untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, terdidik, dan sejahtera, menciptakan dampak positif yang berkelanjutan dalam pembangunan wilayah tersebut.

Urusan sosial mengalami Tren positif dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Pacitan yang patut apresiasi, dengan pencapaian 98,62% pada tahun 2021. Pencapaian penuh dalam penanganan menunjukkan keseriusan dan efektivitas pemerintah daerah dalam memberikan layanan dan bantuan yang diperlukan bagi mereka yang membutuhkan. Keberhasilan ini mencerminkan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, lembaga sosial, dan masyarakat dalam mendukung dan melindungi PPKS. Langkah-langkah inovatif dalam penanganan, pemantauan, dan bantuan kepada PPKS telah menciptakan lingkungan yang inklusif dan peduli di Kabupaten Pacitan, membuktikan bahwa meskipun jumlah PPKS meningkat, upaya penanganan dan dukungan terhadap mereka telah berkembang positif seiring waktu.

Gambar 2. 34 Persentase PMKS yang Tertangani di Kabupaten Pacitan Tahun 2014-2023



Sumber: Dinas Sosial

Isu ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial di Kabupaten Pacitan mencerminkan tantangan dalam mencapai keberlanjutan ekonomi di tingkat lokal.



Ketergantungan yang berlebihan terhadap bantuan sosial dapat menghambat potensi mandiri masyarakat untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang holistik dalam mengatasi permasalahan ini, yang melibatkan kolaborasi aktif antara pemerintah daerah, lembaga sosial, dan sektor swasta. Kolaborasi penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) menjadi langkah penting untuk memastikan bantuan sosial yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak positif jangka panjang. Perlindungan sosial yang adaptif dan kebijakan percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem, seperti yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, menjadi dasar untuk menciptakan sistem perlindungan sosial yang efektif dan berkelanjutan di Kabupaten Pacitan. Fokus pada wilayah Jawa, termasuk Pacitan, memperkuat komitmen untuk mengatasi ketidaksetaraan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program perlindungan sosial yang adaptif dan berdaya tahan.

Pentingnya kolaborasi dan perlindungan sosial yang adaptif juga mencakup upaya percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang mencakup periode 2025-2045 menekankan perlunya kebijakan yang responsif terhadap dinamika sosial dan ekonomi. Di tingkat lokal seperti Kabupaten Pacitan, langkah-langkah nyata seperti penguatan infrastruktur sosial, pelatihan keterampilan untuk peningkatan lapangan pekerjaan, dan pengembangan sumber daya manusia perlu didorong. Sementara itu, adaptasi kebijakan perlindungan sosial akan membantu masyarakat menghadapi perubahan kondisi, termasuk dalam konteks menghadapi bencana alam atau krisis ekonomi. Dengan demikian, melalui kolaborasi yang sinergis, perlindungan sosial yang adaptif, dan upaya percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem, Kabupaten Pacitan dapat mengarahkan pembangunan jangka panjangnya ke arah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Terdapat 3 indikator yang secara umum dapat merepresentasikan urusan sosial di daerah Kabupaten Pacitan yang diampu oleh Dinas Sosial Kabupaten Pacitan. Adapun indikator-indikator tersebut sebagaimana tertuang pada tabel berikut:

Tabel 2. 34 Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosia Kabupaten Pacitanl Tahun 2013-2023

No	Indikator Kinerja	Realisasi										
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar					84,83	88,2	89,13	100	100	100	100



No	Indikator Kinerja	Realisasi										
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	panti (indikator SPM)											
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota					40,13	100	100	100	100	100	100
3	Persentase PPKS yang tertangani		79,38	80	80	84,83	88,20	89,13	97,80	98,62	85,14	86,95

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Pacitan, Tahun 2024

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar

2.3.2.1 Tenaga Kerja

Kondisi geografi suatu wilayah dapat mempengaruhi mata pencaharian Masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Penduduk Kabupaten Pacitan mayoritas ber mata pencaharian sebagai petani dan pekebun, kondisi ini didukung dari kondisi geografis Kabupaten Pacitan yang berbukit-bukit dan tanah yang subur untuk pertanian. Selain mayoritas bekerja sebagai dibidang pertanian, Sebagian besar lainnya terbagi dari usaha manufaktur dan jasa. Selain itu cukup tingginya permintaan tenaga kerja di pasar global memberikan kesempatan penyaluran Pekerja Migran Indonesia terbuka lebar. Dengan meningkatnya permintaan tenaga kerja di pasar global dapat memberikan alternatif bagi masyarakat Kabupaten Pacitan untuk memperbaiki kondisi perekonomiannya. Akan tetapi saat ini di Kabupaten Pacitan belum menyediakan agensi resmi yang memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Semakin berkembangnya IPTEK saat ini memaksa masyarakat untuk meningkatkan kompetensi Angkatan kerja. Masyarakat berusia 15 tahun ke atas yang siap bekerja dituntut untuk memiliki kompetensi atau keahlian khusus untuk membuka peluang mendapatkan pekerjaan lebih baik. Dengan meningkatkan kompetensi yang dimiliki, masyarakat dapat memilih pekerjaan yang diinginkannya. Akan tetapi tantangan saat ini yang harus dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Pacitan adalah berkembangnya sektor industrial di Kabupaten Pacitan. Dengan berkembangnya sektor industrial yang ada di Kabupaten Pacitan, masyarakat tidak akan mencari pekerjaan didaerah lain dan akan lebih memilih bekerja di Kabupaten Pacitan. Melihat



kondisi Kabupaten Pacitan yang masih belum memiliki sektor industrial sendiri membuat fungsional mediator hubungan industrial juga belum dapat direalisasikan.

Dukungan dari Pemerintah Daerah dalam membantu penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Pacitan sangat dibutuhkan dengan membuat regulasi yang mendukung kesempatan kerja sehingga meningkatkan peluang serapan tenaga kerja di Kabupaten Pacitan. Selain itu, adanya sarana persiapan dan pelatihan angkatan kerja yang berbasis kompetensi baik yang dimiliki oleh swasta maupun yang diselenggarakan oleh Dinas dapat membantu para pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkannya. Dukungan-dukkungan inilah yang mampu meningkatkan partisipasi Angkatan kerja dari tahun ke tahun. Adapun dibawah ini merupakan realisasi capaian indikator untuk Tingkat partisipasi Angkatan kerja:

Gambar 2. 35 Capaian Realisasi Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Pacitan tahun 2017-2023



Sumber: Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja, 2024

Tabel 2. 35 Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Pacitan Tahun 2017-2023

No	Indikator Kinerja	Tahun Realisasi						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Penyelesaian Perselisihan Pekerja dan Pengusaha	100	100	100	100	100	100	100
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	0,85	1,39	0,91	2,28	2,04	1,96	1,83
3	keselamatan dan perlindungan	16	16	16	37	37	NA	NA
4	Persentase Pembinaan Tenaga Kerja	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja, 2024

Tabel di atas merupakan indikator kinerja yang diampu di urusan tenaga kerja. Pada indikator persentase penyelesaian perselisihan pekerja dan pengusaha dalam 7 tahun terakhir mencapai angka 100%, selain itu persentase pembinaan tenaga kerja

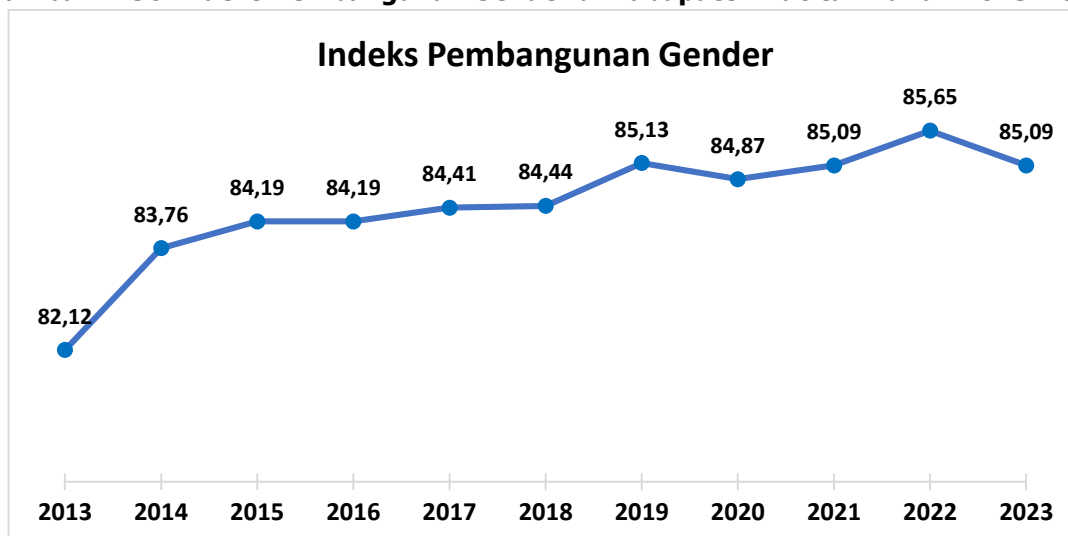


juga mencapai 100% dalam 7 tahun terakhir. Saat ini yang masih perlu mendapatkan perhatian adalah indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT Kabupaten Pacitan sempat mengalami penurunan diangka yang cukup baik di tahun 2017 sebesar 0,85 akan tetapi banyaknya permasalahan sosial dan sempat terjadi Pandemi Covid-19 membuat TPT di Kabupaten Pacitan meningkat hingga 2,28%. Perbaikan perekonomian yang saat ini sedang dimaksimalkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan akhirnya dapat menekan kembali angka pengangguran pada tahun 2023 menjadi 1,83. Apabila strategi yang digunakan tetap konsisten dan semakin tahun mengalami peningkatan maka angka TPT di Kabupaten Pacitan dapat ditekan kembali. Dengan ini kesejahteraan masyarakat dapat mengalami peningkatan.

2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak

Angka kelahiran anak Perempuan saat ini cukup tinggi, dengan didukung angka kematian pada Perempuan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Kondisi yang seperti ini membuat Perempuan untuk dituntut dapat melakukan pekerjaan yang dapat dilakukan oleh laki-laki untuk mengisi kekurangan yang ada. Oleh sebab itu, pemberdayaan Perempuan sangat dibutuhkan demi keberlangsungan hidup. Pemberdayaan Perempuan merupakan hal yang menjadi tujuan Pemerintah Daerah agar dapat mewujudkan ekonomi mandiri untuk Perempuan.

Gambar 2. 36 Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Pacitan Tahun 2013-2023



Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, 2024

Indeks Pembangunan Gender (IPG), merupakan salah satu indikator yang diampu dalam urusan pemberdayaan Perempuan dan pemenuhan hak anak. IPG merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur Tingkat keberhasilan dalam Pembangunan yang telah mengakomodasi persoalan gender. Nilai IPG didapat melalui perbandingan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Perempuan



terhadap IPM Laki-laki. IPG sendiri menggambarkan terkait kesenjangan pencapaian Pembangunan antara Perempuan dan laki-laki. Meningkatnya nilai IPG menandakan bahwa kesenjangan antara Perempuan dan laki-laki sedikit demi sedikit mulai tertutupi.

Tingginya nilai IPG yang dimiliki suatu daerah dapat menunjukkan bahwa hak-hak konstitusional masyarakat telah terjamin dan kesenjangan pencapaian Pembangunan mulai berkurang. Adanya IPG diharapkan dapat membantu untuk mengukur dan mengakomodir keadilan bagi Perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat dan partisipasi dalam mengambil Keputusan. Selain itu, Pemerintah memiliki kewajiban untuk melaksanakan perencanaan dan penganggaran responsive gender yang didasarkan pada IPG. Perencanaan dan penganggaran ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan yang disusun oleh pemerintah dapat menjamin keadilan dan kesetaraan bagi laki-laki dan Perempuan dalam partisipasi, control dan manfaat Pembangunan.

Selain pemberdayaan Perempuan, pemenuhan hak anak merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh segala unsur di yang ada di negara. Pemerintah berkewajiban dalam menyediakan kebutuhan Pendidikan, Kesehatan hingga pangan yang bergizi untuk anak-anak. Sedangkan orang tua memiliki kewajiban dalam memberikan Pendidikan, Kesehatan dan pangan yang bergizi. Sinergisitas antara pemerintah daerah dan masyarakat khususnya untuk orang tua dapat memberikan perubahan dari segi kualitas Sumber Daya Manusia anak.

Pemenuhan hak anak merupakan tanggung jawab dari orang tua sebagai lingkungan pertama dan utama yang dikenal oleh anak. Selanjutnya masyarakat, negara, pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan support system yang membantu orang tua untuk memenuhi tanggung jawab tersebut. Pemerintah sendiri bertugas dalam memberikan program-program perlindungan anak dan kebijakan yang mendukung tentang pemenuhan hak anak. Hak anak sendiri dapat meliputi hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, hak atas Pendidikan, hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak atas identitas, hak atas Kesehatan dan hak atas partisipasi dalam kehidupan sosial. Apabila terdapat anak yang mengalami pembuluan dilingkungan sekolah maka pemerintah wajib untuk mengatasi permasalahan tersebut dan mencari cara agar kasus pembuluan tidak terjadi Kembali. Dibawah ini merupakan indikator Kinerja yang dimiliki oleh urusan Pemberdayaan dan Pemenuhan Hak Anak:

Tabel 2. 36 Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten Pacitan tahun 2013-2023

No	Indikator Kinerja	Tahun Realisasi										
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase angkatan kerja perempuan	46,7	79,73	79,73	79,32	76,4	79,71	86,17	80,72	80,95	80,9	94,65



No	Indikator Kinerja	Tahun Realisasi										
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	42,24	42,24	42,24	42,12	67,28	67,59	68,91	68,11	68,29	NA	NA
3	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	-	-	-	-	32,72	32,76	34,77	31,89	31,71	NA	NA
4	Indeks Pembangunan Gender	82,12	83,76	84,19	0	84,41	84,44	85,13	84,87	85,09	85,65	85,09

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, 2024

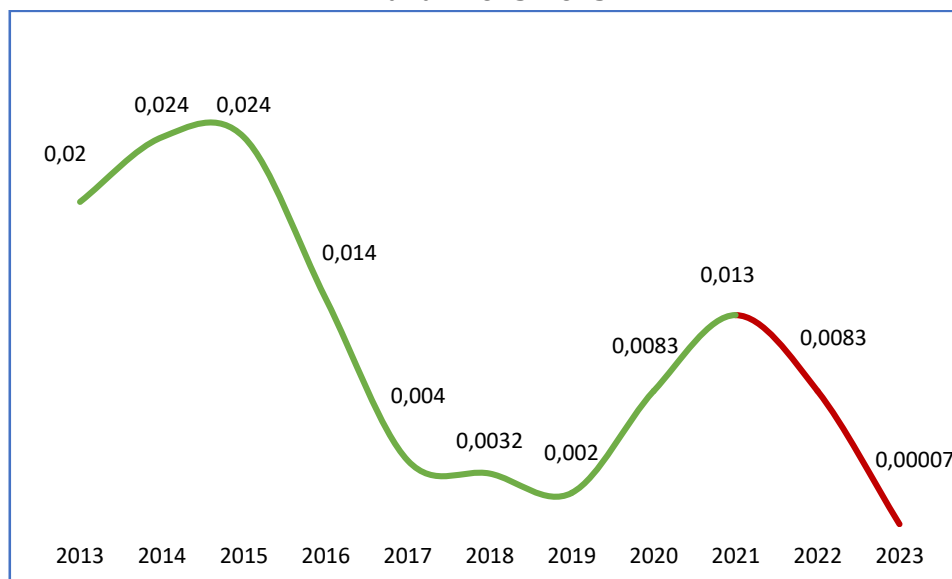
2.3.2.3 Perlindungan Perempuan dan Anak

Perlindungan Perempuan dan anak merupakan upaya dalam pemenuhan hak-hak dasar Perempuan dan anak seperti pencegahan kekerasan, perlindungan dari diskriminasi dan pemenuhan hak-hak dasar (Kesehatan, Pendidikan dan Identitas). Saat ini tren peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap Perempuan dan anak di Indonesia semakin meresahkan kalangan masyarakat. Guna menekan angka kekerasan dan membantu korban kekerasan, maka Pemerintah Indonesia Menyusun regulasi, membentuk Lembaga layanan terpadu dan mengembangkan system informasi online untuk pendataan, monitoring dan evaluasi kasus kekerasan Perempuan dan anak.

Upaya dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap Perempuan dan anak tidak hanya terkait regulasi dan program yang telah dibuat oleh pemerintah, akan tetapi masyarakat khususnya Perempuan dan anak harus meningkatkan edukasi Ketika mengalami kekerasan dan apa yang dilakukan Ketika mengalami kekerasan. Hal ini penting untuk dilakukan guna memastikan apa yang harus dilakukan para korban dan bagaimana untuk menindaklanjuti serta memberikan perlindungan kepada korban kekerasan. Kabupaten Pacitan merupakan daerah yang beresiko mengalami peningkatan kasus kekerasan. Resiko peningkatan kasus kekerasan yang ada di Kabupaten Pacitan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor yakni ekonomi, pola hidup dan pola asuh, teknologi dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati hak-hak Perempuan dan anak yang dapat memicu terjadinya kekerasan. Dibawah ini merupakan capaian indikator rasio KDRT yang ada di Kabupaten Pacitan dari tahun 2013 hingga tahun 2023 yang telah tercatat.



Gambar 2. 37 Capaian Indikator Rasio KDRT di Kabupaten Pacitan Tahun 2013-2023



Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, 2024

Kekerasan pada Perempuan dan anak saat ini menjadi perhatian oleh Pemerintah Daerah. Meningkatnya angka kekerasan pada Perempuan dan anak mulai terlihat ada ditahun 2020 yang saat itu sedang terjadi Pandemic Covid-19. Hal ini dapat dikarenakan kondisi ekonomi yang saat itu sulit dan ruang lingkup untuk bergerak bebas sangat terbatas sehingga memungkinkan terjadinya kekerasan pada ruang lingkup keluarga. Meningkatnya rasio KDRT di Kabupaten Pacitan, Pemerintah Kabupaten Pacitan melakukan berbagai Upaya dalam menangani masalah kekerasan terhadap Perempuan dan anak dengan menyediakan layanan call center dan berbagai fasilitas untuk penanganan korban kekerasan Perempuan dan anak. Dalam sepuluh tahun terakhir, korban kekerasan anak yang telah tertangani oleh Instansi Pemerintahan mencapai 100% di tahun 2017-2023, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 37 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun 2013-2023

No	Indikator Kinerja	Tahun Realisasi										
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi Terkait Kabupaten	-	-	-	-	100	100	100	83,33	100	100	100

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, 2024

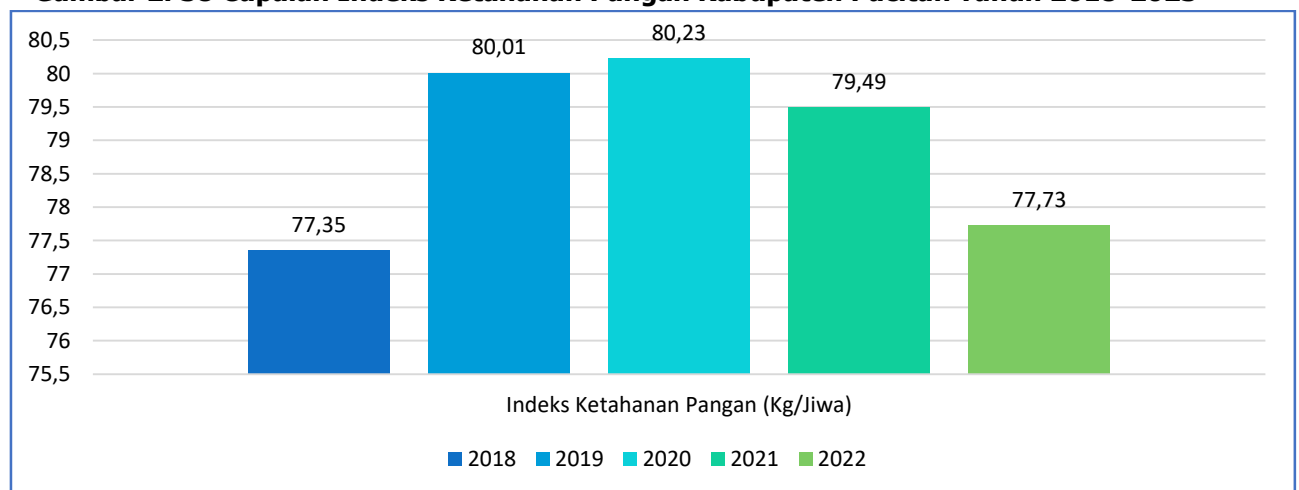


Meningkatnya rasio KDRT di Kabupaten Pacitan tidak mempengaruhi kualitas pembinaan korban kekerasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Dalam 6 tahun terakhir persentase penanganan korban kekerasan telah mencapai 100%. Hal ini didukung oleh UPTD yang telah berjuang untuk membantu korban kekerasan. Selain itu kekerasan terhadap anak dan Perempuan yang dilaporkan Sebagian besar telah mencakup korban yang mengalami kekerasan. Dengan kondisi saat ini kebutuhan akan ahli psikologi menjadi suatu keharusan untuk memenuhi kebutuhan terapi maupun pendampingan psikolog pasca kejadian yang telah dialami korban. Tidak hanya permasalahan kekerasan kepada Perempuan dan anak yang akan dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Pacitan, akan tetapi terdapat permasalahan terkait penyimpangan seksual yang semakin menyebar dikalangan masyarakat. Sehingga Kerjasama antara Pemerintah daerah, sekolah, tenaga pendidik dan orang tua sangat dibutuhkan untuk mencegah permasalahan tersebut kedepannya.

2.3.2.4 Pangan

Urusan pangan identik dengan ketahanan pangan suatu daerah. Ketahanan pangan sendiri merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi daerah yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik dari segi jumlah maupun mutu, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau. Ketahanan pangan ini dibentuk mengingat kondisi alam yang semakin memburuk disertai dengan kondisi iklim yang tidak menentu, sehingga kebutuhan akan hasil pangan juga terpengaruh. Dibawah ini merupakan indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Pacitan Tahun 2018-2022:

Gambar 2. 38 Capaian Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan Tahun 2018-2023



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2024

Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Pacitan mengalami penurunan dari tahun 2020 hingga 2022. Guna mengatasi masalah ketahanan pangan tersebut, pemerintah daerah melakukan berbagai upaya seperti meningkatkan produksi pangan, mengembangkan teknologi pertanian yang ramah lingkungan, meningkatkan akses



masyarakat terhadap pangan dan mengembangkan system distribusi pangan yang efektif. Akan tetapi yang terjadi saat ini di Kabupaten Pacitan, terdapat regulasi pengadaan pangan yang dirasa tidak berpihak pada produsen bahan pangan, khususnya pangan penting yang akan menghambat dan merusak industri dalam negeri. Dibawah ini merupakan indikator kinerja dalam urusan pangan di Kabupaten Pacitan:

Tabel 2. 38 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pangan di Kabupaten Pacitan Tahun 2017-2023

No	Indikator Kinerja	Tahun Realisasi						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Ketersediaan Pangan Utama (kg/jiwa)	235,1	205,72	213,88	210,7	87,26	181,58	309,20
2	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (%)	9,29	9,01	11,67	11,25	14,81	15,38	11,36

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Tahun 2024

Pehitungan surplus/defisit pangan dipengaruhi oleh rata-rata Tingkat Konsumsi, jumlah penduduk dan produksi pangan disuatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Hal ini dilakukan untuk menentukan apakah ketersediaan pangan di suatu wilayah melebihi kebutuhan pangan (surplus) atau kurang dari kebutuhan pangan (defisit). Surplus pangan terjadi ketika ketersediaan pangan di suatu wilayah lebih besar dari kebutuhan pangan. Hal ini berarti bahwa ada lebih banyak pangan yang tersedia daripada yang dibutuhkan, sehingga dapat digunakan untuk cadangan atau diekspor. Sedangkan defisit pangan terjadi ketika ketersediaan pangan di suatu wilayah atau negara kurang dari kebutuhan pangan. Hal ini berarti bahwa ada kurangnya pangan yang tersedia daripada yang dibutuhkan, sehingga dapat memicu krisis pangan. Dengan memahami dan mengelola surplus/defisit pangan secara efektif, dapat diharapkan bahwa ketersediaan pangan di suatu wilayah atau negara dapat lebih stabil dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Berikut dibawah ini merupakan perhitungan surplus/defisit ketersediaan pangan utama di Kabupaten Pacitan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir:

Tabel 2. 39 Perhitungan Surplus/Defisit ketersediaan Pangan Utama Kabupaten Pacitan Tahun 2019-2023

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penduduk	Jiwa	594.757	597.473	597.998	598.934	597.390
Pangan Nabati						
Beras						
Rata-Rata Konsumsi	Kg/Kap/Th	78,249	78,487	81,518	81,044	80,905
Kebutuhan Penduduk	Ton/Th	46.539,14	46.893,86	48.747,60	48.540,01	48.331,84
Produksi	Ton/Th	148.204	129.752	152.697	163.732	169.849
Surplus/Defisit	Ton/Th	101.664,86	82.858,14	103.949,30	115.191,99	121.517,16
Jagung						



Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Rata-Rata Konsumsi	Kg/Kap/Th	1,668	1,790	1,540	1,370	1,425
Kebutuhan Penduduk	Ton/Th	992,05	1.069,48	920,92	820,54	851,28
Produksi	Ton/Th	NA	87.423	73.091	70.939	72.542
Surplus/Defisit	Ton/Th		86.353,52	72.170,08	70.118,46	71.690,72
Terigu						
Rata-Rata Konsumsi	Kg/Kap/Th	2,536	2,455	2,847	2,75	2,935
Kebutuhan Penduduk	Ton/Th	1.508,30	1.466,80	1.702,50	1.647,07	1.753,34
Produksi	Ton/Th	NA	NA	NA	NA	NA
Surplus/Defisit	Ton/Th	NA	NA	NA	NA	NA
Pangan Hewani						
Daging Sapi						
Rata-Rata Konsumsi	Kg/Kap/Th	0,487	0,478	0,466	0,547	0,5
Kebutuhan Penduduk	Ton/Th	289,65	285,59	278,67	327,62	298,70
Produksi	Ton/Th	1.354	1.450	1.483	1.515	1.968
Surplus/Defisit	Ton/Th	1.063,94	1.164,73	1.203,91	1.187,21	1.669,26
Daging Ayam Ras						
Rata-Rata Konsumsi	Kg/Kap/Th	5,695	6,042	6,549	7,151	7,459
Kebutuhan Penduduk	Ton/Th	3.387,14	3.609,93	3.916,29	4.282,98	4.455,93
Produksi	Ton/Th	1.479	1.613	1.658	1.703	1.560
Surplus/Defisit	Ton/Th	-1.908,07	-1.996,57	-2.258,17	-2.580,09	-2.896,24
Daging Ayam Buras						
Rata-Rata Konsumsi	Kg/Kap/Th	0,774	0,734	0,846	0,828	0,762
Kebutuhan Penduduk	Ton/Th	460,34	438,55	505,91	495,92	455,21
Produksi	Ton/Th	1.191	1.294	1.329	1.363	633
Surplus/Defisit	Ton/Th	30,57	855,77	822,88	867,34	177,31
Telur Ayam Ras						
Rata-Rata Konsumsi	Kg/Kap/Th	6,736	6,921	7,205	7,372	6,969
Kebutuhan Penduduk	Ton/Th	4.006	4.135	4.309	4.415	4.163
Produksi	Ton/Th	863	1.495	1.706	1.917	NA
Surplus/Defisit	Ton/Th	-3.143,50	-2.639,97	-2.602,65	-2.498,63	NA
Telur Ayam Buras						
Rata-Rata Konsumsi	Kg/Kap/Th	3,702	3,278	3,632	3,853	3,833
Kebutuhan Penduduk	Ton/Th	2.202	1.959	2.172	2.308	2.290
Produksi	Ton/Th	721	859	905	951	NA
Surplus/Defisit	Ton/Th	-1.482,24	-1.099,58	-1.266,86	-1.356,49	NA
Susu						
Rata-Rata Konsumsi	Kg/Kap/Th	0,899	0,902	0,838	0,752	0,754
Kebutuhan Penduduk	Ton/Th	534.687	538.921	501,122	450,398	450,432



Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Produksi	Ton/Th	786.301	1.217.377	1.361.069	1.504.763	NA
Surplus/Defisit	Ton/Th	51.614	678.456	859.947	1.054.365	NA
Ikan						
Rata-Rata Konsumsi	Kg/Kap/Th	54,50	54,56	55,16	57,27	NA
Kebutuhan Penduduk	Kg/th	32.414.257	32.598.127	32.985.570	34.300.950	NA
Produksi	Kg/th	10.525.118	13.337.691	14.231.367	9.836.439	13.536.190
Surplus/Defisit	Kg/th	-	-	-	-	-
		21.889.139	19.260.436	18.754.203	24.464.511	13.536.190
Sayuran						
Bawang Merah						
Rata-Rata Konsumsi	Kg/Kap/th	2,802	2,699	2,926	3,034	2,861
Kebutuhan Penduduk	Ton/th	1.667	1.613	1.750	1.811	1.709
Produksi	Ton/th	18	12	27	7	NA
Surplus/Defisit	Ton/th	-1.649	-1.600	-1.723	-1.804	NA
Bayam						
Rata-Rata Konsumsi	Kg/Kap/th	3,379	3,353	3,36	3,567	3,192
Kebutuhan Penduduk	Ton/th	2.010	2.003	2.009	2.136	1.907
Produksi	Ton/th	20	13	15	16	NA
Surplus/Defisit	Ton/th	-1.990	-1.990	-1.994	-2.120	NA
Cabai						
Rata-Rata Konsumsi	Kg/Kap/th	4,354	3,789	4,161	4,388	4,614
Kebutuhan Penduduk	Ton/th	2.590	2.264	2.488	2.628	2.756
Produksi	Ton/th	74,41	82,52	61,51	76,60	73,78
Surplus/Defisit	Ton/th	-2.515	-2.181	-2.427	-2.552	-2.683
Kacang Panjang						
Rata-Rata Konsumsi	Kg/Kap/th	2,295	2,283	2,238	2,275	2,183
Kebutuhan Penduduk	Ton/th	1.365	1.364	1.338	1.363	1.304
Produksi	Ton/th	51,37	49,66	46,11	40,23	NA
Surplus/Defisit	Ton/th	-1.314	-1.314	-1.292	-1.322	NA
Kangkung						
Rata-Rata Konsumsi	Kg/Kap/th	3,82	3,784	3,999	4,176	3,96
Kebutuhan Penduduk	Ton/th	2.272	2.261	2.391	2.501	2.366
Produksi	Ton/th	40,36	42,28	42,60	41,94	NA
Surplus/Defisit	Ton/th	-2.232	-2.219	-2.349	-2.459	NA
Buah-Buahan						
Mangga						
Rata-Rata Konsumsi	Kg/Kap/th	0,448	0,549	0,54	0,552	0,562
Kebutuhan Penduduk	Ton/th	266	328	323	331	336
Produksi	Ton/th	NA	NA	637,39	291,44	NA
Surplus/Defisit	Ton/th	NA	NA	-2.096	-2.482	NA



Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Jeruk						
Rata-Rata Konsumsi	Kg/Kap/th	4,433	3,301	4,269	4,826	4,223
Kebutuhan Penduduk	Ton/th	2.637	1.972	2.553	2.890	2.523
Produksi	Ton/th	NA	NA	456,61	408,84	NA
Surplus/Defisit	Ton/th	NA	NA	-2.096	-2.482	NA
Pisang						
Rata-Rata Konsumsi	Kg/Kap/th	6,925	6,598	8,837	8,804	8,507
Kebutuhan Penduduk	Ton/th	4.119	3.942	5.285	5.273	5.082
Produksi	Ton/th	NA	NA	2.078,08	2.956,12	2.560,83
Surplus/Defisit	Ton/th	NA	NA	-3.206	-2.317	-2521

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Petanian, Tahun 2024

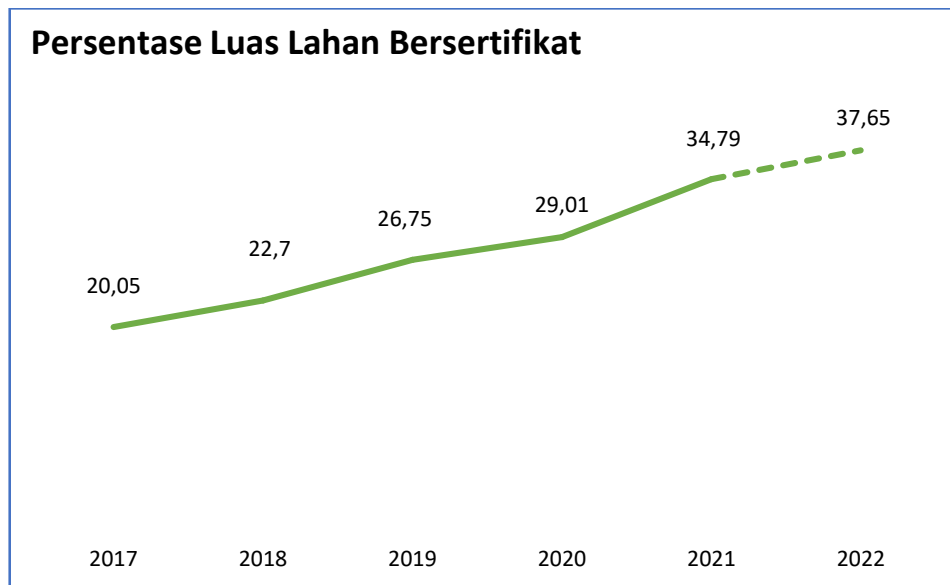
2.3.2.5 Pertanahan

Urusan pertanahan menjadi krusial di Kabupaten Pacitan bukan hanya karena merupakan salah satu urusan wajib, tetapi juga perannya yang dapat menjadi leading sector dalam upaya preventif terhadap konflik agraria. Pentingnya pengelolaan pertanahan di Kabupaten Pacitan melibatkan keberlanjutan pembangunan dan stabilitas sosial-ekonomi di wilayah ini. Dengan mengelola pertanahan secara bijaksana, termasuk penataan tata ruang dan pemberian hak kepemilikan yang jelas, Kabupaten Pacitan dapat mengurangi potensi konflik agraria yang dapat menghambat pembangunan dan mengancam perdamaian sosial.

Isu kurangnya kesadaran pemegang hak atas tanah di Kabupaten Pacitan menjadi permasalahan serius yang meruncing pada sengketa tanah garapan. Tingkat kesadaran yang rendah terkait hak atas tanah dapat menjadi akar dari konflik dan sengketa, mengingat tanah memiliki peran strategis dalam kehidupan masyarakat, terutama yang bergantung pada sektor pertanian. Mediasi menjadi solusi yang penting untuk penanganan sengketa tanah garapan ini. Isu kurangnya kesadaran pemegang hak atas tanah di Kabupaten Pacitan ini dapat dilihat jelas pada indikator Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kabupaten Pacitan pada tahun 2017-2022 yakni sebagai berikut:



Gambar 2. 39 Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kabupaten Pacitan Tahun 2017-2022



Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan, 2023

Diperlukan mediasi sebagai pendekatan alternatif dalam menyelesaikan sengketa tanah, dimana mediator dapat membantu pemegang hak atas tanah dan pihak yang menggarap tanah untuk mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan. Mediasi memberikan ruang bagi dialog terbuka, pemahaman bersama, dan mencari solusi yang memenuhi kepentingan kedua belah pihak. Selain itu, sosialisasi tentang pentingnya pemahaman hak atas tanah perlu dilakukan secara luas untuk mencegah munculnya sengketa tanah di masa depan. Melalui program sosialisasi, masyarakat dapat diberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban mereka terkait kepemilikan tanah, serta pentingnya mengakui dan menghormati hak-hak yang dimiliki oleh pemegang tanah tersebut. Upaya preventif seperti sosialisasi dapat menciptakan kesadaran yang lebih tinggi di kalangan masyarakat dan berpotensi mengurangi jumlah sengketa tanah yang terjadi. Dengan demikian, mediasi dan sosialisasi menjadi instrumen yang perlu diperkuat dalam rangka menangani isu kurangnya kesadaran pemegang hak atas tanah dan menghindari sengketa tanah yang merugikan masyarakat di Kabupaten Pacitan.

Indikator kinerja yang cukup representatif dalam menggambarkan penyelenggaraan urusan pertanahan adalah sebagaimana yang tertuang dalam tabel berikut:



Tabel 2. 40 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanahan Kabupate Pacitan Tahun 2017-2023

No	Indikator Kinerja	Realisasi							
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	20,05	22,7	26,75	29,01	34,79	37,65		
2	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan				0	100	75	100	
3	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan				0	100	75	NA	
4	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum				148.51	100	0.75	NA	
5	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.				0	100	0.75	NA	
6	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee				233,740.32	100	n/a	NA	

Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

2.3.2.6 Lingkungan Hidup

Keberlanjutan lingkungan membentuk dasar kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Dalam konteks ini, urusan lingkungan hidup memainkan peran krusial dalam menjaga kelestarian sumber daya alam, menjalankan kebijakan perlindungan lingkungan, dan merancang tata ruang yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penyelenggaraan urusan lingkungan diarahkan untuk menciptakan keseimbangan yang harmonis antara kepentingan manusia, pertumbuhan ekonomi, dan pelestarian lingkungan, menjadikan Kabupaten Pacitan sebagai model pembangunan yang berdaya tahan dan berwawasan masa depan.

Di antara sekian banyak tolok ukur Pembangunan lingkungan hidup, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator yang paling umum dan representatif untuk menggambarkan kondisinya. Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Pacitan yang fluktuatif dan cenderung menurun dalam 5 tahun terakhir, dari 73,37 pada tahun 2019 menjadi 63,97 di tahun 2023, sedikit-banyak dapat menggambarkan kondisi lingkungan di wilayah tersebut. Fluktuasi yang signifikan dan penurunan IKLH dapat mencerminkan dampak aktivitas manusia terhadap ekosistem, serta kemungkinan adanya tekanan lingkungan yang semakin meningkat. Apabila didasarkan dengan data komponen pembentuk IKLH maka berikut



merupakan capaian komponen pembentuk yang mempengaruhi penurunan angka IKLH:

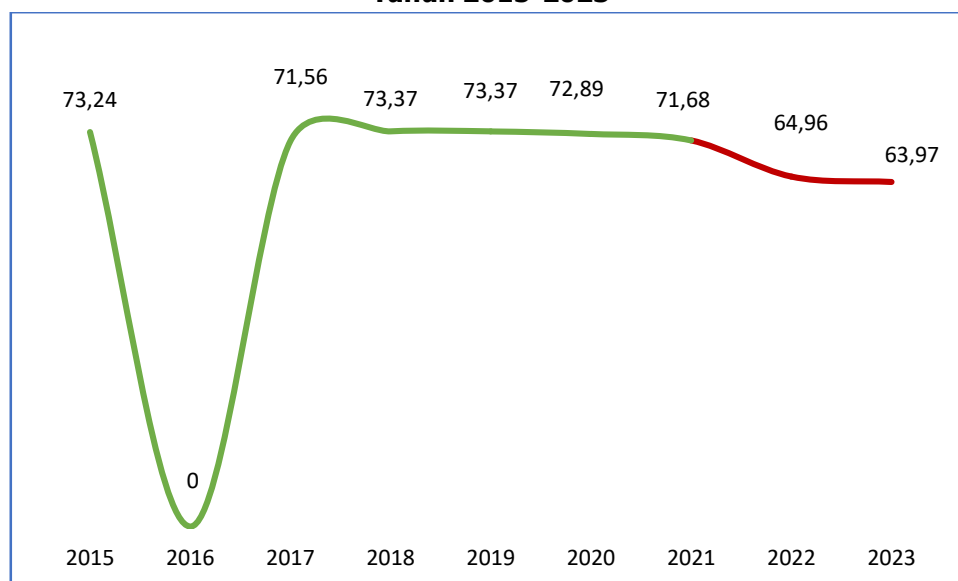
Tabel 2. 41 Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Tahun / Capaian	Indeks Kualitas Air	Kategori	Indeks Kualitas Udara	Kategori	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Kategori
2018	75,79	Baik	77,78	Baik	75,79	Baik
2019	75,79	Baik	77,78	Baik	75,79	Baik
2020	50	Sedang	91,89	Sangat Baik	75,87	Baik
2021	47,5	Kurang	91,89	Sangat Baik	75,8	Baik
2022	60	Sedang	88,74	Baik	29,49	Kurang
2023	50	Sedang	91,89	Sangat Baik	36,34	Kurang

Sumber: Dokumen IKLHD Kabupaten Pacitan, Tahun 2024

Melihat dari komponen pembentuk IKLH di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penurunan angka IKLH di tahun 2023 apabila dibandingkan dengan 2019 maka perubahan paling mendasar yakni penurunan angka IKA dan IKTP, yang semula masuk dalam kategori baik kemudian menurun menjadi kategori sedang dan kurang. Perubahan ini menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap kebijakan lingkungan dan praktik-praktik berkelanjutan di Kabupaten Pacitan. Tindakan proaktif dalam meningkatkan IKLH perlu diambil untuk memastikan keberlanjutan lingkungan yang sehat dan berdaya tahan, sambil menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian alam di Kabupaten Pacitan.

Gambar 2. 40 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Pacitan Tahun 2015-2023



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2024



Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan lingkungan hidup di Kabupaten Pacitan adalah minimnya pengawasan terhadap para pelaku usaha terkait izin lingkungan. Keterbatasan pengawasan ini menciptakan celah bagi pelaku usaha untuk beroperasi tanpa mematuhi standar lingkungan yang berlaku, mengabaikan dampak negatif terhadap ekosistem dan kesehatan masyarakat setempat. Tanpa pengawasan yang memadai, banyak perusahaan mungkin mengabaikan prosedur izin lingkungan, memicu kerugian besar terhadap keberlanjutan lingkungan hidup.

Kabupaten Pacitan yang mayoritas 85% terdiri dari perbukitan dengan keterlerangan lebih dari 40% mengalami hambatan yang signifikan apabila ada pergeseran penggunaan lahan. Misalnya saja ketika tutupan lahan mengalami penurunan maka secara langsung kualitas air juga akan berdampak. Hal ini disebabkan oleh perubahan penggunaan lahan yang berubah dari hutan menjadi pemukiman dan lahan pertanian sehingga menyebabkan pada saat musim hujan, air tidak tertahan dan menyebabkan banjir serta saat kemarau akan terjadi kekeringan. Pergeseran penggunaan lahan inilah yang menjadi penyebab utama turunnya IKLH. Sedangkan untuk IKU di tahun 2018 dan 2019 memiliki kategori baik sedangkan di tahun 2020-2023 mengalami penurunan, hal ini dikarenakan pada tahun 2018-2019 terdapat industri yang menyebabkan polusi dan pada saat pandemic covid-19 industri tersebut mengalami penurunan bahkan terdapat yang gulung tikar, hal inilah yang menyebabkan IKU mengalami kenaikan di tahun 2020 hingga 2023.

Hambatan ini dapat mengakibatkan degradasi lingkungan, pencemaran air dan udara, serta kerugian pada keanekaragaman hayati. Selain itu, minimnya pengawasan juga memberikan peluang bagi praktik-praktik bisnis yang tidak berkelanjutan, seperti pembukaan lahan tanpa pertimbangan ekologis yang memadai. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan pengawasan terhadap izin lingkungan dengan melibatkan pihak berwenang, lembaga pengawas lingkungan, dan partisipasi aktif masyarakat. Pengawasan yang ketat dan efektif akan mendukung implementasi peraturan lingkungan, menjaga keberlanjutan ekosistem, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak negatif yang mungkin timbul dari kegiatan ekonomi yang tidak berkelanjutan di Kabupaten Pacitan. Perlunya upaya-upaya tersebut adalah untuk tetap menjaga kondisi lahan dapat sesuai dengan perencanaannya. Karena apabila terdapat pelanggaran ataupun tutupan lahan yang tidak sesuai maka dapat memberikan dampak signifikan untuk kualitas air maupun lahan yang ada di Kabupaten Pacitan. Adapun beberapa indikator kinerja yang berkaitan dengan urusan lingkungan hidup di Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut:



Tabel 2. 42 Capaian Indikator Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan Tahun 2015-2023

No	Indikator Kinerja	Realisasi								
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	73,24		71,56	73,37	73,37	72,89	71,68	64,96	63,97
2	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota						96,4	0	0,98	
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten						0	41	41	100
4	Tempat Penampungan Sementara (TPS)			1,3	1,4	1,7	1,8	2	2	2
5	Persentase penanganan sampah			91,89	94	94,85	96,35	97,77	97,96	99,01
6	Persentase taman kota yang tertata			44,7	45,9	48	51,59	60,2	NA	NA

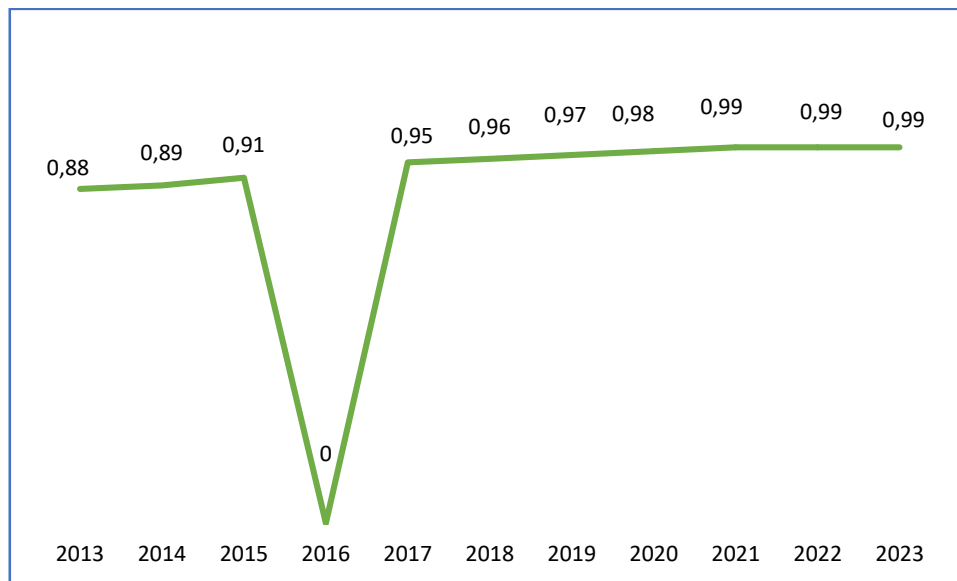
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan, 2024

2.3.2.7 Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Peran administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam proses pembangunan daerah sangat signifikan, mengingat posisinya sebagai fondasi penyelenggaraan kebijakan pelayanan langsung kepada masyarakat. Administrasi kependudukan berfungsi sebagai pilar utama dalam menyediakan informasi dasar terkait jumlah, struktur usia, dan distribusi populasi, yang menjadi dasar perencanaan pembangunan daerah. Sementara itu, pencatatan sipil, sebagai bagian integral dari urusan ini, menciptakan identitas resmi bagi setiap warga negara, mempermudah akses mereka terhadap layanan publik, pendidikan, dan kesehatan. Memiliki data kependudukan yang akurat memungkinkan pemerintah daerah merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran dan efisien, memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, serta mempercepat pembangunan yang berkelanjutan di tingkat lokal. Penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Pacitan menunjukkan kinerja yang cenderung naik selama 7 tahun terakhir. Hal ini terlihat dari capaian Rasio Penduduk BerKTP per Satuan Penduduk yang konsisten mengalami peningkatan dalam periode tersebut.



Gambar 2. 41 Rasio Penduduk Ber-KTP Per-Satuan Penduduk di Kabupaten Pacitan Tahun 2013-2023



Sumber: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, 2024

Dalam konteks penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Pacitan, masih terdapat beberapa permasalahan yang menjadi tantangan bagi pemerintah setempat. Salah satu permasalahan utama adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya data dasar kependudukan. Kesadaran yang rendah terhadap pentingnya memiliki data kependudukan yang akurat dapat berdampak pada kualitas informasi yang disediakan oleh sistem administrasi kependudukan. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya peningkatan pemahaman masyarakat akan manfaat dan kepentingan memiliki data kependudukan yang lengkap dan terkini.

Selain itu, aksesibilitas layanan kependudukan elektronik juga menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan. Dalam era digitalisasi, penting bagi masyarakat memiliki akses yang mudah dan cepat terhadap layanan kependudukan elektronik. Tantangan terkait infrastruktur, ketersediaan sinyal internet, dan literasi digital dapat mempengaruhi efektivitas pemanfaatan layanan kependudukan elektronik di Kabupaten Pacitan. Pemerintah perlu fokus pada peningkatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, serta melakukan upaya sosialisasi untuk meningkatkan literasi digital masyarakat. Dengan mengatasi permasalahan ini, Kabupaten Pacitan dapat memperkuat penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mendukung keberlanjutan pembangunan, dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Beberapa indikator yang dapat mencerminkan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Pacitan diampu oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan. Adapun indikator-indikator tersebut sebagaimana tertuang pada tabel berikut:



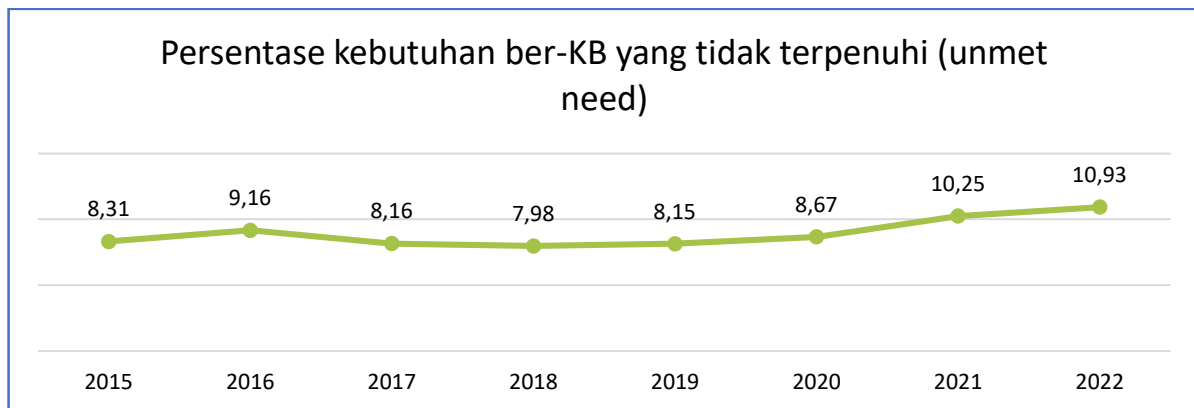
Tabel 2. 43 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kependudukan Kabupaten Pacitan Tahun 2013-2023

No	Indikator Kinerja	Realisasi										
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Rasio Penduduk BerKTP per Satuan Penduduk	0,88	0,89	0,91		0,95	0,96	0,97	0,98	0,99	0,99	0,99
2	Perekaman KTP Elektronik								99,43	99,81	100	99,82
3	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA								35,99	45,4	46	48,62
4	Kepemilikan akta kelahiran								95,83	95,61	98	
5	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama								0,21	0,11	0,19	35,71
6	Persentase Kepemilikan KTP					95,47	96,82	97,94	99,43	99,8	99,81	99,82

Sumber: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, 2024

2.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penyelenggaraan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Pacitan memiliki signifikansi yang besar dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Keberhasilan dalam mengelola pertumbuhan penduduk dan memberikan pelayanan keluarga berencana merupakan landasan bagi pencapaian berbagai tujuan pembangunan. Program ini tidak hanya berperan dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk, tetapi juga mendorong kesejahteraan keluarga dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Melalui upaya-upaya penyuluhan, pelayanan kesehatan reproduksi, dan distribusi alat kontrasepsi, penyelenggaraan urusan ini menjadi kunci untuk memastikan adanya perencanaan keluarga yang sadar dan bertanggung jawab. Dengan demikian, penyelenggaraan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Pacitan mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat, berdaya saing, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Gambar 2. 42 Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmetneed) Tahun 2015-2022

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Pacitan, 2023

Permasalahan serius di Kabupaten Pacitan terkait dengan kegagalan atau komplikasi yang dialami oleh akseptor Keluarga Berencana (KB) telah menimbulkan dampak signifikan, termasuk menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan kontrasepsi. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian dan kekhawatiran di kalangan masyarakat terhadap efektivitas dan keamanan program KB. Kegagalan atau komplikasi yang terjadi dapat menjadi penyebab utama meningkatnya ketidakpercayaan dan kecenderungan menolak program KB. Peningkatan persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*) juga menjadi dampak dari permasalahan tersebut. Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara keinginan masyarakat untuk menggunakan kontrasepsi dengan ketersediaan dan aksesibilitas yang memadai terhadap layanan KB. Unmet need dapat berdampak pada peningkatan jumlah keluarga yang tidak dapat merencanakan kehamilan secara optimal, berpotensi memicu pertumbuhan populasi yang tidak terkendali.

Akibat dari dua permasalahan tersebut, cakupan peserta KB aktif di tahun 2022 mengalami penurunan. Ketidakpercayaan masyarakat dan unmet need menjadi hambatan utama dalam mencapai tingkat partisipasi aktif dalam program KB. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya perbaikan sistem layanan KB, peningkatan edukasi masyarakat terkait manfaat dan keamanan kontrasepsi, serta peningkatan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan reproduksi. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang muncul dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Pacitan. Adapun indikator-indikator urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Pacitan tertuang pada tabel berikut:



Tabel 2. 44 Capiian Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pacitan Tahun 2013-2023

No	Indikator Kinerja	Realisasi										
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Peserta KB Aktif	N/A	N/A	N/A	80,11	79,49	79,3	79,13	77,53	76,23	75,52	75,54
2	TFR (Angka Kelahiran Total)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2,01	1,98	1,54
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	N/A	N/A	8,31	9,16	8,16	7,98	8,15	8,67	10,25	10,93	10,67

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Pacitan, 2024

2.3.2.9 Perhubungan

Esensi dari penyelenggaraan urusan perhubungan adalah untuk memastikan aktifitas perpindahan orang dan barang dapat berjalan dengan lancar dan efisien. Jika dilihat kinerja secara umum berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan, maka dapat dilihat bahwa kinerja urusan perhubungan dalam 6 tahun terakhir cenderung meningkat namun sangat landai. Meskipun terdapat trend peningkatan pada jumlah arus penumpang angkutan umum, potensi peningkatan pengguna transportasi umum masih tinggi mengingat daya tarik pariwisata di Kabupaten Pacitan masih cukup bagus namun alternatif moda transportasi yang dapat digunakan masih terbatas. Alternatif sarana perhubungan yang dimaksud adalah moda transportasi rel dan air namun dalam proses pengembangannya masih terdapat kendala yang membuat proses penyelenggaraan layanan tersebut terhambat. Permasalahan yang dihadapi dalam penyediaan kedua moda transportasi tersebut lebih disebabkan karena faktor eksternal pemerintah Kabupaten Pacitan. Sedangkan proses penyelenggaraan layanan transportasi air masih terkendala oleh infrastruktur Pelabuhan yang masih dirasa kurang representatif. Kendala lain yang dihadapi adalah semakin berkurangnya minat Masyarakat untuk menggunakan kendaraan umum dalam menunjang aktivitas sehari-hari di dalam kota. Isu lain yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan sarana perhubungan adalah mulai meningkatnya minat masyarakat untuk menggunakan kendaraan Listrik baik kendaraan roda dua maupun roda empat, dengan munculnya fenomena tersebut, maka pemerintah daerah harus berupaya untuk memberikan respons yang tepat supaya keselamatan di jalan raya dapat tetap terjaga.



Tabel 2. 45 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2017-2023

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	Tahun Realisasi						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	6.554.009,00	6.589.215,00	6.781.727,00	4.408.124,00	4.942.311	5.436.542	5.376.178
2 Rasio konektivitas Kabupaten	0,60	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,88
3 Kinerja lalu lintas kabupaten	0,19	0,20	0,21	0,2	0,24	0,26	0,27
4 Rasio uji KIR angkutan umum	47,24	47,99	51,46	33,75	31,15	40,89	-
5 Rasio Ijin trayek	0,0091	0,0091	0,0093	0,0087	0,0085	0,009	0,0086

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan, 2024

2.3.2.10 Komunikasi dan Informatika

Tujuan secara umum adanya penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika adalah supaya tata Kelola pemerintahan dapat diselenggarakan secara efisien menggunakan infrastruktur teknologi informasi dan terlaksananya komunikasi publik yang baik, sehingga pemerintah dan masyarakat dapat saling bersinergi dalam proses pembangunan daerah. Kinerja urusan komunikasi dan informatika di Kabupaten Pacitan secara umum mengalami peningkatan, namun demikian kinerja tersebut masih perlu untuk ditingkatkan mengingat masih terdapat beberapa kinerja yang belum tuntas dan terdapat pelayanan yang turun. Kinerja yang perlu diperhatikan secara lebih serius adalah pada penyediaan pelayanan publik berbasis elektronik yang turun signifikan, serta kinerja sistem pemerintahan berbasis elektronik yang masih belum optimal. Salah satu penyebab tidak optimalnya kinerja tersebut adalah belum meratanya infrastruktur pendukung TIK.

Tabel 2. 46 Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan tahun 2017-2023

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Tahun Realisasi						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1 Persentase Jaringan Komunikasi dan Informatika yang Terintegrasi	41	58,41	72,19	0,53	84	50	87,75
2 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	0	0,10	0,11	0,14	0,19	0,45	38,46*
3 Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	70	80	90	100	100	50	87,5
4 Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	81,03	111,680*



Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja		Tahun Realisasi						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten							
5	Indeks SPBE		1,56	1,77	1,78	1,41	2,34	3,34
6	Persentase ketersediaan jaringan internet dan akses internet publik						70	

Sumber: Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pacitan, 2024

2.3.2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kondisi pelaku usaha dengan badan hukum berbentuk koperasi dan usaha mikro kecil di Kabupaten Pacitan dapat dikatakan masih perlu perhatian yang serius. Daya saing para pelaku usaha sangat diuji dan menjadi tantangan besar bagi keberlanjutan usahanya, khususnya pada pelaku usaha dengan target pasar hingga ke luar daerah atau ekspor. Hal tersebut dipicu oleh era digitalisasi yang memberikan efek disruptif pada pola dan cara hidup masyarakat, sebagai contoh adalah cara berbelanja, dan cara berinteraksi. Selain itu, semakin mudahnya perdagangan antar negara juga memberikan efek cukup signifikan, dimana daya saing produk dalam negeri diuji dengan produk dari luar negeri. Selain faktor eksternal tersebut, faktor internal pemerintah juga turut memberikan andil terhadap daya saing usaha, regulasi yang cenderung berubah-ubah dan dinilai kurang konsisten menjadikan kepastian usaha menjadi rendah, sehingga pelaku usaha semakin sulit untuk meningkatkan skala usahanya atau membuka pasar baru. Pada indikator Persentase Koperasi Mandiri di tahun 2022 dan 2023 sudah tidak digunakan kembali. Kemudian terdapat perubahan indikator tersebut menjadi persentase koperasi sehat yang mulai digunakan pada tahun 2022 dan 2023.

Tabel 2. 47 Capaian Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2023

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja		Realisasi							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Peningkatan Jumlah Wirausaha Baru (Rasio Kewirausahaan)	5.25	3.25	3.43	3.66	3.82	5	3.16	4,79
2	Persentase Koperasi Mandiri	0.81	1.21	1.41	1.98	0.9	1.16		
3	Persentase Koperasi Sehat							4.23	7,50
4	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas (RAT)		0.50	0.38	0.48	0.42	0.36	0.39	35,96*
5	Koperasi yang Memiliki Nomor			4	6	6	18	51	3



Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja		Realisasi							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Induk Berusaha (NIB)								
6	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha						0.05	4.84	4,78
7	Jumlah UMKM non BPR/LKM UKM		23270	22345	22565	23170	25000	25000	25000
8	Persentase Usaha mikro yang dibina			3.49	3.50	3.53	3.76	2.06	2,82

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perindustrian Kabupaten Pacitan, 2024

2.3.2.12 Penanaman Modal

Urusan Penanaman modal merupakan urusan dengan focus utama untuk mendatangkan modal atau uang dalam bentuk asset usaha kedalam Kabupaten Pacitan. Upaya dilakukan melalui berbagai program yang kinerjanya dapat dilihat dari beberapa indikator meliputi Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN) (Unit Usaha), Persentase peningkatan investasi di Kabupaten, Rasio daya serap tenaga kerja, Nilai Realisasi Investasi PMDN/PMA. Dari indikator tersebut dapat dilihat bahwa sejak tahun 2013 jumlah investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Pacitan cenderung meningkat sampai tahun 2023. Namun demikian, jika dilihat lebih lanjut, jumlah realisasi investasi yang paling besar adalah pada tahun 2021. Hal tersebut menunjukkan bahwa mayoritas penanaman modal yang terjadi adalah jenis usaha padat karya. Jika disandingkan dengan potensi yang dimiliki Kabupaten Pacitan, realisasi penanaman modal tersebut relative masih kecil. Namun demikian Upaya yang dibutuhkan untuk meningkatkan investasi masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan di lapangan khususnya dalam rangka menciptakan dan menjaga kondusifitas iklim investasi. Beberapa permasalahan yang mengganggu stabilitas iklim investasi adalah berkenaan dengan regulasi yang dinilai sering berubah-ubah dan dirasa oleh masyarakat masih kurang jelas. Selain itu proses pelayanan perizinan dirasa masih belum optimal atau masih dirasa belum memudahkan masyarakat, sehingga minat masyarakat untuk mendaftarkan usahanya masih minim.

Tabel 2. 48 Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Pacitan Tahun 2013-2023

Indikator Kinerja		Tahun Realisasi										
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMDA) (Unit Usaha)	110	115	129	187	169	817	872	1533	1214	6090	16252
2	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	5.7	6.3	26.8	52	7.6	752.9	661.33	-97.27	61.22	47	3,01



Indikator Kinerja		Tahun Realisasi										
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
3	Rasio daya serap tenaga kerja	92.5	102	3.68	7.41	4.4	7.58	6.93	4.29	3.85	0.66	NA
4	Nilai Realisasi Investasi PMDN/PMA	2.5 T	2.55 T	0.69 T	1.05 T	1.13 T	9.70 T	15.25 T	0.41 T	0.67 T	0.45 T	NA

Sumber: Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan, 2024

2.3.2.13 Pemberdayaan Masyarakat Desa

Tingkat keberdayaan masyarakat desa dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Persentase Pengentasan Desa Tertinggal, Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri, Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK, Indek Pembangunan Desa, dan Jumlah Desa Mandiri. Dilihat dari realisasi kinerjanya, dapat dikatakan bahwa kinerja pemberdayaan masyarakat desa sudah cukup baik, pada tahun 2020 samapai 2023 sudah tidak terdapat desa dengan status tertinggal, dan masyarakat sudah semakin aktif pada lembaga atau kelompok binaan. Namun demikian untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat desa menjadi mandiri, masih terdapat berbagai hambatan khususnya dari segi kesiapan pemerintah desa sendiri dalam mengelola sumber daya desa. Mayoritas pemerintah desa masih belum dapat bekerja dengan efisien dan masih sangat dominan dalam melaksanakan Pembangunan desa. Selain itu masih terdapat beberap kewenangan yang masih tumpang tindih antara pemerintah desa dengan instansi pengampu urusan, sebagai contoh dalam hal pengelolaan pariwisata.

Tabel 2. 49 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2016-2023

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja		Tahun Realisasi							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	5.82	6.28	6.28	6.41	6.41	6,36	NA	NA
2	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	89.2		88.6	96.4	100	100	100	100
3	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	0.006	Tidak ada	0	0	0.01	0.05	0.25	0
4	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	87.07	88.5	88.5	91.39	90.64	93,38	NA	NA
5	Indeks Pembangunan Desa					0.83	0.82	0.83	NA
6	Jumlah Desa Mandiri	1	Tidak ada	1	1	2	4	23	28,14

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Pacitan, 2024

2.3.2.14 Kepemudaan dan Olahraga

Kinerja kepemudaan dan olah raga di Kabupaten Pacitan setidaknya dilihat dari 3 indikator kinerja yaitu Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri,



Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan serta peningkatan prestasi olahraga. Kinerja Pembangunan kepemudaan dan olah raga jika dilihat dari 3 indikator tersebut memiliki kecenderungan yang fluktuatif. Beberapa kendala yang terjadi dalam proses Pembangunan pemuda adalah adanya pergeseran cara berkomunikasi antar pemuda sebagai dampak dari adanya perkembangan teknologi informasi. Berkembangnya teknologi informasi menjadikan minat pemuda untuk turut aktif dalam organisasi kepemudaan menurun. Selain itu, menurut para pemuda, perhatian pemerintah pada organisasi pemuda masih dirasa kurang. Melihat kondisi demikian, menjadikan peran pemuda dalam Pembangunan menjadi kurang optimal.

Tabel 2. 50 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan Tahun 2017-2023

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja		Tahun Realisasi						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	N/a	N/a	N/a	90.33	2.32	0.03	0,16
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	N/a	N/a	N/a	0.06	0.06	0.04	4,64
3	Peningkatan Prestasi Olahraga	N/a	N/a	N/a	9	44	96	15

Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Pacitan, 2024

2.3.2.15 Kebudayaan

Perkembangan zaman yang semakin modern menjadikan memberikan dampak distrupsi yang cukup signifikan pada seluruh lini, termasuk pada aspek kebudayaan. Pergeseran cara masyarakat berkomunikasi, dan semakin terabaikannya nilai-nilai budaya lokal menjadi suatu ancaman tersendiri bagi eksistensi kebudayaan lokal Kabupaten Pacitan. Namun meskipun demikian, berbagai upaya telah dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Kabupaten Pacitan untuk tetap menjaga kelestarian budaya yang ada. Upaya untuk menjaga kesenian yang ada di Kabupaten Pacitan menunjukkan hasil yang positif, dimana terdapat peningkatan jumlah group kesenian dari yang awalnya 61 di tahun 2017 menjadi 105 di tahun 2022. Akan tetapi, capaian tersebut kembali menurun pada tahun 2023 dimana jumlah grup kesenian mencapai 82. Meskipun dari sisi jumlah grup kesenian membuahkan hasil yang cukup bagus, upaya untuk melestarikan cagar budaya lokal masih perlu dilakukan evaluasi dan peningkatan atau upaya yang lebih serius mengingat kinerja yang menurun yang ditunjukkan dengan turunnya jumlah cagar budaya yang dilestarikan.



Tabel 2. 51 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Pacitan Tahun 2017-2023

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja		Tahun Realisasi						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Grup Kesenian	61	61	65	70	76	105	82
2	Terlestarikannya Cagar Budaya				96.21	96.21	70.83	24,52*

Sumber; Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Pacitan, 2024

2.3.2.16 Statistik

Urusan statistik merupakan urusan yang sangat penting bagi pemerintah daerah, khususnya jika pemerintah daerah ingin memiliki keinginan secara serius untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan yang baik sangat bergantung pada ketepatan pengambilan Keputusan dimana hal tersebut sangat dipengaruhi oleh kualitas data, baik dari segi tata Kelola data maupun kualitas data itu sendiri. Kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Pacitan berkenaan dengan urusan statistik adalah masih rendahnya kepedulian pemerintah terhadap pengelolaan data, dan tertib data. Sehingga tidak semua pelayanan terdokumentasi dengan baik hingga level meta data. Namun demikian pemerintah tetap berusaha untuk menjaga keterbukaan informasi publik.

Tabel 2. 52 Capaian Indikator Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Pacitan Tahun 2017-2023

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja		Tahun Realisasi						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Nilai Keterbukaan informasi publik	N/a	N/a	N/a	100	100	100	100

Sumber: Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pacitan, 2024

2.3.2.17 Persandian

Urusan Persandian mengalami sedikit transformasi pada era digital, yang semula hanya berfungsi untuk menerjemahkan pesan atau informasi penting dari instansi vertikal menjadi fungsi untuk mengamankan seluruh aktifitas pemerintah yang dilaksanakan melalui infrastruktur teknologi informasi atau berbasis digital. Berdasarkan kinerja selama 6 tahun terakhir, kinerja yang berkaitan dengan pengamanan sistem elektronik hanya terdapat pada tahun 2022. Hingga tahun tersebut, kinerja urusan Persandian dapat dikatakan masih sangat kurang, mengingat hanya 18,75% sistem elektronik dan informasi yang sudah diamankan atau dijamin tingkat keamanannya.



Tabel 2. 53 Capaian Indikator Kinerja Urusan Persandian Kabupaten Pacitan Tahun 2017-2022

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja		Tahun Realisasi						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase pengamanan sistem elektronik dan informasi	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	18,75	N/a

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan, 2024

2.3.2.18 Perpustakaan

Keberadaan perpustakaan sebagai sarana untuk meningkatkan literasi masyarakat sangat penting. Oleh karenanya pemerintah berupaya seoptimal mungkin untuk memberikan akses yang merata untuk setiap masyarakat. Upaya tersebut cukup membuahkan hasil yang baik ditunjukkan dengan semakin meningkatnya jumlah perpustakaan di Kabupaten Pacitan. Selain jumlah perpustakaan yang meningkat, jumlah koleksi perpustakaan juga semakin meningkat. Namun demikian, jika dilihat dari perspektif kegemaran membaca masyarakat justru mengalami penurunan di tahun 2022 dan 2023. Hal tersebut disebabkan karena beberapa masyarakat sudah mulai mengubah cara untuk mendapatkan informasi atau membaca buku dengan cara digital melalui jaringan internet. Fenomena tersebut semakin dikuatkan dengan meningkatnya indeks Pembangunan literasi masyarakat yang cukup signifikan dari 4.68 di tahun 2021 menjadi 64.50 di tahun 2022 dan 68,39 pada tahun 2023.

Tabel 2. 54 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Pacitan Tahun 2015-2023

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja		Tahun Realisasi								
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Perpustakaan	163	159	450	858	858	832	832	840	839
2	Jumlah Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	26667	25816	27932	29132	32538	32538	32538	33888	35138
3	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	62106	69415	77436	95639	114932	130084	136384	171268	402362
4	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat						55.03	58.87	57.50	56,7
5	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat						0	4.68	64.50	68,39

Sumber: Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Pacitan, 2024



2.3.2.19 Kearsipan

Urusan kearsipan memiliki peranan penting dalam keberlanjutan tata Kelola pemerintahan eksistensi kebudayaan maupun Sejarah Kabupaten Pacitan. pengelolaan arsip yang baik dapat berdampak signifikan pada proses Pembangunan melalui pemanfaatan Kembali catatan maupun laporan penting daerah. Kinerja pada urusan ini secara umum sudah menunjukkan progress yang baik ditunjukkan dengan semakin baiknya tata Kelola arsip daerah. Meskipun demikian, jika dilihat dari segi ketersediaan sumber daya manusia yang mampu mengelola arsip dengan baik jumlahnya semakin menurun.

Tabel 2. 55 Capaian Indikator Urusan Kearsipan Kabupaten Pacitan Tahun 2015-2023

Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja		Tahun Realisasi								
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pengelolaan Arsip Secara Baku	65.8	65.35	72.3	88.5	86.05	94.61	100	NA	NA
2	Jumlah peserta peningkatan SDM pengelola kearsipan	234	226	200	201	202	202	148	NA	NA
3	Jumlah Arsip In Aktif yang dikelola	4.320 box	4.320 box	4.581 box	4.925 box	5.183 box	5.367 box	5.822 box	5.367 box	5.320 box
4	Jumlah Arsip Stastis yang Dipelihara	97 box	97 box	123 box	149 box	175 box	205 box	232 box	272 box	276 box
5	Persentase PD dan desa yang menerapkan arsip secara baku	65.8	65.35	73.36	78.97	122.63	89.64	94.39	NA	NA
6	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan						74.14	74.24	74.63	74,78
7	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek						60.83	51.00	100.00	83,33



Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Tahun Realisasi								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat									

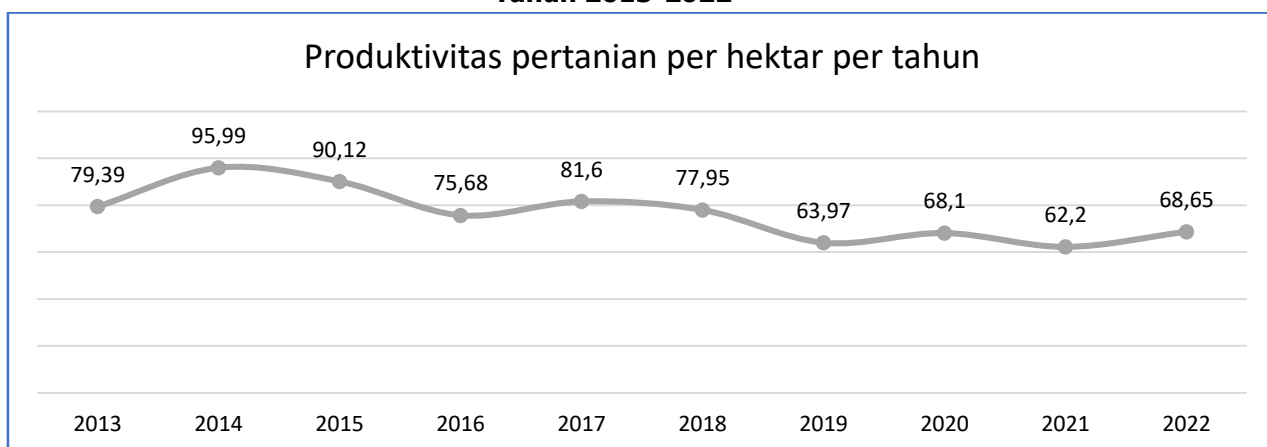
Sumber: Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Pacitan, 2024

2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

2.3.3.1 Pertanian dan Peternakan Serta Perkebunan

Kinerja pemerintah pada urusan pertanian dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yang secara umum dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori yaitu upaya untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Pada upaya untuk melakukan ekstensifikasi yang dalam hal ini berkaitan dengan luas tanaman hampir sudah tidak dapat dilaksanakan mengingat ketersediaan lahan yang dapat dicetak menjadi lahan pertanian cukup terbatas dan minat para pemuda untuk terjun ke dalam dunia pertanian cenderung berkurang. Hal tersebut akan menjadikan proses regenerasi petani menjadi terhambat. Dari segi intensifikasi, proses produksi pertanian dapat dilihat dari tingkat produktivitas pertanian per hektar per tahun. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan dari tahun 2013 hingga tahun 2022, produktivitas pertanian cenderung menurun meskipun jika dilihat realisasi per tahunnya memiliki pola yang fluktuatif.

Gambar 2. 43 Produktivitas Pertanian Per-Hektar Per-Tahun di Kabupaten Pacitan Tahun 2013-2022



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian, Tahun 2023



Produktivitas pertanian tersebut sangat bergantung pada beberapa faktor, selain yang telah diuraikan sebelumnya, juga dapat dipengaruhi oleh ada atau tidaknya kejadian kasus penyakit tanaman dan serangan hama. Kinerja pada sub sektor peternakan menunjukkan progress yang cukup baik meskipun masih terjadi beberapa serangan penyakit ternak. Serangan penyakit pada hewan sangat meresahkan peternak, kemunculan penyakit ternak tersebut sangat berhubungan dengan regulasi yang berkenaan dengan impor ternak dalam kondisi hidup. Hingga saat ini masih terdapat potensi gangguan/bencana penyakit hewan ternak jika mekanisme impor ternak hidup tidak diatur dengan ketat. Seperti halnya kondisi sektor peternakan di daerah lainnya, peternakan di Kabupaten Pacitan juga sangat dipengaruhi oleh kebijakan impor ternak oleh pemerintah pusat. Dengan kondisi hasil ternak di Kabupaten Pacitan yang cukup baik, masyarakat sangat yakin permintaan ternak dari Pacitan akan meningkat jika regulasi pengadaan ternak hidup diatur dengan ketat.

Tabel 2. 56 Capaian Indikator Urusan Pertanian dan Peternakan Serta Perkebunan Kabupaten Pacitan Tahun 2013-2023

No	Indikator Kinerja	Realisasi										
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Produktifitas Padi atau Bahan Pangan Utama Sektor Lainnya	53,82	52,65	54,57	54,59	54,6	54,73	44,84	43,07	46,64	50,71	51,88
2	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	79,39	95,99	90,12	75,68	81,60	77,95	63,97	68,10	62,20	68,65	NA
3	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	-1,2	-1,15	-1,05	-0,20	-0,45	-0,75	-0,75	-1,53	-3,6	0,19	NA

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Pacitan, 2024

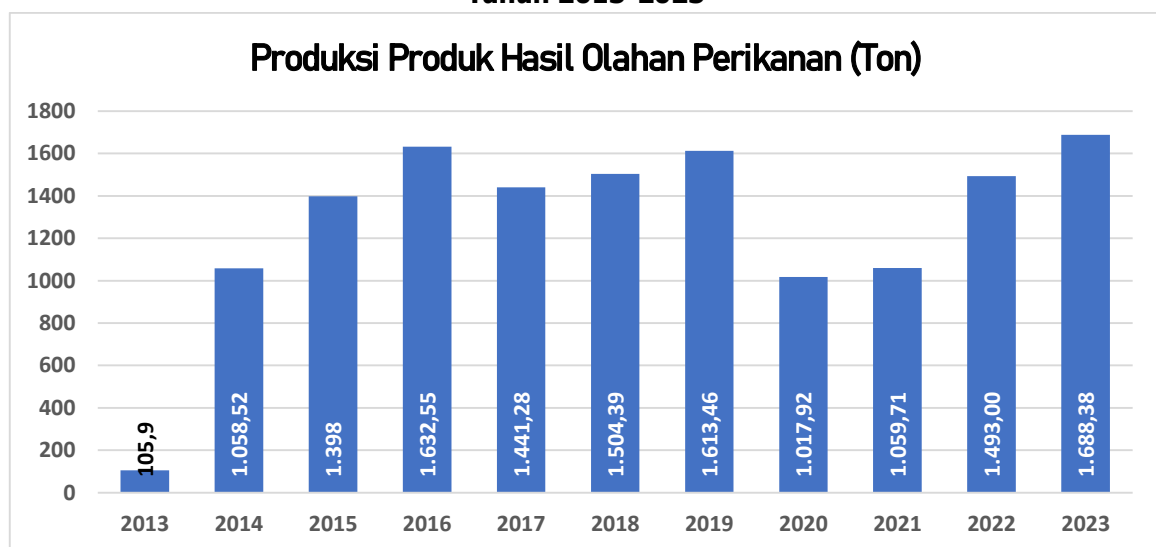
2.3.3.2 Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Pacitan sebagai daerah yang memiliki pantai dan sumber daya kelautan memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya pada masyarakat yang tinggi di sisi selatan atau daerah pesisir karena selain dapat melaksanakan budidaya ikan, masyarakat juga dapat melaksanakan penangkapan ikan di laut lepas. Jika dilihat dari produksi sektor perikanan budidaya dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2023, maka dapat diketahui



bahwa aktivitas perekonomian di sektor tersebut belum sepenuhnya stabil, mengingat produksi setiap tahun yang masih fluktuatif dengan deviasi yang cukup besar. Seperti halnya pada perikanan budidaya, pada sektor perikanan tangkap juga menunjukkan produksi yang fluktuatif dengan kecenderungan semakin berkurang. Meskipun sama-sama mengalami produksi yang fluktuatif, penyebab keduanya sangat berbeda. Pada perikanan budidaya, faktor yang paling dominan disebabkan karena faktor pakan ikan. Bahan baku pakan ikan yang sebagian besar masih bergantung pada impor menyebabkan harga pakan ikan tidak stabil. Hal tersebut berimbas cukup signifikan pada pembudidaya ikan karena alternatif pakan ikan yang menggunakan bahan baku dari dalam negeri dinilai tidak mampu menjaga kondisi kandungan gizinya. Selain faktor pakan, kondisi iklim yang sangat cepat berubah juga menyebabkan permasalahan tersendiri bagi para pembudidaya karena semakin meningkatkan peluang munculnya berbagai macam penyakit pada ikan budidaya.

Gambar 2. 44 Produksi Produk Hasil Olahan Perikanan (Ton) Kabupaten Pacitan Tahun 2013-2023



Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan, 2024

Pada sektor perikanan tangkap menghadapi permasalahan yang lain, yang lebih disebabkan karena faktor keterbatasan alat tangkap, regulasi dari pemerintah pusat dan faktor cuaca yang menjadikan nelayan tidak dapat berlayar. Alat tangkap yang cenderung lebih sederhana dan perahu yang memiliki kapasitas kecil menjadikan daya jelajah dan daya tahan terhadap cuaca cukup rendah. Selain itu dengan tidak stabilnya kebijakan pemerintah pusat berkenaan dengan perizinan dan pengelolaan sumber daya laut menyebabkan beberapa masyarakat beralih profesi dari penangkap ikan menjadi pencari benur atau benih lobster. Selain upaya dalam meningkatkan kesejahteraan rumah tangga nelayan, pemerintah mengajak seluruh masyarakat khususnya keluarga nelayan untuk meningkatkan nilai tambah hasil perikanan budidaya dan tangkap. Upaya tersebut memberikan dampak yang cukup besar bagi



rumah tangga nelayan meskipun perkembangannya tidak dapat secara konsisten meningkat.

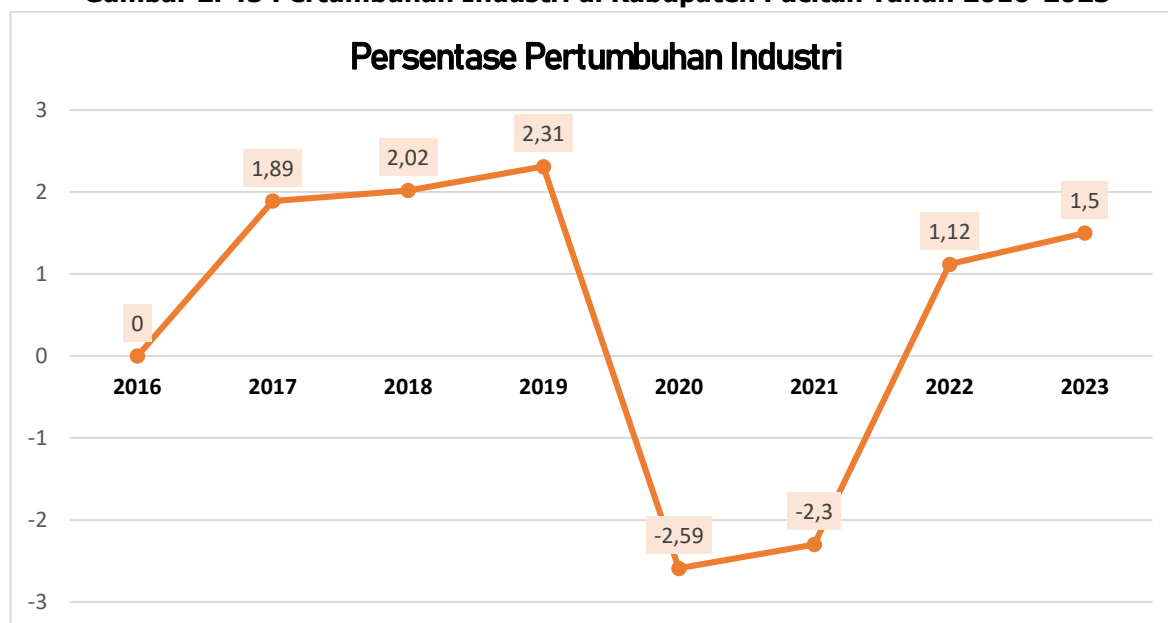
Tabel 2. 57 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan Tahun 2013-2023

No	Indikator Kinerja	Realisasi										
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Produksi Perikanan Budidaya (ton)	581,35	693,35	801,448	925,292	1.084,23	1.277,14	1.664,25	2.157,12	2.164,50	1.647,18	1.453,56
2	Produksi Perikanan Tangkap (ton)	6.003,29	8.419,00	10.891,42	12.513,08	11.011,44	11.377,85	8.860,87	11.180,57	12.643,68	8.874,36	NA
3	Produksi produk hasil olahan perikanan (ton)	105,9	1.058,52	1.398	1.632,55	1.441,28	1.504,39	432,51	1.024,61	1.059,71	1.493,00	1.688,38

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan, 2024

2.3.3.3 Perindustrian

Urusan perindustrian mencakup berbagai aspek yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan sektor industri di suatu daerah. Kabupaten Pacitan bukan merupakan kawasan percepatan ekonomi nasional dibidang industri dan tidak termasuk dalam KPI Provinsi Jawa Timur. Kondisi industri di Kabupaten Pacitan memiliki *demand* yang cukup rendah, hal ini disebabkan kurangnya akses ke sumber daya, keterbatasan sumber daya manusia dan adanya persaingan produk. Berikut merupakan capaian pertumbuhan industri Kabupaten Pacitan.

**Gambar 2. 45 Pertumbuhan Industri di Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2023**

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan, 2024

Pada tahun 2016 hingga tahun 2023, pertumbuhan industri di Kabupaten Pacitan cukup rendah dan sempat terjadi minus pertumbuhan ditahun 2020 dan 2021. Hal ini dikarenakan Kabupaten Pacitan tidak memiliki kawasan industri. Kawasan industri sendiri merupakan area yang didesain khusus untuk kegiatan industri dan dilengkapi dengan infrastruktur dan fasilitas pendukung seperti jalan raya, listrik, air dan sistem pengelolaan limbah. Pada dasarnya, kawasan industri dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja di suatu daerah. Saat ini, kondisi wilayah Kabupaten Pacitan masih belum mampu menampung untuk kawasan industri, karena akses ke Wilayah Kabupaten Pacitan cukup sulit apabila dilewati oleh kendaraan besar.

Meskipun di Kabupaten Pacitan tidak tersedia kawasan industri, potensi perindustrian yang bisa dikembangkan cukup beragam. Seperti potensi SDA berupa ikan tuna, bentonit, dan kapur serta sebagian kecil timah sehingga membuka akses bahan baku industri. Pemerintah Daerah, untuk menarik inverstor dalam bidang industri akan menyediakan RPIK yang nantinya diharapkan dapat membuka potensi investor dalam sektor industri. Apabila Kabupaten Pacitan nantinya telah mampu menyediakan kawasan industri maka kondisi perekonomian masyarakat dan keragaman akan lowongan pekerjaan akan sangat membantu dalam meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat.

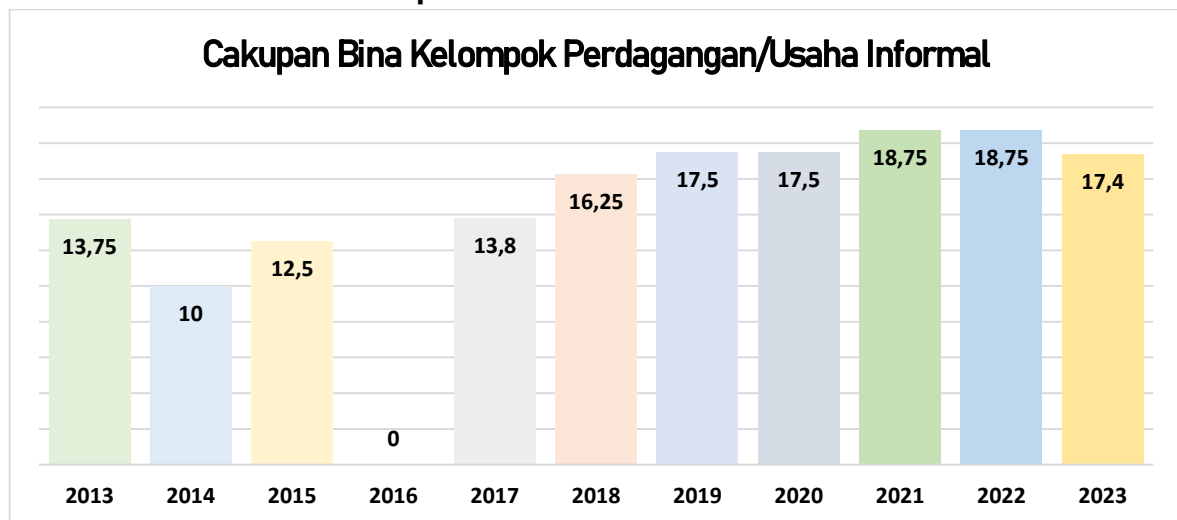
2.3.3.4 Perdagangan

Urusan perdagangan mencakup berbagai aspek yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan sektor perdagangan, serta upaya untuk mendorong pertumbuhan dan daya saing perdagangan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi daerah. Konsep perdagangan saat ini sangat membutuhkan kemajuan



teknologi untuk memasarkan barang dan jasa yang akan diperjualbelikan oleh masyarakat. Adanya teknologi dapat memudahkan perdagangan yang terjadi karena keterbatasan jarak. Oleh sebab itu, pemerintah daerah memberikan bantuan kepada masyarakat untuk membangun usaha mandiri. Kelompok usaha yang mendapatkan binaan dari pihak pemerintah daerah dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Gambar 2. 46 Cakupan Bina Kelompok Perdagangan Atau Usaha Informal Kabupaten Pacitan Tahun 2013-2023



Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan, 2024

Dalam sebelas tahun terakhir, jumlah kelompok perdagangan/usaha informal yang mendapatkan binaan terus meningkat. Pemerintah Daerah memiliki andil dalam memfasilitasi produk hasil pertanian guna ekspansi dalam pasar global. Selain itu, masyarakat juga memiliki komitmen bersama untuk memenuhi permintaan pasar yang diwujudkan dengan kolaborasi antara Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, BUMDes dan off-taker untuk memenuhi permintaan pasar. Akan tetapi untuk mewujudkan perdagangan yang diinginkan oleh masyarakat maka terdapat tantangan yang dihadapi yakni, adanya digitalisasi pasar menyebabkan penurunan daya beli masyarakat di pasar tradisional dan terbatasnya akses distribusi hasil alam karena faktor topografi.

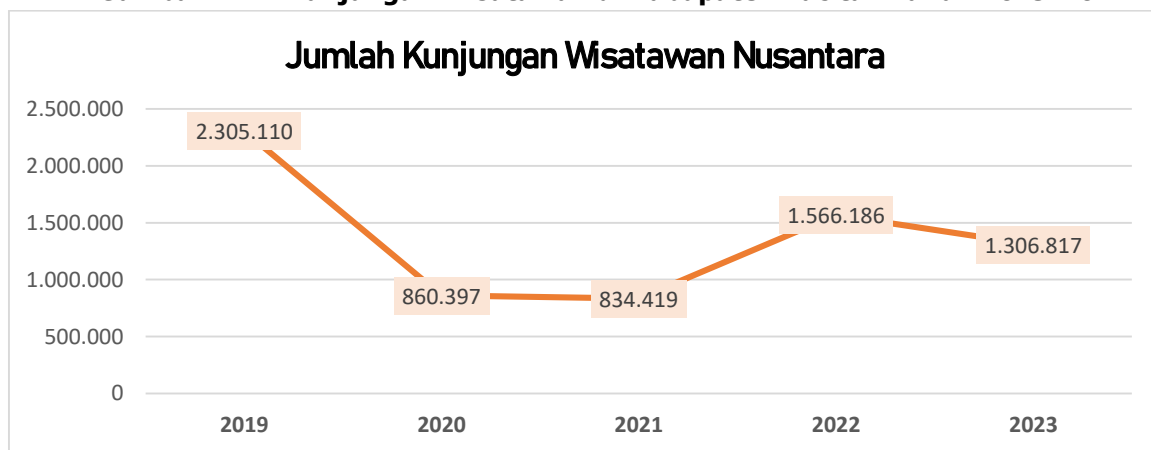
Permasalahan yang dihadapi dalam urusan perdagangan di Kabupaten Pacitan tidak jauh dari kurangnya kesiapan SDA dalam memenuhi kuota permintaan ekspor secara rutin, akses terbuka untuk perdagangan online terbatas, serta terbatasnya pasar yang berstandar nasional. Hal-hal ini dapat mempengaruhi pertumbuhan perdagangan yang ada di Kabupaten Pacitan. Akan tetapi, Kabupaten Pacitan memiliki peluang atau potensi yang belum dapat dikembangkan secara maksimal misalnya saja pengembangan eksportir baru, peningkatan permintaan komoditas di pasar global, dan terbukanya akses distribusi proyek toll dan pelabuhan niaga. Apabila permasalahan yang ada dapat diatasi dengan memaksimalkan potensi yang telah terdeteksi maka akses dalam perdagangan di Kabupaten Pacitan dapat dimaksimalkan dengan baik.



2.3.3.5 Pariwisata

Urusan pariwisata merupakan sektor andalan yang memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan berkontribusi signifikan pada pembangunan ekonomi masyarakat. Kondisi wilayah di Kabupaten Pacitan merupakan kondisi alam yang masih alami dan cocok untuk pengembangan pariwisata. Akan tetapi, pengembangan pariwisata tidak akan dapat berjalan baik tanpa adanya akses akomodasi yang memadai. Guna mengembangkan sektor pariwisata dibutuhkannya pengembangan infrastruktur, pemasaran, pengembangan SDM, peningkatan daya tarik dan pelayanan serta pengembangan kegiatan pariwisata. Berikut dibawah ini merupakan data kunjungan wisatawan yang tercatat di Kabupaten Pacitan tahun 2019-2023:

Gambar 2. 47 Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Pacitan Tahun 2019-2022



Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Pacitan, 2024

Kondisi pariwisata di Kabupaten Pacitan saat ini terhambat dalam pengembangannya, hal ini dikarenakan Kabupaten Pacitan masuk dalam zona pelatihan militer, sehingga keterbatasan pengembangan wilayah menjadi hal yang cukup berisiko. Selain itu, kondisi topografi Kabupaten Pacitan yang masih berupa bukit-bukit dengan akses jalan yang cukup sulit dilalui oleh beberapa jenis kendaraan maka akses untuk menuju wisata hanya dapat dilalui oleh kendaraan tertentu. Dengan minimnya komitmen untuk pendanaan dalam sektor pariwisata membuat promosi pariwisata yang ada memiliki keterbatasan sehingga masyarakat diluar Kabupaten Pacitan tidak mengetahui potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Pacitan.

2.3.4 Fokus Layanan Penunjang Urusan Pemerintah

2.3.4.1 Perencanaan Pembangunan

Penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan di Kabupaten Pacitan memiliki peran krusial dalam mengarahkan dan mengoptimalkan proses pembangunan daerah. Melalui perencanaan yang baik, pemerintah dapat menetapkan visi, misi, dan strategi pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Proses



perencanaan pembangunan yang partisipatif dan berkesinambungan dapat memastikan bahwa setiap langkah pembangunan diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Perencanaan yang matang juga menjadi landasan untuk alokasi sumber daya yang efektif, pendukung pengembangan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, serta pelestarian lingkungan. Dengan penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan yang efektif, Kabupaten Pacitan dapat menciptakan kondisi yang kondusif bagi pertumbuhan dan kemajuan yang berkelanjutan, memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah, dan memberikan dampak positif bagi kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Perlunya optimalisasi urusan perencanaan pembangunan di Kabupaten Pacitan sangat mendesak mengingat rendahnya persentase tingkat ketercapaian target Indikator Kinerja Daerah (IKU & IKD) pada tahun 2022, yang masih mencapai angka 59,26. Tingkat ketercapaian yang rendah ini mencerminkan adanya ketidakefektifan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan di Kabupaten Pacitan. Dalam konteks ini, perlu diidentifikasi dan dievaluasi penyebab rendahnya ketercapaian target untuk kemudian ditemukan solusi dan strategi perbaikan yang tepat.

Optimalisasi urusan perencanaan pembangunan dapat mencakup penguatan proses perencanaan, implementasi program dan kegiatan, serta pengawasan dan evaluasi yang lebih efektif. Langkah-langkah ini dapat melibatkan partisipasi aktif masyarakat, pemanfaatan data dan informasi yang akurat, serta peningkatan koordinasi antarinstansi terkait. Melalui optimalisasi ini, diharapkan Kabupaten Pacitan dapat mencapai tingkat ketercapaian target yang lebih tinggi, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Tabel 2. 58 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pacitan Tahun 2015-2023

No	Indikator Kinerja	Realisasi								
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Kapasitas Daerah				0,70	0,57	0,55	0,66	0,71	0,71
2	Indeks Reformasi Birokrasi						67,04	68,31	69,08	
4	Indeks Inovasi daerah								53,41	46,14

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan, 2024

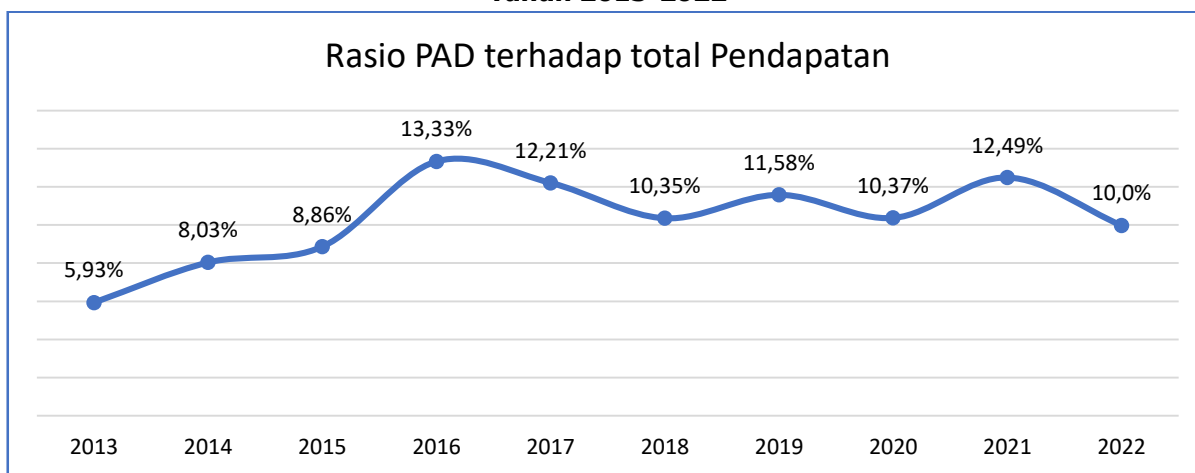
2.3.4.2 Keuangan

Urusan keuangan dalam fokus layanan penunjang urusan pemerintah di Kabupaten Pacitan memiliki peranan sentral dalam mendukung kelancaran dan



efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Urusan keuangan tidak hanya menjadi alat pengelolaan keuangan publik, tetapi juga menjelma sebagai instrumen strategis dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Dengan optimalisasi urusan keuangan, pemerintah dapat mengelola sumber daya keuangan secara transparan, akuntabel, dan efektif, memastikan alokasi dana yang tepat sasaran sesuai dengan prioritas pembangunan. Selain itu, penyelenggaraan keuangan yang baik juga menciptakan landasan yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan pemenuhan kebutuhan layanan dasar. Oleh karena itu, urusan keuangan bukan hanya sekadar aspek administratif, melainkan fondasi utama dalam mewujudkan visi pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Pacitan.

Gambar 2. 48 Rasio PAD Terhadap Total Pendapatan di Kabupaten Pacitan Tahun 2013-2022



Sumber: Badan Keuangan Daerah, 2023

Dalam sepuluh tahun terakhir, Kabupaten Pacitan mengalami fluktuasi capaian penyelenggaraan kinerja urusan keuangan, terlihat dari indikator Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan. Capaian tertinggi tercatat pada tahun 2016 dengan rasio sebesar 13,33%, namun selanjutnya mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun hingga mencapai 10% di tahun 2022. Fluktuasi ini mencerminkan dinamika dalam mengelola dan mengoptimalkan potensi pendapatan daerah. Peningkatan rasio PAD terhadap total pendapatan pada tahun 2016 mungkin dipengaruhi oleh keberhasilan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah atau implementasi kebijakan yang mendukung pertumbuhan PAD. Namun, fluktuasi selanjutnya dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan regulasi, kondisi ekonomi, atau perubahan dalam struktur perekonomian daerah.

Adanya kecenderungan penurunan rasio pada tahun 2022 menunjukkan adanya tantangan atau permasalahan dalam mengelola sumber daya keuangan daerah. Hal ini dapat menjadi sinyal bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap kebijakan fiskal dan strategi pengelolaan keuangan, serta mengidentifikasi potensi peningkatan pendapatan daerah. Dengan memahami fluktuasi capaian kinerja urusan keuangan, Kabupaten Pacitan dapat merumuskan langkah-langkah perbaikan



yang tepat guna meningkatkan keberlanjutan keuangan daerah dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang. Secara lengkap, berikut beberapa indikator representatif dalam mencerminkan penyelenggaraan keuangan di Kabupaten Pacitan dalam sepuluh tahun terakhir:

Tabel 2. 59 Capaian Indikator Kinerja Urusan Keuangan Kabupaten Pacitan Tahun 2013-2023

No	Indikator Kinerja	Realisasi										
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase PD Yang Tidak Terdapat Temuan Material	100,00	93,02	76,74	93,02	93,02	88,37	69,77	100,00	100,00	84,62	
3	Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	100	100	97	100	100	92	93	81	82	55	
4	Pertumbuhan PAD	10%	60,79	24,85	171%	-41,03%	-0,08	0,075	-0,15	0,26	-0,219	
5	Rasio PAD terhadap total Pendapatan	5,93%	8,03%	8,86%	13,33%	12,21%	10,35%	11,58%	10,37%	12,49%	10,0%	
6	Rasio Pajak Terhadap PAD	14,37%	20,42%	17,23%	19,69%	14,72%	18,12%	18,12%	20,81%	16,80%	25,50%	21,84%
7	Prosentase tertib BMD	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
8	Prosentase BMD yang teregistrasi	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan, 2024

2.3.4.3 Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Penyelenggaraan urusan kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan dalam fokus layanan penunjang urusan pemerintah di Kabupaten Pacitan memiliki peran yang krusial dalam memastikan kelancaran dan kualitas layanan publik. Urusan kepegawaian menjadi fondasi bagi kinerja birokrasi, dengan optimalisasi sumber daya manusia yang berkualitas menjadi kunci keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Seiring dengan itu, urusan pendidikan dan pelatihan merupakan sarana

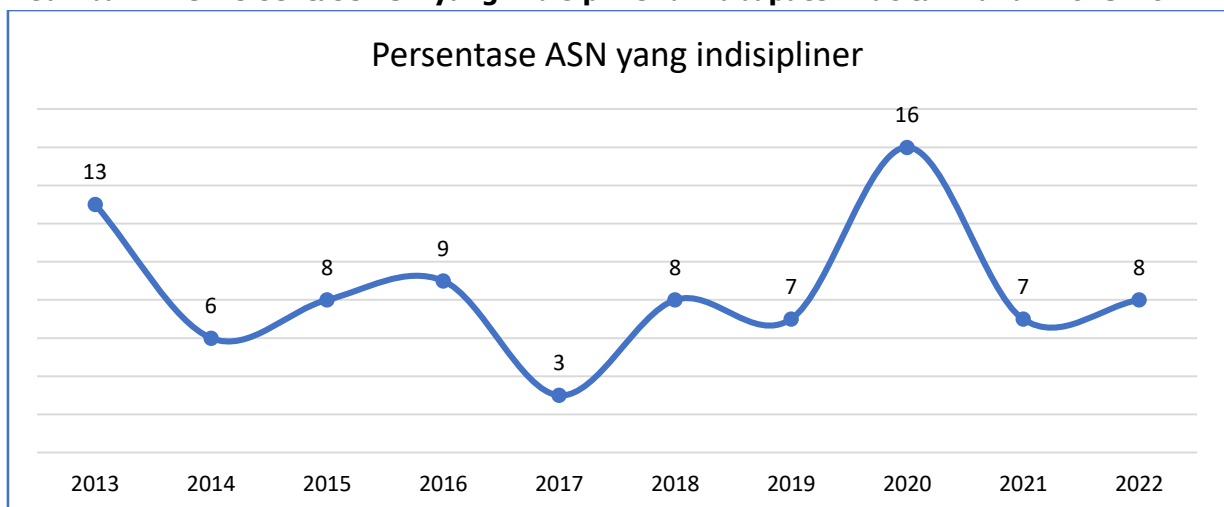


untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pegawai sehingga mampu menjawab dinamika tuntutan masyarakat dan perkembangan teknologi. Dengan mengintegrasikan urusan ini, Kabupaten Pacitan dapat menciptakan aparatur yang berkualitas, memiliki keunggulan kompetitif, dan siap menghadapi perubahan serta tuntutan tugas pemerintahan yang semakin kompleks di era modern ini.

Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, Kabupaten Pacitan mencatat fluktuasi capaian penyelenggaraan kinerja urusan kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan, yang dapat dilihat dari indikator Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) yang indisipliner. Capaian tertinggi tercatat pada tahun 2020, dengan persentase 16%, namun selanjutnya mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun hingga mencapai 8% di tahun 2022. Perlu dicatat bahwa indikator ini bersifat negatif, yang artinya penurunan persentase menunjukkan adanya indikasi positif terhadap penyelenggaraan urusan kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan di Kabupaten Pacitan.

Penurunan persentase ASN yang indisipliner dapat diartikan sebagai upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan disiplin dan kualitas pegawai melalui kebijakan dan program pendidikan dan pelatihan. Capaian negatif pada tahun 2020 kemungkinan dapat dipengaruhi oleh implementasi kebijakan atau program pelatihan kedisiplinan yang berhasil. Namun, fluktuasi selanjutnya dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan regulasi, perubahan dalam manajemen kepegawaian, atau dampak situasi eksternal tertentu. Penurunan persentase indisipliner ASN sejalan dengan upaya perbaikan dan peningkatan kualitas layanan publik. Hal ini mencerminkan komitmen Kabupaten Pacitan untuk memastikan aparatur yang profesional, disiplin, dan mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Gambar 2. 49 Persentase ASN yang Indisipliner di Kabupaten Pacitan Tahun 2013-2022



Sumber: Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Pacitan, 2024



Isu manajemen SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum terstruktur di Kabupaten Pacitan menjadi tantangan signifikan dalam konteks pembangunan jangka panjang daerah, khususnya terkait dengan transformasi tata kelola pemerintahan. Manajemen SDM yang terstruktur merupakan fondasi utama dalam membangun birokrasi yang efisien, responsif, dan profesional. Pentingnya manajemen SDM yang terstruktur terkait erat dengan kemampuan pemerintah daerah untuk merancang kebijakan yang efektif, menerapkan program pembangunan, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. ASN yang memiliki kualifikasi, kompetensi, dan kedisiplinan yang baik akan lebih mampu menjawab kompleksitas tugas pemerintahan, terutama dalam menghadapi berbagai perubahan dan tuntutan masyarakat yang semakin dinamis.

Transformasi tata kelola pemerintahan, sebagai bagian dari agenda pembangunan jangka panjang, memerlukan perubahan dalam paradigma manajemen SDM. Ini mencakup peningkatan kapasitas, penilaian kinerja yang objektif, dan implementasi sistem manajemen yang berorientasi pada hasil. Tanpa manajemen SDM yang terstruktur, risiko ketidakmampuan dalam mengelola sumber daya manusia secara efektif dapat merugikan efisiensi operasional pemerintahan, menghambat inovasi, dan menghambat pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang. Dengan mengatasi isu manajemen SDM ASN yang belum terstruktur, Kabupaten Pacitan dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, mendorong profesionalisme, dan membangun kapasitas ASN untuk menjawab tantangan pembangunan di era yang terus berubah. Ini akan membantu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berdaya saing sehingga sesuai dengan visi pembangunan jangka panjang daerah. Adapun indikator-indikator yang secara umum dapat menjadi tolok ukur keberhasilan dalam penyelenggaraan urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 60 Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pacitan Tahun 2013-2023

No	Indikator Kinerja	Realisasi										
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Profesionalitas ASN	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	57	50,18	52,47	n/a
2	Nilai sistem Merit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	101,5	217,5	n/a
3	Jumlah ASN yang mendapatkan peningkatan kapasitas	394	699	683	983	636	687	323	85	416	117	n/a
4	Persentase ASN yang indisipliner	13	6	8	9	3	8	7	16	7	8	n/a

Sumber: Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Pacitan, 2024



2.3.5 Fokus Layanan Pengawasan Urusan Pemerintah

2.3.5.1 Sekretariat Daerah

Sekretariat daerah memiliki fungsi sebagai middle line dalam organisasi pemerintah daerah tentunya tidak dapat bekerja tanpa bantuan dari perangkat daerah lainnya. Permasalahan yang dihadapi oleh sekretariat daerah tidak jauh dari permasalahan koordinasi antar perangkat daerah dan harmonisasi kebijakan. Jika dilihat dari perspektif sektoral, permasalahan yang dihadapi mencakup rendahnya jejaring kerja sama sebagai sarana penguatan tata kelola perekonomian, kebutuhan akan regulasi yang adaptif, serta akuntabilitas dan efisiensi penyelenggaraan layanan pemerintahan.

2.3.5.2 Inspektorat

Inspektorat merupakan penunjang urusan pemerintah yang berfungsi untuk pengawasan internal pemerintah. Titik tekan inspektorat adalah untuk memastikan seluruh perangkat daerah bekerja sesuai dengan kaidah yang telah ditentukan atau tidak melaksanakan penyimpangan. Oleh karena hal tersebut, kinerja inspektorat dapat dilihat setidaknya dari 4 indikator yaitu Level APIP, Maturitas SPIP, Unit Pelayanan Publik yang Berstatus Zona Integritas, dan Persentase PD yang mendapatkan Nilai SAKIP A. Berdasarkan keempat indikator tersebut dapat dilihat bahwa kinerja inspektorat masih perlu untuk ditingkatkan khususnya dalam hal efektivitas pengawasan internal pemerintah mengingat mayoritas nilai SAKIP perangkat daerah masih belum mencapai kategori A. Namun demikian pengelolaan internal inspektorat sudah cukup baik dengan diraihnya Level APIP di atas 2 dan maturitas SPIP di atas 3.

Tabel 2. 61 Capaian Indikator Kinerja Urusan Inspaktorat Kabupaten Pacitan Tahun 2015-2022

Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Tahun							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Level APIP	1	1	1	1	1	1	1.33	2.33
Maturitas SPIP								3.194
Unit Pelayanan Publik yang Berstatus Zona Integritas						1 (Puskesmas Bubakan)	n/a	2 (Puskesmas Gemaharjo, DPMPSTSP)
Persentase PD yang mendapatkan Nilai SAKIP A				16.27	16.27	11.62	11.62	7.69

Sumber: Inspektorat Kabupaten Pacitan, 2024



2.3.6 Fokus Layanan Pemerintah Umum

2.3.6.1 Kesatuan Bangsa dan Politik

Kinerja berkenaan dengan kesatuan bangsa dan politik dapat dilihat dari ada atau tidaknya konflik yang terjadi di Kabupaten Pacitan. Selain itu jika terjadi konflik harus dapat diselesaikan secara tuntas. Selama rentang waktu 2013 sampai 2022, seluruh konflik yang terjadi di Kabupaten Pacitan dapat ditangani dengan baik sehingga stabilitas wilayah dapat terjaga.

Tabel 2. 62 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan Tahun 2013-2022

Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Tahun									
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Konflik Sosial Yang Ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, 2023

2.4 Aspek Daya Saing

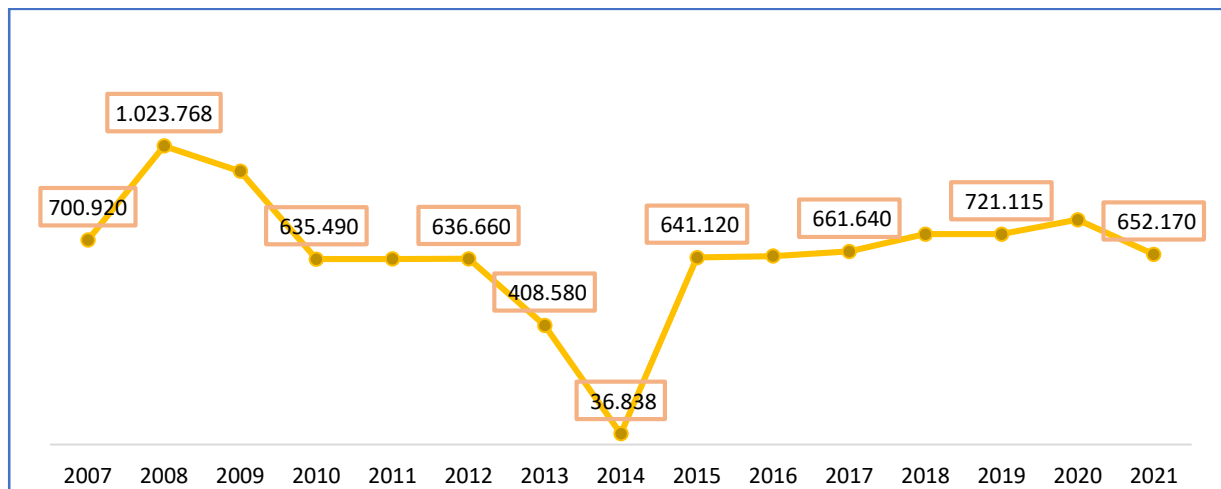
Aspek daya saing merupakan aspek yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu daerah dalam menghadapi persaingan dengan daerah lainnya, baik dalam bidang ekonomi, infrastruktur, investasi dan sumber daya manusia. Aspek daya saing yang ada di wilayah Kabupaten Pacitan mencakup terhadap beberapa hal, di antaranya mencakup fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim berinvestasi dan juga fokus terkait sumber daya manusia.

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Fokus kemampuan ekonomi daerah merujuk pada berbagai aspek yang mempengaruhi kemampuan daerah dalam menghadapi persaingan ekonomi dengan daerah lainnya. Kemampuan daerah dalam perekonomian dapat dinilai dari seberapa mampu daerah tersebut untuk mensejahterakan masyarakat, apabila daerah tersebut memiliki kemampuan ekonomi yang cukup baik dan pembangunan yang dijalankan mampu membawa masyarakat ke arah yang lebih sejahtera, maka daerah tersebut telah dinyatakan mampu dalam segi ekonomi daerah. Kemampuan ekonomi daerah juga berkaitan dengan daya saing daerah yakni kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik bagi pelaku ekonomi yang telah berada di dalam dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan nilai tambah bagi peningkatan daya saing daerah.



Gambar 2. 50 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kabupaten Pacitan Tahun 2007-2021

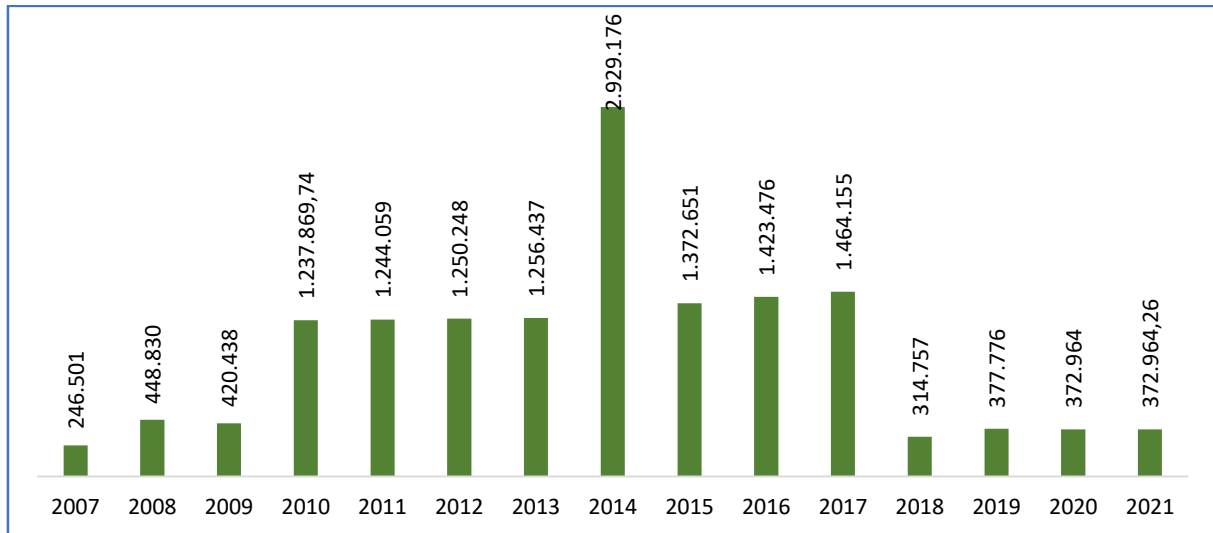


Fokus kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita masyarakat. Semakin tinggi pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita masyarakat maka dapat diartikan bahwa kesejahteraan ekonomi masyarakat semakin baik. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita sendiri merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur konsumsi rumah tangga per orang, hasil dari pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita merupakan jumlah rata-rata yang dibelanjakan oleh setiap individu dalam sebuah rumah tangga untuk membeli barang dan jasa yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. Hingga tahun 2021 pengeluaran konsumsi Rumah tangga per kapita di Kabupaten Pacitan mengalami nilai yang cukup fluktuatif. Dengan kata lain kesejahteraan ekonomi masyarakat masih dirasa kurang apabila dibandingkan dengan daerah lainnya.

Selain pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita yang dihitung untuk mengetahui tingkat kemampuan ekonomi daerah, daerah juga perlu untuk menghitung pengeluaran konsumsi non pangan per kapitanya. Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita sendiri merupakan ukuran yang digunakan untuk mengukur belanja rumah tangga yang tidak digunakan untuk membeli makanan atau minuman. Belanja rumah tangga yang dimaksud adalah untuk membeli barang dan jasa yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari seperti pakaian, perabotan rumah tangga, transportasi, hiburan dan lain-lain. Seperti halnya pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, semakin tinggi pengeluaran konsumsi non pangan per kapita maka semakin tinggi juga kesejahteraan ekonomi masyarakat.



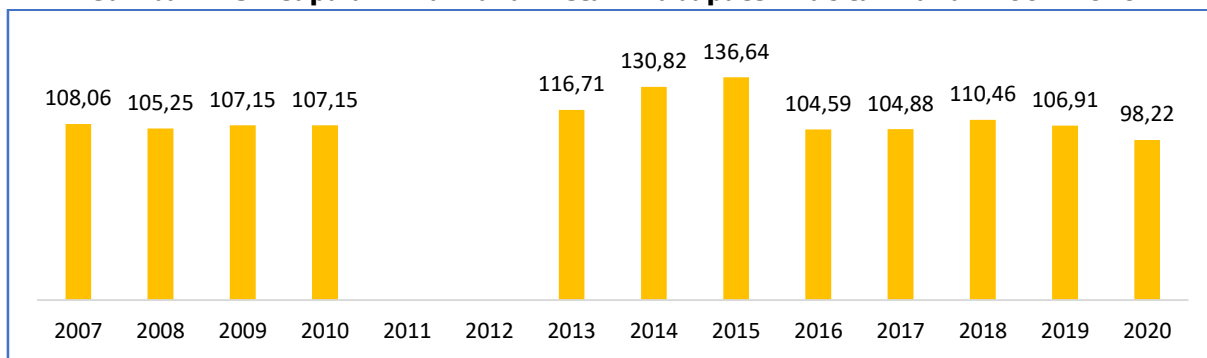
Gambar 2. 51 Capaian Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita Kabupaten Pacitan Tahun 2007-2021



Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita di Kabupaten Pacitan apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini menandakan bahwa terdapat penurunan kemampuan masyarakat dalam pembelian barang non pangan. Meningkatnya harga barang dan jasa juga memberikan pengaruh dalam konsumsi masyarakat untuk barang non pangan. Kemampuan ekonomi daerah juga diukur dari nilai tukar petani, nilai tukar petani sendiri merupakan ukuran harga yang diterima oleh petani untuk produksi pertanian yang mereka hasilkan. Nilai tukar petani sendiri dapat dihitung dengan membagi harga jual produk pertanian dengan jumlah produksinya. Berbeda dengan pengukuran aspek lainnya, nilai tukar petani hanya digunakan untuk mengukur kesejahteraan ekonomi petani. Maka semakin tinggi nilai tukar petani, semakin tinggi pula kesejahteraan ekonomi petani. Kabupaten Pacitan sendiri merupakan salah satu daerah dengan PDRB sektor pertanian tertinggi dibandingkan dengan lapangan usaha lainnya. Oleh sebab itu nilai tukar petani hingga tahun 2020 juga dapat dinilai tinggi meskipun di tahun tersebut sempat mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun lainnya. Akan tetapi di tahun 2011 dan 2012, nilai tukar petani tidak dihitung sehingga capaian pada tahun tersebut nihil.



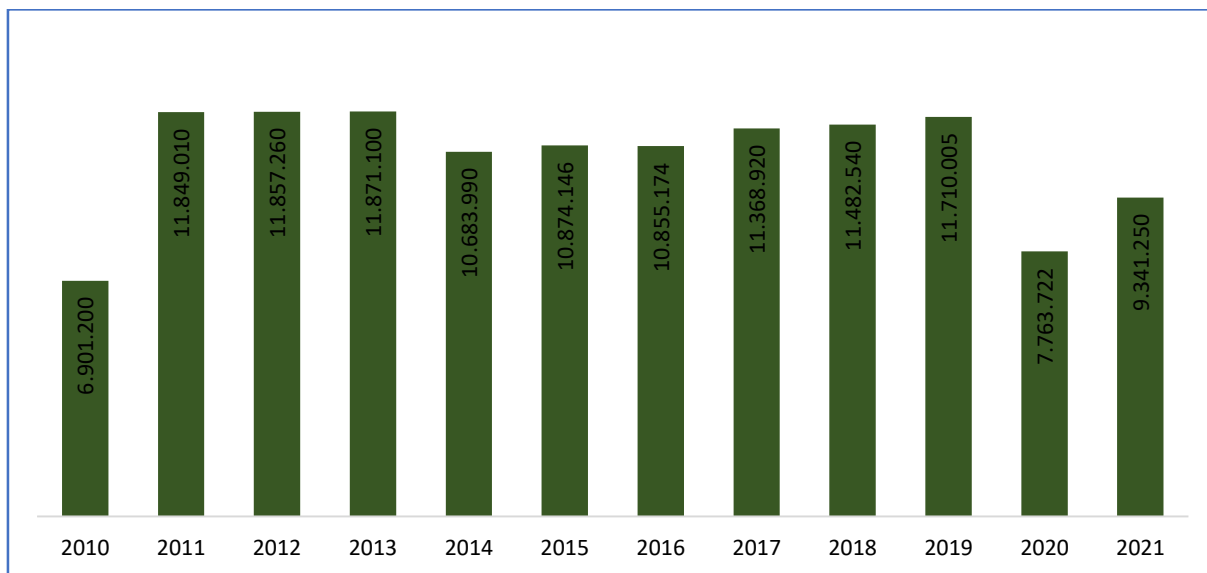
Gambar 2. 52 Capaian Nilai Tukar Petani Kabupaten Pacitan Tahun 2007-2020



2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Fokus fasilitas wilayah/infrastruktur merupakan pengukuran dalam berbagai aspek yang mempengaruhi kualitas dan ketersediaan fasilitas yang ada di suatu daerah. Biasanya pengukuran fasilitas wilayah/infrastruktur berhubungan dengan ketersediaan jalan yang baik dan terjaga, ketersediaan listrik dan air bersih dan ketersediaan fasilitas publik lainnya. Kondisi geomorfologi Kabupaten Pacitan yang berbukit dan bergunung serta bertambahnya penduduk setiap tahunnya menuntut tersedianya infrastruktur jalan dan sarana transportasi yang cukup, layak dan memadai. Jika hal tersebut tidak terpenuhi dapat mengakibatkan pertumbuhan di wilayah pedesaan mengalami hambatan.

Gambar 2. 53 Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum di Kabupaten Pacitan Tahun 2010-2021



Fokus fasilitas wilayah/infrastruktur tidak terlepas dari penataan ruang yang merupakan bagian aspek yang menjadi daya saing daerah. Penataan ruang yang baik dan memenuhi standar kehidupan menjadikan masyarakat hidup tenang, aman dan nyaman. Dalam penerapannya, fokus fasilitas wilayah di Kabupaten Pacitan dibedakan menjadi 5 lokus utama pembagian wilayah daerah, yakni wilayah produktif, wilayah



industry, wilayah banjir, wilayah kekeringan dan wilayah perkotaan. Wilayah-wilayah inilah yang nantinya akan menjadi perhatian besar dalam pelaksanaan kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Wilayah produktif merupakan are geografis yang memiliki potensi untuk menghasilkan produk atau jasa yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Wilayah produktif sendiri dapat meliputi banyak aspek, misalnya saja lahan pertanian, Kawasan perdagangan, dan pariwisata. Dengan meningkatkan luas wilayah produktif disertai dengan kualitas dan ketersediaan fasilitas, maka akan membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Selanjutnya terdapat wilayah industry yang sebagaimana masih menjadi bagian dari wilayah produktif akan tetapi sifatnya lebih spesifik pada Kawasan yang memiliki atau disediakan untuk fasilitas industri seperti pabrik, Gudang dan are produksi besar. Berbeda dari dua klasifikasi wilayah di atas, wilayah banjir dan kekeringan merupakan klasifikasi wilayah yang diperuntukkan untuk memetakan wilayah-wilayah yang rawan terkena banjir dan kekeringan. Harapannya, untuk di masa mendatang persentase wilayah yang meliputi wilayah banjir dan kekeringan persentasenya dapat menurun. Terakhir merupakan wilayah perkotaan merupakan Kawasan yang di khususkan untuk permukiman padat penduduk, biasanya dengan populasi yang besar dan kompleksitas sosial-ekonomi yang tinggi.

Tabel 2. 63 Indikator Fokus Wilayah dan Infrastruktur Bidang Penataan Ruang Tahun 2010-2023

No	Indikator	Realisasi													
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Luas Wilayah Produktif	20,22	20,22	20,22	20,22	20,22	20,22	20,22	20,22	20,22	20,24	20,25	20,25	N/a	N/a
2	Luas Wilayah Industri	9,68	10,8	12,19	13,86	15,7	19	20,84	21,8	23,93	26,83	30,25	33,66	N/a	N/a
3	Luas Wilayah Kebanjiran	11,42	9,65	8,43	8,06	7,61	7,51	7,51	7,3	7,2	7,1	7,02	7,01	N/a	N/a
4	Luas Wilayah Kekeringan	22,51	21,38	19,06	19,58	19,4	17,5	16,4	18,03	17,54	17,07	16,7	16,15	N/a	N/a
5	Luas Wilayah Perkotaan	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	11,11	11,11	N/a	N/a

Sumber: RTRW Kabupaten Pacitan, Tahun 2024-2044

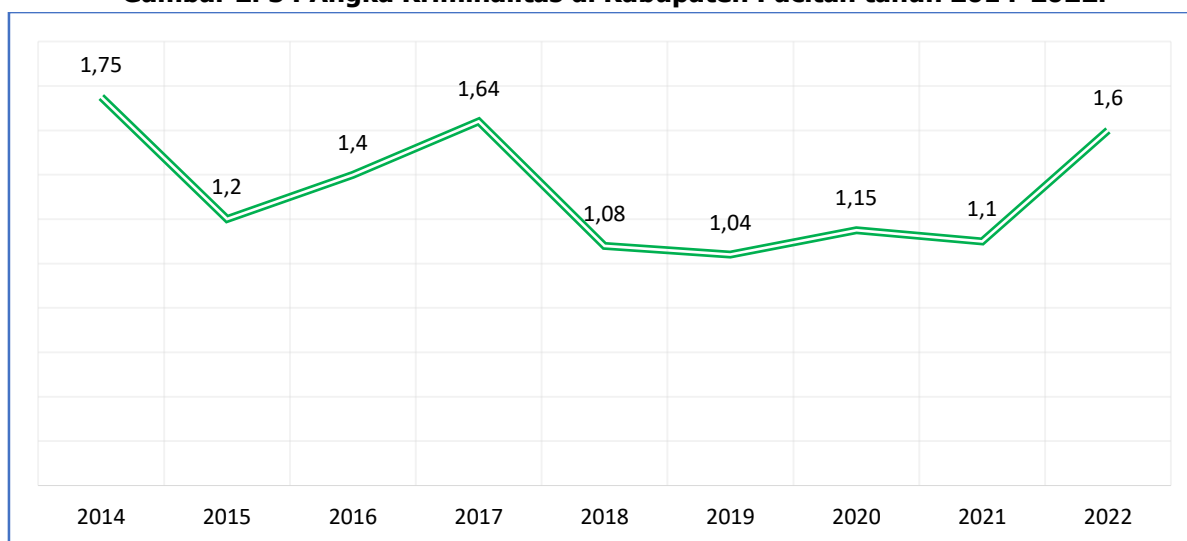
2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Fokus iklim berinvestasi merupakan aspek yang mempengaruhi keputusan investasi berdasarkan dampak iklim. Investasi sendiri menjadi salah satu hal yang menjadi daya saing dalam suatu daerah. Investasi menjadi daya saing dalam suatu daerah karena investasi dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat sinergi berbagai sektor pembangunan daerah dan menciptakan produk atas jasa yang berstandar internasional. Selain itu investasi juga menjadi alasan terkait peningkatan



kualitas hidup, sinergi sektoral, beragamnya produk dan jasa yang berstandar nasional maupun internasional, meningkatkan ekonomi mikro, pengembangan teknologi, mampu meningkatkan infrastruktur dan peningkatan pendidikan serta Sumber daya manusia. Semakin banyak investasi yang didapatkan oleh daerah maka dapat membantu upaya pembangunan dan pengembangan daerah. Iklim investasi dalam suatu daerah akan dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti di Kabupaten Pacitan yang dipengaruhi oleh angka kriminalitas yang terjadi, banyaknya demo, pajak dan retribusi daerah, penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu satu pintu, proses ijin usaha dan juga perda/perbup yang mengaturnya.

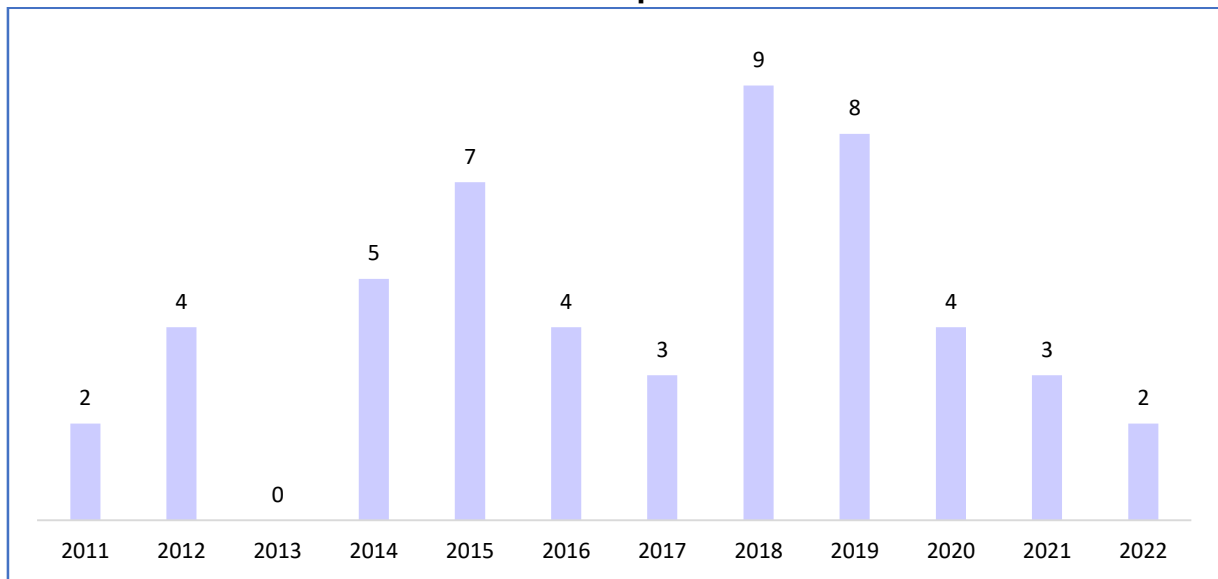
Gambar 2. 54 Angka Kriminalitas di Kabupaten Pacitan tahun 2014-2022.



Keberlangsungan dan kelancaran kegiatan investasi pada suatu daerah, secara tidak langsung tentu diperlukan adanya perda yang mengaturnya. Hal ini untuk memberikan aturan maupun batas-batas pelaksanaan kegiatan investasi yang dapat dilakukan oleh para investor. Seperti halnya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan yang memberlakukan Perda/Perbup dan kebijakan yang mendukung iklim investasi di daerahnya. Selain itu perda dan keamanan daerah juga mempengaruhi minat investasi. Iklim berinvestasi yang baik dapat mempengaruhi angka kriminalitas di suatu daerah. Iklim berinvestasi yang baik dapat meningkatkan daya tarik investasi yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Sedangkan kesejahteraan ekonomi yang tinggi dapat mengurangi angka kriminalitas karena masyarakat yang lebih sejahtera cenderung lebih aman dan lebih terlibat dalam aktivitas yang produktif.



Gambar 2. 55 Jumlah Demo di Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2022



Tabel 2. 64 Skor Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2023

Daerah	Lingkungan Pendukung				SDM				Pasar		Ekonomi Sistem		Skor IDSD
	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
Kab. Pacitan	4,44	1,95	4,02	3,30	4,03	3,44	3,05	2,70	1,67	4,17	2,57	1,87	3,10
Prov. Jawa Timur	4,14	4,17	3,93	3,46	3,90	3,71	1,40	3,53	3,49	5,00	4,15	4,44	3,78
Nasional	4,30	2,71	3,58	3,54	3,79	3,77	2,64	3,85	2,53	4,36	3,22	3,03	3,44

Sumber : Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2024

Tabel di atas menggambarkan Skor Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur, dan rata-rata Nasional untuk tahun 2023. Tabel ini terdiri dari berbagai pilar yang dikategorikan dalam Lingkungan Pendukung, Sumber Daya Manusia (SDM), Pasar, dan Ekonomi Sistem. Kabupaten Pacitan memperoleh skor IDSD sebesar 3,10, lebih rendah dibandingkan dengan skor Provinsi Jawa Timur yang mencapai 3,78, dan juga lebih rendah dari skor nasional yang berada di angka 3,44. Pada aspek Lingkungan Pendukung, Pacitan memiliki skor tertinggi pada Pilar 1 (4,44) namun cukup rendah pada Pilar 2 (1,95), menandakan adanya ketidakseimbangan dalam sub-aspek ini. Sementara itu, pada aspek SDM, skor Pacitan berkisar antara 3,05 hingga 4,03, sedikit di bawah skor Jawa Timur dan nasional yang menunjukkan rata-rata di atas 3,7. Di sektor Pasar, terdapat skor yang berfluktuasi dengan nilai terendah di Pilar 9 (1,67) dan tertinggi di Pilar 10 (4,17), mengindikasikan bahwa sektor ini masih memerlukan penguatan. Terakhir, di kategori Ekonomi Sistem, skor Pacitan juga lebih rendah dibandingkan dengan Jawa Timur dan nasional, terutama pada Pilar 12 yang hanya mencapai 1,87.



2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Fokus sumber daya manusia merupakan aspek yang mempengaruhi kualitas dan ketersediaan sumber daya manusia di suatu daerah. Untuk melihat kualitas sumber daya manusia terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan yakni terkait kualitas pendidikan, keterampilan SDM, kemudahan fasilitas pendidikan untuk SDM dan kemampuan berpikir kritis. Kualitas Sumber daya manusia juga menjadi salah satu modal yang harus dimiliki daerah untuk mampu bersaing dengan daerah lainnya. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki oleh seseorang, maka semakin tinggi pula tingkat kualitas yang dimiliki SDM tersebut. Kualitas daerah dalam mengelola tata kehidupan yang baik tergantung dari kualitas Sumber daya yang tersedia di daerah tersebut. Adapun untuk melihat fokus sumber daya manusia yang ada pada suatu daerah maka dapat dilihat dari kualitas pendidikan, jumlah atau rasio lulusan masyarakatnya dan rasio ketergantungan.

Sektor pendidikan memiliki peran yang krusial dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Pelayanan urusan pendidikan yang optimal dapat meningkatkan kapasitas masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan terutama dalam upaya berkontribusi bagi pembangunan daerah. Selain itu, pendidikan juga dapat menghasilkan SDM yang berdaya saing. Capaian kualitas pendidikan dapat diukur melalui dua indikator yang terdiri dari angka literasi dan numerasi serta indeks pendidikan. Berikut merupakan capaian angka literasi dan numerasi di Kabupaten Pacitan.

Tabel 2. 65 Capaian Angka Literasi dan Numerasi di Kabupaten Pacitan Tahun 2023

Jenjang	Tahun 2023	
	Literasi	Numerasi
SD	77,28	66,57
SMP	79,64	64,62
SMA	74,93	59,96
SMK	61,46	48,86
Rata-Rata	73,3275	60,0025

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, 2024

Tabel di atas menyajikan capaian angka literasi dan numerasi di Kabupaten Pacitan pada tahun 2023. Pada jenjang SD, literasi mencapai 77,28 dan numerasi mencapai 66,57. Kemudian, pada jenjang SMP, angka literasi dan numerasi masing-masing mencapai 79,64 dan 64,62. Setelah itu, angka literasi dan numerasi pada tingkat SMK memiliki capaian terendah dari tiga jenjang lainnya dengan capaian 61,46 pada angka literasi dan 48,86 pada numerasi. Pada jenjang SMA, angka literasi adalah 74,93 dan angka numerasi adalah 59,96.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah indikator yang merepresentasikan tingkat pembangunan literasi masyarakat. Data IPLM diperoleh dari upaya pemerintah daerah untuk mengembangkan perpustakaan sebagai sarana



belajar untuk meningkatkan literasi masyarakat. Capaian IPLM dapat dimanfaatkan sebagai landasan dalam menyusun program-program peningkatan literasi masyarakat. Berikut merupakan capaian IPLM di Kabupaten Pacitan.

Tabel 2. 66 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2023

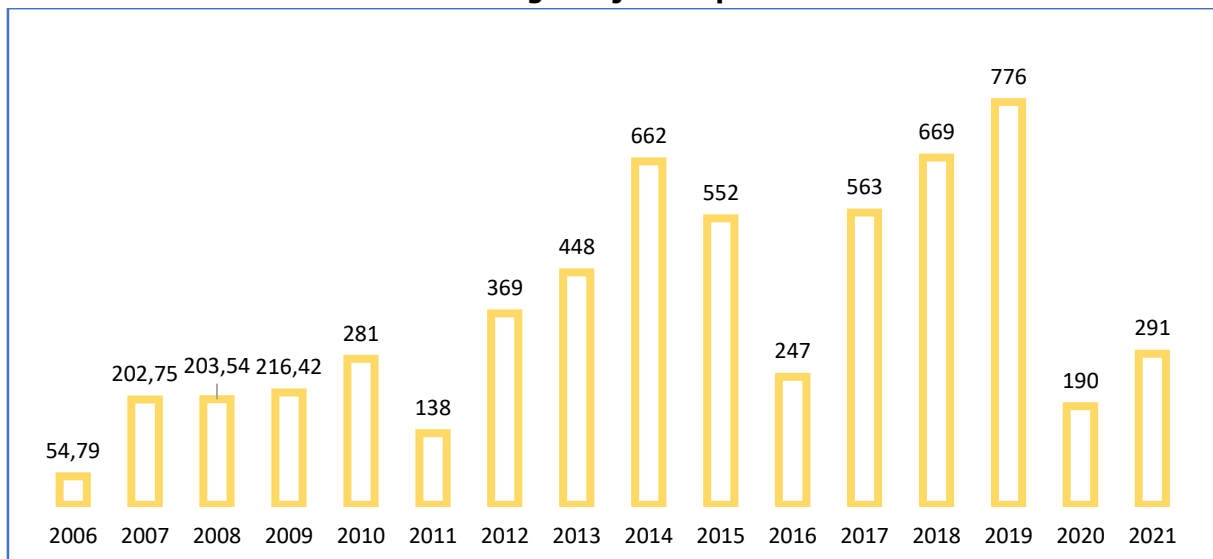
Indikator	2021	2022	2023
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	4,68	64.50	68,39

Sumber: Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Pacitan, 2024

Grafik di atas menyajikan capaian IPLM Kabupaten Pacitan selama tiga tahun dari 2021 sampai 2023. Secara keseluruhan, IPLM Kabupaten Pacitan mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, IPLM adalah 4,68. Sejak itu, IPLM mengalami peningkatan yang sangat pesat sehingga mencapai 68,39 pada tahun 2023.

Indeks Pendidikan merupakan indikator yang merepresentasikan keberhasilan pembangunan pendidikan. Capaian indeks Pendidikan memiliki pengaruh pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Semakin baik capaian indeks pendidikan suatu wilayah maka semakin berkualitas sumber daya manusianya. Berikut merupakan capaian indeks pendidikan Kabupaten Pacitan.

Gambar 2. 56 Rasio Kualitas Tenaga Kerja Kabupaten Pacitan tahun 2006-2021.



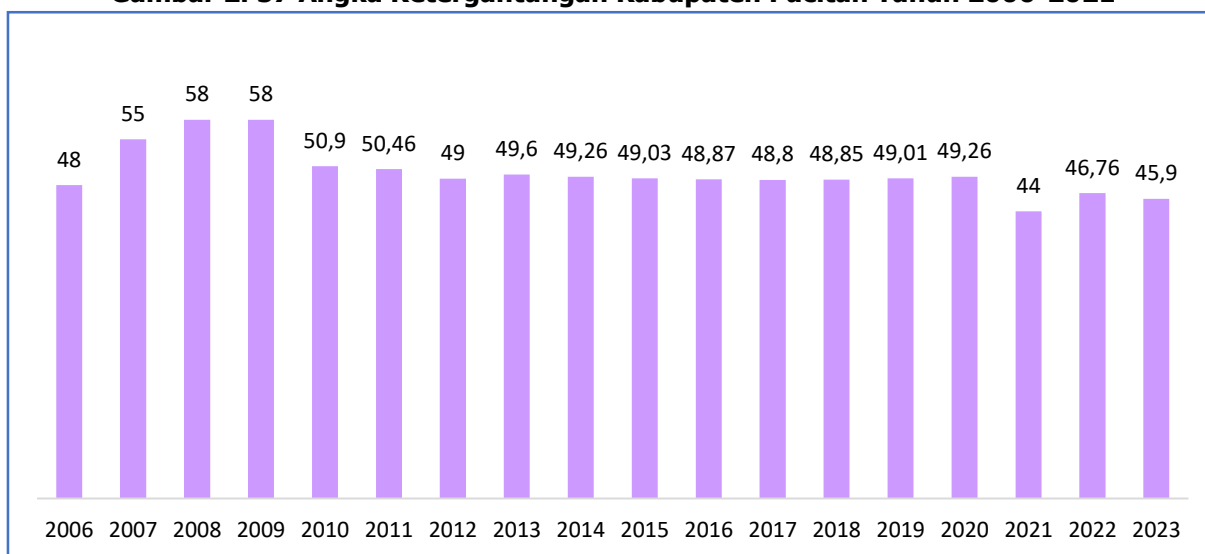
Rasio kualitas tenaga kerja yang ada di Kabupaten Pacitan dalam 15 tahun menunjukkan angka yang tidak stabil. Rasio dengan kualitas tenaga kerja tertinggi ada pada tahun 2019 dan mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2020. melihat dari angka tersebut, maka dapat disimpulkan di tahun 2020 terjadi ketidak stabilan ekonomi sehingga menyebabkan terhambatnya SDM yang akan



menyelesaikan pendidikannya pada tahap perguruan tinggi. Ketidak stabilan tersebut menandakan bahwa masyarakat di Kabupaten Pacitan belum secara maksimal meningkatkan taraf pendidikannya hingga perguruan tinggi. Sedangkan saat ini kebutuhan SDM yang di minati atau di cari oleh beberapa sektor lapangan kerja memiliki kreteria minimal dengan pendidikan sarjana. Untuk mengatasi permasalahan ini, maka bantuan dari pemerintah daerah untuk mengatasi kualitas tenaga kerja yang dimiliki perlu ditingkatkan dengan memberikan upaya-upaya yang memudahkan masyarakat untuk melanjutkan pendidikannya hingga jenjang pendidikan sarjana.

Selain rasio kualitas tenaga kerja, untuk mengukur sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu daerah dapat juga melihat rasio ketergantungannya. Rasio ketergantungan sendiri dapat digunakan untuk melihat apakah suatu daerah merupakan kategori daerah maju dengan produktivitas yang tinggi atau daerah berkembang dengan produktivitas penduduk yang masih rendah. Semakin tinggi angka rasio ketergantungan menunjukkan semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif/tidak produktif lagi. Sementara itu semakin rendah angka rasio menunjukkan semakin rendah beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif/tidak produktif lagi.

Gambar 2. 57 Angka Ketergantungan Kabupaten Pacitan Tahun 2006-2021





2.5 Evaluasi RPJPD 2005 - 2025

2.5.1. Evaluasi Berdasarkan Periode RPJPD

2.5.1.1. RPJPD Periode 1

Berdasarkan arah kebijakan pada periode pertama (2006-2011) maka keberhasilan dari arah kebijakan tersebut adalah:

1. Pada Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang Memadai Baik dari Sisi Kuantitas maupun Kualitas maka dapat diukur keberhasilannya melalui indikator keberhasilan pencapaian pada Misi 3 yaitu Kondisi Jalan (m) (Baik, Sedang, Rusak, Macadam, dan Tanah), Penduduk Berakses Air Bersih, Rumah Layak Huni, dan Cakupan Jaringan Listrik (SR). berdasarkan indikator tersebut, pada kondisi jalan masih belum mencapai target terutama pada kondisi jalan macadam dimana targetnya yaitu 74.694 km tetapi pada realisasinya masih terdapat 222.037 Km. Indikator Cakupan Pelayanan Air Bersih, Cakupan Jaringan Listrik (SR), dan Rumah Layak Huni sudah memenuhi target.
2. Pada Mewujudkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pacitan yang Berkualitas Tinggi Khususnya yang Ditunjukkan oleh Indikator Tingkat Pendidikan dan Keterampilan, Derajat Kesehatan, dan Moralitas Masyarakat serta Aparatur Pemerintah Daerah maka dapat diukur keberhasilannya pada Misi 1 yaitu angka melek huruf, angka partisipasi sekolah, usia harapan hidup, Angka kematian ibu melahirkan (per 100.000 kelahiran), Angka kematian bayi per 100.000 kelahiran), Jumlah PMKS (orang), Laju Pertumbuhan penduduk (%), Tingkat Pengangguran Terbuka (%). Pada capaian indikator keberhasilan tersebut, terdapat 8 indikator yang belum tercapai yaitu indikator angka melek huruf, APK SMP/MTs/PAKET B, APM SD/MI/PAKET A, Usia harapan hidup (tahun), Angka kematian ibu melahirkan (per 100.000 kelahiran), Angka kematian bayi per 100.000 kelahiran), Laju Pertumbuhan penduduk (%), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (%). Sedangkan 5 indikator lainnya sudah tercapai.
3. Mendukung Langsung Pertumbuhan Ekonomi dapat diukur pada indikator keberhasilan di Misi 1 yaitu Produktivitas PDRB dan Angka Kemiskinan. Pada capaian kedua indikator tersebut sudah tercapai sesuai dengan target pada periode 1 RPJPD.

2.5.1.2. RPJPD Periode 2

Arah pembangunan atau arah kebijakan pada periode ke dua RPJPD (2011-2016) Kabupaten Pacitan adalah Mewujudkan produktivitas ekonomi masyarakat yang tinggi khususnya produktivitas tenaga kerja di bidang pertanian, kelautan dan jasa pariwisata. Selain itu melalui arah kebijakan tersebut diharapkan dapat mewujudkan pemerataan yang optimal dalam distribusi pelaksanaan dan pencapaian hasil



pembangunan antar wilayah kecamatan dan distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat serta mewujudkan pembangunan wilayah yang seimbang sesuai dengan fungsi masing-masing wilayah. Hal ini dikarenakan dengan peningkatan produktifitas yang pesat akan menjadi pendorong utama bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya juga akan sangat berpengaruh terhadap akselerasi pembangunan di Kabupaten Pacitan.

Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan pada tahap ke dua RPJPD Kabupaten Pacitan sebagaimana uraian di atas, maka representasi keberhasilannya dapat diterjemahkan melalui beberapa indikator yang telah ditetapkan pada beberapa misi pembangunan, khususnya yang tertuang di dalam Misi ke 1 dan 2. Dua misi tersebut merupakan misi pembangunan yang fokus pada aspek ekonomi, pemerataan pembangunan dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Selain memperhatikan indikator pada dua misi di dalam RPJPD, tingkat keberhasilan atau capaian pembangunan sepanjang tahun 2011 hingga 2015 dapat diterjemahkan melalui indikator makro maupun indikator yang relevan dan tertuang di dalam RPJMD yakni:

1. Pertumbuhan ekonomi;
2. Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB;
3. Persentase angka kemiskinan; dan
4. Indeks Gini.

Berbagai arah kebijakan dan strategi pembangunan serta program prioritas yang ditetapkan melalui perencanaan jangka menengah (RPJMD) maupun perencanaan tahunan (RKPD) diharapkan dapat mengakselerasi pencapaian target pertumbuhan ekonomi di dalam RPJPD yakni 7,38%. Namun dalam realisasinya pada akhir periode tahun ke dua RPJPD pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pacitan belum mencapai target yang ditetapkan yakni hanya berada diangka 5,21%. Sedangkan jika dilihat dari komponen yang memberikan pengaruh pada pertumbuhan ekonomi, yakni PDRB ADHK sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar 2.565.546,45.

Kemudian untuk Industri Pengolahan tingkat kontribusinya cukup tinggi jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada akhir periode RPJMD 2011-2016 yakni 645.273,94. Begitu pula dengan produksi perikanan, sebagai mata pencaharian utama masyarakat Pacitan, capaiannya pada akhir periode kedua 12.513.080 Kg.

Belum maksimalnya kinerja pada indikator pertumbuhan ekonomi juga terjadi pada kinerja Pemerintah Kabupaten Pacitan menurunkan angka persentase kemiskinan. Hal tersebut ditunjukkan dengan angka realisasi persentase penduduk miskin pada akhir periode kedua yang mencapai 15,49% masih berada diatas target penurunan kemiskinan yang diharapkan di dalam RPJPD yakni 14,25%.

Selanjutnya, jika kita lihat Bersama bahwa harapan dan fokus pembangunan pada periode kedua RPJPD Kabupaten Pacitan diantaranya adalah terwujudnya pemerataan pembangunan dan mengurangi ketimpangan. Representasi



keberhasilannya dapat dilihat dari realisasi indeks gini atau gini rasionya. Indeks gini di Kabupaten Pacitan masih tergolong tinggi yakni 0,360. Artinya seiring dengan upaya pemerataan pembangunan yang dilakukan masih terdapat ketimpangan pendapatan masyarakat yang cukup tinggi di Kabupaten Pacitan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam pencapaian indikator makro (pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan gini rasio) di periode kedua belum sesuai dengan harapan bersama.

2.5.1.3. RPJPD Periode 3

Arah Pembangunan pada tahap III (2016-2021) adalah Pemantapan Kemandirian Masyarakat. Sasaran pokok pada tahapan ini adalah mewujudkan masyarakat Kabupaten Pacitan yang memiliki kemandirian tinggi dalam membangun kehidupannya. Kemandirian tersebut sebagai implikasi dari berkembang pesatnya bidang pertanian, kelautan dan pariwisata di Kabupaten Pacitan. Wujud kemandirian tersebut yang utama adalah rendahnya tingkat ketergantungan terhadap pemerintahan daerah, tingginya daya beli, tingginya sikap positif dan tingkat partisipasi swakarsa masyarakat dalam pembangunan. Kemandirian masyarakat merupakan kunci bagi terwujudnya pembangunan yang digerakan oleh masyarakat, yaitu suatu situasi dimana masyarakat menjadi subjek pembangunan dalam arti yang sesungguhnya. Berdasarkan uraian tersebut dapat diterjemahkan kedalam indikator kinerja sebagai berikut:

1. Tingkat Kemiskinan sebagai representasi dari Rendahnya tingkat ketergantungan terhadap pemerintahan daerah.
2. PDRB Per Kapita, dan Nilai Tukar Petani (NTP) sebagai representasi dari tingginya daya beli.
3. Tingkat Pengangguran Terbuka sebagai representasi dari tingginya sikap positif dan tingkat partisipasi swakarsa masyarakat dalam pembangunan.

Keberhasilan pembangunan pada periode ketiga RPJPD Kabupaten Pacitan secara umum dapat dilihat dari realisasi capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan meliputi 40 indikator kinerja yang tersebar kedalam 6 misi pembangunan RPJPD. dari 40 indikator tersebut terdapat 22 indikator yang tidak terdapat catatan hasil pengukuran tahunannya. hal tersebut dikarenakan indikator dirasa kurang representatif pada saat implementasi kinerja pada periode ketiga, sedangkan untuk indikator yang terdapat substitusinya adlaah sebanyak 3 indikator meliputi jumlah PMKS menjadi Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan, Cakupan pelayanan air bersih menjadi persentase penduduk berakses air bersih, dan rumah layak huni (dengan satuan rumah) menjadi rumah layak huni (dengansatuan persen).

Namun dikarenakan terdapat arah kebijakan yang menggambarkan prioritas pembangunan pada setiap periodenya, maka pada periode ketiga RPJPD terdapat



beberapa indikator yang menjadi fokus utama dalam pengukuran kinerja pembangunan meliputi Angka Kemiskinan sebagai representasi dari Rendahnya tingkat ketergantungan terhadap pemerintahan daerah, Pendapatan Perkapita dan Nilai tukar Petani (NTP) sebagai representasi dari tingginya daya beli masyarakat, dan Tingkat pengangguran Terbuka sebagai representasi dari tingginya sikap positif dan tingkat partisipasi swakarsa masyarakat dalam pembangunan.

Capaian kinerja pembangunan pada periode ketiga secara umum dapat dikatakan kurang baik, mengingat hanya terdapat 6 indikator yang kinerjanya telah mencapai target dan 2 indikator substitusi dengan capaian sudah baik. Jumlah indikator yang mencapai target masih relatif kecil jika dibandingkan dengan indikator kinerja yang dianggap masih relevan adalah sebanyak 18 indikator atau hanya sebesar 44,4% indikator yang dapat mencapai target. Selain capaian kinerja secara umum yang dapat dikatakan kurang baik, sebagian besar indikator yang menjadi fokus pembangunan pada periode ketiga RPJPD juga masih belum tercapai. Dari 4 indikator yang menjadi fokus pembangunan pada periode ketiga, hanya terdapat satu indikator yang kinerjanya telah mencapai target yaitu pada indikator PDRB Perkapita. sedangkan ketiga indikator lainnya masih belum mencapai target dari target kinerja. Dengan gambaran kinerja tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tingkat ketergantungan masyarakat pada pemerintah daerah masih relatif tinggi, tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dalam hal ini adalah keikutsertaan dalam aktivitas perekonomian masih cukup rendah, sedangkan daya beli masyarakat sudah mulai meningkat, namun daya beli pada masyarakat yang bekerja sebagai petani masih cenderung rendah.

2.5.1.4. RPJPD Periode 4

Arah Pembangunan pada tahap IV (2021-2026) adalah Pemantapan Peran Daerah dalam Pembangunan Regional dan Nasional. Sasaran pokok pada tahapan ini adalah mewujudkan peran daerah yang menonjol dalam pembangunan di Jawa Timur dan lingkup Nasional. Khusus dalam konteks regional Jawa Timur, hal yang akan diwujudkan adalah mendayagunakan seluruh sumber daya alam dan sumber daya buatan yang telah terbangun, khususnya di bidang pertanian, kelautan dan pariwisata, sehingga menjadi Kabupaten berbasis industri pertanian, kelautan dan pariwisata yang paling diperhitungkan. Segenap pencapaian yang diraih pada tahapan sebelumnya menjadi pijakan yang didayagunakan semaksimal mungkin untuk menjadi Kabupaten yang Mandiri, Berdaya Saing, Aman, Sejahtera yang Menjunjung Nilai-nilai Agama dan Budaya.

Pembangunan pada periode keempat (2021-2026) RPJPD Kabupaten Pacitan 2005-2026 secara umum dapat dilihat dari realisasi capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan meliputi 40 indikator kinerja yang tersebar ke dalam 6 misi pembangunan RPJPD. Di antara 40 indikator tersebut, terdapat 21 indikator yang tidak memiliki data hasil pengukuran realisasi tahun akhirnya.



Periode keempat Kabupaten Pacitan 2021-2026 pada dasarnya masih akan berakhir di tahun 2026, namun terdapat 5 Indikator RPJPD yang telah mencapai target kinerjanya yaitu antara lain Usia Harapan Hidup yang merupakan indikator dalam arah kebijakan Misi I (Aspek kesehatan), PDRB Per kapita yang merupakan indikator dalam arah kebijakan Misi II (Aspek Ekonomi), Capaian penurunan kondisi jalan rusak dan jalan tanah yang merupakan indikator dalam arah kebijakan Misi III (Aspek Infrastruktur), Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan indikator dalam arah kebijakan misi V (Aspek Tata Kelola Pemerintahan).

Di sisi lain, terdapat 5 indikator yang di tahun 2022 mencapai kinerja realisasi cukup baik namun belum sepenuhnya memenuhi target akhir periode keempat, sehingga secara proyeksi dapat diperkirakan akan mencapai target yang ditentukan dalam kurun waktu 1-2 Tahun sampai periode keempat ini berakhir. 5 indikator tersebut antara lain Angka Melek Huruf, Angka Partisipasi Kasar SD, SMP dan SMA/ Sederajat, serta Angka Partisipasi Murni SD/ Sederajat. Semua indikator tersebut merupakan representasi keberhasilan dari Misi I RPJPD yang masuk dalam aspek pendidikan.

Lebih lanjut, terdapat 9 indikator yang masih mencapai kinerja realisasi kurang dari 75% dari target akhir dan secara proyeksi tidak dimungkinkan untuk memenuhinya sehingga diasumsikan bahwa indikator-indikator tersebut belum tercapai. Beberapa indikator tersebut antara lain Angka Partisipasi Murni SMP dan SMA, Laju Pertumbuhan Penduduk, Angka Kemiskinan (Misi I), Pertumbuhan Ekonomi (Misi II), serta capaian Kondisi Jalan Baik, sedang dan makadam (Misi III).

Namun demikian dikarenakan terdapat sasaran pokok yang menggambarkan prioritas pembangunan pada setiap Tahapannya, maka pada tahapan keempat RPJPD terdapat beberapa indikator yang menjadi fokus utama dalam pengukuran kinerja pembangunan meliputi PDRB Sektor Pertanian Kehutanan, dan Perikanan dan Kontribusi PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebagai representasi dari sasaran pokok "Menjadi Kabupaten berbasis industri pertanian, kelautan dan pariwisata yang paling diperhitungkan". Dua indikator tersebut sejatinya merupakan indikator alternatif tambahan yang tidak tercantum dalam RPJPD Kabupaten Pacitan 2005-2025, namun cukup representatif untuk mengukur keberhasilan sasaran pokok tahap keempat RPJPD tersebut. Secara umum, 2 indikator tersebut mengalami tren kenaikan pada 2020-2023, sedangkan secara khusus capaian PDRB Sektor Pertanian Kehutanan, dan Perikanan telah mencapai 98,78% dari target akhir 2025 yang diambil dari RKPD Kabupaten Pacitan 2023. Dari rangkaian data tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya sasaran pokok RPJPD Kabupaten Pacitan 2005-2025 Tahap keempat telah tercapai dengan cukup baik.

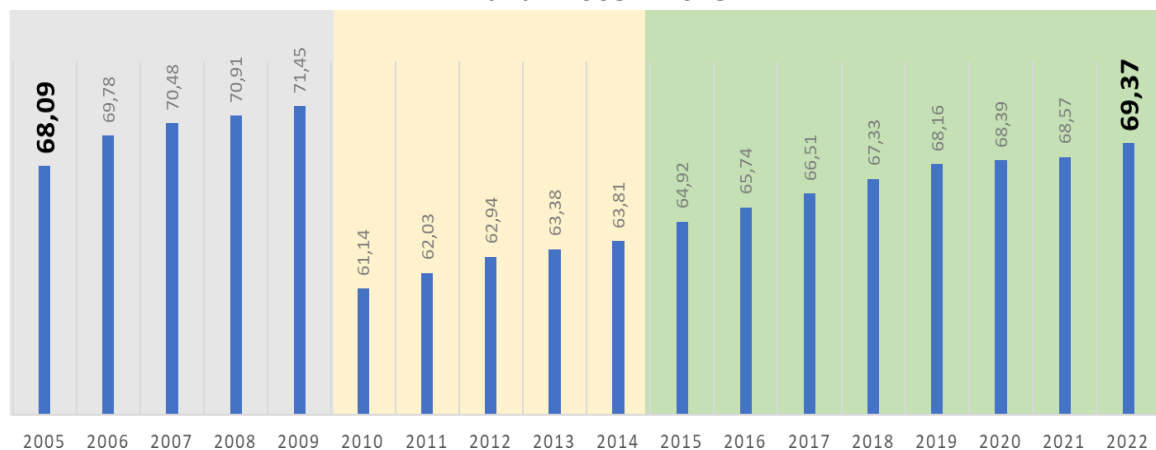


2.5.2. Capaian Indikator Kinerja Makro

2.5.2.1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu Kesehatan, Pendidikan dan Standar hidup layak. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah, oleh karena itu IPM menjadi salah satu indikator Makro dalam Evaluasi Kinerja RPJPD. Adapun IPM telah mengalami 2 kali perubahan metode sejak di launching tahun 1990. Dari tabel diatas menunjukkan bahwa perubahan yang signifikan terjadi pada perubahan metode tahun 2010 yang menyebabkan nilai IPM menurun. Adapun data IPM tahun 2005 hingga 2022 Kabupaten Pacitan sebagai berikut:

**Gambar 2. 58 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pacitan
Tahun 2005 – 2025**



Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur

IPM Kabupaten Pacitan dari Tahun 2005 hingga 2022 mengalami peningkatan 1,28 poin, yang artinya terjadi peningkatan IPM dari Tahun 2005 hingga 2022 meskipun tidak signifikan. Adapun tahun 2010 sempat mengalami penurunan karena adanya perubahan komponen IPM. Jika dibandingkan dengan kabupaten / kota lain di Jawa Timur, Kabupaten Pacitan termasuk 20 Kabupaten/Kota dengan IPM di bawah Jawa Timur dengan peringkat 10 IPM terendah di Jawa Timur.



Gambar 2. 59 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten / Kota di Jawa Timur Tahun 2022

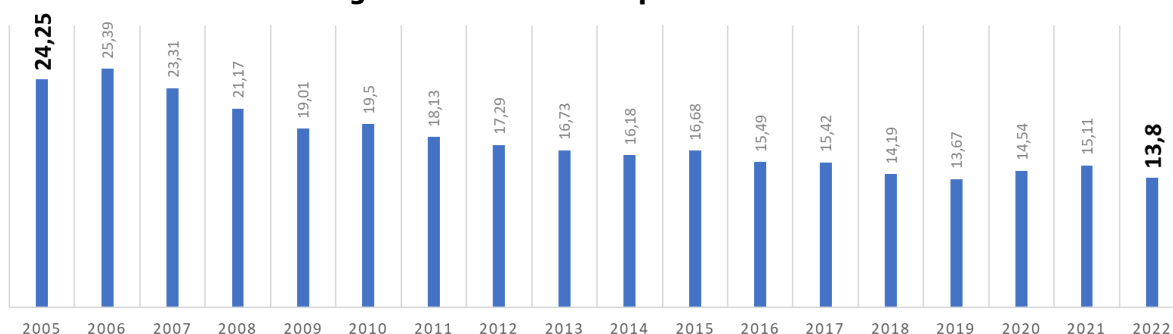


Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur

2.5.2.2. Angka Kemiskinan

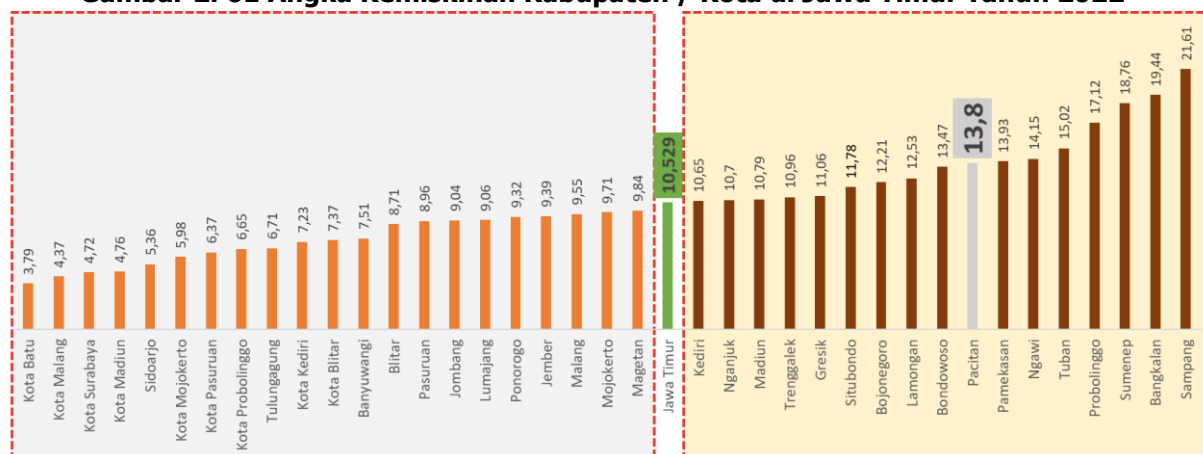
Kemiskinan merupakan ketidakmampuan dari sisi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Sedangkan Penduduk miskin ialah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Kemiskinan di Kabupaten Pacitan pada tahun 2005-2021 sebagai berikut:

Gambar 2. 60 Angka Kemiskinan Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur

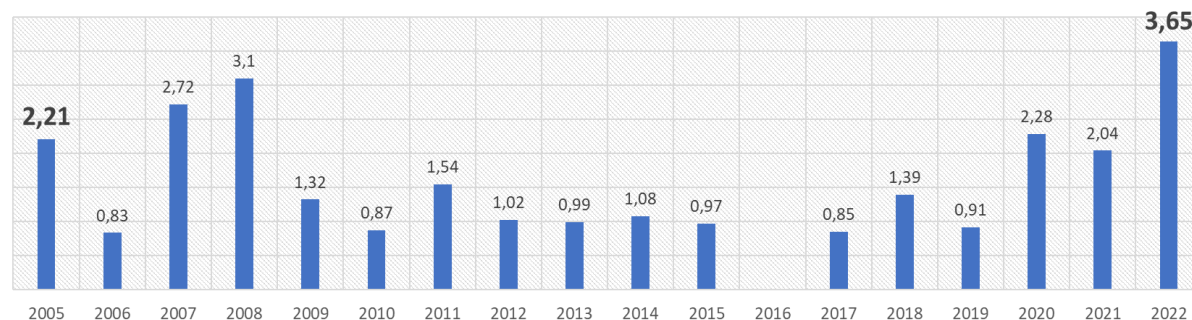
Angka Kemiskinan Kabupaten Pacitan dari Tahun 2005 hingga 2022 mengalami penurunan 10,45 poin, yang artinya terjadi Penurunan Kemiskinan di kabupaten Pacitan yang cukup signifikan. Sedangkan jika dibandingkan dengan kabupaten / Kota di Jawa Timur, angka kemiskinan Kabupaten Pacitan termasuk Kabupaten / Kota dengan angka kemiskinan di atas rata-rata Jawa Timur dengan peringkat 7 tertinggi.


Gambar 2. 61 Angka Kemiskinan Kabupaten / Kota di Jawa Timur Tahun 2022


Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur

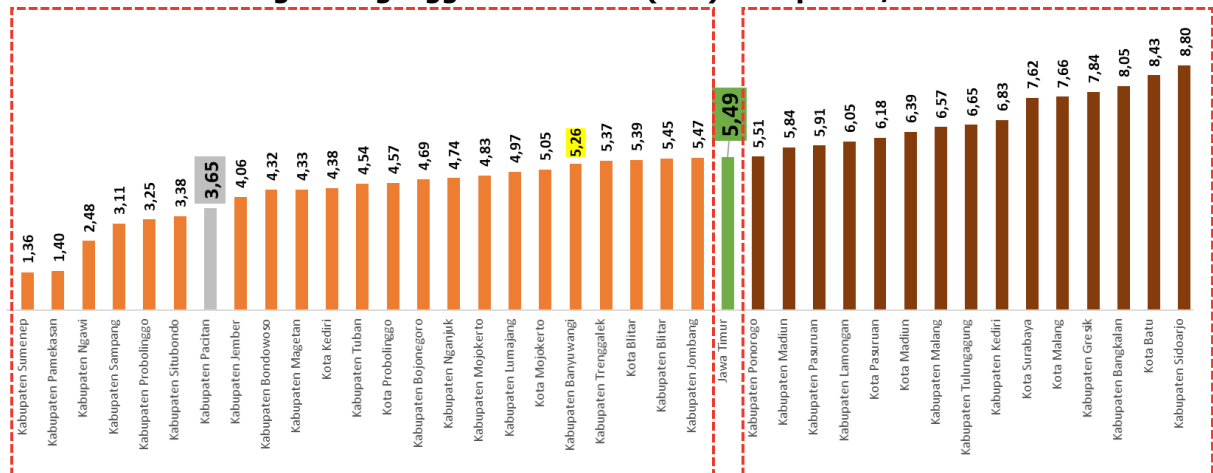
2.5.2.3. Angka Pengangguran

Angka Pengangguran atau direpresentasikan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan. Atau yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mempersiapkan usaha. Perhitungan TPT adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja dihitung penduduk usia produktif yaitu yang berusia 15 tahun hingga 64 tahun adalah penduduk yang digolongkan mampu memproduksi barang dan jasa. Sehingga mereka diharapkan dapat menanggung penduduk usia tidak produktif. Sayangnya penduduk usia produktif ini tidak seluruhnya berpenghasilan. Berikut merupakan data Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pacitan:

Gambar 2. 62 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pacitan Tahun 2005 - 2022


Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur

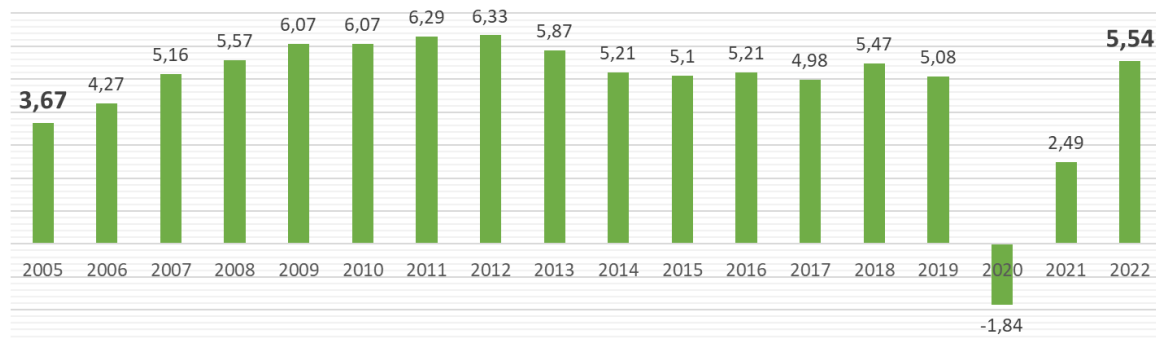
Data TPT menunjukkan bahwa TPT di Kabupaten Pacitan meningkat dari 2,21 di Tahun 2005 menjadi 3,65 di Tahun 2022 atau meningkat 1,44. Peningkatan ini cukup signifikan, artinya penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Pacitan masih menjadi permasalahan. Dibandingkan dengan Kabupaten / Kota di Jawa Timur, Kabupaten Pacitan termasuk dalam kategori Kabupaten / Kota dengan TPT dibawah Jawa Timur, peringkat 7 Terendah di Jawa Timur. Kondisi ini menunjukkan Kabupaten Pacitan meskipun TPT meningkat namun penyerapan tenaga kerja masih tinggi.


Gambar 2. 63 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten / Kota di Jawa Timur


Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur

2.5.2.4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang dihitung dari PDRB atas dasar harga konstan merupakan rata-rata tertimbang dari tingkat sektoralnya, artinya apabila sebuah sektor mempunyai peranan paling penting dan pertumbuhannya lambat, maka hal ini dapat mengakibatkan terhambatnya tingkat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Sebaliknya, apabila sebuah sektor mempunyai peranan penting dan pertumbuhannya tinggi, maka sektor tersebut dapat menjadi lokomotif yang menarik pertumbuhan ekonomi suatu daerah sehingga total pertumbuhan ekonomi menjadi besar. Dengan kata lain, gejala sekecil apapun pada sektor yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB akan sangat berpengaruh terhadap pergerakan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Berikut merupakan data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pacitan Tahun 2005 – 2022.

Gambar 2. 64 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pacitan Tahun 2005 - 2022


Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pacitan dari tahun 2005 hingga 2022 mengalami fluktuatif dan cenderung meningkat. Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2005 Sebesar 3,67 dan Tahun 2022 menjadi 5,54. Pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada tahun 2020 dan 2021 karena adanya pandemi, sedangkan pertumbuhan ekonomi

tertinggi terjadi pada tahun 2012 dengan pertumbuhan mencapai 6,33. Dibandingkan dengan Kabupaten / Kota di Jawa Timur, Kabupaten Pacitan termasuk dalam Kabupaten Kota dengan Pertumbuhan Ekonomi di atas Rata-Rata Jawa Timur dengan peringkat 12 Pertumbuhan Ekonomi tertinggi di Jawa Timur.

Gambar 2. 65 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten / Kota di Jawa Timur Tahun 2022

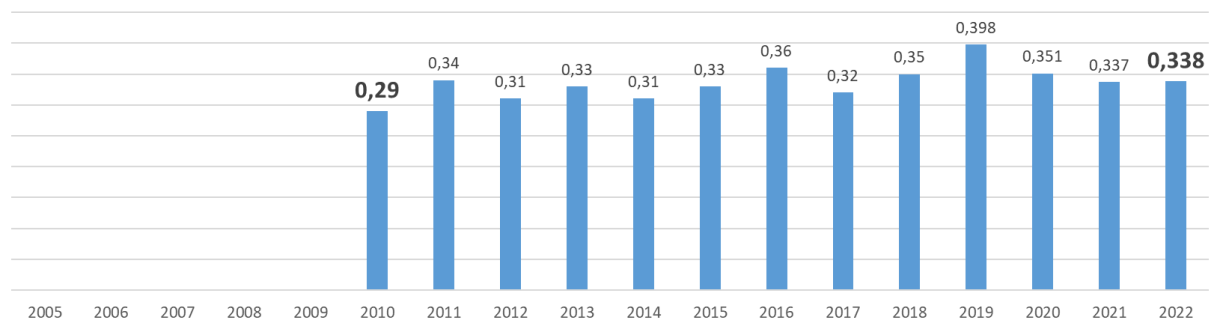


Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur

2.5.2.5. Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio)

Rasio Gini menggambarkan pemerataan dan ketimpangan secara keseluruhan, mulai dari pendapatan hingga distribusi. Secara metodologi Rasio Gini merupakan suatu ukuran pemerataan yang dihitung dengan membandingkan luas antara diagonal dan kurva lorenz (daerah A) dibagi dengan luas segitiga di bawah diagonal. Rasio gini digunakan untuk mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Rentang skor 0 - 1. Indeks 0 menunjukkan pemerataan total, sedangkan 1 terjadi ketidakmerataan atau ketimpangan sama sekali.

Gambar 2. 66 Indeks Gini Kabupaten Pacitan Tahun 2022

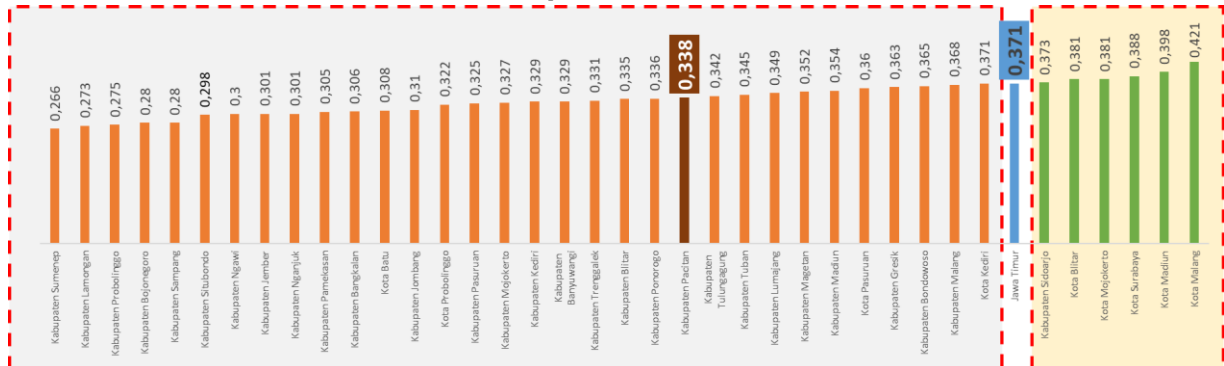


Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur

Indeks Gini sendiri awal data dimulai tahun 2010, dengan angka gini rasio 0,29 ditahun 2010 dan meningkat menjadi 0,338 di tahun 2022. Angka menunjukkan adanya peningkatan 0,48 yang artinya keimpangan semakin meningkat dari tahun 2005 hingga 2022. Angka ketimpangan tertinggi terjadi tahun 2019 dengan ketimpangan mencapai 0,398. Dibandingkan rata-rata pemerataan di Jawa Timur secara umum. Sedangkan dibandingkan dengan Kabupaten / Kota di Jawa Timur,

Kabupaten Pacitan termasuk dalam Kabupaten Kota dengan Indeks Gini di Bawah Rata-Rata Jawa Timur dengan peringkat 17 Indeks Gini tertinggi di Jawa Timur.

Gambar 2. 67 Gini Rasio Kabupaten / Kota di Jawa Timur Tahun 2022

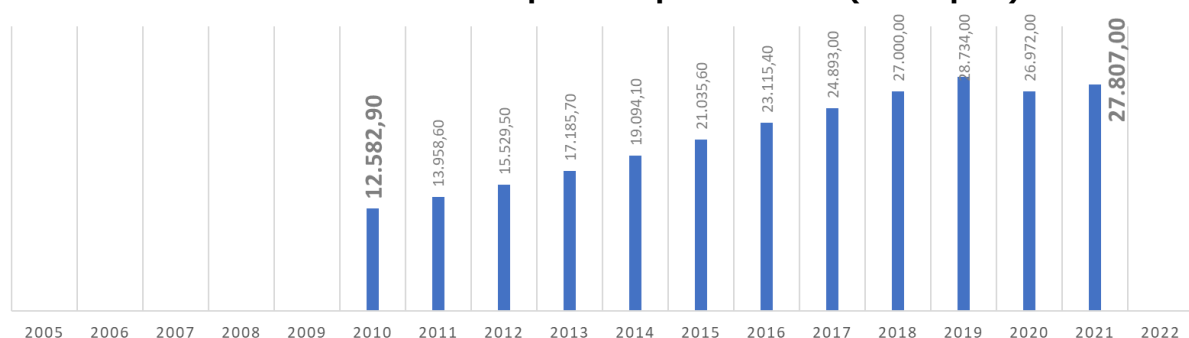


Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur

2.5.2.6. PDRB Per Kapita

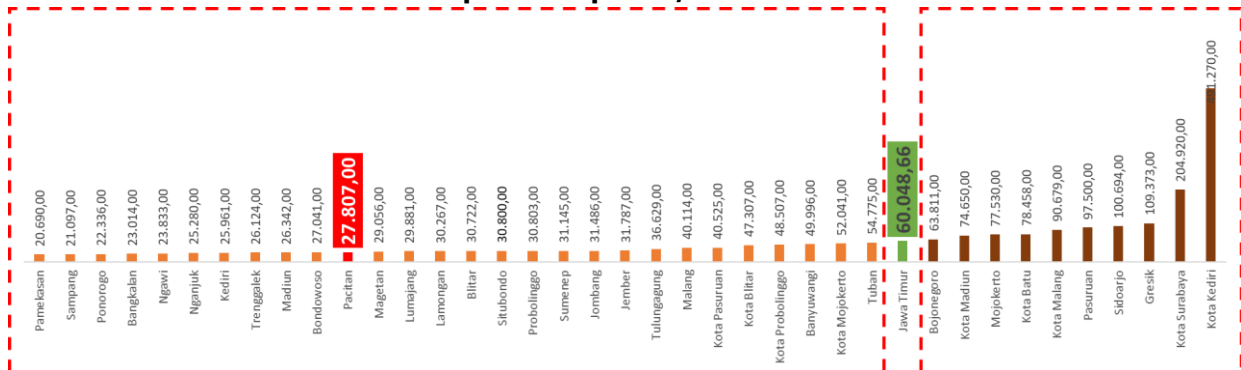
PDRB per kapita merupakan PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. Perhitungan dapat diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan. Data yang tersaji dalam bentuk ini merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah. Adapun data PDRB Perkapita Kabupaten Pacitan sebagai berikut:

Gambar 2. 68 PDRB Perkapita Kabupaten Pacitan (ribu rupiah)



Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur

PDRB Per Kapita Kabupaten Pacitan dari tahun 2010 hingga 2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tahun 2010 PDRB Perkapita sebesar Rp. 12.582,90 sedangkan Tahun 2021 mencapai Rp. 27.807,00, terjadi peningkatan Rp. 15.224,10 atau 54,75%. Kabupaten Pacitan merupakan kabupaten / Kota dengan PDRB Perkapita dibawah Jawa Timur dengan peringkat 16 PDRB Per Kapita Terendah di Jawa Timur.


Gambar 2. 69 PDRB Per Kapita Kabupaten / Kota di Jawa Timur Tahun 2022


Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur

2.5.3. Faktor Penghambat dan Pendorong Pencapaian Kinerja

Arah Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pacitan tahun 2005 – 2025 merupakan arahan-arahan umum untuk menunjang perwujudan Visi Misi pembangunan daerah. Adapun Visi RPJPD Kabupaten Pacitan adalah:

TATA PRAMANA HARGENG PRAJA

Adapun Misi RPJPD Kabupaten Pacitan sebagai berikut:

1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, Mandiri, Berakhlak Mulia dan Berbudaya
2. Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang didukung oleh Industri Berbasis Pertanian (Agroindustri), Kelautan dan Pariwisata
3. Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas dalam Mewujudkan Aktifitas Ekonomi yang Stabil
4. Misi Mewujudkan Suasana Aman dalam Kehidupan Politik, Hukum, Ekonomi, dan Sosial Budaya
5. Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Alam yang Berwawasan Lingkungan
6. Mewujudkan Pemerintahan yang Berkualitas, Berlandaskan Prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government

Sebagai wujud pelaksanaan visi-misi, berikut merupakan evaluasi pelaksanaan misi RPJPD 2005 – 2025 Kabupaten Pacitan:

2.5.3.1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, Mandiri, Berakhlak Mulia dan Berbudaya

Dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia maka pada RPJPD Kabupaten Pacitan tahun 2005-2025 pada realisasinya yang terbagi atas 4 periode yang kemudian diterjemahkan dalam RPJMD, Dalam pencapaian Sasaran pokok Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, Mandiri, Berakhlak Mulia dan Berbudaya terdapat faktor pendorong yang mempengaruhi keberhasilan dari capaian



tersebut. Adapun pada sasaran pokok tersebut diterjemahkan pada urusan peningkatan pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan, dan peningkatan kualitas tenaga kerja.

Pada peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Pacitan selama periode RPJPD yang menjadi pendorong keberhasilannya adalah terkait dengan ketercukupan dan pemerataan jumlah dan kualitas tenaga kependidikan. Maka dari itu pada selama periode RPJPD peningkatan rekrutmen dan peningkatan status tenaga kependidikan kontrak menjadi pegawai negeri maupun P3K. selain itu, dalam rangka peningkatan aksesibilitas pendidikan di Kabupaten Pacitan, maka pemerintah Kabupaten Pacitan meningkatkan kapasitas pemberian jaminan sekolah bagi masyarakat melalui beasiswa dan pengoptimalan dana BOS. Selain itu, juga pembangunan fasilitas pendidikan yang layak untuk kegiatan belajar mengajar serta peningkatan ketercukupan daya tampung fasilitas pendidikan. Dalam rangka peningkatan prestasi siswa maka juga di dorong dengan peningkatan sarana prasarana kegiatan belajar mengajar yang juga penggunaan bahan ajar yang sesuai perkembangan teknologi dan informasi.

Pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, faktor pendorongnya adalah peningkatan jumlah fasilitas kesehatan pada masyarakat yaitu puskesmas, pustu, polindes, maupun posyandu dimana ketersediaan faskes tersebut sebagai upaya dalam peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan pengendalian dan penanggulangan penyakit, serta peningkatan edukasi kesehatan pada masyarakat. Pada peningkatan kualitas kesehatan di dorong juga pada peningkatan jumlah dan kualitas tenaga kesehatan di Kabupaten Pacitan sehingga masyarakat dapat terlayani secara baik dalam kesehatan. Peningkatan kemudahan perijinan kesehatan yang nantinya akan adanya pemantauan dari Dinas Kesehatan juga memberikan dorongan semakin meningkatnya ketersediaan faskes di masyarakat dan peningkatan jumlah ketersediaan tenaga kesehatan.

Pada peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia terkait daya saing pada masyarakat juga pada jangkauan masyarakat dalam memperoleh pekerjaan sesuai dengan keterampilan dan kualifikasinya. Adapun faktor pendorong dalam peningkatan akses masyarakat terhadap pekerjaan adalah peningkatan informasi dan kerjasama pemerintah Kabupaten Pacitan dengan pihak swasta atau pemberi pekerjaan sehingga informasi pekerjaan dapat disampaikan secara luas kepada masyarakat. Selain itu, lembaga pelatihan dalam ragam jenis keterampilan khususnya keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar juga semakin meningkat. Pada penguatan daya saing SDM dalam mengakses ekonomi juga semakin meningkatnya fasilitas dan sarana prasarana bagi wirausaha baru dalam mengembangkan usaha serta penguatan lembaga masyarakat di desa seperti BUMDes, Pokdarwis, Karang Taruna dalam pengelolaan usaha bersama maupun pengelolaan potensi desa guna meningkatkan nilai tambah ekonomi pada masyarakat.

Upaya pemerintah Kabupaten Pacitan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, Mandiri, Berakhlak Mulia dan Berbudaya sebagaimana



cita-cita atau harapan jangka panjang yang tertuang di dalam RPJPD tidak serta merta dapat direalisasikan dengan baik hingga akhir periode RPJPD. Hal tersebut terlihat dari capaian kinerja masing-masing indikator yang merepresentasikan keberhasilan sasaran pokok pada Misi ke satu RPJPD dan hasilnya menunjukkan kinerja yang kurang optimal. Kurang optimalnya kinerja pembangunan disektor sumber daya manusia secara umum dipengaruhi oleh dua faktor utama yakni ketersediaan sarana prasarana dan kecakapan sumber daya manusia disektor Pendidikan maupun Kesehatan.

Di Kabupaten Pacitan masih terdapat sarana prasarana pendidikan dasar maupun menengah yang belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan, sehingga mengurangi kenyamanan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Kondisi tersebut diperparah dengan masih kurangnya jumlah guru PNS di jenjang SD, sehingga banyak sekolah yang diisi oleh guru tidak tetap, namun keberadaannya hingga saat ini belum terstandarisasi baik dari sisi kualitas maupun kesejahteraannya. Dengan kondisi tersebut maka secara tidak langsung memberikan pengaruh pada kualitas layanan Pendidikan bagi para siswa. Selain itu pengembangan kapasitas SDM yang unggul dan berdaya saing terkesan lambat karena hingga saat ini rata-rata lama sekolah Penduduk di Kabupaten Pacitan masih rendah.

Sektor Kesehatan sebagai salah satu layanan dasar wajib juga memberikan pengaruh terhadap akselerasi pembangunan SDM yang unggul. Namun di dalam pelaksanaannya pembangunan disektor Kesehatan juga mengalami hambatan karena kurangnya ketersediaan dan pemerataan SDM Kesehatan. Kondisi tersebut juga diperparah dengan sarana prasarana kesehatan seperti gedung pelayanan, kendaraan transportasi pelayanan kesehatan, alat kesehatan, obat dan perbekalan yang masih terbatas di Kabupaten Pacitan. Selain itu informasi pelayanan persalinan yang kurang masif juga menjadi faktor penghambat. Di akhir periode RPJPD, sistem administrasi pelayanan di sektor Kesehatan juga belum terintegrasi dengan baik, khususnya sistem pelaporan pada fasyankes milik swasta dengan sistem pelayanan di Puskesmas maupun RSUD, sehingga sistem pelaporan pelayanan Kesehatan di Kabupaten Pacitan masih bersifat parsial.

Selanjutnya, daya saing sumber daya manusia dipengaruhi oleh minimnya kesempatan kerja jika dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja yang terus meningkat. Apalagi penduduk yang memasuki usia Angkatan kerja maupun yang sudah bekerja secara kualitas belum memenuhi kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja. Dampaknya adalah produktivitas tenaga kerja masih sangat rendah, sehingga berpengaruh pada tingkat kesejahteraannya masyarakat.

2.5.3.2. Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang didukung oleh Industri Berbasis Pertanian (Agroindustri), Kelautan dan Pariwisata

Proses implementasi kebijakan pembangunan dalam upaya mewujudkan misi kedua dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor baik yang memberikan pengaruh positif maupun negatif. Beberapa



faktor yang mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh industri berbasis pertanian (agroindustri), kelautan, dan pariwisata adalah:

- a. Peningkatan sumber daya manusia, teknis pengolahan dan kelembagaan kelompok
- b. Penguatan regulasi tentang pelelangan ikan, sosialisasi serta pemantauan terhadap pelaksanaan pelelangan ikan
- c. banyaknya destinasi wisata di Kabupaten Pacitan
- d. kesadaran masyarakat untuk menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam hal teknis pengolahan, dan kelembagaan kelompok menjadi salah satu kunci utama dalam akselerasi dalam pengembangan industri berbasis pertanian dan kelautan. Dengan meningkatkannya kualitas sumber daya manusia, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun etos kerja, telah membuka peluang untuk pengembangan teknologi dan pengolahan hasil pertanian dan kelautan yang lebih modern dan efisien. Selain itu, melalui pembentukan kelembagaan kelompok yang kuat, para petani dan nelayan dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar dalam memasarkan hasil produksi mereka.

Faktor kedua adalah penguatan regulasi tentang pelelangan ikan, sosialisasi, serta pemantauan terhadap pelaksanaan pelelangan ikan. Hal ini sangat penting untuk menjaga keberlangsungan industri kelautan di Kabupaten Pacitan. Adanya regulasi yang jelas dan pengawasan yang ketat, dapat mencegah praktik-praktik ilegal seperti penangkapan ikan yang berlebihan dan penjualan ikan yang tidak sesuai standar kualitas. Selain itu, melalui sosialisasi yang efektif, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya laut dan mematuhi aturan-aturan yang ada.

Faktor ketiga adalah banyaknya destinasi wisata di Kabupaten Pacitan. Dengan keindahan pantai, air terjun, dan tempat wisata lainnya yang dimiliki Kabupaten Pacitan, sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang sangat potensial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Namun demikian, dalam rangka meningkatkan kualitas wisata di Kabupaten Pacitan, masih tetap perlu dilakukan pengembangan infrastruktur yang mendukung, seperti pembangunan jalan, pengembangan penginapan, dan pengembangan tempat wisata itu sendiri. Faktor keempat adalah semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan. Melalui kesadaran masyarakat, akan tercipta lingkungan laut yang sehat dan lestari sehingga kelautan tetap menjadi sumber kehidupan yang berkelanjutan. Selain itu, penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan juga dapat meningkatkan kualitas dan nilai produk perikanan.

Sektor pertanian dan perkebunan memiliki hambatan seperti ketersediaan sumber daya air yang terbatas. Ketersediaan air yang terbatas dapat mempengaruhi produktivitas pertanian dan perkebunan, terutama pada musim kemarau. Kondisi



lingkungan yang buruk juga dapat berdampak pada kualitas air yang digunakan untuk irigasi. Hal ini dapat menurunkan kualitas hasil panen dan mempengaruhi ketersediaan bahan baku bagi industri agroindustri.

Selain itu, pengolahan pasca panen menjadi hal yang penting dalam meningkatkan kualitas dan nilai jual hasil pertanian dan perkebunan. Sayangnya, pemasaran hasil perkebunan terkendala dengan kualitas dan pengolahan pasca panen. Hal ini mempersulit para petani untuk memasarkan hasil panennya secara efektif dan efisien, serta meningkatkan nilai tambah hasil panen tersebut.

Di sisi lain, keterbatasan aksesibilitas dan sarana prasarana pariwisata juga menjadi faktor penghambat dalam mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh sektor pariwisata. Diperlukan adanya upaya untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pariwisata serta memperluas aksesibilitas wisata dengan membangun jalur transportasi yang lebih baik. Kurangnya kawasan industri dan kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam legalitas usaha juga juga menjadi faktor penghambat lain yang juga memerlukan perhatian dari pemerintah untuk memberikan kemudahan akses investasi dan pengurangan birokrasi.

Faktor penghambat lain juga datang dari sektor perikanan dan kelautan yaitu kurangnya sarana prasarana perikanan tangkap, baik berupa bangunan infrastruktur, sarana tangkap dan SDM. Hal ini menyebabkan sulitnya nelayan untuk menangkap ikan dengan jumlah yang cukup besar sehingga mengganggu produksi perikanan di daerah tersebut. Selain itu, sistem pelelangan ikan di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) juga belum dapat diterapkan sepenuhnya karena masih adanya ketergantungan nelayan kepada pemodal kuat (bakul), sehingga harga komoditi ditetapkan secara sepihak. Akibatnya, harga ikan tidak mencerminkan kualitas dan kuantitas ikan yang ditangkap oleh nelayan, yang pada akhirnya dapat mengurangi keuntungan bagi nelayan dan industri perikanan di daerah tersebut.

Penurunan potensi Sumberdaya Ikan (SDI) juga menjadi faktor penghambat yang signifikan. Hal ini terjadi akibat kerusakan habitat seperti terumbu karang dan mangrove, padat tangkap (over fishing), serta kerusakan lingkungan akibat pencemaran limbah industri dan limbah rumah tangga. Selain itu, penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti bahan peledak serta potasium juga dapat mempengaruhi penurunan potensi SDI.

Terakhir, keterbatasan sarana produksi utamanya harga pakan yang terus melambung tinggi menjadi faktor penghambat lainnya. Keterbatasan harga pakan dapat membuat petani dan nelayan sulit untuk mengembangkan usaha mereka sehingga dapat mempengaruhi produksi perikanan dan pertanian di daerah tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk menurunkan harga pakan melalui pengembangan teknologi pengolahan pakan ternak dan perikanan, serta pendampingan dalam penerapan teknologi tersebut.

Secara keseluruhan, faktor-faktor penghambat di atas saling terkait dan mempengaruhi tercapainya Misi ke 2 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah



Kabupaten Pacitan tahun 2005-2025. Oleh karena itu, diperlukan upaya sinergi dan koordinasi antara pemangku kepentingan terkait untuk mengatasi setiap faktor penghambat dan memastikan terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh industri berbasis pertanian (agroindustri), kelautan, dan pariwisata di Kabupaten Pacitan pada masa yang akan datang.

2.5.3.3. Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas dalam Mewujudkan Aktifitas Ekonomi yang Stabil

Proses dalam mewujudkan implementasi yang sudah tertuang dalam misi ketiga memiliki beberapa faktor pendorong untuk mencapai keberhasilan misi. Kabupaten Pacitan dalam mengimplementasikan misi “mewujudkan infrastruktur daerah yang berkualitas dalam merujudkan aktifitas ekonomi yang stabil” didukung oleh faktor internal dan eksternal dari dalam pemerintah daerah. Untuk faktor pendorong internal, dikarenakan masih luasnya wilayah di Kabupaten Pacitan. Pemerintah daerah yang memiliki kekuasaan penuh untuk membangun infrastruktur menjadi tombak utama untuk mempercepat pembangunan infrastruktur agar pemerataan perekonomian masyarakat dapat berkembang kearah yang lebih baik. Selain itu dengan adanya percepatan pembangunan infrastruktur akses kewilayah yang ada di Kabupaten Pacitan akan semakin mudah. Kemudahan akses inilah yang akan membangkitkan perekonomian masyarakat.

Faktor pendorong lainnya ada pada faktor pendorong eksternal dari luar Pemerintah daerah. Wilayah yang tidak berpusat pada sektor industri dan minim adanya pembangunan pabrik, maka kualitas air maupun tanah masih belum tercemar. Sehingga terjaminnya kualitas air yang bersih untuk masyarakat masih luas. Selain itu, perluasan rumah tangga yang sudah teraliri listrik juga semakin luas. Hal ini dapat memudahkan masyarakat untuk dapat menikmati listrik tanpa menggunakan oblik atau lampu tempel. Semakin banyaknya rumah tangga yang sudah teraliri listrik, maka masyarakat yang ingin meningkatkan produktifitas akan semakin bertambah.

Selain faktor pendorong yang membantu ketercapaian dalam misi tiga, terdapat juga beberapa faktor penghambat yang mendukung ketidakcapaian. Faktor penghambat juga terdiri dari internal maupun eksternal dari Pemerintah Daerah. Adapun faktor penghambat internal pemerintah daerah adalah kurangnya tim teknis yang berlatar belakang teknis yang ada di Pemerintah daerah Kabupaten Pacitan. Ini merupakan salah satu penghambat, karena dengan tidak adanya tim teknis maka sasaran yang sudah dituju tidak akan dapat berjalan dengan baik karena keterbatasan pengetahuan. Sehingga dibutuhkannya bantuan dari pihak luar untuk mencapainya. Apabila dalam pemerintah daerah Kabupaten Pacitan memiliki tim teknis yang mampu menangani masalah internal maka kemudahan untuk menyelesaikan masalah akan lebih baik.

Faktor eksternal yang menghambat capaian dalam misi ketiga, terkait kondisi topografi daerah. Kabupaten Pacitan yang Sebagian besar wilayahnya merupakan



pegunungan membuat sulitnya proses pembangunan wilayah. Oleh karena itu masih banyak beberapa wilayah yang pembangunan daerahnya tertinggal dibandingkan dengan wilayah yang mudah untuk diakses. Kabupaten Pacitan juga merupakan daerah yang rawan terkena banjir, dampak yang ditimbulkan oleh banjir ini dapat menyebabkan adanya kerusakan khususnya untuk akses Transportasi, sehingga pemerintah daerah akan lebih sering dalam memperbaiki akses Transportasi.

Kondisi topografi Kabupaten Pacitan yang memiliki dataran tinggi juga memiliki dampak negatif, salah satunya adalah minimnya sumber mata air. Sehingga sumber mata air yang bisa ditemukan dan diakses warga terbatas. Selain itu kondisi dataran tinggi ini juga membuat pemukiman masyarakat lebih tersebar. Ketidakmerataan wilayah pemukiman masyarakat ini membuat Kawasan yang sulit untuk diakses tidak bisa mendapatkan pasokan listrik. Sehingga pembangunan jaringan listrik sebagian besar terdapat pada daerah yang mudah untuk dijangkau.

2.5.3.4. Mewujudkan Suasana Aman dalam Kehidupan Politik, Hukum, Ekonomi, dan Sosial Budaya

Mewujudkan suasana aman dalam kehidupan politik dititikberatkan pada proses pelembagaan demokrasi, optimalisasi kinerja lembaga-lembaga penyelenggara pemerintahan, meningkatkan kemampuan mengelola daerah secara baik dan bersih sebagai perwujudan kebijakan otonomi daerah serta konsolidasi dengan lembaga-lembaga di masyarakat. Selain itu mewujudkan kebebasan pers yang bertanggungjawab dan terlembaga serta menjamin hak masyarakat luas untuk berpendapat dan mengontrol jalannya penyelenggaraan negara, mewujudkan pemerataan informasi dengan mendorong munculnya media-media massa lokal yang independen; menciptakan jaringan informasi yang bersifat interaktif antara masyarakat dan kalangan pengambil keputusan politik; menciptakan jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang mampu menghubungkan seluruh link informasi yang ada untuk memudahkan proses sosialisasi dan transparansi kebijakan. Pembangunan Keamanan dan Ketertiban diarahkan untuk mewujudkan suasana yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan ditegakkannya tatanan sosial kemasyarakatan serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan.

2.5.3.5. Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Alam yang Berwawasan Lingkungan

Misi Ke- 5 pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan tahun 2005-2025 "Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Alam yang Berwawasan Lingkungan" mengarah pada pengelolaan SDA yang tetap berpedoman pada pelestarian lingkungan. Dalam pelaksanaannya terdapat factor yang memiliki pengaruh positif dan ada factor yang memiliki pengaruh negative. Adapun factor-faktor yang mendorong adanya pelestarian lingkungan dalam pengelolaan SDA di Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut:



1. Pembinaan dan pengawasan untuk penataan peraturan bagi pelaku usaha
2. Peraturan perundang-undangan
3. Kesadaran masyarakat sekitar hutan pembentukan MPI (Masyarakat Peduli Api)
4. Penetapan lahan konservasi baru oleh kemen LHK

Pembinaan dan pengawasan pada pelaku usaha mengenai ketaatan peraturan khususnya dalam hal pengelolaan Sumber Daya Alam merupakan hal yang penting dilakukan. Mengingat Kabupaten Pacitan adalah Kabupaten yang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, baik potensi pertanian, kelautan, ekraf, dll serta potensi dari jumlah pelaku usaha yang cukup besar. Oleh karenanya, agar tidak terjadi kerusakan sumberdaya alam serta dapat terjadi keberlanjutan dalam berlangsungnya pemanfaatan sumberdaya alam oleh pelaku usaha diperlukan adanya peraturan yang mengikat batasan-batasan eksplorasi SDA, seperti pada larangan penggunaan pukat harimau pada pelaku usaha kelautan, larangan penggunaan pupuk kimia untuk pelaku usaha pertanian dan lain sebagainya.

Kondisi topografi Kabupaten Pacitan sebagian besar berupa pegunungan dan bukit, juga menyimpan potensi hutan yang cukup besar. Dari hutan ini akan dihasilkan berbagai jenis kayu yang tidak hanya diminati oleh masyarakat sekitar tetapi juga diekspor keluar Kabupaten Pacitan. Hutan di Kabupaten Pacitan terbagi menjadi hutan produksi yang luasnya mencapai 87,89% dari luas hutan yang ada, sedangkan sisanya 12,10% adalah hutan lindung. Sehingga memiliki lahan hutan yang luas juga menjadi keberuntungan tersendiri dalam hal pengelolaan sumberdaya alam di Kabupaten Pacitan.

Dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, maka lapangan usaha di Kabupaten Pacitan di dominasi pada sector pertanian. Salah satu hal positif yang dapat mendukung lestarnya sumberdaya alam pertanian adalah dengan peralihan penggunaan pupuk kimia menjadi pupuk organik. Pupuk organik dapat membantu petani mengatasi masalah dalam meningkatkan kesuburan tanah serta membasmi hama. Selain itu pupuk organik juga menghasilkan hasil pertanian dengan kualitas yang lebih baik akan tetapi tanah pun akan tetap terjaga dengan baik segi kualitasnya. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Pacitan terus mendorong pelaku usaha pertanian untuk membuat pupuk organik, selain pada alasan lingkungan, penggunaan pupuk organik juga menjadi langkah mengatasi langkanya pupuk non organik saat musim panen yang seringkali menjadi penghambat produksi petani.

Selain factor-faktor yang bersifat positif dan mendorong pelaksanaan misi ke-5 mengenai pengelolaan SDA yang tetap berpedoman pada pelestarian lingkungan, juga terdapat beberapa factor yang memiliki dampak negative atau menghambat adanya pelestarian lingkungan diantaranya:

1. Belum adanya kesadaran masyarakat untuk memilah sampah sehingga dapat menambah volume timbulan sampah di TPA



2. adanya pencemaran diakibatkan kegiatan industri, sampah dan pertambangan
3. Adanya perilaku sebagian masyarakat dan industri yang belum berwawasan lingkungan.
4. Penebangan liar dan perambahan hutan
5. kebakaran hutan
6. pengalihfungsian lahan (jalan, fasilitas umum dll)

Sejauh ini, perilaku masyarakat Indonesia terbiasa dengan membuang seluruh jenis sampah pada tempat yang sama, yang akhirnya seluruh jenis sampah berakhir pada penumpukan di TPA. Padahal seharusnya ada beberapa sampah yang dapat dipilah dan kemudian di salurkan pada tempat yang tepat. Sampah organik seperti sisa sayur buah, makanan dan tulang-tulang merupakan contoh sampah organik yang seharusnya dapat diolah untuk menjadi kompos, pakan ternak atau yang lainnya dan bukan berakhir di TPA. Sedangkan botol kardus adalah contoh sampah anorganik yang seharusnya diberikan pada pihak pengelola seperti pemulung, pelapak, petugas kebersihan dan mereka yg terkait didalamnya. Serta yang paling penting adalah memilah barang yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Sehingga dengan pemilahan sampah yang tepat hal ini akan sangat berpengaruh baik untuk rumah tangga maupun untuk lingkungan.

Jika pemilahan sampah tidak pernah dilakukan oleh masyarakat Pacitan. Maka hal ini akan berujung pada pencemaran lingkungan seperti adanya pencemaran udara yang disebabkan oleh bercampurnya sampah organik dan sampah anorganik. Lebih besar dari itu, sampah yang dihasilkan dalam masyarakat bukan hanya sampah rumah tangga, masih ada sampah atau sisa kegiatan industri dan pertambangan yang biasa disebut sebagai limbah yang memiliki dampak lingkungan lebih besar jika dibandingkan dengan sampah rumah tangga. Oleh karena itu, jika tidak dilakukan pengelolaan yang benar pada limbah industri dan pertambangan ini akan terus menjadi sumber pencemaran lingkungan di Kab. Pacitan.

Tidak adanya kesadaran masyarakat dan pelaku industri merupakan faktor dasar adanya pencemaran lingkungan yang berasal dari sampah dan limbah. Hal inilah yang memunculkan faktor penghambat pertama dan kedua yang telah dijelaskan diatas. Oleh karenanya diperlukan adanya penekanan perilaku pengolahan sampah yang benar pada seluruh masyarakat serta pelaku industri untuk mendorong minimnya pencemaran lingkungan. Sehingga pengelolaan sumberdaya alam dapat dilakukan secara berkelanjutan dalam waktu yang panjang.

Salah satu hal yang dapat menekan masyarakat dan pelaku industri mengenai kelestarian lingkungan adalah dengan adanya peraturan. Akan tetapi, kembali pada kondisi topografi Kabupaten Pacitan yang sebagian besar berupa pegunungan dan bukit, serta menyimpan potensi hutan yang cukup besar, hal ini selain dapat menjadi potensi positif juga dapat menjadi potensi adanya pembangunan industri yang



merusak lingkungan. Oleh sebab itu diperlukan peraturan yang dapat memberi Batasan pada pengelola dan pelaku industry agar menggunakan lahan dengan tepat dan berwawasan lingkungan.

2.5.3.6. Mewujudkan Pemerintahan yang Berkualitas, Berlandaskan Prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government

Penyelenggaraan Pemerintahan diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah yang mantap sehingga mampu mensejahterakan rakyat dan pemantapan tatakelola pemerintahan yang baik (good governance). Untuk mewujudkan Clean Government perlu adanya pembangunan Hukum diarahkan untuk mewujudkan ketertiban sosial melalui penegakan hukum yang adil, konsisten, konsekwen, aspiratif, dan tidak diskriminatif, penciptaan konstruksi hukum yang memberi peluang dan perlindungan bagi masyarakat sipil untuk berkontribusi dalam pengelolaan negara berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, konstitusionalisme, hak-hak asasi manusia, dan hukum yang berkeadilan. Berikut merupakan faktor penghambat dan pendorong mewujudkan pemerintahan yang berkualitas:

A. Faktor Pendorong

1. Integrasi urusan komunikasi dan informatika dilaksanakan oleh satu perangkat daerah
2. efektifitas penempatan ASN sesuai dengan kompetensinya
3. Terdapat regulasi yang mengatur terkait reward and punishment untuk dijadikan pedoman
4. telah menyusun rencana kebutuhan pengembangan kompetensi
5. SDM yang mampu untuk mengikuti perubahan regulasi yang sangat cepat
6. wajib pajak daerah mendukung terhadap inovasi perpajak daerah, diantaranya adalah jemput bola pembayaran pajak daerah, maupun pembayaran pajak daerah secara online / non tunai.
7. Adanya perubahan regulasi perpajakan daerah yang mendorong semangat peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama pada bidang pajak daerah yang dapat dilakukan melalui upaya inovasi, intensifikasi, ekstensifikasi, maupun diversifikasi potensi pajak daerah
8. Investor mulai tertarik untuk berinvestasi di Pacitan

B. Faktor Penghambat

1. Belum terintegrasinya aplikasi yang digunakan oleh perangkat daerah dalam data center yang dimiliki pemerintah daerah
2. Sumber Daya Manusia yang menguasai bidang informatika terbatas
3. adanya regulasi tidak dapat melakukan rekrutmen pegawai Honorer
4. Belum diterapkannya sistem reward and punishment dalam sistem kinerja di Kabupaten Pacitan



5. kurangnya disiplin ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya
6. Sistem self assessment memungkinkan wajib pajak kurang transparan dalam melaporkan omzet usahanya sehingga rawan terjadi kebocoran pajak.
7. Administrasi perpajakan daerah masih lemah terutama yang menyangkut kelembagaan, sistem dan prosedur maupun komputerisasi
8. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) dalam implementasinya belum dapat dilaksanakan secara optimal

2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik

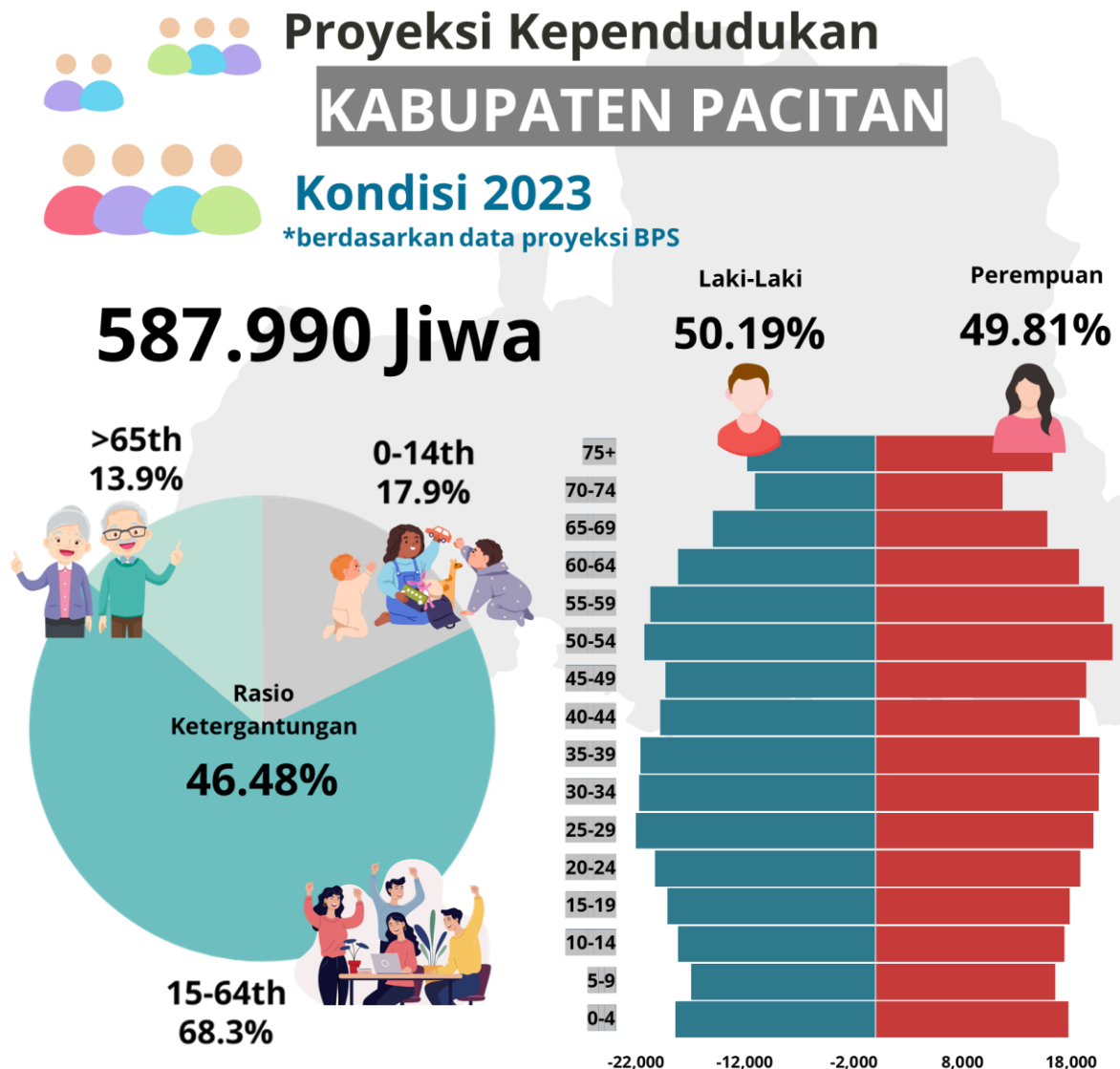
2.6.1. Proyeksi Kependudukan

Proyeksi penduduk merupakan cara penggambaran jumlah penduduk berdasarkan perhitungan tertentu yang didasarkan pada asumsi komponen yang bekerja di dalamnya yang meliputi kelahiran, kematian, dan migrasi. Dalam suatu perencanaan pembangunan, diperlukan informasi mengenai kepadatan penduduk seperti jumlah penduduk, persebaran penduduk, dan susunan penduduk menurut kelompok umur. Dengan basis data proyeksi penduduk, dapat bermanfaat sebagai basis data dan target penentuan kebijakan untuk pembangunan sektoral. Oleh karenanya proyeksi penduduk sangat bermanfaat dan merupakan kunci aktivitas perencanaan pembangunan, karena selain dapat dijadikan pijakan dalam menentukan arah dan dasar pengambilan keputusan rencana dimasa yang akan datang, juga dapat digunakan sebagai evaluasi pencapaian kegiatan pembangunan baik pada jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Sebagai upaya untuk merumuskan Kebijakan Jangka Panjang yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup daerah, diperlukan adanya proyeksi kependudukan yang dapat memberikan gambaran kondisi demografi Kabupaten Pacitan hingga tahun 2045. Proyeksi ini akan menjadi dasar utama pengembangan Kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan langsung ke masyarakat seperti pelayanan sektor kesehatan, pendidikan dan sosial serta kebijakan mengenai kebutuhan tempat tinggal, air bersih, energi/ listrik dan kualitas lingkungan di Kabupaten Pacitan.

Data dasar yang digunakan dalam proyeksi ini adalah data Proyeksi Penduduk Kabupaten Pacitan yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur yang memperkirakan jumlah penduduk dari tahun 2020 hingga tahun 2035. Berdasarkan proyeksi BPS Provinsi Jawa Timur tersebut, jumlah penduduk Kabupaten Pacitan pada tahun 2023 diperkirakan sebesar 587.990 Jiwa. Dengan jumlah penduduk Laki-laki sebanyak 295.110 Jiwa atau sebesar 50.19% dan 292.880 Jiwa penduduk Perempuan atau sebesar 49.81%.



Gambar 2. 70 Proyeksi Penduduk Kabupaten Pacitan Tahun 2023

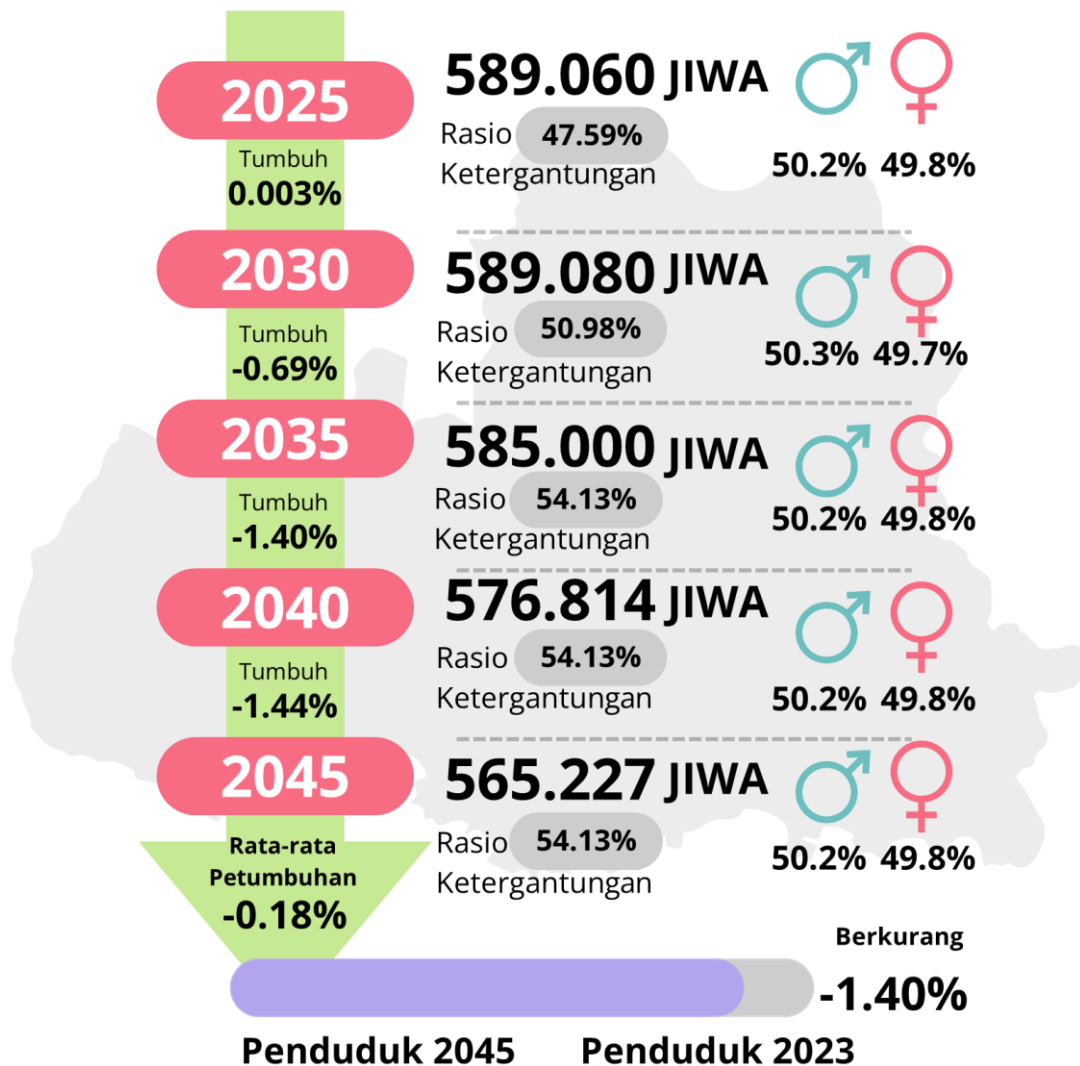


Sumber: BPS Tahun 2024

Pada tahun 2023 kondisi kependudukan Kabupaten Pacitan didominasi oleh penduduk usia produktif 15-64 tahun yakni sebesar 68.3%. Sedangkan sisanya sebesar 13.9% adalah penduduk usia lanjut >65% dan usia balita hingga remaja sebesar 17.9%. Dengan komposisi tersebut, nilai rasio ketergantungan Kabupaten Pacitan adalah sebesar 46.48%. Untuk menyempurnakan hasil proyeksi BPS Jawa Timur yang memproyeksikan jumlah penduduk Kabupaten Pacitan tahun 2023-2035. Sudah menggunakan data proyeksi BPS sesuai akhir periode RPJPD Kabupaten Pacitan 2025-2045 dengan memperhatikan proyeksi data proyeksi penduduk tahun 2040 dan 2045 berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin yang bersumber dari BPS Provinsi Jawa Timur. Berikut merupakan hasil proyeksi penduduk Kabupaten Pacitan hingga tahun 2045 yang diperkirakan akan menurun -3.87% dibandingkan dengan tahun 2023 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -0.18%.



Gambar 2. 71 Proyeksi Penduduk Kabupaten Pacitan Tahun 2025, 2030, 2035, 2040 dan 2045



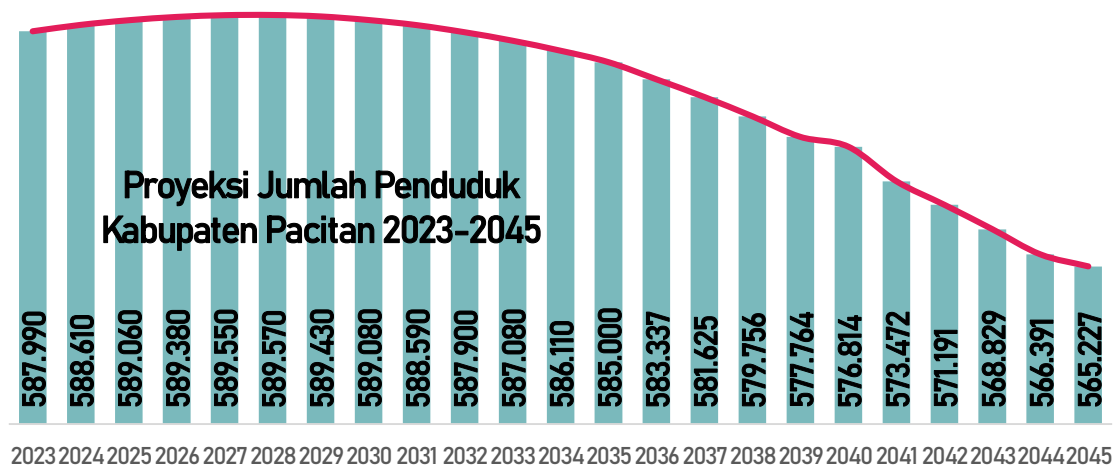
Sumber: BPS Tahun 2024

Jumlah penduduk Kabupaten Pacitan dalam 20 tahun mendatang diperkirakan akan mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan pada data historis proyeksi penduduk Kabupaten Pacitan yang tersaji dalam dokumen proyeksi penduduk 2022-2035 BPS Jawa Timur serta proyeksi penduduk BPS Jawa Timur tahun 2040 dan tahun 2045, menunjukkan bahwa proyeksi penduduk Kabupaten Pacitan memiliki tren yang cenderung menurun. Pada tahun 2025, diperkirakan jumlah penduduk Kabupaten Pacitan adalah sebesar 589.060 jiwa yang kemudian meningkat sebesar 0.003% di akhir periode tahap pertama RPJPD Kabupaten Pacitan yakni tahun 2030 menjadi 589.080 jiwa. Sedangkan pada akhir tahap kedua RPJPD Kabupaten Pacitan yakni tahun 2035 di perkirakan jumlah penduduk Kabupaten Pacitan akan mengalami sedikit penurunan hingga menjadi 585.000 jiwa atau menurun -0.69% dibanding periode sebelumnya. Adapun pada akhir tahap ketiga RPJPD Kabupaten Pacitan yakni tahun



2040, Penduduk Kabupaten Pacitan diperkirakan kembali mengalami penurunan sebesar -1.40% menjadi 576.814 jiwa dan terus menurun -1.44% di akhir periode RPJPD Kabupaten Pacitan yakni tahun 2045 menjadi 565.227 jiwa. Secara lebih lengkap, berikut proyeksi jumlah Penduduk Kabupaten Pacitan 2023-2045:

Gambar 2. 72 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Pacitan 2023-2045



Sumber: Proyeksi Penduduk BPS Provinsi Jawa Timur 2023-2045, diolah

Masalah kependudukan umumnya bersumber pada dua hal yaitu penambahan penduduk dan penyebaran penduduk. Meskipun berdasarkan hasil proyeksi jumlah Penduduk Kabupaten Pacitan diperkirakan akan mengalami penurunan, Akan tetapi yang perlu menjadi perhatian adalah mengenai komposisi penduduk dan struktur penduduknya. Selain menjadi pertimbangan dalam penentuan arah pengembangan infrastruktur pelayanan dasar masyarakat, proyeksi demografi Kabupaten Pacitan ini juga dapat memberikan gambaran umum kondisi sumber daya manusia Kabupaten Pacitan di masa yang akan datang, seperti pada rasio ketergantungan penduduk yang merupakan perbandingan jumlah penduduk usia produktif dengan penduduk usia non produktif. Berdasarkan data proyeksi, rasio ketergantungan Kabupaten Pacitan menunjukkan adanya peningkatan. Dari angka 47.59% di tahun 2025 kemudian angka rasio ketergantungan Kabupaten Pacitan mengalami peningkatan hingga pada tahun 2045 berada pada angka 54.13%. secara lebih jelas perkembangan Rasio Ketergantungan tahun 2025 – 2045 berdasarkan kelompok usia tersaji dalam tabel berikut:



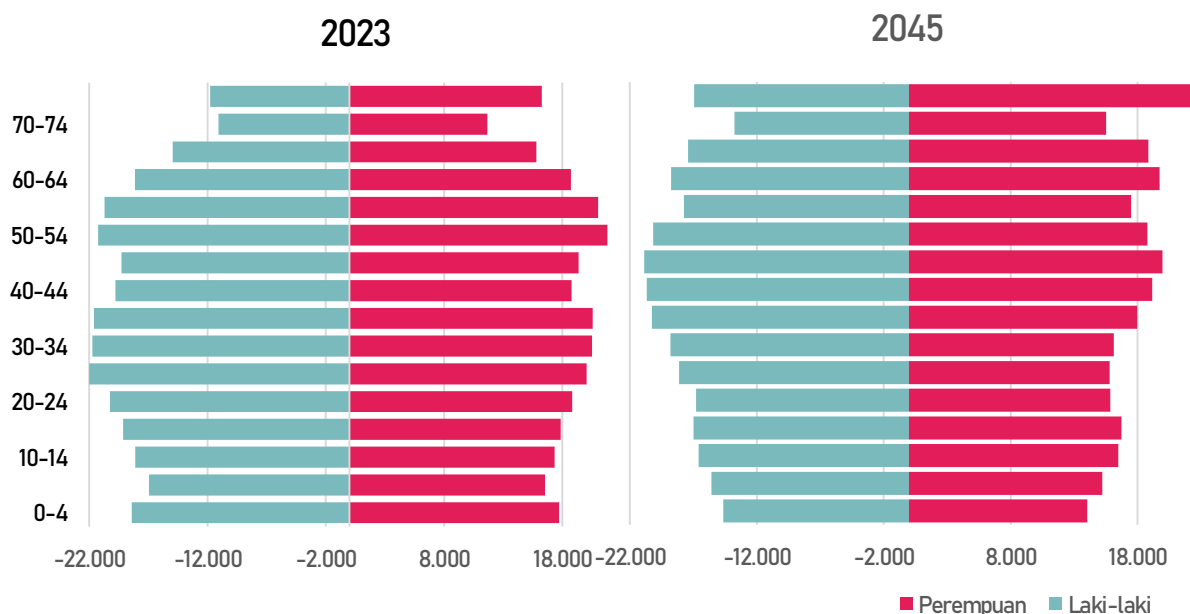
Tabel 2. 67 Proyeksi Komposisi Penduduk berdasarkan Kelompok Usia Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2045

Kelompok Umur	Penduduk Tahun 2023	Proyeksi Penduduk (Orang)				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0-14 Tahun	17.87%	17.67%	17.19%	16.37%	16.37%	16.37%
15-64 Tahun	68.27%	67.76%	66.23%	64.88%	64.88%	64.88%
> 65 Tahun	13.86%	14.57%	16.57%	18.75%	18.75%	18.75%
Angka Ketergantungan (%)	46.48%	47.59%	50.98%	54.13%	54.13%	54.13%

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, diolah

Pergeseran nilai rasio ketergantungan pada proyeksi Penduduk Kabupaten Pacitan disebabkan oleh adanya perubahan struktur penduduk Kabupaten Pacitan yang cukup signifikan baik pada struktur usia maupun struktur jenis kelamin. Dalam 20 tahun mendatang diperkirakan penduduk balita hingga usia produktif muda akan mengalami penurunan. Yakni dari proporsi 17.87% untuk penduduk 0-14 tahun pada tahun 2023 kemudian bergeser menjadi 16.37% pada tahun 2045. Sedangkan pada penduduk usia produktif yang memiliki proporsi sebesar 68.27% di tahun 2023 kemudian bergeser menjadi 64.88% di tahun 2045. Dilain sisi, penduduk usia lanjut >65 justru mengalami peningkatan dari proporsi 13.86% di tahun 2023 kemudian menjadi 18.75% di tahun 2045. Secara lebih jelas, pergeseran struktur penduduk Kabupaten Pacitan dari tahun 2023 terhadap tahun 2045 dapat diamati dalam dua piramida berikut ini:

Gambar 2. 73 Piramida Penduduk Kabupaten Pacitan Tahun 2018 dan 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, diolah



Berdasarkan perbandingan dua piramida penduduk Pacitan dari tahun 2023 menuju tahun 2045 diindikasikan adanya penurunan angka kelahiran dan kematian, berkurangnya kelompok umur muda dan anak-anak serta usia produktif muda, perlambatan pertumbuhan penduduk, meningkatnya angka harapan hidup serta banyaknya penduduk usia lanjut. Oleh karena itu, diperlukan adanya dorongan Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk mengambil langkah intervensi spesifik pada sektor pelayanan dasar tertentu seperti pelayanan Kesehatan, Pendidikan, Sosial dan Ketenagakerjaan. Intervensi yang dimaksud bertujuan sebagai upaya mitigasi pada kondisi-kondisi yang tidak diharapkan di masa depan, seperti timbulnya dampak sosial negatif akibat dari meningkatnya beban ketergantungan penduduk non-produktif. Hal ini juga sesuai dengan angka ketergantungan yang terlihat mengalami peningkatan pada 20 tahun kedepan.

Sedangkan jika dilihat berdasarkan Rasio Jenis Kelamin dalam 20 tahun kedepan terlihat adanya tren yang fluktuatif. Pada tahun 2023 rasio jenis kelamin berada pada angka 100.76% yang berarti dalam setiap 100 jiwa laki-laki terdapat 76 jiwa perempuan. Kemudian pada dua periode pertama yakni diakhir periode tahun 2025 dan tahun 2030, pertumbuhan penduduk berjenis kelamin perempuan diperkirakan akan lebih banyak dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk berjenis kelamin laki-laki. Sehingga pada akhir tahun 2025 dan tahun 2030 diperkirakan rasio jenis kelamin di Kabupaten Pacitan akan meningkat menjadi 100.90% dan 101.02%. Akan tetapi pada akhir 3 periode berikutnya (tahun 2035, 2040 dan 2045), diperkirakan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan akan mengalami penurunan yang lebih tinggi dari penurunan penduduk berjenis kelamin laki-laki. Sehingga rasio jenis kelamin Kabupaten Pacitan pada akhir periode ketiga, keempat dan kelima (tahun 2035, 2040 dan 2045) menurun menjadi 100.98%. Secara lebih jelas tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2. 68 Proyeksi Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Pacitan 2025-2045

Jenis Kelamin	Penduduk Tahun 2023	Proyeksi Penduduk (Orang)				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Laki-laki	295,110	295,850	296,040	293,920	289,807	283,986
Perempuan	292,880	293,210	293,040	291,080	287,007	281,241
Rasio Jenis Kelamin Laki-Laki Terhadap Perempuan (%)	100.76%	100.90%	101.02%	100.98%	100.98%	100.98%

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, diolah

Lebih lanjut, dengan adanya tren menurun pada jumlah Penduduk Kabupaten Pacitan 20 tahun mendatang, maka diperkirakan kepadatan penduduk di Kabupaten Pacitan akan mengalami penurunan. Saat ini luas wilayah Kabupaten Pacitan adalah sebesar 1.390 Km². Dengan luas tersebut, pada tahun 2023 angka kepadatan



penduduk Kabupaten Pacitan adalah sebesar 423 jiwa/km². Kemudian seiring dengan penurunan jumlah penduduk pada 20 tahun mendatang, kepadatan Penduduk Kabupaten Pacitan diproyeksikan akan mengalami penurunan hingga pada tahun 2045 menjadi 407 jiwa/km².

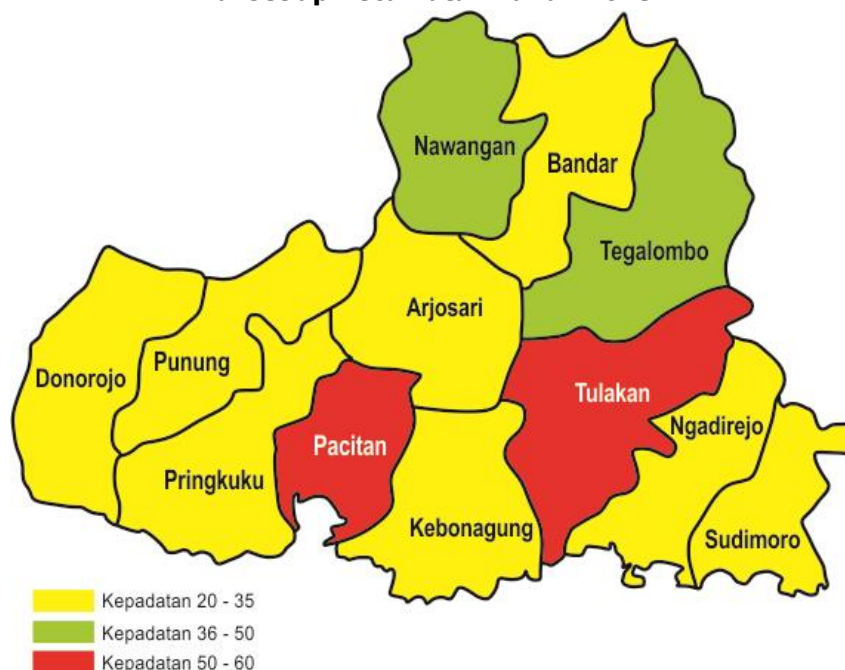
Tabel 2. 69 Proyeksi Kepadatan Penduduk berdasarkan perkiraan jumlah penduduk Kabupaten Pacitan 2025-2045

Komponen	Penduduk Tahun 2023	Proyeksi Penduduk				
		2025	2030	2035	2040	2045
Total Penduduk	587,990	589,060	589,080	585,000	576,814	565,227
Kepadatan Penduduk (jiwa / km ²)	423	424	424	421	415	407

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, diolah

Meskipun berdasarkan proyeksi menunjukkan bahwa kepadatan penduduk Kabupaten Pacitan 20 tahun mendatang akan menurun, akan tetapi masih terdapat ketimpangan persebaran penduduk yang menyebabkan adanya beberapa daerah dengan kepadatan penduduk yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya. Pada tahun 2045, di proyeksikan kepadatan penduduk tertinggi berada pada Kecamatan Tulakan dan Kecamatan Pacitan. Sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah ada pada Kecamatan Pringkuku dan Kecamatan Sudimoro. Lebih jelasnya kepadatan penduduk setiap kecamatan di Kabupaten Pacitan tersaji dalam tabel dan peta berikut ini:

Gambar 2. 74 Peta Proyeksi Kepadatan Penduduk Kabupaten Pacitan di setiap Kecamatan Tahun 2045



Sumber: Data diolah

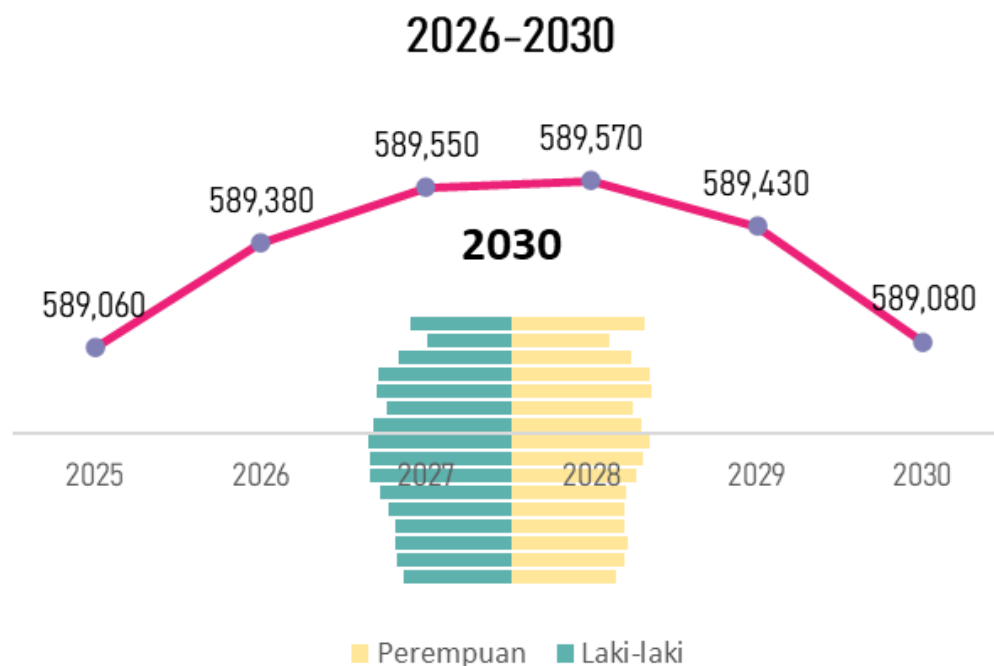


Secara spesifik, hasil proyeksi penduduk Kabupaten Pacitan akan disajikan dalam rentang waktu 5 tahunan sesuai dengan *milestone* arah Pembangunan RPJPD Kabupaten Pacitan 2025-2045, dimulai dari periode 2025-2030 hingga 2040-2045 sebagai berikut:

2.6.1.1. Proyeksi Penduduk 2025-2030

Pada *milestone* pertama RPJPD Kabupaten Pacitan 2025-2045 yaitu dalam rentang tahun 2025-2030, penduduk Kabupaten Pacitan diperkirakan akan mengalami tren yang meningkat kemudian kembali menurun. Yakni dari sejumlah 589.060 jiwa di tahun 2025 kemudian meningkat pada tahun 2026-2028 hingga menjadi 589.570 jiwa. Akan tetapi pada tahun 2029 di proyeksikan Penduduk Kabupaten Pacitan akan menurun pada angka 589.430 jiwa dan terus menurun hingga hampir kembali pada tahun pertama, yakni menjadi 589.080 jiwa di tahun 2030. Dengan kondisi tersebut, pada tahun 2025 hingga tahun 2030 penduduk Kabupaten Pacitan mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 0.003%. Tren pertambahan penduduk hasil proyeksi tersebut dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 2. 75 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Pacitan 2025-2030



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur, diolah

Adapun secara struktur demografi, di akhir tahun 2030, di mana merupakan akhir dari *milestone* pertama RPJPD Kabupaten Pacitan 2025-2045, penduduk Kabupaten Pacitan banyak berkurang pada usia balita hingga remaja serta bertambahnya penduduk usia produktif dewasa serta penduduk usia lanjut. Struktur semacam ini sejatinya merupakan hasil proyeksi yang umumnya terjadi pada wilayah

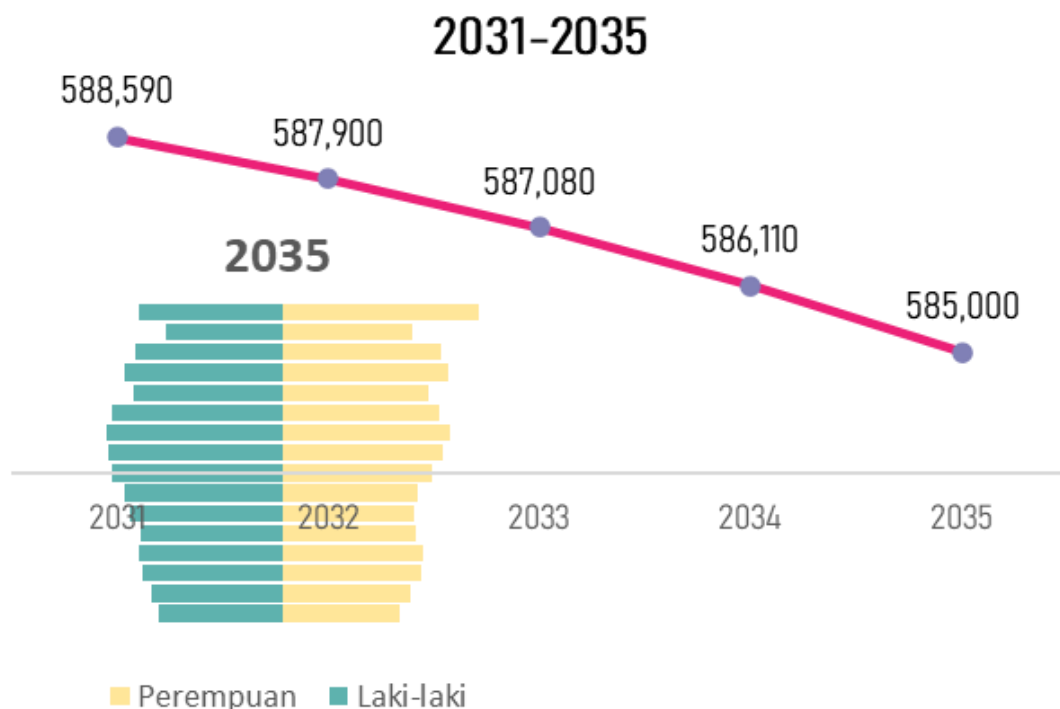


yang di tahun dasarnya (2023) memiliki konstruksi piramida penduduk konstruktif yang sejak awal mayoritas penduduknya berusia dewasa. Sedangkan secara komposisi jenis kelamin, penduduk Kabupaten Pacitan pada seluruh rentang usia ditahun 2030 relative didominasi oleh laki-laki sebesar 50.3%.

2.6.1.2. Proyeksi Penduduk 2031-2035

Penduduk Kabupaten Pacitan diestimasikan akan kembali mengalami penurunan dari 588.590 jiwa di tahun 2031 menjadi 585.000 jiwa di tahun 2035 atau dengan kata lain mengalami penurunan -0.69%. Di tahapan kedua *milestone* RPJPD Kabupaten Pacitan 2025-2045 yaitu tahun 2031-2035 ini mengalami penurunan yang lebih signifikan dibanding periode sebelumnya. Secara lengkap, tren pertambahan penduduk hasil proyeksi tersebut dapat dilihat di diagram berikut:

Gambar 2. 76 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Pacitan 2031-2035



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur, diolah

Sedangkan secara struktur, di akhir tahun 2035, di mana merupakan akhir dari tahapan kedua RPJPD Kabupaten Pacitan 2025-2045, penduduk usia balita hingga remaja terlihat semakin berkurang. Sedangkan penduduk usia produktif dewasa semakin bertambah dan terlihat juga semakin bertambahnya usia lanjut hingga lebih dominan II-154etikaII-154eII-154g rentang usia lainnya. Diindikasikan pada periode ini terdapat perlambatan angka kelahiran dan meningkatnya angka harapan hidup. Dalam kondisi ini, Pemerintah Kabupaten Pacitan harus mengantisipasi adanya peningkatan kebutuhan kerja serta peningkatan ketergantungan usia non produktif

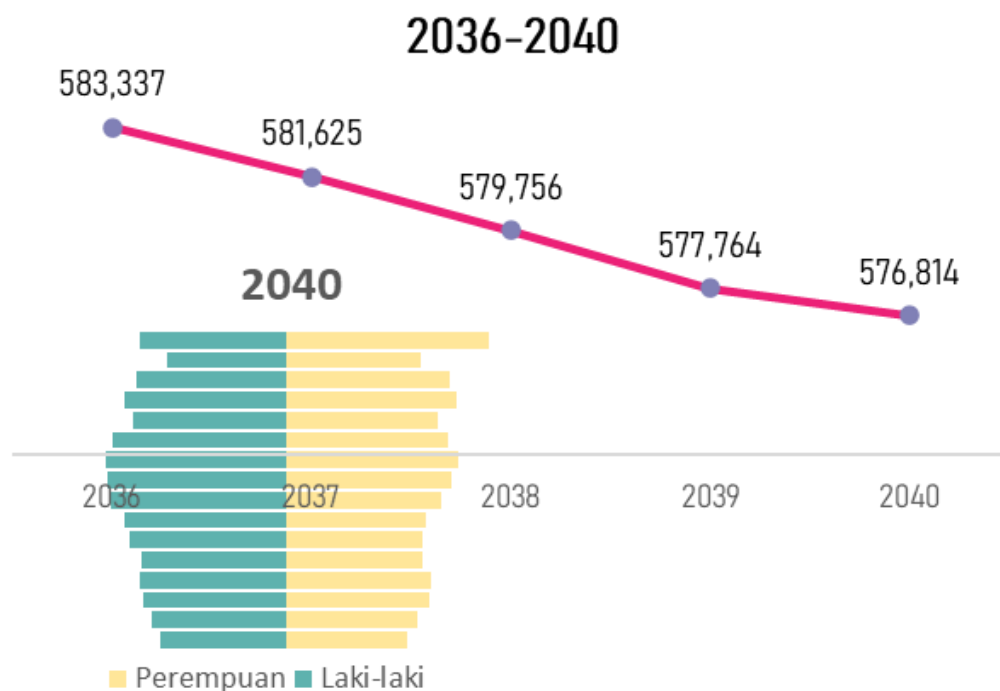


terhadap usia produktif. Sehingga penyediaan lapangan kerja serta peningkatan kualitas tenaga kerja harus dipersiapkan dengan serius agar kondisi pada periode ini dapat membawa dampak positif terhadap perekonomian Kabupaten Pacitan. Selain itu, dengan dominanya kelompok usia lanjut membutuhkan adanya pelayanan-pelayanan khusus seperti pelayanan Kesehatan yang mudah dijangkau, layanan perlindungan sosial dan lain sebagainya.

2.6.1.3. Proyeksi Penduduk 2036-2040

Di fase ketiga *milestone* RPJPD Kabupaten Pacitan 2025-2045 yaitu tahun 2036-2040 ini diproyeksikan penduduk Kabupaten Pacitan kembali mengalami mengalami penurunan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -1.40%. Yakni dari jumlah penduduk sebesar 583.337 jiwa di tahun 2036 kemudian terus menurun setiap tahunnya hingga pada tahun 2040 mencapai 576.814 jiwa. Secara lengkap, tren penurunan jumlah penduduk Kabupaten Pacitan berdasarkan hasil proyeksi tahun 2036-2040 dapat dilihat di diagram berikut:

Gambar 2. 77 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Pacitan 2036-2040



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur, diolah

Di akhir tahun 2040, penduduk usia lanjut terlihat semakin bertambah dan dominan. Kondisi ini mengakibatkan II-155etikaII-155 kebutuhan lapangan pekerjaan semakin besar. Meskipun diiringi dengan meningkatnya penduduk usia produktif dewasa, akan tetapi angka ketergantungan pada periode ini masih berada pada angka 54.13% atau sama dengan periode sebelumnya. Oleh karenanya produktifitas daerah

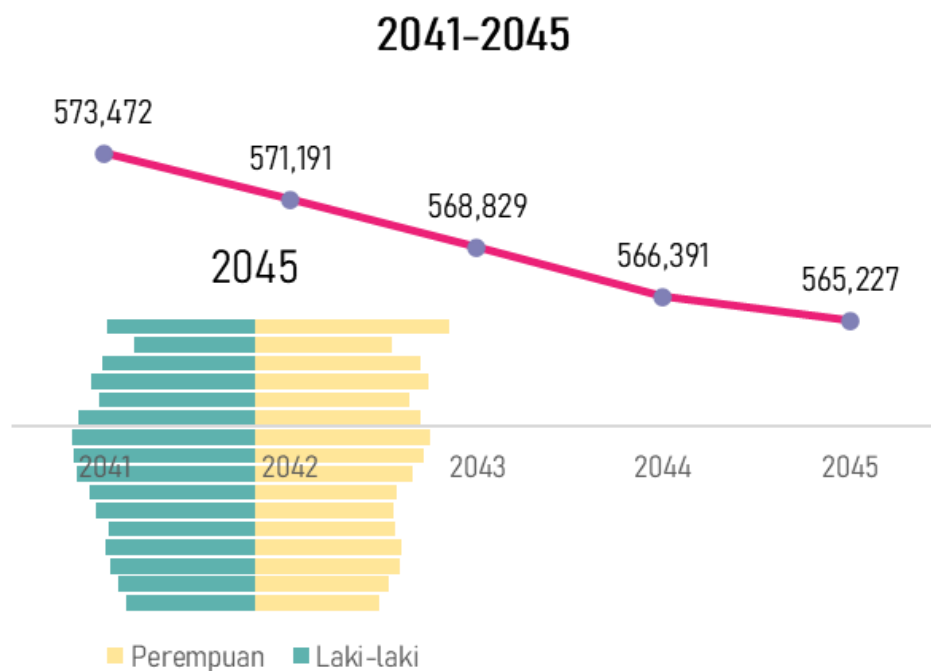


harus terus dipertahankan meskipun besaran penduduk usia lanjut di Kabupaten Pacitan pada akhir periode ini kemungkinan tidak akan sebesar hasil proyeksi, mengingat terdapat II-156etikaII-156e kematian yang belum dapat diperhitungkan dalam proses proyeksi ini.

2.6.1.4. Proyeksi Penduduk 2041-2045

Proyeksi penduduk Kabupaten Pacitan pada fase keempat tahapan RPJPD Kabupaten Pacitan 2025-2045 yaitu tahun 2041-2045 menunjukkan trend yang tidak jauh berbeda dengan tiga tahap sebelumnya. Pada tahun 2041 hingga tahun 2045 diperkirakan penduduk Kabupaten Pacitan akan mengalami penurunan dari angka 573.472 jiwa di tahun 2041 hingga menjadi 565.227 jiwa di tahun 2045 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -1.44%. Tren pertumbuhan penduduk Kabupaten Pacitan berdasarkan hasil proyeksi pada tahun 2041-2045 secara lengkap dapat dilihat dalam grafik berikut:

Gambar 2. 78 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Pacitan 2041-2045



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur, diolah

Di akhir tahun 2045, Kabupaten Pacitan semakin mengalami peningkatan penduduk usia lanjut dan usia produktif dewasa. Sedangkan pada penduduk usia balita, remaja dan dewasa terlihat semakin mengalami penurunan. Kondisi ini mengindikasikan adanya keberhasilan program keluarga berencana maupun program keberlangsungan hidup masyarakat Kabupaten Pacitan. Dalam kondisi ini, pelayanan publik terhadap usia dewasa hingga usia lanjut perlu disiapkan dengan matang serta menjaga kondistensi dalam mempertahankan produktifitas daerah. Sama seperti



struktur penduduk pada periode berikutnya, dominasi usia lanjut dan dewasa dibanding usia balita hingga remaja dimungkinkan tidak akan setinggi hasil proyeksi yang disebabkan adanya variabel kematian yang belum dapat diperhitungkan. Variabel kematian tersebut sangat berarti, mengingat Angka Harapan Hidup di Kabupaten Pacitan di tahun dasar sebesar 72.86 atau dengan kata lain belum mencapai 75 tahun.

2.6.2. Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Setelah diketahui proyeksi kependudukan Kabupaten Pacitan dalam 20 tahun mendatang, maka langkah selanjutnya yang perlu dilaksanakan dalam perencanaan jangka panjang RPJPD Kabupaten Pacitan 2025-2045 adalah melihat proyeksi akan kebutuhan sarana prasarana pelayanan dasar seperti kebutuhan air bersih, kebutuhan lahan permukiman, kebutuhan sarana prasarana persampahan, serta kebutuhan ketersediaan fasilitas Kesehatan dan Pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Pacitan dalam 20 tahun mendatang. Untuk melihat lebih rinci kebutuhan sarana prasarana layanan publik pada setiap wilayah di Kabupaten Pacitan dalam 20 tahun mendatang, maka proyeksi dilakukan berdasarkan perkiraan jumlah penduduk pada setiap kecamatan di akhir tahun periode pertama (2030), kedua (2035), ketiga (2040), hingga periode keempat (2045) RPJPD Kabupaten Pacitan 2025-2045. Adapun hasil proyeksi jumlah penduduk dalam setiap kecamatan tertera dalam table berikut:

Tabel 2. 70 Proyeksi Penduduk berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Proyeksi Penduduk				
		2022	2025	2030	2035	2040	2045
1	DONOROJO	42,897	41,968	41,970	41,679	41,096	40,270
2	PUNUNG	37,052	36,250	36,251	36,000	35,496	34,783
3	PRINGKUKU	32,375	31,674	31,675	31,456	31,016	30,393
4	PACITAN	76,537	74,880	74,883	74,364	73,323	71,850
5	KEBONAGUNG	46,023	45,027	45,028	44,716	44,091	43,205
6	ARJOSARI	41,808	40,903	40,904	40,621	40,053	39,248
7	NAWANGAN	51,770	50,649	50,651	50,300	49,596	48,600
8	BANDAR	45,503	44,518	44,519	44,211	43,592	42,717
9	TEGALOMBO	55,852	54,643	54,645	54,266	53,507	52,432
10	TULAKAN	86,925	85,043	85,046	84,457	83,275	81,602
11	NGADIROJO	48,994	47,933	47,935	47,603	46,937	45,994
12	SUDIMORO	36,359	35,572	35,573	35,327	34,832	34,133
Total	592916	602,095*	589,060	589,080	585,000	576,814	565,227

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur dan BPS Kabupaten Pacitan, diolah

*2022 menggunakan data eksisting berdasarkan BPS Kabupaten Pacitan

Adapun dari hasil proyeksi penduduk tersebut, kemudian dilakukan perhitungan proyeksi pada masing-masing kebutuhan sarana prasarana pelayanan di Kabupaten Pacitan dalam 20 tahun mendatang. Proyeksi sarana prasarana dilakukan dengan berdasar pada jumlah penduduk pada tahun-tahun berkenaan serta standar



kebutuhan masing-masing sarana prasarana yang termuat dalam peraturan terkait. Secara garis besar proyeksi kebutuhan sarana prasarana Kabupaten Pacitan pada tahun 2045 tergambar dalam peta berikut:

Gambar 2. 79 Peta Kebutuhan Sarana Prasarana Kabupaten Pacitan pada Tahun 2045



Sumber: Data diolah

2.6.2.1 Proyeksi Kebutuhan Air

Proyeksi kebutuhan air bersih di Kabupaten Pacitan dalam 20 tahun kedepan, di proyeksikan dengan cara mengalikan estimasi jumlah penduduk di tahun berkenaan dengan standar Kebutuhan air untuk hidup layak sebesar 1.600 m³, sesuai dengan standar yang ada di dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah sebagai berikut:

Tabel 2. 71 Proyeksi Kebutuhan Air

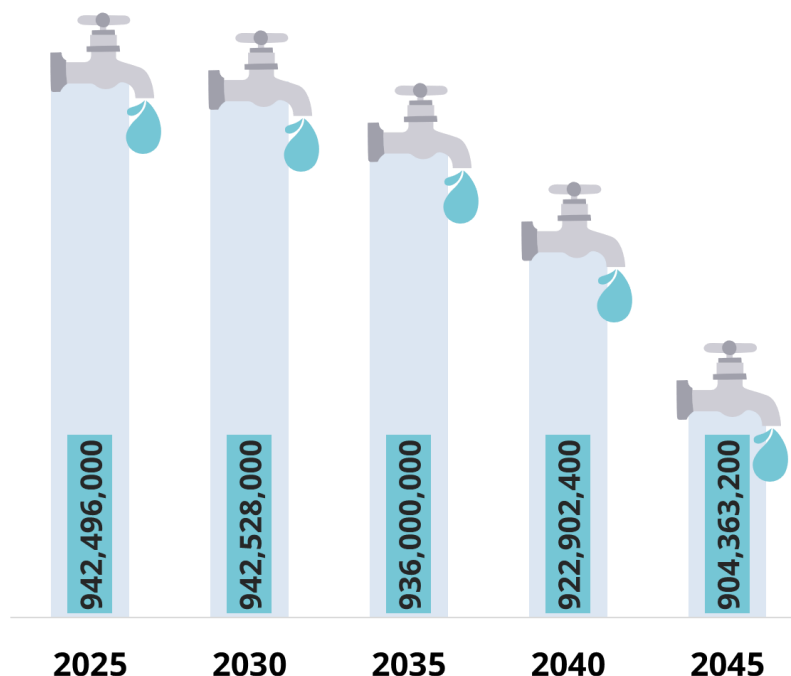
Tahun	Proyeksi Jumlah Penduduk	Proyeksi Kebutuhan Air	
		Standar Kebutuhan Air Tahunan (M ³ /Orang/Tahun)	Total Kebutuhan Air Bersih (M ³)
2025	589,060	1,600	942,496,000
2030	589,080	1,600	942,528,000
2035	585,000	1,600	936,000,000
2040	576,814	1,600	922,902,400
2045	565,227	1,600	904,363,200

Sumber: Data diolah



Pada tahun 2025 ini proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Pacitan adalah sebesar 589.060 jiwa. Sehingga II-159etika dikalikan dengan standar kebutuhan air tahunan menunjukkan angka sebesar 942.496.000 M³. Adapun pada akhir periode pertama tahapan RPJPD Kabupaten Pacitan 2025-2045 yakni tahun 2030, proyeksi jumlah penduduk meningkat menjadi 589.080 sehingga perkiraan kebutuhan air masyarakat Kabupaten Pacitan pada tahun 2030 juga mengalami peningkatan menjadi 942.528.000 M³. Kebutuhan air di Kabupaten Pacitan kemudian diproyeksikan akan mengalami penurunan pada 3 periode terakhir RPJPD Kabupaten Pacitan 2025-2045 seiring dengan menurunnya proyeksi jumlah penduduk. Di proyeksikan pada tahun 2045 kebutuhan air di Kabupaten Pacitan menurun hingga menjadi 904.363.200 M³. Lebih jelasnya tersaji dalam grafik berikut:

Gambar 2. 80 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih



Sumber: Data diolah

Adapun jika dibandingkan dengan kondisi saat ini, Ketersediaan Air di Kabupaten Pacitan saat ini adalah sebesar 1.738.083.000,54 M³/tahun. Dapat diartikan ketersediaan air di Kabupaten Pacitan telah mencukupi kebutuhan air dalam 20 tahun mendatang. Dari total ketersediaan air tersebut, diperoleh bahwa terdapat 2 Kecamatan yang masuk kategori status daya dukung airnya pada tahun 2023 mengalami defisit dengan nilai yang bervariasi, kecamatan tersebut antara lain Kecamatan Donorojo dan Kecamatan Pacitan, sedangkan kecamatan lainnya berstatus surplus. Secara lebih rinci sebaran ketersediaan air pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut:



Tabel 2. 72 Sebaran Ketersediaan Air Kabupaten Pacitan Tahun 2023

Kecamatan	Ketersediaan (m ³ /th)	Kebutuhan (m ³ /th)	Surplus/Defisit
Arjosari	168.712.703,09	95.386.806,76	Surplus
Bandar	130.028.122,84	105.465.026,15	Surplus
Donorojo	124.712.591,40	130.970.521,83	Defisit
Kebonagung	153.018.706,19	39.838.823,47	Surplus
Nawangan	139.632.726,69	70.009.667,63	Surplus
Ngadirojo	153.300.228,26	71.470.375,39	Surplus
Pacitan	152.925.858,74	173.565.608,08	Defisit
Pringkuku	135.698.683,79	70.998.325,35	Surplus
Punung	116.947.433,32	106.541.693,22	Surplus
Sudimoro	88.910.394,04	31.331.602,32	Surplus
Tegalombo	162.249.041,50	94.367.042,14	Surplus
Tulakan	211.946.510,66	84.897.721,20	Surplus
Total	1.738.083.000,54	1.074.843.213,56	

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2045

Untuk dapat memastikan kecukupan kebutuhan air di seluruh wilayah di Kabupaten Pacitan dalam 20 tahun mendatang, maka selain memproyeksikan kebutuhan air Kabupaten Pacitan dalam 20 tahun ke depan secara total, penting juga bagi Kabupaten Pacitan untuk memperkirakan kebutuhan air berdasarkan sebaran kecamatan di Kabupaten Pacitan. Berikut merupakan hasil proyeksi kebutuhan air Kabupaten Pacitan yang terbagi berdasar 12 kecamatan.

Tabel 2. 73 Proyeksi Kebutuhan Air Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Proyeksi Kebutuhan Air (M ³)				
		2025	2030	2035	2040	2045
1	Donorojo	67.149.289	67.151.568	66.686.473	65,753,318	64,432,470
2	Punung	57.999.754	58.001.723	57.600.000	56,793,994	55,653,120
3	Pringkuku	50.678.561	50.680.281	50.329.267	49,625,001	48,628,138
4	Pacitan	119.808.031	119.812.099	118.982.274	117,317,335	114,960,673
5	Kebonagung	72.042.607	72.045.053	71.546.065	70,544,909	69,127,808
6	Arjosari	65.444.611	65.446.833	64.993.544	64,084,079	62,796,762
7	Nawangan	81.038.736	81.041.488	80.480.190	79,354,018	77,759,960
8	Bandar	71.228.619	71.231.038	70.737.688	69,747,844	68,346,754
9	Tegalombo	87.428.540	87.431.508	86.825.953	85,610,983	83,891,236
10	Tulakan	136.069.000	136.073.620	135.131.167	133,240,255	130,563,734
11	Ngadirojo	76.693.294	76.695.898	76.164.698	75,098,913	73,590,331
12	Sudimoro	56.914.959	56.916.891	56.522.682	55,731,751	54,612,215
Total Proyeksi Kebutuhan Air (M ³)		942.496.000	942.528.000	936.000.000	922,902,400	904,363,200

Sumber: RTRW Kabupaten Pacitan, Tahun 2024-2044



2.6.2.2 Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal dan Lahan Permukiman

Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal dan Lahan Permukiman Kabupaten Pacitan dalam 20 tahun mendatang diproyeksikan dengan metode mengalikan jumlah penduduk pada tahun berkenaan dengan standar kebutuhan lahan permukiman perkapita yang mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan lingkungan perumahan yaitu sebesar 26 M²/kapita untuk kebutuhan lahan permukiman dan 1 rumah untuk 5 orang. Sehingga menghasilkan proyeksi kebutuhan rumah dan lahan permukiman sebagai berikut:

Tabel 2. 74 Proyeksi Kebutuhan Lahan Permukiman

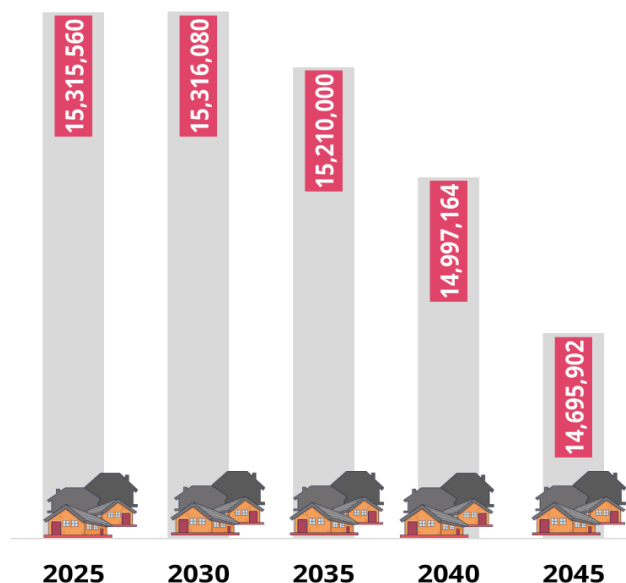
Uraian	Standar	Kondisi Kebutuhan 2023	Proyeksi Kebutuhan Minimum Persampahan				
			2025	2030	2035	2045	2045
Proyeksi Jumlah Penduduk		587.990	589.060	589.080	585.000	576,814	565,227
Kebutuhan Lahan Permukiman	26 m2/orang	15.264.340	15.315.560	15.316.080	15.210.000	14.997.164	14.695.902
Kebutuhan Rumah (Unit)	5 orang per 1 unit	117.598	117.812	117.816	117.000	115.363	113.045

Sumber: RTRW Kabupaten Pacitan dan data diolah, 2024

Pada tahun 2025 diproyeksikan jumlah penduduk Kabupaten Pacitan adalah sebesar 589.060 jiwa, sehingga ketika dikalikan dengan standar kebutuhan lahan permukiman menunjukkan angka sebesar 15.315.560 M² dan kebutuhan rumah dengan standart 5 orang dalam 1 rumah menghasilkan perhitungan 117.812 rumah. Adapun pada akhir periode pertama tahapan RPJPD Kabupaten Pacitan 2025-2045 yakni tahun 2030, proyeksi jumlah penduduk meningkat menjadi 589.080 jiwa, sehingga perkiraan kebutuhan lahan permukiman masyarakat Kabupaten Pacitan pada tahun 2030 juga mengalami peningkatan menjadi 15.316.080 M² dan kebutuhan rumah dengan standart 5 orang dalam 1 rumah menghasilkan perhitungan 117.816 rumah. Kebutuhan rumah dan lahan permukiman di Kabupaten Pacitan kemudian diproyeksikan akan memiliki tren menurun pada tiga periode terakhir RPJPD Kabupaten Pacitan 2025-2045 seiring dengan menurunnya proyeksi jumlah penduduk. Di proyeksikan pada tahun 2045 kebutuhan lahan pemukiman di Kabupaten Pacitan menurun hingga pada tahun 2045 menjadi 14.695.902 M² dan kebutuhan rumah menurun hingga menjadi 113.045 rumah. Lebih jelasnya tersaji dalam grafik berikut:



Gambar 2. 81 Proyeksi Kebutuhan Lahan Permukiman (M²)



Sumber: RTRW Kabupaten Pacitan, Tahun 2024-2044

Adapun jika dibandingkan dengan kondisi saat ini, Luas Wilayah Kabupaten Pacitan saat ini adalah sebesar 1.390 Km² atau sama dengan 1.390.000.000 M² yang terdiri atas luas permukiman sebesar 02.27% dari luas wilayah yakni sebesar 3.153,33 Ha. Dari data tersebut, luas kawasan yang layak untuk menjadi permukiman di Kabupaten Pacitan adalah sebesar 559.648.625 m² dengan sebaran luas pada masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 75 Ketersediaan Laus Lahan Layak Pemukiman Kabupaten Pacitan Tahun 2022

No	Kecamatan	Luas Lahan Layak Permukiman (m ²)
1	Arjosari	19.711.909,81
2	Bandar	52.056.238,84
3	Donorojo	58.128.060,42
4	Kebonagung	59.654.878,87
5	Nawangan	39.536.490,43
6	Ngadirojo	28.174.957,78
7	Pacitan	48.318.806,62
8	Pringkuku	86.994.624,89
9	Punung	57.017.408,96
10	Sudimoro	27.605.421,25
11	Tegalombo	25.084.707,19
12	Tulakan	57.365.119,67
Total		559.648.624,7

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2045



Untuk dapat memastikan ketercukupan kebutuhan lahan pemukiman di seluruh kecamatan di Kabupaten Pacitan dalam 20 tahun kedepan, maka selain memproyeksikan kebutuhan lahan pemukiman Kabupaten Pacitan dalam 20 tahun ke depan secara total, penting juga bagi Kabupaten Pacitan untuk memperkirakan kebutuhan lahan pemukiman berdasarkan sebaran kecamatan di Kabupaten Pacitan. Berikut merupakan hasil proyeksi kebutuhan lahan pemukiman Kabupaten Pacitan yang terbagi berdasar 12 kecamatan.

Tabel 2. 76 Proyeksi Kebutuhan Lahan Permukiman Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Proyeksi Kebutuhan Lahan Permukiman (M2)				
		2025	2030	2035	2040	2045
1	Donorojo	1.091.176	1.091.213	1.083.655	1,068,491	1,047,028
2	Punung	942.496	942.528	936.000	922,902	904,363
3	Pringkuku	823.527	823.555	817.851	806,406	790,207
4	Pacitan	1.946.881	1.946.947	1.933.462	1,906,407	1,868,111
5	Kebonagung	1.170.692	1.170.732	1.162.624	1,146,355	1,123,327
6	Arjosari	1.063.475	1.063.511	1.056.145	1,041,366	1,020,447
7	Nawangan	1.316.879	1.316.924	1.307.803	1,289,503	1,263,599
8	Bandar	1.157.465	1.157.504	1.149.487	1,133,402	1,110,635
9	Tegalombo	1.420.714	1.420.762	1.410.922	1,391,178	1,363,233
10	Tulakan	2.211.121	2.211.196	2.195.881	2,165,154	2,121,661
11	Ngadirojo	1.246.266	1.246.308	1.237.676	1,220,357	1,195,843
12	Sudimoro	924.868	924.899	918.494	905,641	887,448
Total Proyeksi Kebutuhan Lahan Permukiman (M2)		15.315.560	15.316.080	15.210.000	14,997,164	14,695,902

Sumber: Data diolah

2.6.2.3 Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana Persampahan

Kebutuhan sarana prasarana persampahan Kabupaten Pacitan dilaksanakan dengan melihat pada perkiraan timbulan sampah pada tahun berkenaan. Adapun proyeksi timbulan sampah dilakukan melalui perkalian antara proyeksi jumlah penduduk di tahun berkenaan dengan rata-rata timbulan sampah perkapita masyarakat wilayah dengan jumlah penduduk 500.000 - 1.000.000 jiwa seperti Kabupaten Pacitan yaitu sebesar 0,6 Kg/orang/hari sesuai dengan yang terdapat dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan, serta dikalikan koefisien 365 sebagai angka yang mewakili jumlah hari dalam 1 tahun sehingga menghasilkan standar timbulan sampah tahunan sebesar 219 Kg.


Tabel 2. 77 Proyeksi Timbunan Sampah dan Kebutuhan TPST

Uraian	Standar	Kondisi Kebutuhan 2023	Proyeksi Timbunan Sampah				
			2025	2030	2035	2045	2045
Proyeksi Jumlah Penduduk		587.990	589.060	589.080	585.000	576,814	565,227
Timbunan Sampah (Ton/tahun)	0,6 Kg/orang/hari	128.769,81	129.004,14	129.008,52	128.115,00	126.322,27	123.784,71
Kebutuhan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu	1: 120.000	5	5	5	5	5	5

Sumber: Data diolah

Data Neraca Sampah Kabupaten Pacitan tahun 2019 berdasarkan laporan SIPSN adalah sebesar 103.962,36 ton/hari. Kemudian pada tahun 2020 timbunan sampah yang tercatat dalam SIPSN meningkat menjadi 104.308,04 ton/hari. Adapun pada tahun 2021 (laporan SIPSN), mencatat timbunan sampah di Pacitan telah mencapai 104.654,83 ton/tahun. Lebih lanjut, pada tahun 2022 jumlah timbunan sampah di Kabupaten Pacitan kembali meningkat hingga mencapai 104.999,96 ton/tahun (laporan SIPSN) dengan persentase penanganan sampah sebesar 97.96%. Dan pada tahun 2023, data neraca sampah Kabupaten Pacitan tahun 2023 (laporan SIPSN) kembali meningkat hingga menjadi 105.345,64 ton/tahun. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

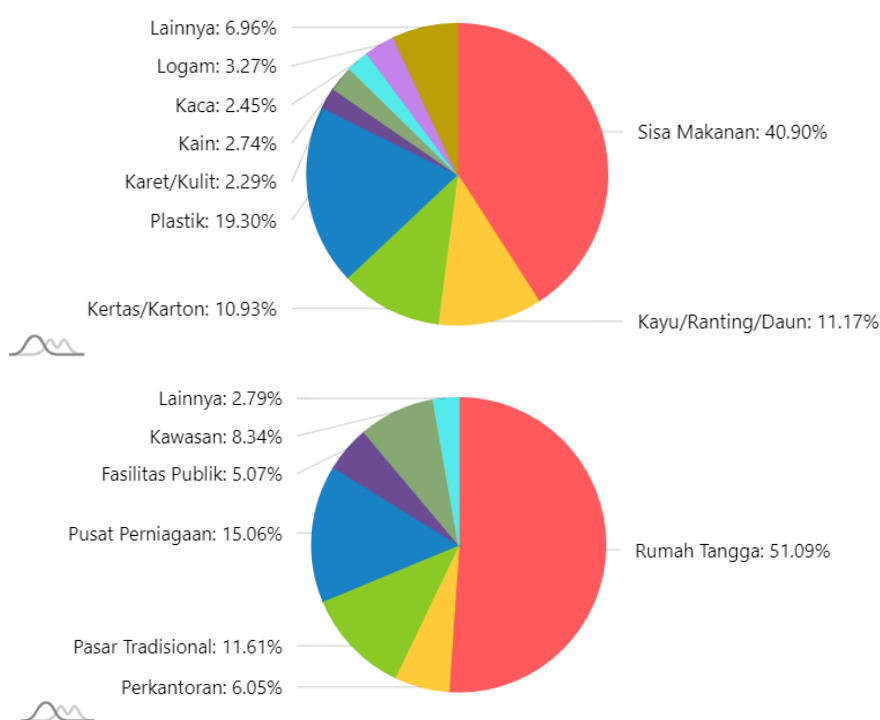
Gambar 2. 82 Total Timbunan Sampah Kab. Pacitan berdasarkan Laporan SIPSN Tahun 2019-2023


Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, 2024



Pada tahun 2023 kondisi timbunan sampah mencapai titik tertinggi sebesar 105.334,64 ton/tahun. Dari total sampah tersebut, sumber sampah paling besar adalah sampah rumah tangga yang mencapai 51.09% dari total sampah, sampah pusat perniagaan sebesar 15.06 dan sampah pasar tradisional sebesar 11.61%. Dengan sumber sampah terbesar tersebut maka jenis sampah yang paling banyak adalah sampah sisa makanan yang mencapai 40.90% dari total sampah, sampah plastik sebesar 19.30%, sampah kayu/ranting/daun sebesar 11.17% serta sampah kertas/karton sebesar 10.93%. Lebih jelasnya sumber dan jenis sampah di Kabupaten Pacitan pada tahun 2023 dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 2. 83 Sumber dan Jenis Sampah di Kabupaten Pacitan tahun 2023



Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2024

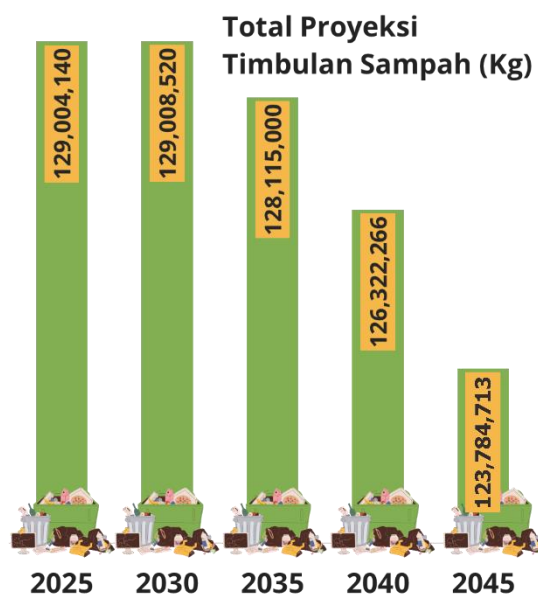
Dari sekian sumber dan jenis sampah di Kabupaten Pacitan pada tahun 2023, 99.01% sampah telah tertangani. Persentase penanganan sampah ini merupakan capaian yang paling tinggi jika dibandingkan persentase penanganan sampah pada 7 tahun terakhir. Yakni pada kondisi tahun 2017, persentase penanganan sampah berada pada angka 91.89% yang kemudian persentase penanganan sampah di Kabupaten Pacitan terus meningkat setiap tahunnya hingga pada tahun 2023 dapat mendekati angka 100% sampah tertangani. Lebih jelasnya perkembangan persentase penanganan sampah di Kabupaten Pacitan pada tahun 2017 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 2. 78 Persentase penanganan sampah Kabupaten Pacitan tahun 2017 - 2023

Indikator Kinerja	Realisasi						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase penanganan sampah	91,89	94	94,85	96,35	97,77	97,96	99,01

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan, 2024

Adapun ketika dibandingkan dengan data proyeksi, pada awal periode pertama tahapan RPJPD Kabupaten Pacitan 2025-2045 yakni tahun 2025, proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Pacitan adalah sebesar 589.060 sehingga perkiraan timbulan sampah masyarakat Kabupaten Pacitan pada tahun 2025 adalah sebesar 129.004,14 ton/hari. Seiring dengan adanya tren menurun pada proyeksi jumlah penduduk, maka proyeksi timbulan sampah di Kabupaten Pacitan diperkirakan akan mengalami penurunan hingga pada akhir periode RPJPD Kabupaten Pacitan 2025-2045 menjadi 123.784,71 ton/tahun. Sehingga dapat dikatakan bahwa timbulan sampah masyarakat Kabupaten Pacitan saat ini (berdasarkan data 2023) masih jauh dibawah proyeksi timbulan sampah pada tahun 2025. Lebih jelasnya proyeksi timbulan sampah Kabupaten Pacitan tersaji dalam grafik berikut:

Gambar 2. 84 Proyeksi Timbunan Sampah


Sumber: Data Diolah

Sejauh ini, pengelolaan sampah yang dilaksanakan dengan menggunakan metode *landfill*. Sedangkan berdasarkan himbauan pemerintah pusat agar tidak terdapat *landfill* baru pada tahun 2030 dan tidak ada sampah pada *landfill* di tahun 2040-2050. Oleh karenanya, Pemerintah Kabupaten Pacitan perlu merencanakan dan mengambil langkah dalam pergeseran metode pengelolaan sampah menjadi teknologi pengolahan sampah menggunakan teknologi sanitary *landfill* dengan prinsip-prinsip "3R" (*reduce, reuse, recycle*). Metode *sanitary landfill* merupakan metode standar yang



dipakai secara internasional dimana penutupan sampah dilakukan setiap hari sehingga potensi gangguan yang timbul dapat diminimalkan. Namun demikian diperlukan perencanaan yang matang khususnya pada penyediaan prasarana dan sarana yang memadai bagi penerapan metode ini.

Dengan mempertimbangkan proyeksi timbulan sampah 20 tahun kedepan serta sebagai dasar perencanaan pengelolaan sampah menggunakan teknologi *sanitary landfill*, maka juga diperlukan proyeksi mengenai kebutuhan tempat pengelolaan sampah seperti TPST dan TPA. Adapun proyeksi kebutuhan TPST dan TPA di Kabupaten Pacitan juga dilaksanakan dengan mengacu pada (SNI) Nomor 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan, yakni 1:120.000 penduduk untuk kebutuhan TPST dan 1:480.000 penduduk untuk kebutuhan TPA. Dengan standar tersebut, maka proyeksi kebutuhan TPST dan TPA di Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut:

Gambar 2. 85 Proyeksi Kebutuhan TPST dan TPA Kabupaten Pacitan 20 Tahun Mendatang



2025-2045
membutuhkan

5 TPST
1 TPA

Untuk dapat memastikan meratanya ketersediaan sarana prasarana persampahan di seluruh wilayah di Kabupaten Pacitan, maka selain memproyeksikan timbulan sampah Kabupaten Pacitan dalam 20 tahun ke depan secara total, penting juga bagi Kabupaten Pacitan untuk memperkirakan timbulan sampah berdasarkan sebaran kecamatan di Kabupaten Pacitan. Berikut merupakan hasil proyeksi timbulan sampah Kabupaten Pacitan yang terbagi berdasar 12 kecamatan.

Tabel 2. 79 Proyeksi Timbulan Sampah Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Proyeksi Timbulan Sampah (ton/tahun)				
		2025	2030	2035	2040	2045
1	Donorojo	9.191,06	9.191,37	9.127,71	8.999,99	8.819,19
2	Punung	7.938,72	7.938,99	7.884,00	7.773,68	7.617,52
3	Pringkuku	6.936,63	6.936,86	6.888,82	6.792,42	6.655,98
4	Pacitan	16.398,72	16.399,28	16.285,70	16.057,81	15.735,24
5	Kebonagung	9.860,83	9.861,17	9.792,87	9.655,83	9.461,87
6	Arjosari	8.957,73	8.958,04	8.895,99	8.771,51	8.595,31
7	Nawangan	11.092,18	11.092,55	11.015,73	10.861,58	10.643,39
8	Bandar	9.749,42	9.749,75	9.682,22	9.546,74	9.354,96
9	Tegalombo	11.966,78	11.967,19	11.884,30	11.718,00	11.482,61



No	Kecamatan	Proyeksi Timbunan Sampah (ton/tahun)				
		2025	2030	2035	2040	2045
10	Tulakan	18.624,44	18.625,08	18.496,08	18.237,26	17.870,91
11	Ngadirojo	10.497,39	10.497,75	10.425,04	10.279,16	10.072,68
12	Sudimoro	7.790,24	7.790,50	7.736,54	7.628,28	7.475,05
Total Proyeksi Timbunan Sampah (ton/tahun)		129.004,14	129.008,52	128.115,00	126.322,27	123.784,71

Sumber: Data diolah

2.6.2.4 Kebutuhan Pangan Kabupaten Pacitan

Kebutuhan akan pangan sebagai aspek paling dasar bagi masyarakat Kabupaten Pacitan menjadi fokus utama dalam perencanaan pengembangan layanan dasar dalam jangka panjang tahun 2025-2045. Pangan tidak hanya memenuhi kebutuhan nutrisi masyarakat, tetapi juga menjadi fondasi bagi kelangsungan hidup dan perkembangan ekonomi daerah. Dengan mengoptimalkan sektor pertanian dan ketahanan pangan, Kabupaten Pacitan dapat meningkatkan ketahanan pangan lokal, mengurangi tingkat kelaparan, dan mendukung keberlanjutan pembangunan. Perencanaan ini harus melibatkan upaya-upaya untuk meningkatkan produktivitas pertanian, mendukung petani lokal, dan memastikan distribusi pangan yang merata. Dengan demikian, Kabupaten Pacitan dapat mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan, mendukung kesejahteraan masyarakat, dan menjawab tantangan global terkait kebutuhan pangan.

Berhubungan dengan hal tersebut maka sebelumnya perlu diketahui mengenai kebutuhan dan ketersediaan pangan di Kabupaten Pacitan. Untuk mengetahui kebutuhan pangan dengan lebih rinci maka diperlukan data kebutuhan dan ketersediaan pangan pada masing-masing kecamatan sebagai berikut:

Tabel 2. 80 Luas Status Daya Dukung Pangan Kabupaten Pacitan

Kecamatan	Ketersediaan (Kkal)	Kebutuhan (Kkal)	Luas (Ha)
Arjosari	686.553.440.360,95	76.726.577.000,00	12.827,40
Bandar	531.427.496.911,14	77.950.787.000,00	12.669,21
Donorojo	558.812.014.692,17	62.957.353.500,00	12.346,72
Kebonagung	631.930.744.420,12	54.823.419.750,00	12.771,76
Nawangan	578.027.495.044,37	92.133.573.750,00	13.335,67
Ngadirojo	603.330.105.878,45	66.374.939.750,00	9.672,48
Pacitan	651.266.320.329,46	111.966.560.500,00	7.932,72
Pringkuku	625.434.554.867,81	72.018.077.000,00	13.980,03
Punung	505.328.236.796,72	74.765.486.750,00	10.967,42
Sudimoro	349.894.934.091,81	37.924.613.250,00	7.655,76
Tegalombo	654.603.544.401,20	74.494.748.000,00	15.179,31
Tulakan	779.324.455.171,00	90.975.282.750,00	16.893,18
Grand Total	7.155.933.342.965,20	893.111.419.000,00	143.247,27

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2045



Berdasarkan table tersebut dapat diketahui bahwa Kecamatan Tulakan merupakan wilayah dengan status daya dukung pangan Terlampaui (surplus) yang terbesar yaitu mencapai 11.55 % dari total luas wilayah Kabupaten Pacitan atau sebesar 16,893.18 ha.

2.6.2.5 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Energi/Listrik

Kebutuhan energi Listrik Kabupaten Pacitan pada tahun 2025-2045 diproyeksikan dengan cara mengalikan proyeksi penduduk di tahun berkenaan dengan standar terkait kebutuhan listrik yang telah diatur dalam SNI Nomor 03 – 1733 Tahun 2004 tentang Tata Cara Perencanaan lingkungan perumahan sebesar 2.250 VA untuk kebutuhan listrik rumah tangga sedangkan untuk kebutuhan listrik sarana lingkungan sebesar 900 VA. Berdasarkan data distribusi listrik PT. PLN (Persero) pada cabang /ranting PLN menurut kecamatan di Kabupaten Pacitan, pada tahun 2023 ini telah terdapat 147.685 KW daya terpasang dan 95.891.902 KWh listrik terjual dari total 137.390.608 KWh produksi listrik.

Berikut merupakan hasil proyeksi kebutuhan energi/listrik di Kabupaten Pacitan tahun 2025-2045 berdasarkan standar kebutuhan listrik yang termuat dalam SNI Nomor 03 – 1733 Tahun 2004 tentang Tata Cara Perencanaan lingkungan perumahan:

Tabel 2. 81 Proyeksi Kebutuhan Energi Listrik Kabupaten Pacitan 2025-2045

Uraian	Standar (VA)	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
			2025	2030	2035	2040	2045
Proyeksi Jumlah Penduduk		587.990	589.060	589.080	585.000	576,814	565,227
Kebutuhan Rumah (Unit)	5 orang/ unit	117.598	117.812	117.816	117.000	115.363	113.045
Kebutuhan Listrik Rumah Tangga (VA)	2.250	264.595.500	265.077.000	265.086.000	263.250.000	259.566.300	254.352.150
Kebutuhan Listrik Sarana Lingkungan (VA)	900	105,838,200	106,030,800	106,034,400	105,300,000	103,826,520	101,740,860
TOTAL		370,433,700	371,107,800	371,120,400	368,550,000	363,392,820	356,093,010

Sumber: data diolah, 2024

Berdasarkan standar Kebutuhan listrik kebutuhan listrik yang telah diatur dalam SNI Nomor 03 – 1733 Tahun 2004 tentang Tata Cara Perencanaan lingkungan perumahan disebutkan bahwa kebutuhan listrik terbagi atas kebutuhan listrik rumah tangga dan kebutuhan listrik sarana lingkungan. Oleh karenanya, proyeksi pada kebutuhan listrik di Kabupaten Pacitan juga di proyeksikan menjadi 2 jenis kebutuhan listrik yakni listrik untuk kebutuhan rumah tangga dan listrik untuk kebutuhan sarana lingkungan. Adapun yang dimaksud dengan kebutuhan listrik rumah tangga lebih merujuk khusus pada listrik yang digunakan pada rumah masyarakat. Sedangkan listrik sarana lingkungan merupakan kebutuhan listrik yang digunakan untuk fasilitas infrastruktur kabupaten seperti penerangan jalan umum (PJU), lampu taman, lampu lalu lintas dan infrastruktur lainnya. Sehingga pada data proyeksi, kebutuhan listrik



sarana lingkungan membutuhkan listrik dengan jumlah yang lebih rendah apabila dibandingkan dengan listrik rumah tangga. Adapun jika dilihat berdasarkan trennya, proyeksi kebutuhan listrik baik pada listrik rumah tangga maupun listrik sarana lingkungan Kabupaten Pacitan di tahun 2025-2045 mengalami penurunan seiring menurunnya proyeksi jumlah penduduk. Secara lebih jelas, perkembangan tren proyeksi kebutuhan listrik rumah tangga dan kebutuhan listrik sarana lingkungan dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 2. 86 Proyeksi Kebutuhan Listrik Kabupaten Pacitan 2025-2045



Sumber: data diolah, 2024

2.6.2.6 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan

Kebutuhan Prasarana Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Pacitan diproyeksikan dengan mengalikan proyeksi jumlah penduduk pada tahun berkenaan dengan standar kebutuhan fasilitas kesehatan yang mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan yaitu sebesar 1:1.250 untuk kebutuhan posyandu, 1:2.500 untuk kebutuhan balai pengobatan warga, 1:30.000 untuk kebutuhan BKIA/Klinik bersalin, 1:30.000 untuk kebutuhan posyandu pembantu dan balai pengobatan lingkungan, 1:120.000 untuk kebutuhan puskesmas dan balai pengobatan, 1:5.000 untuk tempat praktek dokter dan 1:30.000 untuk apotik/rumah obat. Hasil dari proyeksi tersebut menunjukkan bahwa total kebutuhan masing-masing fasilitas kesehatan di Kabupaten Pacitan hingga tahun 2045 adalah sebagai berikut:



Tabel 2. 82 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kabupaten Pacitan 20 Tahun Mendatang

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Standar (Prasarana: Jumlah Penduduk)	Proyeksi Kebutuhan Minimum Prasarana Kesehatan				
			2025	2030	2035	2045	2045
Proyeksi Jumlah Penduduk	587.090		589,060	589,080	585,000	576,814	565,227
Kebutuhan Posyandu		1: 1250	471	471	468	461	452
Kebutuhan Balai Pengobatan Warga	3 Rumah Sakit	1: 2500	236	236	234	231	226
Kebutuhan BKIA/ Klinik Bersalin		1: 30.000	20	20	20	19	19
Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan		1: 30.000	20	20	20	19	19
Kebutuhan Puskesmas dan Balai Pengobatan	24 Puskesmas	1: 120.000	5	5	5	5	5
Tempat Praktek Dokter	94 Dokter dan 21 Dokter Gigi	1:5000	118	118	117	115	113
Apotik/ Rumah Obat		1: 30.000	20	20	20	19	19

Sumber: Data diolah

Adapun jika dibandingkan dengan kondisi saat ini, di Kabupaten Pacitan telah terdapat 24 Puskesmas (14 Rawat Inap, 10 Non Rawat Inap), 2 Rumah Sakit Tipe D, 1 Rumah Sakit Tipe C, 94 Dokter dan 21 Dokter Gigi. Hal yang perlu di perhatikan selain ketercukupan jumlah fasilitas Kesehatan adalah mengenai keterjangkauan akses Kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Pacitan. Khususnya jika melihat proyeksi jumlah penduduk yang dalam 20 tahun mendatang akan didominasi oleh penduduk usia lanjut. Sehingga keterjangkauan fasilitas Kesehatan baik secara jarak tempuh, jaminan Kesehatan, maupun kualitas sarana prasarana Kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat perlu dipersiapkan dengan matang.

2.6.2.7 Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana Pendidikan

Kebutuhan sarana prasarana pendidikan di Kabupaten Pacitan diproyeksikan dengan metode mengalikan jumlah penduduk pada tahun berkenaan dengan standar kebutuhan fasilitas pendidikan yang mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI)



Nomor 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan lingkungan perumahan. Dalam proyeksi fasilitas pendidikan terdapat masing-masing standart pada empat jenjang pendidikan yakni 1:1.250 untuk kebutuhan prasarana TK, 1:1.600 untuk kebutuhan prasarana Sekolah Dasar, 1:4.800 untuk kebutuhan prasarana SMP, dan 1:4.800 untuk kebutuhan prasarana SMA. Hasil dari proyeksi tersebut menunjukkan terdapat peningkatan akan kebutuhan prasarana pendidikan pada setiap jenjang dalam 20 tahun kedepan. Untuk melihat proyeksi kebutuhan prasarana pendidikan dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Tabel 2. 83 Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana Pendidikan Kabupaten Pacitan 20 Tahun Mendatang

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Standar (Prasarana: Jumlah Penduduk)	Proyeksi Kebutuhan Minimum Prasarana Pendidikan				
			2025	2030	2035	2045	2045
Proyeksi Jumlah Penduduk	587.090		589,060	589,080	585,000	576,814	565,227
 Kebutuhan Prasarana TK	314	1: 1250	471	471	468	461	452
 Kebutuhan Prasarana Sekolah Dasar	418	1:1600	368	368	366	361	353
 Kebutuhan Prasarana SMP	72	1:4800	123	123	122	120	118
 Kebutuhan Prasaran SMA	41	1:4800	123	123	122	120	118

Sumber: Data diolah

Berdasarkan data proyeksi, kebutuhan akan sarana prasarana pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan di Kabupaten Pacitan terlihat cenderung menurun. Akan tetapi meskipun begitu, hal yang perlu dipersiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan adalah mengenai kualitas pendidikan dan keterjangkauan akses pendidikan



bagi masyarakat di Kabupaten Pacitan. Hal ini selain untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, juga merupakan langkah dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap kualitas pendidikan di Kabupaten Pacitan. Sehingga masyarakat Kabupaten Pacitan dapat memilih untuk tetap menempuh pendidikan di Kabupaten Pacitan. Selain itu, hal yang perlu diusahakan adalah memastikan seluruh anak usia sekolah dapat menjangkau pendidikan dari jenjang TK hingga jenjang SMA.

Adapun jika dibandingkan dengan kondisi saat ini, pada tahun 2023 telah terdapat 401 KB, 314 TK, 418 SD, 72 SMP dan 41 SMA/SMK di Kabupaten Pacitan. Dengan begitu, sarana prasarana pendidikan yang masih perlu ditambahkan dalam 20 tahun mendatang adalah pada jenjang pendidikan TK, SMP dan SMA. Sedangkan pada jenjang pendidikan SD, saat ini telah melampaui jumlah kebutuhan dalam 20 tahun mendatang.

2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Arah Kewilayahan

RPJPD Tahun 2025-2045 diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Hal tersebut didasarkan pada prinsip hak asasi bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, Pemerintah Daerah harus menitikberatkan masyarakat sebagai penikmat dan pelaku pembangunan.

Visi Indonesia Emas 2045 diukur melalui 5 (lima) sasaran visi dan diwujudkan dalam 8 (delapan) misi (agenda) Pembangunan yang terdiri dari 3 (tiga) transformasi Indonesia, 2 (dua) landasan transformasi, dan 3 (tiga) kerangka implementasi transformasi. Kedelapan agenda tersebut dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) arah (tujuan) pembangunan yang diukur melalui 45 (empat puluh lima) indikator utama Pembangunan. Adapun angka yang terkandung dalam 8 misi (agenda) Pembangunan nasional, 17 arah (tujuan) Pembangunan nasional, dan 45 indikator utama Pembangunan, secara utuh mencerminkan semangat kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang berlandaskan Pancasila.

Dalam rangka mewujudkan visi Indonesia emas 2045 diperlukan sinkronasi dan penyelarasan antara perencanaan Pembangunan nasional dan perencanaan Pembangunan daerah. Oleh karena itu, penyelarasan perencanaan Pembangunan jangka Panjang menjadi kunci bagi sinergi Pembangunan antara pusat dan daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlunya disusun suatu mekanisme dalam rangka penyelarasan RPJPD tahun 2025-2045 terhadap RPJPN tahun 2025-2045.

1. Misi 1 Transformasi Sosial;
2. Misi 2 Transformasi Ekonomi;
3. Misi 3 Transformasi Tata Kelola;
4. Misi 4 Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia;



5. Misi 5 Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;
6. Misi 6 Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan;
7. Misi 7 Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; dan
8. Misi 8 Kesinambungan Pembangunan.

2.7.1. Arah Pembangunan Kewilayahan Nasional

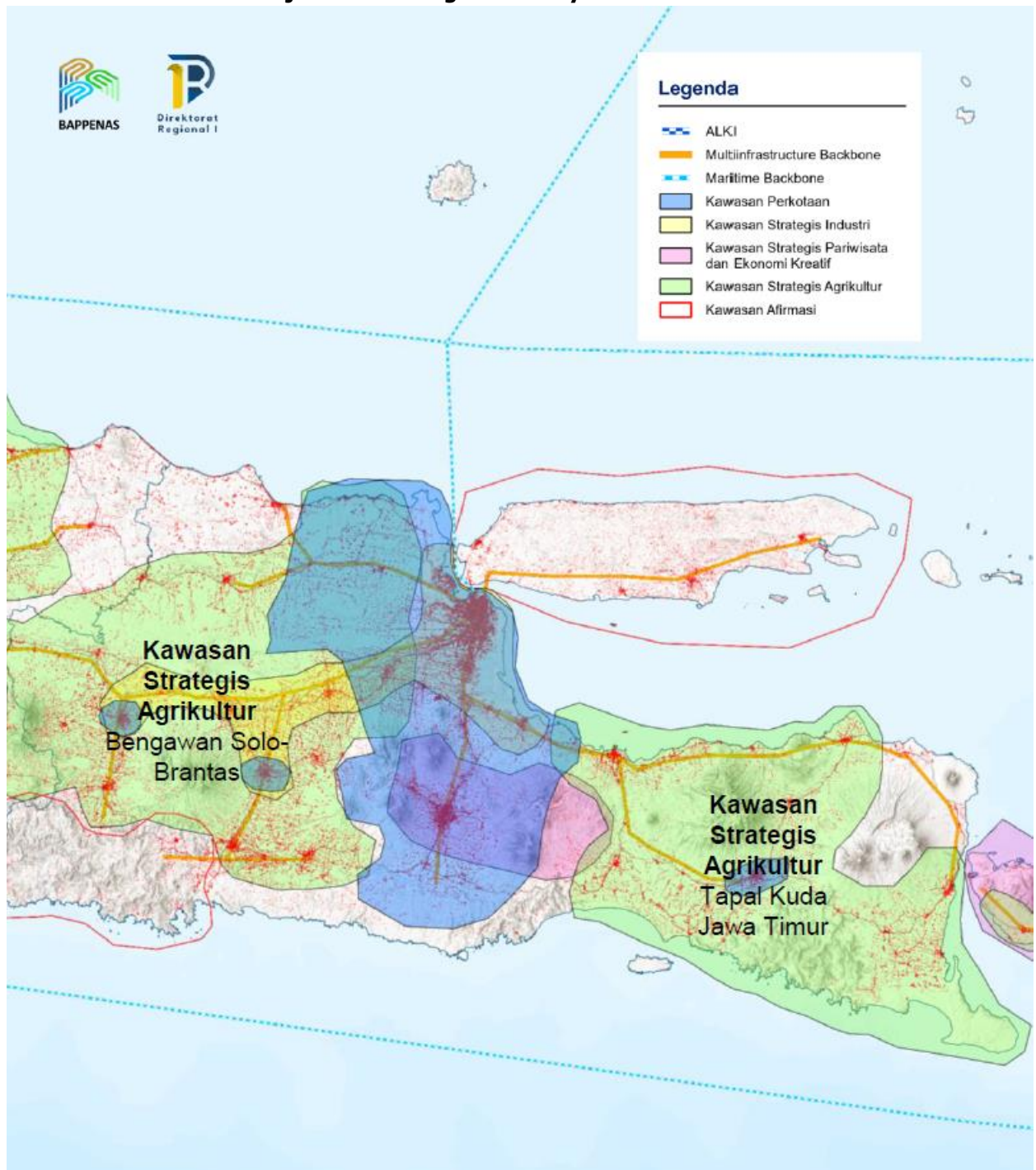
Dalam rangka menentukan keselarasan dan integrasi pembangunan antar wilayah, pemerintah pusat telah menyusun arahan pembangunan kewilayahan. Pembangunan kewilayahan Nasional memiliki fokus yang luas, dimana arahan yang diberikan masih secara makro menurut wilayah pulau maupun provinsi. Dalam konteks ini berkenaan dengan pembangunan kewilayahan di Kabupaten Pacitan, maka kebijakan pembangunan yang perlu diperhatikan adalah tema dan arah pembangunan untuk wilayah Pulau Jawa.

Tema pembangunan untuk wilayah pulau jawa adalah “Megalopolis yang unggul, Inovatif, Inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan” dengan target pembangunan pulau jawa mampu memberikan kontribusi pembangunan sebesar 54,5% terhadap PDB Nasional dengan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,6-5,9% pada periode pertama RPJPD yaitu 2025-2029.

Gambar 2. 87. Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Pulau Jawa



Implementasi arah kebijakan pembangunan tersebut diterjemahkan pada masing-masing kawasan strategis pembangunan nasional di Jawa timur meliputi, Kawasan Strategis Perkotaan Metropolitan Surabaya, kawasan megapolitan Surabaya-Malang, Kawasan Perkotaan Madiun, Kawasan Perkotaan Kediri, Kawasan Perkotaan Jember, Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Malang-Pasuruan-Lumajang, Kawasan Strategis Agrikultur Bengawan Solo-Brantas, Kawasan Strategis Agrikultur Tapal Kuda, dan Kawasan Afirmasi Madura.

**Gambar 2. 88. Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Jawa Timur Berdasarkan Kawasan**

Berdasarkan pada pembagian kawasan strategis tersebut, Kabupaten Pacitan masuk pada kawasan Afirmasi. Pada kawasan afirmasi tersebut, telah diidentifikasi beberapa faktor sangat penting yang dapat mempengaruhi keberhasilan pembangunan (Game Changer) serta dirumuskan program pembangunan yang harus diperhatikan dalam 20 tahun kedepan. Game Changer dan program pembangunan tersebut terbagi dalam masing-masing transformasi sebagai berikut:



Tabel 2. 84 Game Changer dan program pembangunan di Kabupaten Pacitan Tahun 2013-2022

Transformasi (1)	UTSP/ <i>Game Changer</i> (2)	Program Pembangunan (3)
Sosial	Pengembangan perguruan tinggi riset dan vokasi yang mendukung di bidang pertanian dan agroindustri	Penguatan perguruan tinggi riset dan vokasi bidang pertanian dan agroindustri
Ekonomi	Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi	Penguatan Integrasi Konektivitas dengan Intra dan Antarkawasan Pertumbuhan Ekonomi
	Pembentukan BUMD untuk meningkatkan pendapatan daerah*	Pembentukan BUMD
	Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan, khususnya komoditas tebu dan tembakau*	Penyediaan bibit dan varietas unggul
Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan	Reformasi perencanaan dan fiskal perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko; penerapan aturan fiskal adaptif reformasi APBN serta transformasi kelembagaan perencanaan dan fiskal	Perluasan Sumber dan Pengembangan Inovasi Pembiayaan
	Reformasi subsidi terutama pupuk tepat sasaran	Pengendalian Nilai Tukar
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir	1. Penerapan ekonomi sirkular dari sumber domestik secara partisipatif 2. Optimalisasi penanganan sampah domestik
	Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan dengan pendekatan terpadu <i>FEW Nexus (Food, Energy, Water)</i>	1. Kemandirian Pangan 2. Pemenuhan Akses Air Minum Aman

2.7.2. Arah Pembangunan Kewilayahan Provinsi Jawa Timur

Selaras dengan arahan pembangunan kewilayahan pemerintah pusat untuk Provinsi Jawa Timur yang menetapkan arah kebijakan “Megalopolis yang unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi, dan Berkelanjutan”, maka provinsi Jawa timur telah menetapkan 5 prioritas pembangunan sebagai berikut:

- A. Pertama, pengembangan Sumber Daya Manusia berdaya saing global (talenta global) serta percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem pada kawasan afirmasi 3T.
 1. Wajib PAUD 1 tahun dan sekolah 12 tahun untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dan kualitasnya.
 2. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi seperti industri dan jasa serta keterkaitan dengan

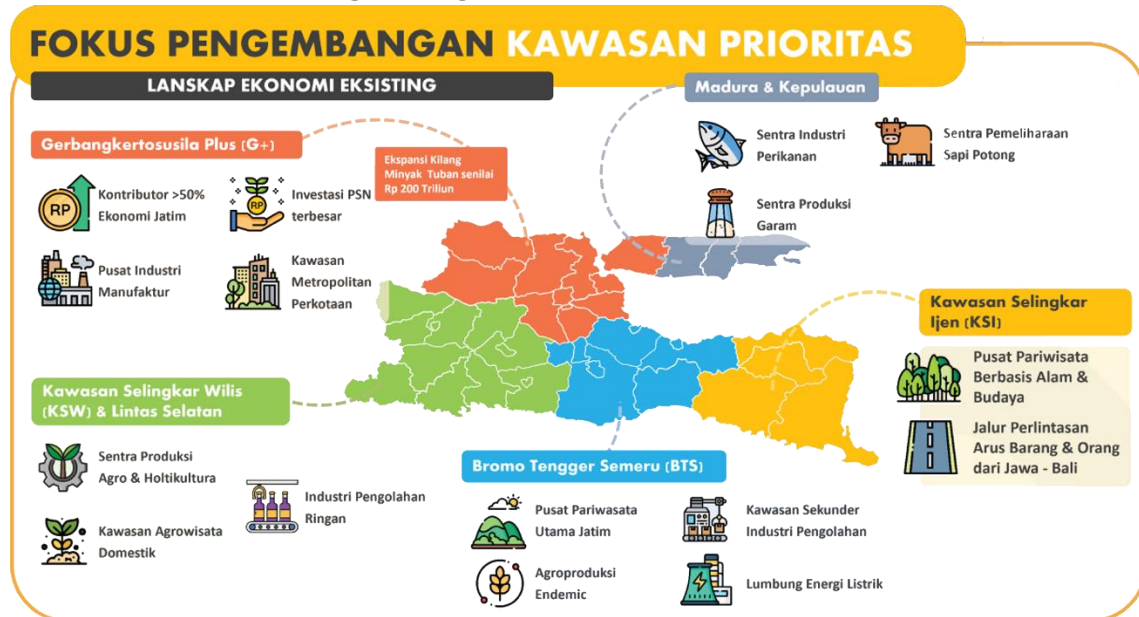


- DUDI; Peningkatan akses dan kualitas pendidikan nonformal, terutama percepatan peningkatan kualifikasi angkatan kerja.
3. Perkuatan pemenuhan tenaga medis dan kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif dan afirmasi pendayagunaan tenaga medis dan kesehatan dari masyarakat lokal.
 4. Pengentasan kemiskinan di seluruh wilayah terutama Jawa bagian Selatan melalui perlindungan sosial adaptif dan peningkatan akses layanan dasar.
- B. Kedua, pengembangan kawasan pusat pertumbuhan seperti: kawasan strategis perkotaan, kawasan strategis industri ramah lingkungan, industri berbasis inovasi riset dan teknologi, kawasan strategis pariwisata, dan kawasan strategis pertanian mendukung kemandirian pangan.
1. Pengembangan Kawasan-Kawasan perkotaan yang memiliki potensi urban & health/medical Megapolitan Surabaya-Malang
 2. Pengembangan beberapa Kawasan strategis industri kawasan strategis industri Madiun - Surabaya - Gresik - Probolinggo (klaster industri pengolahan petrokimia, material/metalurgi, kapal, agroindustri, industri dan pengolahan perikanan);
 3. Percepatan pembangunan, optimalisasi/ penguatan potensi wilayah, dan pengembangan interkoneksi menuju kawasan perkotaan terdekatnya guna meningkatkan access to market dan access to information pada Kawasan afirmasi antara lain Madura, dan Pacitan-Trenggalek-Blitar;
 4. Pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal perkotaan di Wilayah Metropolitan Surabaya dan kota Malang yang andal dan modern
- C. Ketiga, percepatan pembangunan berbasis pembangunan hijau dan sirkular, serta penguatan kawasan konservasi strategis pada kawasan lindung dan geopark; termasuk optimalisasi potensi energi baru dan terbarukan, guna menjamin ketahanan energi, air, dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan.
1. Pengembangan industri hijau di Metropolitan Surabaya.
 2. Pengembangan kawasan strategis pertanian mendukung kemandirian pangan di Tapal Kuda.
 3. Penerapan tata ruang permanen kawasan sentra produksi pangan untuk mengurangi alih fungsi lahan pertanian.
 4. Perlindungan pesisir Gerbangkertosusila dari banjir kala ulang 100 tahun.



5. Peningkatan ketersediaan air dan pengelolaan sumber daya air yang efisien;
- D. Keempat, pengembangan infrastruktur pendukung, seperti pengembangan infrastruktur konektivitas multi-infrastruktur backbone dan feeder, serta maritime backbone, yang menginterkoneksi antar kawasan strategis; pengembangan jalur konektivitas antar wilayah dan jalur khusus logistik; pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan dan digital; penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan; serta peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar.
1. Penurunan ketimpangan antara desa-kota dan wilayah utara-selatan di Wilayah Jawa terutama melalui peningkatan konektivitas antarwilayah.
 2. Pengembangan jalan tol Wilayah Jawa untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok logistik serta penyelesaian Jalan Lintas Selatan Wilayah Jawa untuk mendorong pemerataan wilayah;
 3. Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif dan global (global city) pada megapolitan Surabaya-Malang, dan pusat-pusat aglomerasi yaitu Madiun, Kediri, dan Jember
 4. Pengembangan pelabuhan simpul utama untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi di Pelabuhan Tanjung Perak menjadi pelabuhan bertaraf global
 5. Optimalisasi dan pengembangan bandara Juanda
 6. Pengembangan kereta cepat (Jakarta - Surabaya) yang terintegrasi dengan kereta cepat Jakarta – Bandung
 7. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas sarana prasarana dasar
- E. Kelima, penuntasan RDTR Kabupaten/Kota perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan resiko bencana, terutama mitigasi risiko pada wilayah perkotaan dan perdesaan, serta penguatan ketangguhan bencana dan perubahan iklim, terutama pada kawasan-kawasan perkotaan dan kawasan startegis.

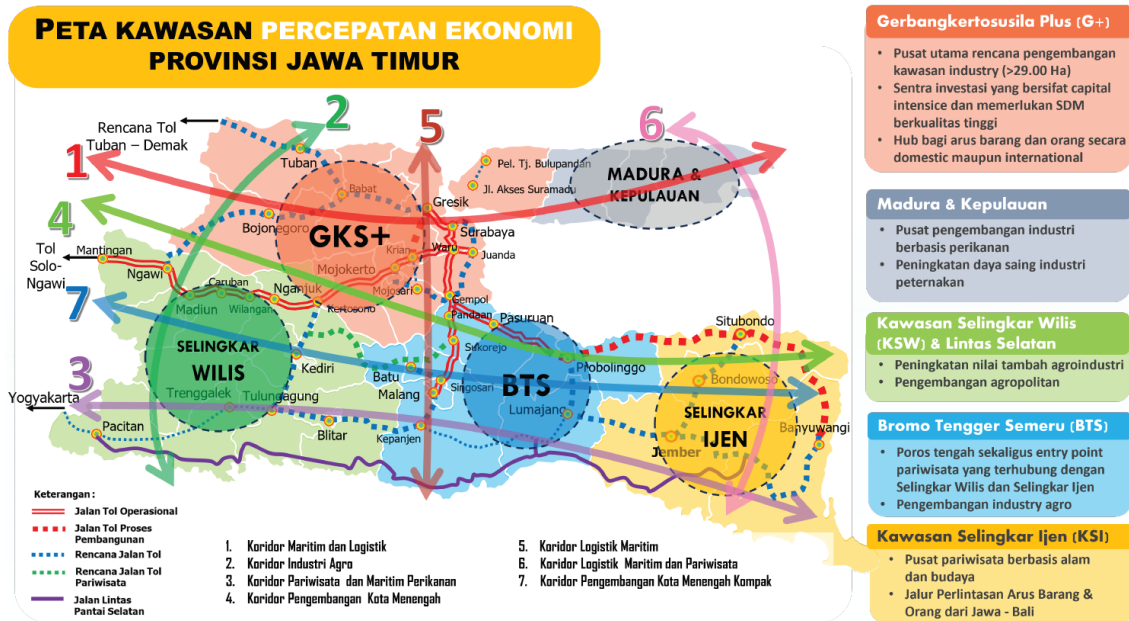
Dalam rangka menentukan fokus pembangunan pada masing-masing wilayah, Provinsi Jawa Timur telah membagi wilayahnya menjadi 5 wilayah yang menjadi kawasan prioritas. Kawasan prioritas yang dimaksud adalah Gerbangkertosusila Plus (G+), kawasan selingkar wilis, Bromo Tengger Smeru (BTS), Kawasan Selingkar Ijen, dan Kawasan Madura Kepulauan.

**Gambar 2. 89. Fokus Pengembangan Kawasan Prioritas di Jawa Timur**

Sumber: RPJPD Jawa Timur 2025-2045

Masing-masing prioritas pembangunan pada setiap wilayah tersebut didasarkan atas potensi yang dimiliki. Dari 5 kawasan tersebut, Kabupaten Pacitan masuk dalam cluster Kawasan Selingkar Wilis (KSW) dan Lintas Selatan. Mengacu pada kondisi existing sebagaimana telah diidentifikasi oleh Provinsi Jawa Timur, pada kawasan tersebut diarahkan dalam pembangunan sentra produksi Agro dan Holtikultura, Kawasan Agrowisata Domestik, dan Industri Pengelolaan Ringan. Mengacu pada kondisi eksisting dan arah kebijakan nasional untuk Pulau Jawa khususnya Provinsi Jawa Timur, maka dalam rentang waktu 20 tahun kedepan ditetapkan beberapa kebijakan percepatan pembangunan ekonomi pada masing-masing wilayah sebagai berikut:

Gambar 2. 90. Peta Pembangunan Kawasan Prioritas Melalui Koridor Pembangunan di Jawa Timur



Sumber: RPJPD Jawa Timur 2025-2045

Percepatan pembangunan ekonomi untuk Kawasan Selingkar Wilis yang masuk dalam Kabupaten Pacitan dilakukan pengembangan melalui 2 koridor pembangunan yaitu koridor pariwisata dan maritim perikanan serta koridor industri agro. Kedua koridor tersebut didukung pada segi aksesibilitas yaitu dengan adanya jalan lintas selatan dan rencana pembangunan jalan tol. Dari dua koridor tersebut maka kedepannya Kabupaten Pacitan akan dikembangkan sebagai pusat pusat peningkatan nilai tambah agroindustri dan pengembangan agropolitan.

2.7.3. Arah Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Pacitan

Pembangunan kewilayahan di Kabupaten Pacitan dapat dilihat melalui dokumen rencana tata ruang wilayah daerah. Dalam hal penyusunan RPJPD Kabupaten Pacitan, terdapat irisan periodisasi Pembangunan, dimana RPJPD disusun untuk masa Pembangunan 2025-2045 sedangkan untuk RTRW Kabupaten Pacitan yang ada saat ini adalah 2009-2028. Melihat gap periode Pembangunan tersebut, maka sisa periode Pembangunan adalah 3 tahun. Beberapa hal yang bisa diperhatikan dalam RTRW adalah struktur ruang serta kawasan strategis kabupaten. Secara struktur ruang, Kabupaten Pacitan telah menetapkan rencana sistem perkotaan dan Rencana sistem jaringan prasarana wilayah.

A. Struktur Ruang

Wilayah Kabupaten Pacitan terdiri dari 12 kecamatan. Jenis kegiatan yang akan dikembangkan disesuaikan dengan kebutuhan, seperti fasilitas perbelanjaan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, serta fasilitas rekreasi dan olahraga, untuk penyelenggaraan dan



pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Adapun hirarki kawasan perkotaan dan Ibukota Kecamatan di Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut:

1. Kawasan perkotaan Pacitan dengan hirarki K-1 berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW II/C/2);
2. Ibukota Kecamatan yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dengan hirarki K-2 meliputi: Ibukota Kecamatan Punung, Ibukota Kecamatan Ngadirojo, dan Ibukota Kecamatan Bandar;
3. Ibukota Kecamatan yang berfungsi sebagai pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dengan hirarki K-3 meliputi: Ibukota Kecamatan Donorojo, Ibukota Kecamatan Pringkuku, Ibukota Kecamatan Kebonagung, Ibukota Kecamatan Arjosari, Ibukota Kecamatan Tegalombo, Ibukota Kecamatan Nawangan, Ibukota Kecamatan Tulakan, Ibukota Kecamatan Sudimoro.

Pengembangan sistem jaringan Prasarana Wilayah di RTRW dapat dibagi kedalam beberapa kategori yaitu pengembangan sistem jaringan transportasi, Sistem jaringan listrik dan sumberdaya energi lainnya, dan sistem jaringan sumber daya air. Pengembangan jaringan transportasi diarahkan pada peningkatan kondisi jalan dan geometrik jalan sesuai dengan fungsinya serta rencana pengembangan terminal. Rencana pengembangan sistem jaringan jalan pada tahun 2009-2028 di Kabupaten Pacitan terdiri adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 85 Indikasi Program RTRW Kabupaten Pacitan

No.	Rencana	Lokasi	Fungsi Jalan
1	Pembangunan jalan lintas selatan selatan (meliputi ruas jalan Donorojo – Pacitan – Kayen – Sudimoro dan Lingkar Kota Pacitan)	Kec. Donorojo, Punung, Pringkuku, Pacitan, Kebonagung, Tulakan, Ngadirojo, Sudimoro	Kolektor primer
2	Pelebaran Jalan nasional ruas Donorojo – Pacitan – Panggul - Trenggalek	Kec. Donorojo, Punung, Pringkuku, Pacitan, Kebonagung, Tulakan, Ngadirojo, Sudimoro	Kolektor primer
3	Pembangunan Lingkar Barat Kota Pacitan dari Kelurahan Sidoharjo – Pucangsewu – Semanten – Gunungsari (terhubung dengan dibangunnya Jembatan Gunungsari).	Kec. Pacitan, Arjosari	Kolektor primer
4	Pembangunan Lingkar Timur Kota Pacitan dari Desa Gunungsari – Desa Sirnobojo – Desa Kembang – Kelurahan Ploso – (terhubung dengan dibangunnya Jembatan Ploso), sebagai jalan bypass (bagian dari jalan lintas selatan selatan).	Kec. Pacitan, Arjosari	Kolektor primer
5	Pembangunan Jembatan Cangkring Ngadirojo.	Kec. Ngadirojo	



No.	Rencana	Lokasi	Fungsi Jalan
6	Pembangunan dan peningkatan jalan antar ibukota kecamatan.	Kab. Pacitan	Lokal Primer
7	Pembangunan dan peningkatan jalan antara ibukota kecamatan dengan pusat pertumbuhan.	Kab. Pacitan	Lokal Primer
8	Pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan	Kab. Pacitan	Lingkungan
9	Mempertahankan kondisi jalan dengan pemeliharaan rutin.	Kab. Pacitan	Kolektor primer, Lokal Primer, jalan sekunder, jalan lingkungan
10	Peningkatan jalan nasional ruas Donorojo – Pacitan – Panggul - Trenggalek	Kec. Donorojo, Punung, Pringkuku, Pacitan, Kebonagung, Tulakan, Ngadirojo, Sudimoro	Kolektor primer
11	Peningkatan jalan nasional wilayah kota (ruas jalan WR. Supratman - Gatot Subroto - P. Sudirman - Maghribi).	Kec. Pacitan	Kolektor primer
12	Peningkatan jalan provinsi ruas Pacitan – Dengok.	Kec. Pacitan, Tegalombo	Kolektor primer
13	Peningkatan jalan provinsi ruas Arjosari – Nawangan	Kec. Arjosari, Nawangan, Bandar	Lokal Primer
14	Peningkatan jalan provinsi wilayah kota (ruas jalan Basuki Rahmat dan Tentara Pelajar)	Kec. Pacitan	Lokal Primer
15	Peningkatan jaringan jalan untuk mendukung pariwisata wilayah barat (ke pantai Klayar, Gua Gong, dsb.)	Kec. Punung, Donorojo	Lokal Primer
16	Peningkatan jaringan jalan untuk mendukung pariwisata wilayah timur (ke Pantai Segara Anakan, dsb.), dilakukan dengan pembangunan akses jalan yang menghubungkan ruas jalan lintas selatan selatan dengan lokasi pariwisata.	Kab. Ngadirojo	Lokal Primer
17	Peningkatan jalan kabupaten dan poros desa.	Kab. Pacitan	Lokal Primer, jalan sekunder

Pemenuhan kebutuhan listrik dimasa datang memiliki prospek yang bagus karena adanya pembangunan PLTU Pacitan di Kecamatan Sudimoro kapasitas 2 x 315 MW, pengembangan Gardu Induk Pacitan di Kecamatan Pacitan, serta pengembangan SUTT 150 kV:

1. dari PLTU – Gardu Induk Pacitan (melewati sebagian wilayah Kecamatan Sudimoro, Ngadirojo, Tulakan, Kebonagung, Arjosari, Pacitan);
2. dari Gardu Induk Pacitan – Ponorogo (melewati sebagian wilayah Kecamatan Pacitan, Arjosari, Bandar, Tegalombo);
3. dari Gardu Induk Pacitan – Wonogiri (melewati sebagian wilayah Kecamatan Pacitan, Pringkuku, Punung).



B. Pola Ruang

Rencana pola ruang bagi Kabupaten Pacitan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya.

1. Kawasan Hutan lindung, ditetapkan dengan kriteria:
 - a. kawasan hutan dengan faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan yang jumlah hasil perkalian bobotnya sama dengan 175 (seratus tujuh puluh lima) atau lebih;
 - b. kawasan hutan yang mempunyai ketinggian paling sedikit 2.000 (dua ribu) meter di atas permukaan laut.
 - c. kawasan yang dapat diusahakan sebagai hutan oleh orang pada tanah yang dibebani hak milik.
2. Kawasan karst (khususnya karst kelas 1), ditetapkan dengan kriteria:
 - a. Berfungsi sebagai penyimpan air bawah tanah secara tetap(permanen) dalam bentuk akuifer, sungai bawah tanah, telaga atau danau bawah tanah yang keberadaannya mencukupi fungsi umum hidrologi;
 - b. Mempunyai sungai-sungai bawah tanah yang aktif yang kumpulannya membentuk jaringan baik mendatar maupun tegak yang sistemnya mencukupi fungsi hidrologi dan ilmu pengetahuan;
 - c. Gua-guanya mempunyai speleotum aktif atau peninggalan-peninggalan sejarah sehingga berpotensi untuk dikembangkan menjadi obyek wisata dan budaya;
 - d. Mempunyai kandungan flora dan fauna khas yang memenuhi arti dan fungsi sosial, ekonomi, budaya serta pengembangan ilmu pengetahuan.
3. Kawasan sempadan pantai, ditetapkan dengan kriteria:
 - a. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau
 - b. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.
4. Kawasan sempadan sungai, ditetapkan dengan kriteria:
 - a. daratan sepanjang tepian sungai bertanggung dengan lebar 3 (tiga) sampai 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
 - b. daratan sepanjang tepian sungai tidak bertanggung dengan lebar 10 (sepuluh) sampai 100 (seratus) meter dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; dan

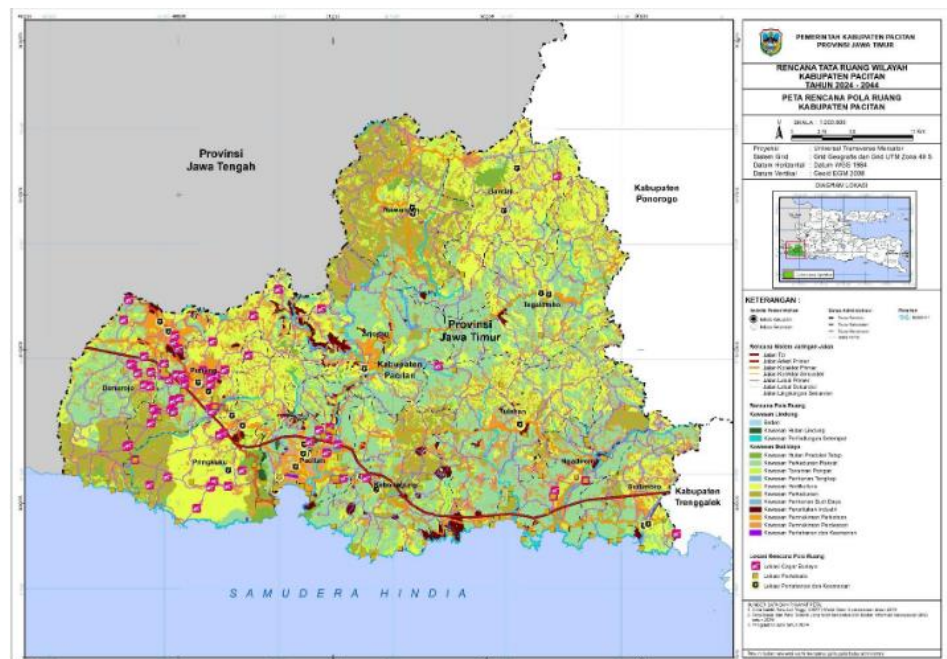


- c. daratan sepanjang tepian sungai yang terpengaruh pasang surut air laut dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai.
5. Kawasan sekitar mata air, ditetapkan dengan kriteria:
 - a. daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi mata air; dan
 - b. wilayah dengan jarak paling sedikit 200 (dua ratus) meter dari mata air.
6. Kawasan sekitar SUTT, ditetapkan dengan kriteria daratan di sepanjang SUTT dengan lebar 10 (sepuluh) sampai 50 (lima puluh) meter sebagai ruang terbuka hijau;
7. Kawasan cagar alam, ditetapkan dengan kriteria:
 - a. memiliki keanekaragaman jenis tumbuhan, satwa, dan tipe ekosistemnya;
 - b. memiliki formasi biota tertentu dan/atau unit-unit penyusunnya;
 - c. memiliki kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli atau belum diganggu manusia;
 - d. memiliki luas dan bentuk tertentu; atau
 - e. memiliki ciri khas yang merupakan satu-satunya contoh di suatu daerah serta keberadaannya memerlukan konservasi.
8. Kawasan cagar budaya, ditetapkan dengan kriteria:
 - a. hasil budaya manusia yang bernilai tinggi yang dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
 - b. benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagian atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;
 - c. benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.
9. Kawasan rawan gempa bumi, ditetapkan dengan kriteria berpotensi dan/atau pernah mengalami gempa bumi dengan skala VII sampai dengan XII Modified Mercally Intensity (MMI)
10. Kawasan rawan tanah longsor/gerakan tanah, ditetapkan dengan kriteria memiliki tingkat kerentanan gerakan tanah tinggi.
11. Kawasan gelombang pasang tsunami, ditetapkan dengan kriteria:
 - a. pantai yang rawan terhadap gelombang pasang dengan kecepatan antara 10 (sepuluh) sampai dengan 100 (Seratus)



- kilometer per jam yang timbul akibat angin kencang atau gravitasi bulan atau matahari.
- b. pantai dengan elevasi rendah dan/atau berpotensi atau pernah mengalami tsunami.
12. Kawasan rawan banjir, ditetapkan dengan kriteria diidentifikasi sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir.
13. Kawasan peruntukan ruang terbuka hijau, ditetapkan dengan kriteria:
 - a. berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur; dan
 - b. didominasi komunitas tumbuhan.
14. Kawasan terumbu karang, ditetapkan dengan kriteria:
 - a. berupa kawasan yang terbentuk dari koloni masif dari hewan kecil yang secara bertahap membentuk terumbu karang;
 - b. terdapat di sepanjang pantai dengan kedalaman paling dalam 40 (empat puluh) meter; dan
 - c. dipisahkan oleh laguna dengan kedalaman antara 40 (empat puluh) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) meter

Gambar 2. 91 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Pacitan



Sumber: RTRW Kabupaten Pacitan, Tahun 2024-2044



C. Kawasan Strategis

Dari perspektif kawasan strategis, dalam RTRW Kabupaten Pacitan telah ditetapkan beberapa Kawasan setrategis sosio kultural yang dikembangkan dalam bentuk Kawasan pariwisata, Kawasan strategis Ekonomi yang dikembangkan dalam bentuk Kawasan agropolitan dan Kawasan strategis teknologi tinggi.

1. Kawasan strategis sosio kultural

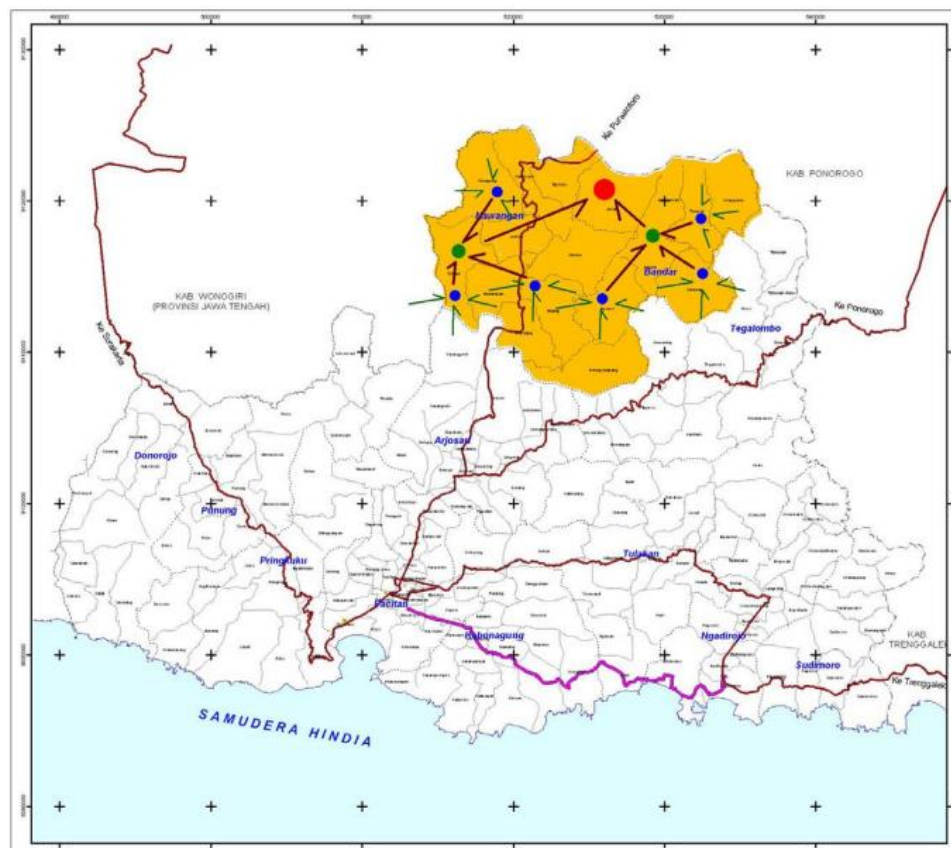
Kawasan strategis sosio kultural atau kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan dalam RTRW Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut:

- a. Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) A dengan objek wisata yang dikembangkan adalah Pantai Srau, Pantai Klayar, Pantai Karang Bolong/Segoro Bunder, Pantai Nampu, Pantai Watukarung, Makam Keturunan Raja, Bekas Kerajaan Wirati dan Makam Kiyai Santri, Makam Kiyai Banteng, Situs Bak Soko, Song Agung dan Song Terus, Goa Gong, Goa Tabuhan, Goa Putri, Goa Kalak, Goa Kendil, Luweng Jaran, Luweng Ombo dan wana wisata;
- b. Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) B dengan objek wisata yang dikembangkan adalah Pantai Teleng Ria, Pantai Tamperan, Palangan Tumpak Rinjing, Makam Kanjeng Jimat, Sumber Air Hangat, Pondok Tremas dan Makam Ki Ageng Petung dan Notopuro;
- c. Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) C dengan objek wisata yang dikembangkan adalah Pantai Tawang, Pantai Bakung, Pantai Wawaran, Pantai Jetak, Pantai Bawur, Pantai Sidomulyo, Pantai Taman, Pantai Soge, Gunung Limo, Batu Tulis dan Makam Sutononggo, Goa Somopuro, Goa Papringan, Goa Pentung, Goa Kambil, Petilasan Buwono Keling, Geger Gunung Selurung, Markas Jendral Sudirman, dan Makam Kanjeng Bayat;
- d. Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) D dengan objek wisata yang dikembangkan adalah Monumen Jendral Sudirman, Makam Eyang Putri dan Iro Kombor serta Makam Mbah Wager, agrowisata.

**Gambar 2. 92 Peta Kawasan Strategis Sosio Kultural**

Sumber: RTRW Kabupaten Pacitan, Tahun 2024-2044

2. Kawasan strategis ekonomi
Rencana pengembangan kawasan strategis dengan dari sudut pandang ekonomi yang dalam hal ini adalah pengembangan kawasan agropolitan akan dikembangkan di dua kecamatan yaitu Kecamatan Nawangan dan Kecamatan Bandar.

**Gambar 2. 93 Peta Kawasan Strategis Ekonomi Kabupaten Pacitan**

Sumber: RTRW Kabupaten Pacitan, Tahun 2024-2044

Pengembangan komoditas pertanian diarahkan melalui pendekatan pembangunan sistem dan usaha agribisnis. Pembangunan sistem agribisnis dapat diartikan sebagai cara pandang dengan menekankan kepada tiga hal, yaitu:

- Pertama, melalui pembangunan agribisnis, pendekatan pembangunan pertanian ditingkatkan dari pendekatan produksi ke pendekatan yang berdasarkan bisnis. Dengan orientasi kepada bisnis, maka pembangunan usaha bisnis yang berdaya saing dan berkelanjutan menjadi dasar pertimbangan utama.
- Kedua, dalam pembangunan agribisnis pembangunan pertanian bukan semata pembangunan sektoral namun juga terkait/ ditentukan oleh agroindustri hilir, agroindustri hulu dan lembaga jasa penunjang.
- Ketiga, pembangunan pertanian bukan sebagai pembangunan parsial pengembangan komoditas, melainkan sangat terkait dengan pembangunan wilayah, khususnya pedesaan yang berkaitan erat dengan upaya-upaya peningkatan pendapatan masyarakat pertanian.



Pembangunan pertanian dalam kerangka sistem agribisnis merupakan suatu rangkaian dan keterkaitan dari :

- a. Sub agribisnis hulu (upstream agribusiness) yaitu seluruh kegiatan ekonomi yang menghasilkan sarana produksi bagi pertanian primer (usahatani); dapat berupa pupuk, benih, pestisida, infrastruktur, saprodi;
- b. Sub agribisnis usahatani (on-farm agribusiness) atau pertanian primer, yaitu kegiatan yang menggunakan sarana produksi untuk menghasilkan komoditas pertanian primer; dapat berupa petani, kelompok tani, budidaya
- c. Sub agribisnis hilir (down-stream agribusiness) yaitu kegiatan ekonomi yang mengolah komoditas pertanian primer menjadi produk olahan baik bentuk produk antara (intermediate product) maupun bentuk produk akhir (finished product); dapat berupa agroindustri, pemasaran
- d. Sub jasa penunjang yaitu kegiatan yang menyediakan jasa bagi ketiga sub agribisnis di atas; dapat berupa KUD, perbankan, pendidikan dan pelatihan.

Desa Jeruk Kecamatan Bandar yang ditetapkan sebagai pusat agropolitan memiliki fungsi dalam kawasan agropolitan sebagai:

- a. Pusat perdagangan dan transportasi pertanian
- b. Penyedia jasa pendukung pertanian
- c. Pasar konsumen produk non pertanian
- d. Pusat Industri Pertanian

Penyedia pekerjaan non pertanian Desa-desa lainnya di Kecamatan Bandar dan Kecamatan Nawangan yang merupakan unit-unit pengembangan kawasan agropolitan, memiliki fungsi sebagai:

- a. Pusat Produksi pertanian
- b. Intensifikasi pertanian
- c. Pusat pendapatan perdesaan dan permintaan untuk barang-barang dan jasa non pertanian
- d. Produksi tanaman siap jual dan diversifikasi pertanian

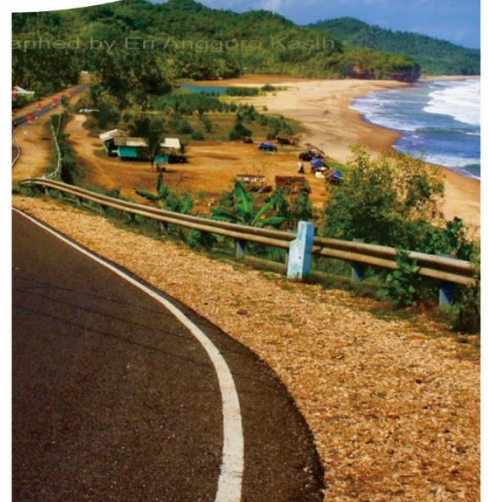
3. Kawasan strategis teknologi tinggi

Kawasan strategis yang ketiga ditetapkan pada Kecamatan Sudimoro yang diarahkan untuk pengembangan kawasan PLTU dengan jaringan transmisi SUTT 150KV meliputi:

- a. SUTT dari PLTU ke Gardu Induk Pacitan.
- b. SUTT dari Gardu Induk Pacitan ke Ponorogo
- c. SUTT dari Gardu Induk Pacitan ke Wonogiri.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS





3.1. Permasalahan Pembangunan

Pada era globalisasi dan persaingan yang semakin ketat, perencanaan Pembangunan Daerah menjadi kunci utama dalam memastikan pertumbuhan dan kemajuan suatu wilayah. Akan tetapi, perencanaan Pembangunan Daerah tidak jauh dari permasalahan yang ada sehingga menghambat proses perencanaan Pembangunan Daerah yang efektif. Untuk mengatasi permasalahan Pembangunan daerah yang ada, maka dibutuhkannya pengidentifikasian permasalahan Pembangunan daerah, khususnya permasalahan Pembangunan daerah di Kabupaten Pacitan. Sebelumnya untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam beberapa tahun terakhir, maka dibutuhkan Kerjasama antar Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Pacitan.

Permasalahan Pembangunan Daerah diidentifikasi dari persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Organisasi Perangkat Daerah dari berbagai urusan yang diampu oleh Kabupaten Pacitan. Selain itu juga identifikasi permasalahan ini juga dilakukan berdasarkan hasil gambaran umum kondisi daerah dari pertimbangan berbagai aspek seperti aspek geografi, demografi, kesenjangan Masyarakat, pelayanan umum dan juga daya saing daerah. Nantinya hasil dari identifikasi permasalahan daerah ini akan dikerucutkan menjadi isu strategis daerah. Berdasarkan hasil analisis terkait kondisi daerah serta memperhatikan permasalahan yang terjadi dalam sepuluh tahun terakhir maka secara umum permasalahan Pembangunan daerah di Kabupaten Pacitan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

- 1) Kurangnya Daya Saing Tenaga Kerja Lokal
Daya saing tenaga kerja lokal merujuk pada kemampuan tenaga kerja untuk bersaing di pasar kerja, baik di tingkat lokal maupun global. Hal ini mencakup keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman kerja yang dimiliki oleh SDM, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi dan pasar kerja. Peningkatan daya saing tenaga kerja dilakukan melalui berbagai cara, yakni peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, pengembangan keterampilan teknologi, dan peningkatan akses pasar kerja. Dalam konteks pembangunan daerah, peningkatan daya saing tenaga kerja dapat menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat daya saing daerah. Salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja adalah dengan melindungi tenaga kerja melalui peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan ketenagakerjaan.
- 2) Kurangnya Daya Saing Usaha Berbasis Digital
Daya saing usaha berbasis digital merupakan kemampuan usaha untuk mengembangkan dan mengoperasikan bisnis melalui teknologi digital, seperti internet, smartphone, dan aplikasi. Hal ini memungkinkan usaha memiliki konsumen yang lebih luas (diluar daerah), menghemat biaya



promosi, dan mengembangkan layanan yang lebih efektif dan efisien. Daya saing usaha berbasis digital juga memungkinkan usaha untuk beradaptasi dengan cepat dengan perkembangan teknologi dan perubahan pasar. Dengan demikian, usaha berbasis digital dapat menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan daya saing dalam bisnis. Melihat letak geografis Kabupaten Pacitan, peningkatan daya saing usaha yang berbasis digital merupakan hal yang sangat dibutuhkan untuk Masyarakat dapat mengembangkan usahanya diluar Kabupaten Pacitan.

- 3) Belum optimalnya daya tarik investasi
Menciptakan iklim investasi yang kondusif dapat diterapkan dalam beberapa hal yakni regulasi, peningkatan pelayanan publik, perbaikan perijinan berusaha dan peningkatan akses pasar ekspor. Konduktivitas iklim investasi diperlukan untuk memudahkan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif maka diperlukan kestabilan politik dan sosial, infrastruktur yang memadai, kemudahan pembiayaan untuk investor, kualitas tenaga kerja/SDM, kebijakan pemerintah, dan pelayanan publik. Dengan memperbaiki kondisi iklim investasi, diharapkan dapat memudahkan investasi dan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing industri, dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
- 4) Minimnya Penerapan teknologi dan Hilirisasi sektor pertanian
Hilirisasi dalam sektor pertanian merujuk pada upaya untuk meningkatkan nilai tambah dari produk melalui proses pengolahan dan pemasaran. Hilirisasi bertujuan untuk meningkatkan daya saing pada pasar global dan meningkatkan kesejahteraan petani. Upaya hilirisasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pengembangan industri pengolahan, pengembangan jaringan distribusi, dan pengembangan pasar ekspor. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pertanian digunakan untuk memantau kondisi tanaman, dan penggunaan teknologi pengolahan pangan yang lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, pengembangan hilirisasi dan penerapan teknologi yang tepat dapat membantu meningkatkan daya saing sektor pertanian, serta meningkatkan kesejahteraan petani. Hal ini perlu untuk diterapkan di Kabupaten Pacitan mengingat potensi pertanian belum dimaksimalkan dan dapat menjadi produk utama untuk peningkatan perekonomian.
- 5) Kurangnya Produktivitas Peternakan dan Perikanan



Terdapat berbagai permasalahan yang menyangkut terkait produktivitas peternakan dan perikanan terkait Keterbatasan akses terhadap teknologi dan inovasi dalam praktik perikanan dan peternakan, yang dapat mempengaruhi efisiensi dan produktivitas. Kurangnya integrasi sistem perikanan dan peternakan, dapat menghambat efisiensi dan produktivitas melalui kurangnya pemanfaatan limbah dan sumber daya alam secara optimal. Pengelolaan ruang terbuka hijau yang kurang optimal, yang dapat mempengaruhi ketersediaan lahan untuk kegiatan perikanan dan peternakan. Kurangnya kualitas layanan dan sarana prasarana pendidikan di sektor perikanan dan peternakan, yang dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia dan produktivitas. Upaya untuk mengatasi permasalahan ini meliputi penerapan teknologi perikanan yang inovatif, pengembangan integrasi sistem perikanan dan peternakan, pengelolaan ruang terbuka hijau yang lebih optimal, dan peningkatan kualitas layanan dan sarana prasarana pendidikan di sektor perikanan dan peternakan.

6) Minimya Pengembangan Pariwisata tematik

Pariwisata tematik merupakan jenis pariwisata yang menawarkan pengalaman wisata yang berfokus pada tema atau topik tertentu, seperti budaya, sejarah, alam, atau olahraga. Pariwisata tematik bertujuan untuk memberikan pengalaman wisata yang lebih mendalam dan berkesan bagi wisatawan, serta meningkatkan daya tarik wisata suatu daerah. Dalam pengembangan pariwisata tematik, perlu diperhatikan aspek-aspek seperti pengembangan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, dan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan demikian, pengembangan pariwisata tematik yang berkelanjutan dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang seimbang bagi suatu daerah.

7) Kurangnya Pengembangan kawasan industri

Berkembangnya Kawasan industri dalam suatu daerah dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan mendorong pertumbuhan sektor manufaktur. Selain itu daerah dengan Kawasan industri yang berkembang dengan baik dapat menarik investasi dari dalam maupun luar negeri, serta dapat memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Inovasi dan pengembangan teknologi baru, untuk meningkatkan daya saing industri nasional dapat dikembangkan guna memenuhi kebutuhan industri serta pengembangan infrastruktur jalan, listrik, dan air bersih, yang dapat memberikan manfaat bagi Masyarakat. Dengan demikian, pengembangan kawasan industri memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan



ekonomi suatu daerah, dan dapat memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan daya saing ekonomi, investasi, inovasi, dan infrastruktur. Perkembangan dan kemandirian daerah juga dapat dipengaruhi dengan meningkatnya Kawasan industri oleh karena itu, untuk mencapai pengembangan Kawasan industri maka Kabupaten Pacitan memerlukan SDM yang berkualitas serta potensi lainnya yang dapat ditawarkan kepada investor untuk menarik investasi dalam sektor industri.

- 8) Belum optimalnya Digitalisasi di berbagai sektor
Dalam penerapan digitalisasi di berbagai sektor maka memerlukan penerapan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, dan kebijakan yang adaptif, *agile*, dan *forward looking*. Infrastruktur yang kuat dan handal diperlukan untuk mendukung konektivitas dan aksesibilitas digital. Pengembangan sumber daya manusia yang terampil dalam teknologi digital juga penting untuk memanfaatkan teknologi secara efektif. Selain itu, kebijakan yang adaptif, agile, dan forward looking diperlukan untuk mengakomodasi perubahan yang cepat dalam teknologi digital dan memastikan regulasi tetap relevan dan mendukung inovasi. Aspek-aspek tersebut diperlukan untuk memastikan digitalisasi di berbagai sektor dapat memberikan manfaat maksimal bagi pertumbuhan ekonomi dan kemajuan masyarakat.
- 9) Kurangnya Kualitas Layanan dan Sarpras Pendidikan
Peningkatan kualitas layanan dan sarana prasarana pendidikan merujuk pada upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan memperbaiki layanan dan sarana prasarana yang tersedia. Hal ini mencakup peningkatan kualitas pengajaran, peningkatan kualitas fasilitas, dan peningkatan kualitas manajemen Pendidikan. Peningkatan kualitas layanan dan sarana prasarana pendidikan dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti peningkatan kualitas guru, pengembangan kurikulum yang lebih relevan, peningkatan kualitas fasilitas pendidikan, dan peningkatan manajemen pendidikan yang lebih efektif. Dengan demikian, peningkatan kualitas layanan dan sarana prasarana pendidikan dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan daya saing sumber daya manusia, dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
- 10) Kurangnya Kualitas Layanan dan Sarpras Kesehatan
Kesehatan merupakan salah satu urusan wajib dasar yang memiliki standart pelayanan minimum dalam pemberian pelayanan kepada Masyarakat. Adanya standart pelayanan minimum ini memberikan dorongan bahkan mewajibkan seluruh ASN maupun pegawai non ASN



yang bekerja dalam bidang Kesehatan untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan SPM. Akan tetapi beberapa daerah masih mengeluhkan terkait kurangnya sarana prasarana Kesehatan sehingga tidak dapat memaksimalkan pelayanan kepada Masyarakat. Kurangnya sarana prasarana dapat memberikan efek pelayanan yang tepat, cepat dan akurat kepada Masyarakat. Dengan meningkatnya pasien yang memeriksakan dirinya di unit Kesehatan yang ada di daerah maka kebutuhan akan sarana prasana semakin meningkat. Sedangkan pemerintah daerah tidak dapat menyediakan kebutuhan tersebut, sehingga banyaknya kasus terkait reschedule jadwal operasi karena kekurangan ruangan operasi. Hal inilah yang membuat kualitas pelayanan pada sektor Kesehatan memerlukan peningkatan. Apabila dilihat dari jumlah tenaga Kesehatan yang ada di Pacitan di tahun 2019 jumlah dokter hanya berkisar 45, jumlah perawat 343, bidang 271, farmasi 32 dan ahli gizi 41. Sedangkan jumlah rumah sakit di tahun 2019 hanya sebanyak 2 rumah sakit, 2 rumah sakit bersalin, 10 poliklinik, 26 puskesmas, 53 puskesmas pembantu, dan 26 apotik. Jumlah ini cenderung kecil apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Pacitan 586,110 ribu jiwa. Oleh karena itu untuk meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan maka pemerintah kabupaten pacitan memerlukan pemenuhan sarana prasarana Kesehatan.

11) **Potensi Tingginya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan**

Tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan sosial merupakan permasalahan yang bahkan setiap tahunnya selalu ada. Adanya kemiskinan dan kesenjangan sosial dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan dapat memicu ketidakstabilan sosial. Isu strategis terkait kemiskinan tidak hanya terjadi pada Kabupaten Pacitan, akan tetapi juga terjadi pada daerah-daerah lainnya. Wilayah Kabupaten Pacitan yang cukup jauh dari jangkauan lokasi kota-kota besar membuat adanya kesenjangan pada masyarakatnya. Selain itu adanya pandemic covid ditahun 2019-2021 membuat perekonomian di Kabupaten Pacitan mengalami pelemahan sehingga angka kemiskinan meningkat. Jumlah dan jenis pekerjaan yang ada di Kabupaten Pacitan juga berperan dalam meningkatkan perekonomian daerah, akan tetapi jenis pekerjaan yang dapat ditemui di Kabupaten pacitan tidak seberagam dengan jenis pekerjaan yang ada di kota-kota besar. Oleh karena itu untuk meningkatkan perekonomian keluarga, Masyarakat akan cenderung mencari pekerjaan di luar Kabupaten Pacitan.



12) Tingginya Risiko Bencana

Tingginya risiko bencana merujuk pada kemungkinan terjadinya bencana alam atau kejadian yang dapat menimbulkan kerusakan dan dampak negatif yang signifikan terhadap masyarakat, lingkungan, dan perekonomian. Di Indonesia, khususnya Kabupaten Pacitan kondisi geologi dan geografis yang rentan terhadap bencana alam, seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan longsor, menyebabkan tingginya intensitas kejadian bencana. Hal ini menunjukkan bahwa risiko bencana alam sulit untuk dihilangkan, sehingga yang dapat dilakukan adalah mengurangi risiko bencana dengan cara mengurangi kerentanan dan memperkuat ketahanan masyarakat dan infrastruktur terhadap bencana. Oleh karena itu, penting untuk melakukan upaya mitigasi, adaptasi, dan kesiapsiagaan bencana guna mengurangi risiko dan dampak bencana yang mungkin terjadi.

13) Potensi Degradasi Moral Pemuda

Degradasi moral pemuda dipengaruhi oleh teknologi informasi, lingkungan masyarakat, dan kurangnya pendidikan karakter. Hal ini dapat menyebabkan penurunan moral dan etika pemuda, seperti terkait dengan perilaku kekerasan, penipuan, narkoba, dan seks bebas. Selain itu, kurangnya akses terhadap sarana prasarana pendidikan dan layanan sosial juga dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia dan produktivitas. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan pendidikan karakter dan moral pemuda, melalui pendidikan agama, pendidikan karakter, dan pengembangan keterampilan sosial. Selain itu, perlunya peningkatan akses terhadap sarana prasarana pendidikan dan layanan sosial yang berkualitas untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan produktivitas yang lebih baik.

14) Kurangnya Profesionalitas Aparatur

Profesionalitas aparatur dibutuhkan dalam birokrasi untuk menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, adil, dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan dan etika profesi. Hal ini mencakup kemampuan dalam memberikan pelayanan publik yang baik, efektif, dan efisien, serta kemampuan dalam mengelola sumber daya publik dengan baik. Untuk mencapai profesionalitas aparatur yang baik, diperlukan kualitas sumber daya manusia yang sesuai dengan tuntutan organisasi, seperti kemampuan teknis, keterampilan interpersonal, dan pengetahuan tentang regulasi dan kebijakan. Selain itu, diperlukan juga pengembangan sistem manajemen kinerja yang baik, pelatihan dan



pengembangan keterampilan, serta pengembangan budaya organisasi yang mendukung profesionalitas aparatur. Dengan demikian, profesionalitas aparatur dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

15) Belum Efektifnya Tata Kelola Pemerintahan

Tata Kelola pemerintahan yang efektif mampu membawa kemajuan untuk daerah dan dapat memberikan pelayanan yang baik pada Masyarakat. Adanya keteraturan pada pemerintahan dapat merujuk pada kemampuan pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsinya secara efektif, efisien, dan responsif terhadap perubahan, serta mampu beradaptasi dengan dinamika lingkungan yang terus berubah. Tata Kelola pemerintahan ini sangat dibutuhkan untuk perkembangan dimasa mendatang. Untuk menjadikan tata Kelola pemerintahan yang efektif dan adaptif maka cakupan dalam kemampuan pengelolaan perubahan, berinovasi, dan menyesuaikan diri dengan tuntutan dan kebutuhan yang berkembang, serta tetap mempertahankan standar kinerja yang tinggi membutuhkan kerja keras bahkan komitmen perubahan dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, untuk dapat Menyusun kebijakan yang sesuai dengan dinamika sosial ekonomi serta politik pada masa mendatang maka pemerintah Kabupaten Pacitan memerlukan komitmen dan konsistensi untuk menjadikan tata Kelola pemerintahannya menjadi pemerintahan yang efektif dan adaptif. Apabila pemerintah Kabupaten Pacitan tidak mampu merubah kondisi/iklim dalam pemerintahannya maka untuk mencapai pemerintahan yang mampu beradaptasi dan mampu menjalankan fungsi-fungsinya secara efektif efisien akan sulit dengan kondisi masa mendatang yang penuh dengan konflik sosial ekonomi serta politik nasional dan global.

16) Kurangnya Kualitas Pengelolaan Arsip

Pengelolaan arsip merujuk pada serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan, menggunakan, memelihara, dan memanfaatkan arsip. Pengelolaan arsip dinamis dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan serta mencakup tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, dan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip. Pengelolaan arsip statis dilakukan dalam suatu sistem kearsipan nasional untuk lembaga negara, pemerintah daerah, perguruan tinggi negeri, serta BUMN dan/atau BUMD. Kualitas pengelolaan arsip mencakup efisiensi, efektivitas, dan sistematis dalam penciptaan, pemeliharaan, dan pemanfaatan arsip. Upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan arsip juga termasuk dalam rangka



wujudkan kualitas pengelolaan arsip yang mudah diakses, sehingga arsip dapat dimanfaatkan secara optimal. Dengan demikian, kualitas pengelolaan arsip yang baik akan mendukung efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik serta pemeliharaan dan pemanfaatan arsip secara menyeluruh.

- 17) **Potensi adanya Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum**
Gangguan keamanan dan ketertiban umum merujuk pada situasi yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, seperti tindakan kriminal, kekerasan, dan tindakan yang merusak fasilitas umum. Hal ini dapat terjadi pada lingkungan Masyarakat. Pencegahan dan penanganan gangguan keamanan dan ketertiban umum, diperlukan upaya-upaya penerapan standar pencegahan dan penindakan gangguan keamanan dan ketertiban, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pengembangan kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan situasi keamanan dan ketertiban. Selain itu, internalisasi nilai kearifan lokal juga dapat menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban umum.
- 18) **Belum Optimalnya Pendapatan Asli Daerah**
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam daerah, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Guna mengoptimalkan PAD maka diperlukan kesadaran masyarakat akan kewajiban membayar pajak dan retribusi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah melalui kualitas SDM daerah, dan meningkatkan kerjasama antar daerah dan pemerintah pusat dalam pengelolaan sumber daya dan penerimaan daerah. Optimalisasi PAD digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat keuangan daerah, dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
- 19) **Masih adanya kekerasan**
Perlindungan terhadap kekerasan adalah upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan kekerasan, seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Upaya perlindungan ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pemberian perlindungan yang tidak hanya diberikan kepada korban tetapi juga kepada pendamping atau keluarga korban. Meningkatnya kasus kekerasan terhadap Perempuan dan anak



membuat pemerintah daerah harus memiliki ketegasan dalam penerapan hukum yang berlaku. Oleh karena itu perlindungan terhadap kekerasan perlu ditingkatkan.

- 20) Berkurangnya Kualitas lingkungan hidup
Kualitas lingkungan hidup merujuk pada kondisi dan keadaan unsur-unsur atau komponen-komponen lingkungan hidup, baik komponen biota maupun komponen abiotik. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti kualitas udara, air, tanah, serta keanekaragaman hayati. Peningkatan jumlah penduduk dan meningkatnya industri dalam daerah membuat kualitas lingkungan hidup mengalami penurunan. Pada beberapa kota besar bahkan kualitas udara dan air sangat rendah. Oleh karena itu untuk melaksanakan Pembangunan dalam daerah harus memperhatikan lingkungan untuk meminimalisir menurunnya kualitas lingkungan hidup yang ada dalam Masyarakat.
- 21) Kurangnya Internalisasi nilai-nilai kebudayaan lokal
Masuknya kebudayaan baru di Indonesia membuat kebudayaan lokal mulai mengalami kepunahan. Hal ini juga ditunjang dengan aktivitas pemuda yang lebih mengutamakan atau menyukai budaya luar baik dari seni musik, pakaian adat, makanan hingga bahasa yang digunakan. Apabila permasalahan ini tidak segera diatasi maka kebudayaan lokal akan mulai menghilang seiring dengan berjalannya waktu. Internalisasi nilai kebudayaan lokal merujuk pada upaya untuk memperkenalkan, memahami, dan menghargai nilai-nilai kebudayaan lokal suatu daerah, serta mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan, seni, budaya, dan kegiatan sosial. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperkuat identitas budaya suatu daerah, meningkatkan rasa bangga dan cinta tanah air, serta memperkaya pengalaman dan pengetahuan masyarakat tentang kebudayaan lokal. Dalam konteks pembangunan daerah, internalisasi nilai kebudayaan lokal juga dapat menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat daya saing daerah.
- 22) Belum Optimalnya Ketahanan Pangan
Ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, menjadi salah satu permasalahan utama terkait ketahanan pangan. Hal ini mencakup produksi pangan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat. Dalam beberapa wilayah, pendistribusian pangan yang merata dan terjangkau sulit untuk diakses. Sedangkan pertumbuhan penduduk terus bertambah oleh karena itu, pemerintah



daerah perlu untuk meningkatkan ketahanan pangan pada daerahnya untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat. Permasalahan lain adalah karena banyaknya lahan marginal yang rendah potensi dan produktivitasnya, baik dari sisi kesuburan tanah, baik kesuburan kimia, fisik maupun biologi tanah, juga rendah. Di samping itu, tanah marginal juga mempunyai tersedianya air yang rendah dikarenakan kondisi kabupaten pacitan yang Sebagian besar pegunungan.

- 23) Kurangnya Pemenuhan Infrastruktur dasar permukiman
Pemenuhan infrastruktur dasar permukiman mencakup berbagai aspek, seperti penyediaan air bersih, sanitasi, listrik, jalan, dan transportasi. Untuk memenuhi infrastruktur permukiman maka pemerintah daerah memerlukan pengembangan kebijakan yang adaptif dan responsive terhadap perubahan kebutuhan masyarakat, serta pengembangan sistem manajemen kinerja yang baik untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam penyediaan layanan infrastruktur dasar permukiman. Kebutuhan terkait infrastruktur dasar permukiman ini juga didasari dari peningkatan jumlah penduduk serta peningkatan permintaan Masyarakat untuk menyediakan lahan permukiman baru. Oleh karena itu kebutuhan infrastruktur sangat dibutuhkan.
- 24) Pembangunan dan Infrastruktur yang belum merata
Pemerataan Pembangunan infrastruktur memiliki peranan penting dalam peningkatan perekonomian daerah, akan tetapi Pembangunan infrastruktur berkelanjutan harus memperhatikan lingkungan agar tidak terjadi kerusakan lingkungan pada masa depan. Pembangunan infrastruktur yang memperhatikan lingkungan dapat mencakup penggunaan teknologi dan material ramah lingkungan, konservasi sumber daya alam, mitigasi terhadap perubahan iklim, serta memperhatikan aspek sosial dan budaya masyarakat. Prinsip ini juga mencakup pengembangan infrastruktur hijau, yang melibatkan penataan ruang dengan memperhatikan aspek perlindungan, penghematan, dan pengurangan penggunaan sumber daya alam. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan dan berkelanjutan diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang seimbang.
- 25) Kurangnya Konektivitas antar wilayah
Konektivitas wilayah merujuk pada kemampuan suatu wilayah untuk terhubung dengan wilayah lain melalui berbagai sarana transportasi dan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara. Konektivitas wilayah dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan



pembangunan daerah, karena dapat memudahkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat serta barang dan jasa. Peningkatan konektivitas wilayah dilakukan melalui pengembangan infrastruktur transportasi dan sarana prasarana yang memadai, serta pengembangan kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat. Dengan meningkatkan konektivitas wilayah, maka daya saing daerah dapat diperkuat, kualitas hidup Masyarakat dapat meningkatkan, dan dapat mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan serta meningkatkan perekonomian daerah guna pengoptimalan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Konektivitas antar wilayah juga dapat menumbuhkan usaha mikro kecil menengah Masyarakat.

3.2. Telaah Isu RPJPN Tahun 2025-2045

RPJPD Tahun 2025-2045 diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Hal tersebut didasarkan pada prinsip hak asasi bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, Pemerintah Daerah harus menitikberatkan masyarakat sebagai penikmat dan pelaku pembangunan. Berikut merupakan isu dan tantangan Pembangunan ke depan:

1. Rendahnya tingkat produktivitas di Tengah persaingan global yang semakin meningkat
2. Lemahnya kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN)
3. Kuantitas dan kualitas SDM peneliti belum memadai
4. Deindustrialisasi Dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah
5. Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata
6. Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi laut
7. Rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi
8. Produktivitas tenaga kerja Indonesia selama kurun waktu 2010 – 2022 masih relative tertinggal
9. Pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan
10. Pembangunan energi utamanya peningkatan akses energy yang belum merata dan berkualitas di seluruh wilayah, masih rendahnya penggunaan energy terbarukan, dan masih rendahnya efisiensi energi
11. Pencemaran dan kerusakan lingkungan masih menjadi tantangan untuk mencapai ekonomi hijau
12. Penggunaan internet yang tidak produktif, tidak memberikan dampak ekonomi yang signifikan pada perekonomian nasional



13. Rendahnya peran perkotaan di Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan oleh elastisitas pertumbuhan penduduk perkotaan terhadap pertumbuhan PDB per kapita perkotaan di Indonesia
14. Akses dan kualitas yang belum merata di sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial
15. Kualifikasi pendidikan penduduk masih rendah, berdampak pada keterserapan tenaga kerja di pasar kerja
16. Tuntutan cakupan sistem perlindungan sosial yang lebih menyeluruh dan inklusif di sepanjang siklus kehidupan
17. Infrastruktur dan literasi digital masih terbatas
18. Belum optimalnya integrasi ekonomi domestik, sehingga keterkaitan ekonomi antar wilayah masih relatif terbatas
19. Tuntutan perencanaan yang baik untuk menciptakan kota yang layak huni
20. Pembangunan Kesehatan yang dihadapkan pada transisi demografi yang diiringi mobilitas penduduk, urbanisasi, transisi epidemiologi dan perilaku hidup tidak sehat.
21. Pembangunan Pendidikan yang dihadapkan pada tantangan bonus demografi dan memenuhi kebutuhan SDM yang berkualitas untuk mendukung Pembangunan di berbagai sektor
22. Produktivitas dan daya saing perguruan tinggi di tingkat global saat ini masih rendah
23. Belum meratanya akses untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan
24. Masih rendahnya pemahaman manfaat jaminan sosial
25. Rendahnya tingkat kepatuhan pembayaran iuran jaminan sosial
26. Perbaikan tata kelola guna menciptakan pemerintahan yang transparan, efisien, dan mendukung terwujudnya tujuan pembangunan nasional
27. Regulasi yang berlebih dan kualitas regulasi yang rendah
28. Proses pembentukan regulasi belum cukup responsive dan adaptif untuk mengakomodasi kebutuhan hukum masyarakat
29. Kelembagaan instansi publik masih dicirikan dengan struktur yang terfragmentasi dan tidak efektif
30. Proses bisnis dan tata kelola urusan pemerintahan masih terfragmentasi dan tidak adaptif
31. Masih terjadi tumpang tindih pelaksanaan program-program pembangunan yang berpotensi menimbulkan inefektivitas dan inefisiensi
32. Belum terimplementasinya manajemen talenta secara merata di seluruh K/L/D
33. ASN berada dalam posisi yang rentan terhadap intervensi politik di dalam birokrasi
34. Belum meratanya kualitas pelayanan publik
35. Masih tingginya kesenjangan antar kota-desa dan rendahnya literasi digital



36. Belum meratanya tingkat kematangan sistem pemerintahan berbasis elektronik antara instansi pusat dan pemerintah daerah
37. Belum terwujudnya partai politik yang mandiri dan modern
38. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan demokratisasi belum optimal
39. Prinsip keterbukaan pemerintah belum sepenuhnya terarusutamakan dalam pelaksanaan pembangunan
40. Sistem hukum belum mampu sepenuhnya mewujudkan kepastian hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan
41. Dalam aspek politik, demokrasi masih terbatas pada hal-hal prosedural seperti teknis pemilihan dan hubungan formal kelembagaan
42. Keamanan nasional menghadapi kompleksitas ancaman dan gangguan serta meningkatnya isu geopolitik kawasan, terutama di perbatasan
43. Masih lemahnya keamanan siber, serta masih tingginya gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di laut dan wilayah perbatasan
44. Perlunya kebijakan fiskal dan moneter yang pro-pertumbuhan untuk menjaga stabilitas ekonomi makro Indonesia
45. Masih rendahnya penerimaan negara terutama perpajakan
46. Ruang fiskal yang rendah dan disertai kualitas belanja yang belum optimal menyebabkan terbatasnya peranan fiskal
47. Kebijakan moneter menghadapi tantangan menjaga stabilitas harga di tengah volatilitas harga komoditas di pasar global
48. Belum optimalnya partisipasi dalam forum internasional untuk memajukan kepentingan nasional
49. Pancasila belum sepenuhnya diimplementasikan dalam norma dan praktik kehidupan, karakter dan jati diri bangsa
50. Ketimpangan gender masih tinggi
51. Tingginya laju kehilangan dan rendahnya pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan
52. Tingginya tingkat bencana hidrometeorologi
53. Kurang efektifnya mitigasi bencana, sistem peringatan dini, dan penanganan pasca bencana
54. Pengendalian kerusakan lingkungan belum optimal
55. Ketidakseimbangan antara kebutuhan dan pasokan pangan, energy, dan air terjadi di berbagai wilayah
56. Kesenjangan Pembangunan sarana prasarana antara dasar antara jawa dan luar jawa
57. Masih tingginya permasalahan pertanahan dan sangat terbatasnya Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota yang tersedia
58. Rendahnya produktivitas perkotaan akibat desain kota yang tidak optimal
59. Tingginya resiko bencana dan lemahnya tata kelola kebencanaan



60. Dalam pembangunan infrastruktur masih lemahnya tata kelola dan koordinasi antar lembaga
61. Kurangnya pendanaan untuk pembangunan infrastruktur dan menjaga kualitas serta keberlanjutan infrastruktur yang telah dibangun
62. Belum optimalnya pemanfaatan infrastruktur yang sudah ada
63. Belum terpenuhinya kebutuhan atas hunian layak dan terjangkau
64. Terbatasnya rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang aman dan berkelanjutan
65. Masih tingginya rumah tangga yang mempraktikkan Buang Air Besar Sembarangan (BABS)
66. Sarana dan prasarana dasar belum berketahanan bencana
67. Keterbatasan prasarana untuk memanfaatkan potensi air
68. Pelayanan tenaga listrik belum optimal dan berkelanjutan
69. Konektivitas laut dan penyeberangan serta konektivitas udara yang menjadi tulang punggung angkutan barang dan penumpang antar pulau belum optimal
70. Masih terbatasnya sistem angkutan umum massal
71. Masih belum meratanya jangkauan jaringan internet
72. Belum efektifnya upaya menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran
73. Belum konsistensinya antara perencanaan pembangunan nasional, K/L/D serta konsistensi pencapaian sasaran jangka panjang
74. Keterbatasan pembiayaan untuk memenuhi percepatan dan peningkatan kebutuhan pembangunan dari sektor publik pusat dan daerah, serta non publik
75. Belum berkembangnya inovasi pembiayaan pembangunan
76. Tingginya *cost of fund*
77. Dangkalnya sektor keuangan
78. Belum optimalnya fungsi intermediasi dan inklusi keuangan

3.3. Telaah Isu RPJPD Provinsi Jawa Timur 2025-2045

Telaah RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota/Kabupaten merupakan tindak lanjut terhadap keterkaitan perencanaan Pemerintah provinsi terhadap perencanaan daerah Kabupaten/Kota dimana Kabupaten Pacitan merupakan bagian dari Provinsi Jawa Timur maka dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2045 perlu memperhatikan dan memperhitungkan perencanaan yang tersusun dalam rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur. Berikut adalah identifikasi isu strategis di Jawa Timur dalam rentang waktu pembangunan di Tahun 2025-2045 :

1. Penguatan Ekonomi Daerah Melalui Peningkatan Produktivitas, Daya Saing dan Nilai Tambah Sumber Daya Lokal



Isu strategis mengenai penguatan ekonomi daerah meliputi peningkatan produktivitas dan nilai tambah sumber daya lokal dalam rangka menggerakkan perekonomian regional, memanfaatkan potensi lokal secara maksimal, serta mengoptimalkan sumber daya ekonomi melalui peningkatan akses pembiayaan, kapasitas sumber daya manusia, dan perluasan akses pasar. Langkah-langkah holistik dan berkelanjutan diperlukan untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang kuat, inklusif, dan berdaya saing, serta memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi regional dan nasional secara keseluruhan.

2. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur yang Berkelanjutan

Ketersediaan Infrastruktur di Jawa Timur masih memerlukan peningkatan dari aspek kualitas maupun pemerataan. Infrastruktur pelayanan dasar, sumber daya air, maupun transportasi yang terintegrasi dengan penataan ruang termasuk mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pengurangan risiko bencana dan krisis iklim dibutuhkan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas sumber daya lokal guna mendukung penguatan ekonomi daerah.

3. Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Sosial Dasar

Pemenuhan kebutuhan sosial dasar, khususnya pemenuhan layanan pendidikan, kesehatan, perumahan serta peningkatan lapangan kerja, penanganan stunting, dan penanggulangan kemiskinan, menjadi isu strategis karena memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan suatu masyarakat.

4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, Kepedulian Sosial dan Nilai-Nilai Budaya Lokal

Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dengan menciptakan insan yang berkualitas dimulai dari usia dini hingga usia kerja dengan peningkatan relevansi serta daya saing pendidikan dan pelatihan, pelibatan dunia Industri dan dunia usaha dalam pengembangan vokasi, serta penguasaan adopsi teknologi dan penciptaan inovasi. Kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal mencerminkan pentingnya memahami, menghargai, dan memelihara identitas budaya suatu masyarakat dalam konteks globalisasi dan perubahan sosial. Kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal membentuk fondasi kuat untuk membangun masyarakat yang beragam namun tetap kokoh dalam solidaritas, menciptakan keseimbangan antara globalisasi dan keberlanjutan budaya lokal.



5. Pemerataan Kemandirian Pangan dan Pemanfaatan Potensi Energi Baru Terbarukan

Pemerataan kemandirian pangan dan pemanfaatan potensi energi baru terbarukan diperlukan untuk mendukung ketahanan nasional dan daerah serta menjawab tantangan krisis pangan global dan perubahan iklim. Pemerataan kemandirian pangan mengacu pada upaya untuk menyediakan akses yang merata terhadap pangan yang cukup, bergizi, dan aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Kemandirian dan ketahanan pangan ditopang oleh 3 (tiga) pilar: ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Hilirisasi produksi pangan dari pertanian dan perikanan menjadi kebutuhan Jawa Timur ke depan, terutama mengingat bahwa Jawa Timur merupakan provinsi lumbung pangan nasional. Produksi pangan Jawa Timur dikembangkan dengan irian pangan juga perlu diupayakan melalui pengembangan kawasan sentra produksi agro (hulu) dan pengembangan SDM agro. Hal ini penting untuk menjaga keberlanjutan dan meningkatkan produksi pangan, serta mengoptimalkan input hilirisasi pangan/agro yang akan meningkatkan kesejahteraan petani.

Pemanfaatan potensi energi mencakup optimalisasi penggunaan sumber daya energi yang tersedia, termasuk energi terbarukan, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa merusak lingkungan. Untuk itu dalam rangka mendukung komitmen antisipasi perubahan iklim dan Pembangunan berkelanjutan, maka ketahanan energi, transisi energi serta penguatan Kerjasama untuk pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) menjadi perhatian khusus di Jawa Timur. Penting untuk menciptakan kebijakan dan strategi pembangunan yang mempertimbangkan interkoneksi antara produksi pangan dan sumber daya energi. Dengan demikian, dapat tercipta lingkungan yang berkelanjutan, mandiri, dan berdaya saing mendunia bagi masyarakat lokal dan wilayah secara keseluruhan.

6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kapasitas Penanggulangan Bencana.

Ancaman terhadap penurunan daya dukung dan daya tampung cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya tekanan terhadap lingkungan yang berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penduduk serta aktivitas perekonomian termasuk pertumbuhan kawasan perumahan dan permukiman, serta industri dan perdagangan. Hal ini tidak terlepas bahwa setiap aktivitas perekonomian akan menghasilkan limbah baik yang bersifat B3 maupun non B3 yang berpotensi menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan hidup baik air, tanah, maupun udara. Di sisi lain, peningkatan aktivitas perekonomian merupakan penyumbang peningkatan emisi Gas



Rumah Kaca (GRK) sebagai salah satu penyebab terjadinya perubahan iklim yang perlu diantisipasi.

Indikasi terjadinya perubahan iklim saat ini secara langsung mulai terasa dan ditandai dengan adanya kenaikan temperatur serta curah hujan yang ekstrem. Perubahan iklim merupakan ancaman besar bagi keberlangsungan berbagai sektor kehidupan termasuk sektor perekonomian, kesehatan, sosial, dan sebagainya. Laju emisi Gas Rumah Kaca (GRK) akan terus meningkat secara eksponensial jika intervensi kebijakan terhadap perubahan iklim tidak dilakukan atau Business As Usual (BAU). Empat sektor prioritas diperkirakan bisa mengalami kerugian yang cukup signifikan akibat perubahan iklim adalah yaitu sektor pesisir dan laut, sektor pertanian, sektor kesehatan, serta sektor sumber daya air. Kejadian bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, gelombang pasang, dan puting beliung sebagai ancaman dari perubahan iklim mendominasi kejadian bencana di Indonesia termasuk di Jawa Timur.

Peningkatan kapasitas dalam hal kesiapsiagaan dengan melibatkan pengembangan sistem peringatan dini yang efektif dan merata, pelatihan masyarakat untuk merespon cepat ketika bencana terjadi, serta simulasi dan latihan evakuasi sangat dibutuhkan. Peningkatan kapasitas ketangguhan terhadap bencana dan kesiapsiagaan dalam pengurangan risiko bencana pada pembangunan berkelanjutan juga perlu dilaksanakan dengan mengintegrasikan rencana penanggulangan bencana ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

7. Optimalisasi Penanganan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat serta Penguatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Isu ini menitik beratkan upaya untuk meningkatkan pelayanan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat dan pada saat yang sama memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik. Penguatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah dan pelayanan publik difokuskan untuk perbaikan kualitas tata kelola pemerintahan dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan serta menyederhanakan prosedur administratif dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Proses birokrasi yang rumit dapat menjadi sumber ketidakpuasan masyarakat, sehingga penyederhanaan prosedur, pemantauan dan evaluasi regulasi dan pelayanan yang efisien menjadi sangat penting. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pengembangan SDM di sektor publik juga menjadi sangat penting. Pendidikan, pelatihan, dan bentuk pengembangan kompetensi lainnya bagi pegawai pemerintah dapat meningkatkan kapasitas dan profesionalisme sehingga dapat memberikan pelayanan yang berkualitas. Optimalisasi



penanganan gangguan Trantibumlinmas sejalan dengan penguatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik merupakan langkah esensial untuk menciptakan lingkungan sosial yang aman dan adil agar tidak terjadi konflik sosial.

Penguatan Trantibumlinmas tentunya terfokus pada pemusatan data gangguan dan kegiatan dengan menggunakan sistem informasi, serta melibatkan peran serta masyarakat dalam memberikan informasi melalui saluran pengaduan, sehingga integrasi data dan penanganan gangguan Trantibumlinmas di Jawa Timur dapat dioptimalkan. Potensi terjadinya gangguan Trantibumlinmas juga menjadi perhatian khususnya dalam proses demokrasi sehingga peran pemerintah dalam hal peningkatan kelembagaan dan pembudayaan nilai – nilai pancasila.

3.4. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Selain mempertimbangkan aspek spasial dengan adanya penelaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pacitan ini juga memperhatikan aspek keberlanjutan dalam Pembangunan daerah, Komitmen pada aspek keberlanjutan tersebut diwujudkan melalui bagian yang secara khusus menelaah hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Kabupaten Pacitan 2025-2045 ini. KLHS RPJPD Pacitan 2025-2045 sendiri merupakan dokumen yang berisi kajian terhadap Pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Pacitan terutama dari segi daya dukung daya tampung lingkungan hidup (*carrying capacity*) maupun dari segi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).

Berdasarkan hasil kajian, berikut merupakan permasalahan/isu yang berhasil diidentifikasi dari indikator-indikator TPB/SDGs yang belum tercapai:

Tabel 3. 1 Telaah KLHS RPJPD Kabupaten Pacitan Tahun 2025 - 2045

No.	Nomor Indikator	Indikator SDG's	Permasalahan
1	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Masih tingginya angka kemiskinan
2	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Keikutsertaan masyarakat dalam jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan masih belum optimal
3	1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan.	Masih banyak rumah tangga yang tergolong ke dalam rumah tangga miskin
4	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Belum meratanya akses terhadap layanan sumber air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan



No.	Nomor Indikator	Indikator SDG's	Permasalahan
5	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan yang masih belum merata
6	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Masih tingginya jumlah korban meninggal dan hilang akibat dampak bencana
7	1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	Peningkatan jumlah daerah bencana yang mendapatkan pendidikan layanan khusus masih rendah
8	1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	Tingkat risiko bencana masih cukup tinggi
9	1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Belum optimalnya pengeluaran (belanja) untuk layanan pokok pemerintah
10	2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Masih rendahnya proporsi penduduk dengan asupan kalori minimal
11	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Masih banyak terdapat prevalensi malnutrisi pada balita
12	2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Jumlah ibu hamil yang mengalami anemia masih tinggi
13	2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Kualitas konsumsi pangan (skor Pola Pangan Harapan) yang belum optimal
14	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Masih terdapat kelahiran yang ditolong bukan oleh tenaga kesehatan terlatih
15	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Meningkatnya Prevalensi tekanan darah tinggi
16	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Rendahnya PUS yang menggunakan alat kontrasepsi modern
17	3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	Penggunaan MKJP cara modern masih rendah
18	3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Peran serta masyarakat atau keikutsertaan masyarakat pada Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih belum merata
19	4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Peningkatan SMP/MTs yang terakreditasi B masih lambat
20	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Partisipasi sekolah pada jenjang SD/MI/ Sederajat masih belum optimal



No.	Nomor Indikator	Indikator SDG's	Permasalahan
21	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	Partisipasi sekolah jenjang SMP/MTs/ Sederajat masih belum optimal
22	4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun.	Rata-rata lama sekolah penduduk yang berusia ≥ 15 tahun masih rendah
23	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun.	Angka melek aksara penduduk masih rendah
24	4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Angka melek aksara penduduk masih rendah
25	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Masih minimnya ketersediaan kebijakan yang mendukung pemberdayaan perempuan
26	5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan masih rendah
27	5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Median usia kawin pertama perempuan yang masih rendah
28	5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Unmet need KB masih di atas standart
29	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Akses terhadap layanan sumber air minum layak yang belum merata
30	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Masyarakat yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan yang masih rendah
31	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Akses terhadap layanan sanitasi layak yang masih belum merata
32	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Masih terdapat desa/kelurahan yang belum melaksanakan STBM
33	6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	Belum terlaksananya pemberian insentif penghematan air pertanian/ perkebunan dan industri
34	6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	Belum terdapat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau
35	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	IRBI masih tinggi
36	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Kapasitas penanganan sampah perkotaan masih rendah
37	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Belum seluruhnya jumlah limbah B3 terkelola
38	12.5.1.(a)	Jumlah timbunan sampah yang didaur ulang.	Masih banyak jumlah timbunan sampah yang tidak didaur ulang
39	8.1.1.(a)	PDB per kapita.	Nilai output dari aktivitas ekonomi yang dihasilkan oleh setiap penduduk dalam satu tahun masih rendah



No.	Nomor Indikator	Indikator SDG's	Permasalahan
40	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	TPT masih meningkat
41	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	Rendahnya wisatawan mancanegara
42	9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	Anggaran riset pemerintah daerah masih rendah
43	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Menurunnya pendapatan pemerintah
44	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Penerimaan pajak daerah yang diterima oleh pemerintah daerah masih rendah
45	17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Belum terlaksananya kerjasama dengan Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)
46	17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	Penggunaan data dan informasi BPS oleh konsumen tidak mengalami peningkatan
47	17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	Persentase indikator SDG's yang relevan dengan target belum mengalami peningkatan
48	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Proporsi pengeluaran utama pemerintah yang disetujui mengalami penurunan
49	16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Penerapan E-procurement oleh pemerintah daerah yang belum optimal
50	16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik yang masih belum optimal

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Pacitan Tahun 2025 - 2045

Selain berhasil mengidentifikasi 50 permasalahan/ isu dari capaian TPB, KLHS RPJPD Kabupaten Pacitan 2025-2045 juga telah mengidentifikasi permasalahan/ isu yang berkaitan dengan muatan KLHS yang meliputi Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, Perkiraan mengenai Dampak dan Risiko Lingkungan Hidup, Kinerja Layanan/ Jasa Ekosistem, Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi terhadap Perubahan Iklim, serta Intensitas Wilayah Bencana Alam. Isu/Permasalahan yang berkaitan aspek-aspek tersebut secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 2 Permasalahan / Isu KLHS RPJPD Kabupaten Pacitan Tahun 2025 – 2045

No.	Aspek Pembahasan	Permasalahan/ Isu
1	Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Daya dukung lahan kawasan terbangun berstatus bersyarat, sehingga pembangunan mulai harus dititikberatkan pada aspek upaya konservasi
2	Perkiraan mengenai Dampak dan Risiko Lingkungan Hidup	Indeks kualitas air masih rendah Kapasitas penanganan sampah perkotaan masih rendah



No.	Aspek Pembahasan	Permasalahan/ Isu
3	Kinerja Layanan/ Jasa Ekosistem	Jasa ekosistem air bersih berstatus sedang, sehingga membutuhkan upaya konservasi sumber daya air
		Jasa Ekosistem Fungsi Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup Kabupaten Pacitan berstatus sangat rendah
4	Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	-
5	Intensitas Wilayah Bencana Alam	Risiko bencana TINGGI adalah pada bencana tsunami

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Pacitan Tahun 2025 - 2045

Permasalahan/ isu yang berhasil teridentifikasi tersebut kemudian diinventarisasi menjadi *short list* atau daftar pendek lantas dibobotkan sesuai dengan keselarasannya pada beberapa aspek seperti 1.) Karakteristik Wilayah; 2.) Tingkat pentingnya potensi dampak; 3.) Keterkaitan antar isu strategis Pembangunan Berkelanjutan; 4.) Keterkaitan dengan materi muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program; 5.) Muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan/atau 6.) Hasil KLHS dari Kebijakan, Rencana, dan/atau Program pada hirarki di atasnya, sehingga dapat ditarik 8 Isu Strategis KLHS RPJPD Kabupaten Pacitan yaitu

1. Pengentasan Kemiskinan;
2. Pemenuhan Gizi dan Ketersediaan Pangan yang Berkualitas dan Beragam;
3. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat
4. Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi;
5. Ketersediaan dan Aksesibilitas Terhadap Air Bersih/Air Minum Layak dan Berkelanjutan;
6. Pemerataan Akses terhadap Layanan Sanitasi Layak;
7. Mitigasi Risiko Bencana dan Peningkatan Kapasitas Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap Bencana;
8. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Partisipasi Masyarakat.
9. Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

9 Isu strategis yang berhasil ditarik dari permasalahan/ isu KLHS tersebut selanjutnya dilakukan pengintegrasian dan penyelarasan terhadap Dokumen RPJPD Kabupaten Pacitan Tahun 2025 – 2045 terutama dalam proses penarikan Isu Strategis RPJPD. Pengintegrasian KLHS RPJPD ke dalam Dokumen RPJPD Kabupaten Pacitan dilaksanakan dengan tujuan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam penyusunan RPJPD



Kabupaten Pacitan, serta dalam rangka meningkatkan kualitas substansi RPJPD Kabupaten Pacitan.

3.5. Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan Pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/Masyarakat) di masa depan. Pada dasarnya identifikasi terkait isu strategis merupakan inti dari proses perencanaan strategis. Dengan adanya isu strategis maka Lembaga khususnya pemerintah daerah atau pemerintah pusat akan dapat mengelompokkan dan melaksanakan proses perencanaan strategis untuk kebutuhan masa depan. Oleh karena itu isu strategis masih dinilai sangat penting untuk kebutuhan pengambilan keputusan politis. Pengambilan keputusan politis sendiri selalu beranjak dari isu-isu yang dimulai atau ada dalam Masyarakat, pengambilan keputusan politis tidak bisa serta merta tanpa landasan pengambilan keputusan.

Adanya disposisi Rencana Pembangunan Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, membuat pemerintah daerah membutuhkan rangkaian pemetaan isu strategis untuk pengambilan keputusan. Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah berisikan tentang visi misi dan juga arah Pembangunan daerah dalam jangka waktu 20 tahun ke depan. Untuk itu kesepakatan dan juga komitmen Pembangunan dibutuhkan di dalamnya, dengan mengusung terkait isu strategis yang ada di daerah tersebut. Perencanaan Pembangunan sendiri dapat diartikan sebagai proses pemikisan yang mengarahkan pada sumber-sumber Pembangunan secara efektif dan efisien. Selain itu berbagai alternatif yang dianggap sebagai alternatif terbaik digunakan untuk mencapai tujuan di masa depan. Pemilihan alternatif yang paling baik diharapkan mampu mencapai suatu tujuan yang berguna bagi kualitas Pembangunan kedepannya.

Kabupaten Pacitan merupakan salah satu pemerintah daerah yang telah membuat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Sebelum memasuki perencanaan strategis Kabupaten Pacitan telah berhasil mengidentifikasi isu-isu strategis sebagai dasar dalam membuat perencanaan strategis. Penyajian dalam isu strategis ini telah disusun dan difaramingkan sesuai dengan isu global, nasional dan regional yang nantinya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung. Adapun isu-isu strategis yang sudah berhasil diidentifikasi di Kabupaten Pacitan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Layanan dan Sarpras Kesehatan
Kesehatan merupakan salah satu urusan wajib dasar yang memiliki standart pelayanan minimum dalam pemberian pelayanan kepada Masyarakat. Adanya standart pelayanan minimum ini memberikan dorongan bahkan mewajibkan seluruh ASN maupun pegawai non ASN yang bekerja dalam bidang Kesehatan untuk memberikan pelayanan



yang sesuai dengan SPM. Akan tetapi beberapa daerah masih mengeluhkan terkait kurangnya sarana prasarana Kesehatan sehingga tidak dapat memaksimalkan pelayanan kepada Masyarakat. Kurangnya sarana prasarana dapat memberikan efek pelayanan yang tepat, cepat dan akurat kepada Masyarakat. Dengan meningkatnya pasien yang memeriksakan dirinya di unit Kesehatan yang ada di daerah maka kebutuhan akan sarana prasana semakin meningkat. Sedangkan pemerintah daerah tidak dapat menyediakan kebutuhan tersebut, sehingga banyaknya kasus terkait reschedule jadwal operasi karena kekurangan ruangan operasi. Hal inilah yang membuat kualitas pelayanan pada sektor Kesehatan memerlukan peningkatan. Apabila dilihat dari jumlah tenaga Kesehatan yang ada di Pacitan di tahun 2019 jumlah dokter hanya berkisar 45, jumlah perawat 343, bidang 271, farmasi 32 dan ahli gizi 41. Sedangkan jumlah rumah sakit di tahun 2019 hanya sebanyak 2 rumah sakit, 2 rumah sakit bersalin, 10 poliklinik, 26 puskesmas, 53 puskesmas pembantu, dan 26 apotik. Jumlah ini cenderung kecil apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Pacitan 586,110 ribu jiwa. Oleh karena itu untuk meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan maka pemerintah kabupaten pacitan memerlukan pemenuhan sarana prasarana Kesehatan.

2. Peningkatan Kualitas Mutu dan Akses Pendidikan Berkarakter
Mutu Pendidikan yang berkarakter mengacu pada kualitas Pendidikan. Kualitas Pendidikan sendiri dapat dilihat dari beberapa aspek yakni aspek akademis dan pembentukan karakter, Dalam pemenuhan aspek tersebut maka dibutuhkannya peningkatan standar Pendidikan, metode pengajaran, serta pengembangan karakter pada peserta didik. Sedangkan Pendidikan karakter mencakup Pendidikan yang berkualitas serta dapat mengintegrasikan nilai-nilai moral dan etika dalam proses pembelajaran. Dengan demikian pendidikan berkarakter tidak hanya menekankan pada aspek akademis tetapi juga mencakup pembentukan karakter yang baik dan memiliki nilai-nilai positif pada peserta didik. Pendidikan di Indonesia saat ini memiliki isu yang berkepanjangan terkait karakter peserta didik yang semakin lama mengalami kemerosotan. Oleh karena itu kualitas mutu Pendidikan serta akses kedalam Pendidikan perlu diperhatikan dan dikaji lebih jauh. Kabupaten Pacitan memiliki jumlah penduduk dalam usia sekolah lebih tinggi, dengan meningkatkan kualitas mutu dan akses Pendidikan maka dapat membantu mengembangkan daya saing SDM yang ada di Kabupaten Pacitan yang mampu bersaing dengan daerah lainnya.



3. **Potensi Tingginya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan**
Tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan sosial merupakan isu nasional bahkan masuk dalam ranah isu global. Isu ini mempengaruhi dan memberikan dampak negatif untuk Masyarakat dan Pembangunan daerah. Adanya kemiskinan dan kesenjangan sosial dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan dapat memicu ketidakstabilan sosial. Isu strategis terkait kemiskinan tidak hanya terjadi pada Kabupaten Pacitan, akan tetapi juga terjadi pada daerah-daerah lainnya. Wilayah Kabupaten Pacitan yang cukup jauh dari jangkauan lokasi kota-kota besar membuat adanya kesenjangan pada masyarakatnya. Selain itu adanya pandemic covid ditahun 2019-2021 membuat perekonomian di Kabupaten Pacitan mengalami pelemahan sehingga angka kemiskinan meningkat. Jumlah dan jenis pekerjaan yang ada di Kabupaten Pacitan juga berperan dalam meningkatkan perekonomian daerah, akan tetapi jenis pekerjaan yang dapat ditemui di Kabupaten pacitan tidak seberagam dengan jenis pekerjaan yang ada di kota-kota besar. Oleh karena itu untuk meningkatkan perekonomian keluarga, Masyarakat akan cenderung mencari pekerjaan di luar Kabupaten Pacitan.
4. **Pemerataan Pembangunan dan Infrastruktur berkelanjutan yang memperhatikan Lingkungan**
Pemerataan Pembangunan infrastruktur memiliki peranan penting dalam peningkatan perekonomian daerah, akan tetapi Pembangunan infrastruktur berkelanjutan harus memperhatikan lingkungan agar tidak terjadi kerusakan lingkungan pada masa depan. Pembangunan infrastruktur yang memperhatikan lingkungan dapat mencakup penggunaan teknologi dan material ramah lingkungan, konservasi sumber daya alam, mitigasi terhadap perubahan iklim, serta memperhatikan aspek sosial dan budaya masyarakat. Prinsip ini juga mencakup pengembangan infrastruktur hijau, yang melibatkan penataan ruang dengan memperhatikan aspek perlindungan, penghematan, dan pengurangan penggunaan sumber daya alam. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan dan berkelanjutan diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang seimbang. Kondisi lingkungan di Kabupaten Pacitan dibandingkan dengan daerah lain terbilang subur dan masih terdapat lahan hijau. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Pacitan berusaha untuk membuka daerahnya untuk investor dan memperbanyak jenis pekerjaan serta lapangan pekerjaan untuk masyarakatnya. Berdasarkan isu SDG's, Daya dukung lahan kawasan terbangun berstatus bersyarat, sehingga pembangunan mulai harus dititikberatkan pada aspek upaya konservasi. Selain itu masih terdapat isu Indeks kualitas air yang masih rendah dan



Kapasitas penanganan sampah perkotaan masih rendah. Sedangkan Jasa ekosistem air bersih berstatus sedang, sehingga membutuhkan upaya konservasi sumber daya air serta Jasa Ekosistem Fungsi Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup Kabupaten Pacitan berstatus sangat rendah. Pembangunan di Kabupaten Pacitan harus memperhatikan Risiko bencana TINGGI adalah pada bencana tsunami.

5. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan adaptif
Tata Kelola pemerintahan yang efektif dan adaptif mampu membawa kemajuan untuk daerah dan dapat memberikan pelayanan yang baik pada Masyarakat. Adanya keteraturan pada pemerintahan dapat merujuk pada kemampuan pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsinya secara efektif, efisien, dan responsif terhadap perubahan, serta mampu beradaptasi dengan dinamika lingkungan yang terus berubah. Tata Kelola pemerintahan ini sangat dibutuhkan untuk perkembangan dimasa mendatang. Untuk menjadikan tata Kelola pemerintahan yang efektif dan adaptif maka cakupan dalam kemampuan pengelolaan perubahan, berinovasi, dan menyesuaikan diri dengan tuntutan dan kebutuhan yang berkembang, serta tetap mempertahankan standar kinerja yang tinggi membutuhkan kerja keras bahkan komitmen perubahan dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, untuk dapat Menyusun kebijakan yang sesuai dengan dinamika sosial ekonomi serta politik pada masa mendatang maka pemerintah Kabupaten Pacitan memerlukan komitmen dan kekonsistenan untuk menjadikan tata Kelola pemerintahannya menjadi pemerintahan yang efektif dan adaptif. Apabila pemerintah Kabupaten Pacitan tidak mampu merubah kondisi/iklim dalam pemerintahannya maka untuk mencapai pemerintahan yang mampu beradaptasi dan mampu menjalankan fungsi-fungsinya secara efektif efisien akan sulit dengan kondisi masa mendatang yang penuh dengan konflik sosial ekonomi serta politik nasional dan global.
6. Pengembangan Pariwisata tematik
Pariwisata tematik merupakan jenis pariwisata yang menawarkan pengalaman wisata yang berfokus pada tema atau topik tertentu, seperti budaya, sejarah, alam, atau olahraga. Pariwisata tematik bertujuan untuk memberikan pengalaman wisata yang lebih mendalam dan berkesan bagi wisatawan, serta meningkatkan daya tarik wisata suatu daerah. Dalam pengembangan pariwisata tematik, perlu diperhatikan aspek-aspek seperti pengembangan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, dan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan demikian, pengembangan pariwisata tematik yang berkelanjutan



dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang seimbang bagi suatu daerah.

7. Daya Saing Usaha Berbasis Digital

Daya saing usaha berbasis digital merupakan kemampuan usaha untuk mengembangkan dan mengoperasikan bisnis melalui teknologi digital, seperti internet, smartphone, dan aplikasi. Hal ini memungkinkan usaha memiliki konsumen yang lebih luas (diluar daerah), menghemat biaya promosi, dan mengembangkan layanan yang lebih efektif dan efisien. Daya saing usaha berbasis digital juga memungkinkan usaha untuk beradaptasi dengan cepat dengan perkembangan teknologi dan perubahan pasar. Dengan demikian, usaha berbasis digital dapat menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan daya saing dalam bisnis. Melihat letak geografis Kabupaten Pacitan, peningkatan daya saing usaha yang berbasis digital merupakan hal yang sangat dibutuhkan untuk Masyarakat dapat mengembangkan usahanya diluar Kabupaten Pacitan.

8. Penerapan teknologi dan Hilirisasi sektor pertanian

Hilirisasi dalam sektor pertanian, peternakan, dan merujuk pada upaya untuk meningkatkan nilai tambah dari produk melalui proses pengolahan dan pemasaran. Hilirisasi pada ketiga sektor tersebut bertujuan untuk meningkatkan daya saing pada pasar global dan meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan. Upaya hilirisasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pengembangan industri pengolahan, pengembangan jaringan distribusi, dan pengembangan pasar ekspor. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam ketiga sektor tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pertanian, dan digunakan untuk memantau kondisi tanaman atau hewan, penggunaan aplikasi untuk manajemen peternakan, dan penggunaan teknologi pengolahan pangan yang lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, pengembangan hilirisasi dan penerapan teknologi yang tepat dapat membantu meningkatkan daya saing sektor pertanian, peternakan, dan , serta meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan. Hal ini perlu untuk diterapkan di Kabupaten Pacitan mengingat potensi Perkebunan, pertanian serta yang belum dimaksimalkan dan dapat menjadi produk utama untuk peningkatan perekonomian.

9. Pengembangan kawasan industri

Pengembangan kawasan industri memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan berkembangnya Kawasan



industri dalam suatu daerah maka dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan mendorong pertumbuhan sektor manufaktur. Selain itu daerah dengan Kawasan industri yang berkembang dengan baik dapat menarik investasi dari dalam maupun luar negeri, serta dapat memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Inovasi dan pengembangan teknologi baru, untuk meningkatkan daya saing industri nasional dapat dikembangkan guna memenuhi kebutuhan industri serta pengembangan infrastruktur jalan, listrik, dan air bersih, yang dapat memberikan manfaat bagi Masyarakat. Dengan demikian, pengembangan kawasan industri memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah, dan dapat memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan daya saing ekonomi, investasi, inovasi, dan infrastruktur. Perkembangan dan kemandirian daerah juga dapat dipengaruhi dengan meningkatnya Kawasan industri oleh karena itu, untuk mencapai pengembangan Kawasan industri maka Kabupaten Pacitan memerlukan SDM yang berkualitas serta potensi lainnya yang dapat ditawarkan kepada investor untuk menarik investasi dalam sektor industri.

10. Internalisasi nilai-nilai kebudayaan local
kebudayaan lokal saat ini bukan menjadi kebudayaan yang selalu digunakan bahkan diidam-idamkan masyarakat. Masuknya kebudayaan baru di Indonesia membuat kebudayaan lokal mulai mengalami kepunahan. Hal ini juga ditunjang dengan aktivitas pemuda yang lebih mengutamakan atau menyukai budaya luar baik dari seni musik, pakaian adat, makanan hingga bahasa yang digunakan. Apabila permasalahan ini tidak segera diatasi maka kebudayaan lokal akan mulai menghilang seiring dengan berjalannya waktu. Internalisasi nilai kebudayaan lokal merujuk pada upaya untuk memperkenalkan, memahami, dan menghargai nilai-nilai kebudayaan lokal suatu daerah, serta mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan, seni, budaya, dan kegiatan sosial. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperkuat identitas budaya suatu daerah, meningkatkan rasa bangga dan cinta tanah air, serta memperkaya pengalaman dan pengetahuan masyarakat tentang kebudayaan lokal. Dalam konteks pembangunan daerah, internalisasi nilai kebudayaan lokal juga dapat menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat daya saing daerah.

Isu-isu strategis diatas merupakan isu yang ada di Kabupaten Pacitan dan apabila dilevelingkan maka 10 isu strategis memerlukan perhatian dan penanganan



husus. Isu strategis diatas lebih berorientasi pada masa depan dan berpotensi menjadi masalah atau peluang di masa yang akan datang. Penentuan isu strategis dilakukan dengan mempertimbangkan jenis dokumen yang akan disusun, seperti dokumen jangka panjang, jangka menengah, atau jangka pendek. Oleh karena itu untuk mencegah isu tersebut menjadi masalah yang tidak dapat dipecahkan dimasa mendatang maka diperlukannya kebijakan, program dan kegiatan yang dikhususkan untuk mengurangi dan meminimalisir pertumbuhan isu yang lebih besar terjadi di masa mendatang.

Tabel 3. 3 Keterkaitan Isu Nasional, Isu Provinsi, Isu KLHS, dan Isu Kabupaten Pacitan

ISU NASIONAL	ISU PROVINSI	ISU KLHS	ISU KAB. PACITAN
Rendahnya tingkat produktivitas di Tengah persaingan global yang semakin meningkat	Penguatan Ekonomi Daerah Melalui Peningkatan Produktivitas, Daya Saing dan Nilai Tambah Sumber Daya Lokal		Pengentasan Kemiskinan
Lemahnya kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN)			Pengembangan kawasan industri
Kuantitas dan kualitas SDM peneliti belum memadai		Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi;	
Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi laut			
Produktivitas tenaga kerja Indonesia semala kurun waktu 2010 – 2022 masih relative tertinggal			
Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata			Pengembangan Pariwisata tematik
Rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi			Daya Saing Usaha Berbasis Digital
Deindustrialisasi Dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah	Pemerataan Kemandirian Pangan dan Pemanfaatan Potensi Energi Baru Terbarukan	Pemenuhan Gizi dan Ketersediaan Pangan yang Berkualitas dan Beragam;	Penerapan teknologi dan Hilirisasi sektor pertanian
Pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan	Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan	Potensi Tingginya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan



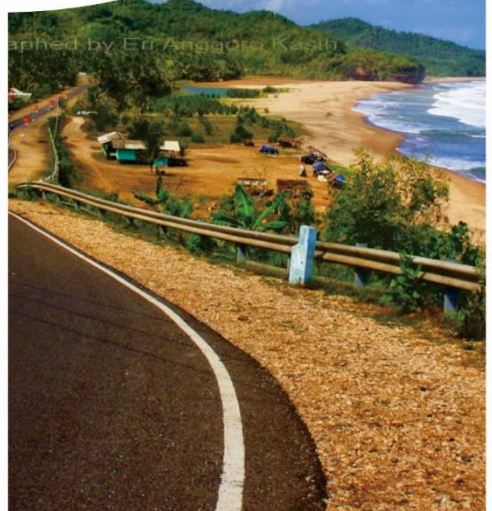
ISU NASIONAL	ISU PROVINSI	ISU KLHS	ISU KAB. PACITAN
	yang Berkelanjutan	Partisipasi Masyarakat.	
Infrastruktur dan literasi digital masih terbatas			
Belum optimalnya integrasi ekonomi domestik, sehingga keterkaitan ekonomi antar wilayah masih relative terbatas			
Tuntutan perencanaan yang baik untuk menciptakan kota yang layak huni		Ketersediaan dan Aksesibilitas Terhadap Air Bersih/Air Minum Layak dan Berkelanjutan	
		Pemerataan Akses terhadap Layanan Sanitasi Layak;	
Kesenjangan Pembangunan sarana prasarana antara dasar antara jawa dan luar jawa			
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kapasitas Penanggulangan Bencana.		Mitigasi Risiko Bencana dan Peningkatan Kapasitas Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap Bencana	
Pembanguunan Kesehatan yang dihadapi pada transisi demografi yang diiriingi mobilitas penduduk, urbanisasi, transisi epidemiologi dan perilaku hidup tidak sehat.	Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Sosial Dasar Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing,	Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Layanan dan Sarpras Kesehatan



ISU NASIONAL	ISU PROVINSI	ISU KLHS		ISU KAB. PACITAN
Belum meratanya akses untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan	Kepedulian Sosial dan Nilai-Nilai Budaya Lokal			
Pembangunan Pendidikan yang dihadapkan pada tantangan bonus demografi dan memenuhi kebutuhan SDM yang berkualitas untuk mendukung Pembangunan di berbagai sektor				Peningkatan Kualitas Mutu dan Akses Pendidikan Berkarakter
Produktivitas dan daya saing perguruan tinggi di tingkat global saat ini masih rendah				
Regulasi yang berlebih dan kualitas regulasi yang rendah		Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.		Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan adaptif
Kelembagaan instansi publik masih dicirikan dengan struktur yang terfragmentasi dan tidak efektif				
Belum terimplementasinya manajemen talenta secara merata di seluruh K/L/D				
Belum meratanya kualitas pelayanan publik				
partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan demokratisasi belum optimal	Optimalisasi Penanganan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat serta Penguatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			Internalisasi nilai-nilai kebudayaan local
Pancasila belum sepenuhnya diimplementasikan dalam norma dan praktik kehidupan, karakter dan jati diri bangsa				

BAB IV

VISI DAN MISI DAERAH



4.1. Telaah Visi Dan Misi RPJPN 2025-2045

RPJPD Tahun 2025-2045 diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Hal tersebut didasarkan pada prinsip hak asasi bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, Pemerintah Daerah harus menitikberatkan masyarakat sebagai penikmat dan pelaku pembangunan.

Visi Indonesia Emas 2045 diukur melalui 5 (lima) sasaran visi dan diwujudkan dalam 8 (delapan) misi (agenda) Pembangunan yang terdiri dari 3 (tiga) misi (agenda) transformasi, 2 (dua) landasan transformasi, dan 3 (tiga) kerangka implementasi transformasi. Kedelapan agenda tersebut dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) arah (tujuan) pembangunan yang diukur melalui 45 (empat puluh lima) indikator utama Pembangunan. Adapun angka yang terkandung dalam 8 misi (agenda) Pembangunan nasional, 17 arah (tujuan) Pembangunan nasional, dan 45 indikator utama Pembangunan, secara utuh mencerminkan semangat kemerdekaan negara kesatuan republic Indonesia pada tanggal proklamasi kemerdekaan 17 agustus 1945 yang berlandaskan Pancasila.

Gambar 4. 1 Kerangka Pikir RPJPN Tahun 2025 – 2045



Sumber: RPJPN Tahun 2025-2045

Gambar 4. 2 Visi Indonesia Emas 2045



Sumber: RPJPN Tahun 2025-2045

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan besar yang terletak di antara dua samudera besar, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Indonesia akan menjadi negara tangguh pada tahun 2045, yang memiliki kekuatan geopolitik, militer, dan geoekonomi serta peradaban maritim yang besar di kancah dunia.

1. Kekuatan geopolitik: Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya dan mengelola wilayah maritimnya secara efektif, serta menjalin hubungan kerja sama dengan negara-negara lain di kawasan dan dunia internasional.
2. Kekuatan militer: Indonesia memiliki kekuatan dalam bidang militer di seluruh matra, sehingga mampu melindungi wilayah Indonesia dari ancaman asing, mengamankan jalur pelayaran dan perbatasan, mengontrol perairan strategis, dan melaksanakan operasi militer dengan kekuatan besar.
3. Kekuatan geoekonomi: Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya ekonomi di wilayah maritimnya, serta memperkuat perekonomian domestik dan posisinya dalam perdagangan internasional, yang meliputi kemampuan untuk mengembangkan industri dan jasa terutama maritim, meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya alam, serta memperkuat hubungan perdagangan dengan negara-negara lain di kawasan dan dunia internasional.
4. Kekuatan peradaban maritim: Indonesia dan masyarakatnya mampu mempertahankan dan mengembangkan warisan budaya baharinya, yang meliputi nilai-nilai, tradisi, seni, dan budaya bahari yang merupakan aset penting dalam memperkuat identitas budaya dan daya saing bangsa di kawasan dan dunia internasional.

Bersatu

Pada Tahun 2045, NKRI akan memiliki kesatuan yang lebih kuat di seluruh wilayah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, sesuai dengan Pasal 1 UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seluruh wilayah Indonesia akan tunduk pada satu sistem hukum nasional yang memastikan hak dan kewajiban yang sama bagi setiap warga negara di seluruh negeri. Pemerintahan akan dijalankan secara



terpusat dengan satu pemerintahan nasional yang memegang kedaulatan dan otoritas tertinggi, sambil tetap mengakomodasi desentralisasi dan otonomi daerah untuk menjaga kohesi nasional. Walaupun memiliki keragaman budaya, Bahasa, dan adat istiadat, semua elemen tersebut akan dipersatukan oleh identitas nasional dan Pancasila sebagai dasar negara, mencerminkan semangat Bhineka Tunggal Ika yang lebih kokoh. Pembangunan ekonomi akan dilakukan secara merata di seluruh wilayah Indonesia untuk memastikan kesejahteraan seluruh rakyat, dengan kebijakan ekonomi nasional yang menciptakan pemerataan dan keadilan sosial, sehingga tercipta keseimbangan dan kesetaraan serta kesatuan yang kuat di seluruh wilayah Indonesia.

Berdaulat

Pada tahun 2045, Indonesia yang berdaulat adalah Indonesia sebagai negara kesatuan yang memiliki kemandirian dan kewenangan penuh untuk mengatur sendiri seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di wilayahnya.

1. Ketahanan: Indonesia semakin kuat dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, politik, pertahanan dan keamanan untuk melindungi kedaulatannya dari ancaman internal dan eksternal, serta mampu menghadapi berbagai tantangan global secara mandiri dan berkelanjutan. Indonesia memiliki kekuatan pertahanan dan keamanan yang tinggi untuk menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan negara di tengah perubahan geopolitik dan geomiliter.
2. Kesatuan: Indonesia mempertahankan jati dirinya sebagai NKRI yang menjunjung tinggi kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Berlandaskan kekuatan ini, Indonesia mempunyai kekuatan yang tangguh dalam menghadapi berbagai permasalahan dan dapat mempertahankan keutuhan wilayah serta persatuan bangsa. Secara nyata, Bhinneka Tunggal Ika tetap kukuh. Meskipun terdapat beragam suku, agama, dan budaya, Indonesia tetap satu dalam kesatuan sebagai bangsa Indonesia.
3. Mandiri: Indonesia yang mandiri tidak tergantung kepada negara lain, karena memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya sendiri, seperti pangan, energi dan produk-produk industri termasuk produk industri pertahanan keamanan. Indonesia juga mampu mengambil keputusan yang independen tanpa tergantung pada negara lain.
4. Aman: Indonesia mampu memberikan perlindungan dan keamanan bagi rakyatnya di segala aspek kehidupan, baik dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, agama, dan politik, maupun keamanan dalam negeri, sehingga memberikan lingkungan yang kondusif bagi rakyat untuk berkembang dan berkontribusi pada pembangunan negara secara aktif dan produktif. Rakyat juga memiliki kebebasan berpartisipasi dalam proses demokrasi dan mengeluarkan pendapat tanpa takut akan adanya intimidasi.

Maju

Pada tahun 2045, Indonesia sebagai negara maju, perekonomiannya mencapai posisi nomor lima terbesar dunia, berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Nusantara. Indonesia menjadi negara berdaya, modern, tangguh, dan adil, sehingga memiliki daya saing yang tinggi di kancah domestik dan global, ketahanan ekonomi yang kuat terhadap gejolak dan perubahan global serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat. Peran Indonesia semakin penting dalam berbagai forum internasional.



1. Beradab: Indonesia memiliki karakter dan jati diri sebagai bangsa yang besar, memiliki sumber daya manusia yang unggul, berbudaya maju, serta mampu berkontribusi pada peradaban dunia.
2. Berdaya: Indonesia memiliki kemampuan untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhannya, daya saing yang tinggi di kancah domestik dan global, ketahanan ekonomi yang kuat terhadap gejolak dan perubahan global, serta memiliki sistem keadilan sosial yang kuat. Indonesia juga memiliki kekuatan dalam berdiplomasi dan memengaruhi kebijakan internasional dengan memperjuangkan kepentingan nasionalnya.
3. Modern: Indonesia memiliki infrastruktur yang maju dan mutakhir, tata kelola yang transparan, serta sistem pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Indonesia juga mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya dengan teknologi dan layanan yang terkini, serta menjaga keberlangsungan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Rakyat Indonesia dapat bepergian dengan mudahnya karena ketersediaan infrastruktur konektivitas terpadu, nyaman, aman dan terjangkau. Infrastruktur ini didukung oleh teknologi modern dan inovatif yang memungkinkan rakyat Indonesia terhubung dengan dunia.
4. Inovatif: Indonesia memiliki sumber daya manusia berilmu pengetahuan dan teknologi terkini yang berkualitas untuk mendorong inovasi dalam berbagai sektor, serta mampu menciptakan produk dan layanan berkualitas dan efisien yang memiliki daya saing tinggi di pasar global. Dengan kemampuan ini, Indonesia memainkan peran penting dalam memecahkan berbagai masalah sosial dan lingkungan, serta menghadapi tantangan global yang kompleks di masa depan.
5. Tangguh: Indonesia memiliki kemampuan fisik, mental dan spiritual untuk menghadapi berbagai tantangan dan krisis dengan kemampuan yang kuat, baik dari segi ekonomi, sosial, politik, maupun keamanan. Indonesia juga memiliki sistem ketahanan nasional yang tangguh dalam menghadapi berbagai ancaman dari dalam dan luar negeri.
6. Adil: Rakyat Indonesia menikmati keadilan yang merata dalam segala aspek kehidupan, seperti dalam hal distribusi sumber daya, akses terhadap layanan publik, perlakuan yang sama di hadapan hukum, kesempatan bekerja, dan pendidikan tanpa diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tertentu. Rakyat Indonesia menikmati kehidupan yang sejahtera, dan nyaman dengan lingkungan yang aman. Semua rakyat Indonesia hidup layak didukung sistem jaminan sosial yang kuat.
7. Berkarakter: Bangsa Indonesia memiliki karakter yang bersumber dari jiwa Pancasila sehingga menjadi bangsa yang memiliki kepribadian dalam berkebudayaan Indonesia.

Berkelanjutan

Sebagai negara yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik. Kualitas hidup masyarakat Indonesia ditandai dengan kehidupan yang sejahtera secara merata, kesehatan dan pendidikan yang prima, serta lingkungan yang asri dan lestari, lingkungan permukiman hidup yang layak dan nyaman, bebas polusi udara, air, suara dan sampah, serta kondisi hutan, sungai, danau, dan laut beserta isinya terjaga dengan baik.

Gambar 4. 3 Lima Sasaran Utama Visi Indonesia Emas 2045



Sumber: RPJPN Tahun 2025-2045

Terwujudnya Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan tercermin dalam lima sasaran visi, yaitu: mencapai pendapatan per kapita setara negara maju, kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat, daya saing sumber daya manusia meningkat, dan intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju *net zero emission*.

- Sasaran pertama**, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan setara seperti negara maju sekitar USD23.000-30.300 dan masuk ke dalam ekonomi lima terbesar di dunia yang utamanya didorong oleh peningkatan kontribusi PDB industri manufaktur menjadi 28,0 persen dan PDB kemaritiman sebesar 15,0 persen berbasis inovasi serta secara inklusif dan berkelanjutan. Lapangan pekerjaan layak (*decent job*) yang tercipta akan meningkatkan jumlah penduduk berpendapatan menengah sekitar 80 persen.
- Sasaran kedua**, sejalan dengan peningkatan ekonomi yang tinggi, kesempatan kerja dan pendapatan kelas menengah meningkat, sehingga kemiskinan menuju nol persen pada kisaran 0,5-0,8 persen dengan memastikan bahwa pengukuran kemiskinan dapat mengukur kesejahteraan rakyat secara absolut dan peningkatannya dapat dibandingkan antar waktu dan antar wilayah. Ketimpangan pendapatan antar penduduk semakin menurun dengan Rasio Gini berkisar 0,290-0,320. Sementara itu, ketimpangan antarwilayah menurun dengan peningkatan kontribusi PDRB Kawasan Timur Indonesia menjadi 28,5 persen.
- Sasaran ketiga**, sejalan dengan kemajuan yang diraih oleh Indonesia, peran dan pengaruh di dunia internasional meningkat yang dicerminkan penguatan diplomasi internasional dan kepemimpinan global, pengaruh budaya, peran aktif dalam organisasi

internasional, serta berkontribusi terhadap penyelesaian isu-isu global yang diukur dengan Global Power Index (GPI) di peringkat 15 besar dunia.

4. **Sasaran keempat**, meningkatnya daya saing sumber daya manusia untuk kesejahteraan masyarakat yang dibentuk berdasarkan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara merata melalui peningkatan pendidikan, pelatihan dan pengembangan, sikap dan etos kerja, inovasi dan kreativitas, dan kesehatan yang utamanya diukur melalui peningkatan Indeks Modal Manusia (Human Capital Index) menjadi 0,73 pada tahun 2045.
5. **Sasaran kelima**, Indonesia berkomitmen kuat untuk melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan sekaligus ramah lingkungan dalam kerangka ekonomi hijau yang utamanya ditunjukkan oleh menurunnya Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca dibandingkan kondisi Tahun 2010 menjadi 93,5 persen pada Tahun 2045, dan meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menjadi 83,00 pada tahun yang sama.

Gambar 4. 4 17 (Tujuh Belas) Arah (Tujuan) Pembangunan



Sumber: RPJPN Tahun 2025-2045

Dalam rangka mewujudkan visi Indonesia emas 2045 diperlukan sinkronasi dan penyelarasan antara perencanaan Pembangunan nasional dan perencanaan Pembangunan daerah. Oleh karena itu, penyelarasan perencanaan Pembangunan jangka Panjang menjadi kunci bagi sinergi Pembangunan antara pusat dan daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlunya disusun suatu mekanisme dalam rangka penyelarasan RPJP Daerah tahun 2025-2045 terhadap RPJP nasional tahun 2025-2045.

1. Misi 1 Transformasi Sosial

Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera dan berdaya saing.



2. Misi 2 Transformasi Ekonomi
Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi iptek, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi dan keuangan syariah, pertanian, pariwisata, ekonomi biru dan bioekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global, serta pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan.
3. Misi 3 Transformasi Tatakelola
Mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegrasi dan adaptif.
4. Misi 4 Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia
Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan.
5. Misi 5 Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.
6. Misi 6 Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
Pembangunan kewilayahan diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah.
7. Misi 7 Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi.
8. Misi 8 Kestinambungan Pembangunan
Kestinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pendanaan pembangunan.



4.2. Telaah Visi Dan Misi RPJPD Provinsi Jawa Timur 2025-2045

Telaah RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota/Kabupaten merupakan tindak lanjut terhadap keterkaitan perencanaan Pemerintah provinsi terhadap perencanaan daerah Kabupaten/Kota dimana Kabupaten Pacitan merupakan bagian dari Provinsi Jawa Timur maka dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2045 perlu memperhatikan dan memperhitungkan perencanaan yang tersusun dalam rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur. Keterkaitan diantaranya keduanya dapat diharapkan dapat menciptakan linieritas dalam pembangunan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Adapun visi jangka panjang Provinsi Jawa Timur dalam dokumen RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 dijelaskan sebagai berikut:

JAWA TIMUR BERAKHLAK, MAJU, MENDUNIA DAN BERKELANJUTAN

Sebagai Upaya mencapai cita-cita jangka Panjang Provinsi Jawa Timur 2025-2045 sehingga visi RPJPD Provinsi Jawa Timur diturunkan kedalam 6 Misi sebagai upaya memastikan bahwa setiap tahapan tujuan jangka Panjang akan dapat tercapai dengan baik, berikut merupakan gambaran 8 misi Pembangunan jangka Panjang Provinsi Jawa Timur:

1. **Mewujudkan transformasi sosial dalam menunjang SDM berkelanjutan,** Misi ini meliputi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), jaminan kesejahteraan sosial, yang dicapai melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan-anak, kesejahteraan keluarga, dan penyediaan literasi ilmu pengetahuan yang memadai dalam mewujudkan masyarakat Jawa Timur yang maju, berakhlak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, unggul, inovatif dan berdaya saing Mewujudkan transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan.
2. **Mewujudkan transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan,** dicapai dengan cara meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi produktif melalui industri manufaktur, ekonomi biru, pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global, serta pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan.
3. **Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik inovatif,** dicapai dengan cara membangun sistem pemerintahan yang handal (Good Corporate Governance), pembentukan kapasitas aparatur daerah (ASN), serta kebijakan pengawasan internal dan eksternal yang efektif.
4. **Mewujudkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah,** dicapai melalui pembangunan karakteristik masyarakat yang inklusif, demokratis, tertib, aman, nyaman, dan tentram, internalisasi nilai-nilai kebangsaan dan pendidikan politik, serta dalam mencapai



stabilitas ekonomi makro dilakukan melalui stabilisasi harga dalam rangka pengendalian inflasi dan penguatan sektor ekonomi.

5. **Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi**, dicapai dengan cara penguatan nilai-nilai agama dan budaya sebagai pijakan spiritual yang kokoh dan teruji, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, peningkatan kualitas keluarga, pengarusutamaan gender, dan pelestarian lingkungan hidup serta ketahanan energi dan ketangguhan penanggulangan bencana.
6. **Memantapkan Pembangunan Kewilayahan yang Mendorong Titik Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Memperkuat Pemerataan Pembangunan**, dicapai dengan cara penguatan konektivitas antar wilayah, sehingga diharapkan dapat menekan angka kemiskinan, pengangguran melalui kemudahan memperoleh akses terhadap berbagai bentuk pelayanan sosial dasar masyarakat yang berkualitas
7. **Mewujudkan pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan**, dicapai dengan cara pemenuhan infrastruktur dan sarana prasarana dasar masyarakat berkualitas dan merata, meliputi sarana pendidikan, kesehatan, perumahan/permukiman, perhubungan dan daya dukung pengembangan sektor riil.
8. **Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan**, dicapai dengan cara melaksanakan kebijakan Net Zero Emission (Aktivitas Bebas Karbon), dengan menekankan implementasi Green Economy dan Blue Economy serta penerapan Energi Baru Terbarukan (EBT)

4.3. Visi Dan Misi RPJPD Kabupaten Pacitan 2025-2045

Harapan pembangunan Kabupaten Pacitan dalam 20 tahun kedepan dituangkan dalam Visi pembangunan jangka panjang daerah. Visi pembangunan jangka panjang dirumuskan dari hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan pada periode sebelumnya untuk melihat kondisi masa lampau dan kondisi saat ini, serta mempertimbangkan unsur kemungkinan yang akan terjadi pada 20 tahun kedepan yang diperoleh melalui telaah-telaah pada dokumen maupun publikasi hasil penelitian yang tentunya sedikit banyak akan memiliki pengaruh pada pembangunan di kabupaten Pacitan dalam kurun waktu 20 tahun kedepan. Berikut merupakan Visi-Misi Kabupaten Pacitan 20 Tahun kedepan:

Gambar 4. 5 Visi RPJPD Kabupaten Pacitan Tahun 2025 - 2045



Pacitan Maju Yang Mampu Berdaya Saing

Pacitan menjadi daerah yang mandiri, tangguh dan memiliki taraf hidup yang tinggi dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, indeks pembangunan manusia yang tinggi, pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, Masyarakat yang berakhlak, infrastruktur yang canggih, standar hidup yang tinggi, dan mampu memajukan aspek-aspek lainnya sehingga dapat menjadi daerah yang maju dan berdaya saing.

Infrastruktur Yang Berkualitas, Merata, dan Berkelanjutan

Pacitan melaksanakan pembangunan infrastruktur yang berkualitas secara merata di berbagai wilayah dalam rangka menciptakan aksesibilitas dan mobilitas yang efisien untuk mendukung berbagai aktivitas masyarakat sehingga menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan. Pembangunan yang dilaksanakan didasarkan pada wawasan lingkungan yang berorientasi pada terjaganya keberlangsungan sumber daya alam.

Upaya untuk mencapai kedua visi tersebut dituangkan dalam 5 sasaran visi sebagai berikut:

1. Kemiskinan Berkurang dan Pembangunan Merata

Pacitan memfokuskan orientasi kebijakan ekonomi pada pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), perluasan lapangan kerja, penurunan tingkat pengangguran, dan peningkatan pengeluaran perkapita. Pelaksanaan kebijakan diiringi dengan peningkatan kualitas infrastruktur sebagai aspek penunjang dalam perputaran ekonomi. Pembangunan ini dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Pacitan. Dengan demikian, Kabupaten Pacitan mencapai 6,75% pertumbuhan ekonomi, 0,94 – 0,28% angka kemiskinan, dan 72,04 indeks Kepuasan Layanan infrastruktur pada tahun 2045.

2. Daya Saing SDM Meningkat



Pacitan menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kualifikasi yang sesuai kebutuhan pasar dan zaman untuk memajukan daerah dalam berbagai aspek dengan meningkatkan berbagai kemampuan, seperti kreativitas, integritas, kepemimpinan, keterampilan, etos kerja, dan profesionalisme melalui pendidikan dan pelatihan yang adaptif dan komprehensif sehingga memiliki daya saing yang tinggi. Dengan demikian, angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Pacitan mencapai 85-86 pada tahun 2045.

3. Penurunan Intensitas Emisi GRK

Pacitan menerapkan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan untuk menjaga keberlangsungan sumber daya alam sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lestari, nyaman, dan aman bagi generasi selanjutnya yang salah satu langkahnya adalah menurunkan intensitas emisi GRK sampai 30,46% pada tahun 2045.

4. Daya Tarik Ekonomi Kawasan Selatan Jawa Timur

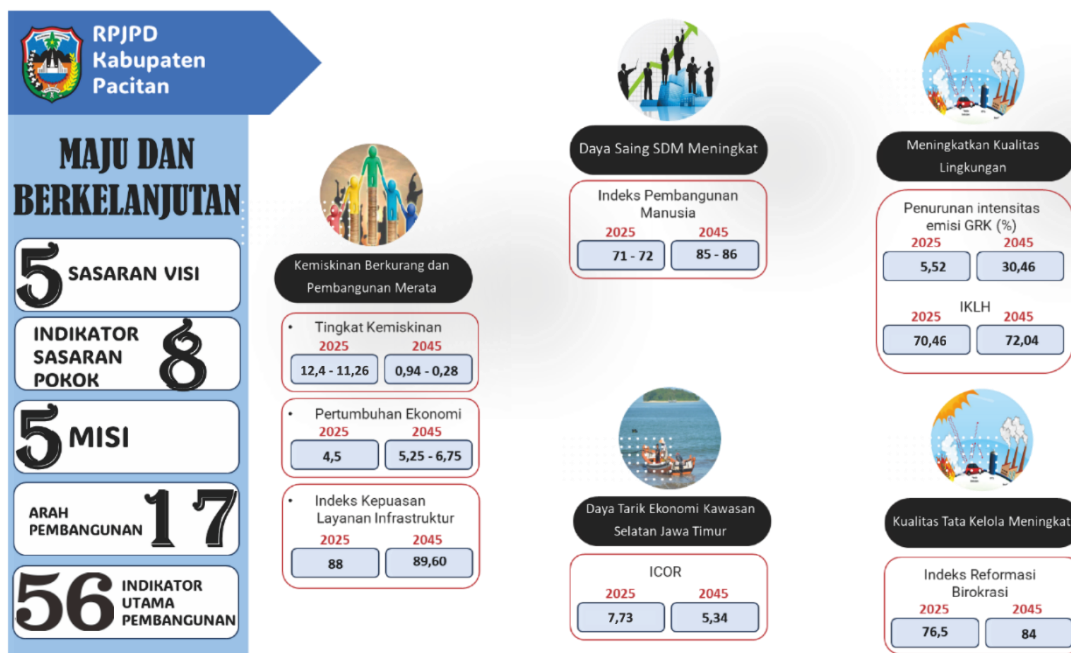
Pacitan memanfaatkan potensi perekonomian daerah sehingga dapat memproduksi barang dan jasa yang bernilai tinggi melalui berbagai sektor yang terdiri dari perikanan, pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, dan industri manufaktur sehingga dapat membangun ekosistem perekonomian yang menguntungkan dan menjadikan Pacitan sebagai daerah yang memiliki daya tarik ekonomi di Kawasan Selatan Jawa Timur dengan mencapai mencapai skor 5,34 pada Incremental Capital Output Ratio (ICOR) di tahun 2045.

5. Kualitas Tata Kelola Meningkat

Pacitan melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan nilai-nilai reformasi dengan menekankan efektivitas, efisiensi, keadilan, keterbukaan, partisipatif, akuntabel, dan transparan sehingga mampu mencapai Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 84 pada tahun 2045.

Berdasarkan Visi diatas, dirumuskan Sasaran Pokok Visi yang di fokuskan pada 3 aspek berikut:

Gambar 4. 6 Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Pacitan Tahun 2025 - 2045



Adapun sasaran Visi antara RPJPN 2025 – 2045, RPJPD Provinsi Jawa Timur 2025 – 2045 dan RPJPD Kabupaten Pacitan 2025- 2045 harus selaras dan linear, sehingga dalam perumusannya tetap memperhatikan dan berpedoman pada RPJP Vertikal. Berikut merupakan keselarasan Sasaran Visi RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Timur dan RPJPD Kabupaten Pacitan:

Gambar 4. 7 Linearitas Sasaran Visi RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Timur dan RPJPD Kabupaten Pacitan.

 1. Pendapatan Perkapita Setara Negara Maju 2. Kemiskinan Menuju 0% dan Kesenjangan Berkurang 3. Kepemimpinan dan pengaruh di Dunia Internasional Meningkat 4. Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat 5. Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju Net Zero Emission	 1. Peningkatan Pendapatan per Kapita 2. Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang 3. Kepemimpinan dan Pengaruh Jawa Timur di Kancah Nasional 4. Produktivitas & Daya Saing SDM Meningkat 5. Penurunan emisi GRK menuju net zero emission	 1. Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pembangunan 2. Daya Tarik Ekonomi Kawasan Selatan Jawa Timur 3. Daya Saing SDM Meningkat 4. Mengurangi Intensitas Emisi GRK 5. Kualitas Tata Kelola Meningkat
---	---	--

Misi pembangunan jangka panjang merupakan jabaran atas visi pembangunan yang telah diuraikan sebelumnya. Oleh karena hal tersebut dalam rangka perumusan

misi pembangunan, tidak dapat terlepas dari point-point penting yang termuat dalam sasaran visi pembangunan. Berdasarkan pada sasaran visi yang telah diuraikan sebelumnya maka dirumuskan 4 misi pembangunan sebagai berikut.

Gambar 4. 8 Misi RPJPD Kabupaten Pacitan Tahun 2025 – 2045



MISI 1: Mewujudkan Transformasi Sosial Secara Merata

Mewujudkan transformasi sosial secara merata merupakan upaya untuk mengubah struktur dan pola hubungan sosial yang ada dalam masyarakat agar lebih adil dan merata bagi seluruh anggotanya. Transformasi ini bertujuan untuk mengatasi disparitas dan kesenjangan yang ada dalam berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan partisipasi politik. Proses ini melibatkan partisipasi aktif dari semua elemen masyarakat, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sektor bisnis, dan individu-individu, untuk bekerja sama dalam merancang kebijakan, program, dan proyek yang mendukung terciptanya kesetaraan dan keadilan sosial. Selain itu, transformasi sosial ini juga memerlukan pemahaman mendalam tentang masalah-masalah struktural yang menyebabkan ketidakmerataan, sehingga solusi yang dihasilkan dapat menjadi langkah yang tepat dalam mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian, mewujudkan transformasi sosial secara merata bukan hanya sekadar mengubah tatanan sosial yang ada, tetapi juga melibatkan perubahan paradigma dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara.

MISI 2: Mewujudkan Transformasi Ekonomi Berbasis Potensi Lokal

Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis potensi lokal merupakan upaya untuk mengembangkan perekonomian suatu daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang ada di dalamnya. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan



kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dengan memperkuat ekonomi lokal dan meminimalisir ketergantungan pada sumber daya eksternal. Potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah, seperti potensi sumber daya alam, keunggulan komparatif dalam produksi tertentu, keberagaman budaya, dan kreativitas masyarakat lokal dikembangkan melalui berbagai program dan kebijakan yang mendukung, seperti pengembangan infrastruktur, pelatihan tenaga kerja, pembiayaan usaha mikro dan kecil, serta promosi produk lokal. Dengan mewujudkan transformasi ekonomi berbasis potensi lokal, diharapkan dapat tercipta perekonomian yang lebih kuat dan inklusif, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat setempat.

MISI 3: Mewujudkan Tata Kelola Yang Efektif Dan Adaptif

Mewujudkan tata kelola yang efektif dan adaptif merupakan upaya untuk membangun sistem penyelenggaraan pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, responsif terhadap perubahan, dan mampu menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Hal ini melibatkan perbaikan dalam berbagai aspek tata kelola, termasuk kebijakan publik, manajemen sumber daya, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Dengan tata kelola yang efektif dan adaptif, diharapkan pemerintah dapat mengambil keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan layanan publik, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahannya.

MISI 4: Meningkatkan Ketahanan Sosbud Ekologi

Meningkatkan ketahanan sosial, budaya ekologi adalah upaya untuk memperkuat daya tahan masyarakat terhadap tekanan dan tantangan sosial, budaya, dan ekologi. Hal ini melibatkan pemeliharaan dan pengembangan nilai-nilai budaya lokal, peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, serta penguatan solidaritas sosial dan ketahanan ekonomi. Dengan meningkatkan ketahanan sosial, budaya ekologi, diharapkan masyarakat dapat lebih mampu bertahan dan beradaptasi dalam menghadapi perubahan lingkungan dan sosial yang terjadi.

MISI 5: Mewujudkan Pemerataan Pembangunan dan Infrastruktur Berkelanjutan

Mewujudkan pemerataan pembangunan dan infrastruktur berkelanjutan adalah upaya untuk menyelaraskan pembangunan infrastruktur dengan kebutuhan masyarakat, serta memastikan bahwa pembangunan tersebut berlangsung secara merata di berbagai wilayah. Hal ini melibatkan perencanaan yang matang, alokasi sumber daya yang tepat, serta pengembangan infrastruktur yang ramah lingkungan dan mampu berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan mewujudkan pemerataan pembangunan dan infrastruktur berkelanjutan, diharapkan dapat tercipta kondisi di mana seluruh masyarakat dapat menikmati manfaat dari pembangunan yang berkelanjutan dan adil.

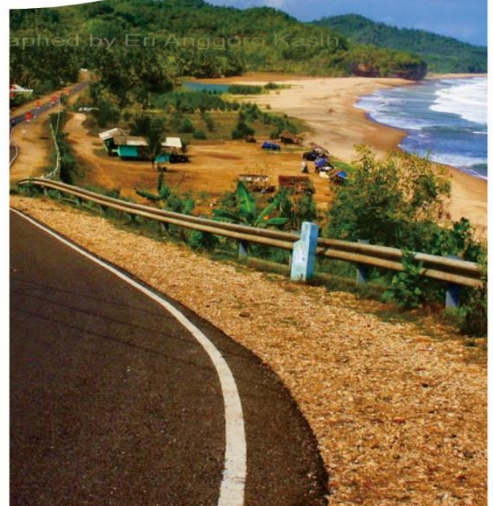
Dalam Perumusannya, Visi dan Misi RPJPD harus selaras dengan Visi-Misi RPJPN dan RPJPD Provinsi, sehingga harus di perhatikan berkaitan dengan linearitasnya. Berikut merupakan linearitas Misi RPJPN, RPJPD Provinsi dan RPJPD Kab. Pacitan:

Gambar 4. 9 Linearitas Misi RPJPN, RPJPD Provinsi dan RPJPD Kabupaten Pacitan Tahun 2025 – 2045



BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN ARAH PEMBANGUNAN





5.1. Arah Kebijakan Periodisasi 5 Tahunan

5.1.1. Arah Kebijakan Periodisasi 5 Tahunan Misi 1: Mewujudkan Transformasi Sosial secara merata

Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Pacitan pada setiap Misi dibagi kedalam 4 periode pembangunan selama 5 Tahunan yang yaitu 2025-2029, 2030-2034, 2035-2039, dan 2040-2044. Adapun Arah kebijakan Misi 1 RPJPD Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut:

Gambar 5. 1 Arah Kebijakan Periodisasi 5 Tahunan Misi 1 RPJPD Kabupaten Pacitan Tahun 2025 - 2045



Arah Kebijakan Misi 1 pada Periode 2025-2029 berfokus pada Pemenuhan Infrastruktur Layanan Dasar dan Pengentasan Kemiskinan sebagai Dasar Transformasi Sosial yang Merata. Dimana selanjutnya pada periode 2030-2034 dilanjutkan dengan Akselerasi Pemenuhan Infrastruktur Layanan Dasar yang berkualitas dan Perlindungan Sosial yang Berkeadilan. Periode 2035-2039 termasuk periode pematangan dimana diarahkan pada Peningkatan Daya Saing SDM dan Kesejahteraan semakin baik. Sehingga periode akhir Tahun 2040-2044 arah kebijakan dapat Mewujudkan SDM yang berdaya Saing dan Taraf Kesejahteraan meningkat.



5.1.2. Arah Kebijakan Periodisasi 5 Tahunan Misi 2: Mewujudkan Transformasi Ekonomi berbasis Potensi Lokal

Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Pacitan pada setiap Misi dibagi kedalam 4 periode pembangunan selama 5 Tahunan yang yaitu 2025-2029, 2030-2034, 2035-2039, dan 2040-2044. Adapun Arah kebijakan Misi 2 RPJPD Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut:

Gambar 5. 2 Arah Kebijakan Periodisasi 5 Tahunan Misi 2 RPJPD Kabupaten Pacitan Tahun 2025 - 2045



Arah Kebijakan Misi 2 pada Periode 2025-2029 berfokus Meningkatkan Produktivitas sektor Unggulan melalui penerapan Riset, Inovasi dan Teknologi. Dimana selanjutnya pada periode 2030-2034 dilanjutkan dengan Penguatan Hilirisasi sektor-sektor potensial dan peningkatan Perekonomian Masyarakat. Periode 2035-2039 termasuk periode pematangan dimana diarahkan pada Eksplorasi Sumber-sumber pertumbuhan ekonomi potensial dengan penerapan green economy. Sehingga periode akhir Tahun 2040-2044 arah kebijakan memberikan Penguatan Riset, Inovasi dan Teknologi dalam Perekonomian Daerah.



5.1.3. Arah Kebijakan Periodisasi 5 Tahunan Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Yang Efektif dan Adaptif

Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Pacitan pada setiap Misi dibagi kedalam 4 periode pembangunan selama 5 Tahunan yang yaitu 2025-2029, 2030-2034, 2035-2039, dan 2040-2044. Adapun Arah kebijakan Misi 3 RPJPD Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut:

Gambar 5. 3 Arah Kebijakan Periodisasi 5 Tahunan Misi 3 RPJPD Kabupaten Pacitan Tahun 2025 – 2045



Arah Kebijakan Misi 3 pada Periode 2025-2029 berfokus Peningkatan Kualitas Kelembagaan, SDM dan Layanan yang efektif dan adaptif. Dimana selanjutnya pada periode 2030-2034 dilanjutkan dengan Akselerasi Penerapan Digitalisasi dalam tata Kelola Pemerintahan. Periode 2035-2039 termasuk periode pematangan dimana diarahkan pada Penguatan kualitas Tata Kelola yang kompetitif dan mampu menjalankan sektor-sektor strategis. Sehingga periode akhir Tahun 2040-2044 arah kebijakan dapat Mewujudkan Pelayanan Publik dan Tata Kelola yang Berkualitas.



5.1.4. Arah Kebijakan Periodisasi 5 Tahunan Misi 4: Meningkatkan Ketahanan Sosbud Ekologi

Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Pacitan pada setiap Misi dibagi kedalam 4 periode pembangunan selama 5 Tahunan yang yaitu 2025-2029, 2030-2034, 2035-2039, dan 2040-2044. Adapun Arah kebijakan Misi 4 RPJPD Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut:

Gambar 5. 4 Arah Kebijakan Periodisasi 5 Tahunan Misi 4 RPJPD Kabupaten Pacitan Tahun 2025 – 2045



Arah Kebijakan Misi 4 pada Periode 2025-2029 berfokus Memperkuat Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi melalui pemenuhan infrastruktur dan peran aktif Masyarakat. Dimana selanjutnya pada periode 2030-2034 dilanjutkan dengan Akselerasi pemenuhan infrastruktur dan peran aktif Masyarakat sebagai langkah meningkatkan kualitas ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi. Periode 2035-2039 termasuk periode pematangan dimana diarahkan pada Penguatan jejaring ketahanan sosial, budaya dan ekologi. Sehingga periode akhir Tahun 2040-2044 arah kebijakan dapat Menciptakan sistem Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi yang berkelanjutan.



5.1.5. Arah Kebijakan Periodisasi 5 Tahunan Misi 5: Mewujudkan Pemerataan Pembangunan dan Infrastruktur Berkelanjutan

Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Pacitan pada setiap Misi dibagi kedalam 4 periode pembangunan selama 5 Tahunan yang yaitu 2025-2029, 2030-2034, 2035-2039, dan 2040-2044. Adapun Arah kebijakan Misi 5 RPJPD Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut:

Gambar 5. 5 Arah Kebijakan Periodisasi 5 Tahunan Misi 5 RPJPD Kabupaten Pacitan Tahun 2025 – 2045



Arah Kebijakan Misi 5 pada Periode 2025-2029 berfokus Meningkatkan Pembangunan dan Penyediaan Infrastruktur yang merata dan berkelanjutan. Dimana selanjutnya pada periode 2030-2034 dilanjutkan dengan Akselerasi Pembangunan yang merata dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan. Periode 2035-2039 termasuk periode pematangan dimana diarahkan pada Peningkatan kualitas Pembangunan yang mampu menekan ketimpangan. Sehingga periode akhir Tahun 2040-2044 arah kebijakan dapat Menjamin Pembangunan yang merata, berkualitas dan berkelanjutan.



5.2. Arah Pembangunan

Sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian Pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD Tahun 2025-2045 pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator pada level impact dan bersifat progresif. Berikut merupakan sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Pacitan Tahun 2025 – 2045:

Gambar 5. 6 Arah Pembangunan RPJPD Kabupaten Pacitan Tahun 2025 – 2045



Dalam sasaran pokok di atas, telah dibagi sasaran pokok berdasarkan dengan lima sektor yakni sektor sosial, sektor ekonomi, sektor tata kelola, sektor sosial budaya dan ekologi serta sektor infrastruktur. Melihat kondisi daerah yang didasarkan dengan visi RPJPD, maka disusunlah 19 sasaran pokok misi sebagai perwujudan visi RPJPD Tahun 2025-2045. 19 sasaran pokok misi tersebut nantinya akan menjadi landasan dalam penyusunan arah kebijakan yang disesuaikan dengan arah kebijakan Provinsi Jawa Timur.

5.2.1. Arah Pembangunan Misi 1

Sasaran pokok Misi 1 berkaitan dengan Transformasi Sosial Secara merata diarahkan pada Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan, Pemerataan Akses dan Kualitas Kesehatan, Pengurangan Kesenjangan dan Pembangunan Kepemudaan. Berikut merupakan gambaran sasaran pokok pada Misi 1 RPJPD Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2045 :



Gambar 5. 7 Arah Pembangunan Misi 1 RPJPD Kabupaten Pacitan Tahun 2025 – 2045



Tabel 5. 1 Indikator Sasaran Pokok Misi 1 disertai Target

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator	Baseline 2023	Target	
				2025	2045
Mewujudkan Akses dan Mutu Pendidikan merata	Akses dan Mutu Pendidikan merata	Indeks Pendidikan	0,615	0,62	0,70
		Skor Literasi	73,33	74	80
		Skor Numerasi	60	61	70
		Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia diatas 15 Tahun	7,88	8,12	9,66
		Harapan Lama Sekolah	12,68	12,71	13,03
		Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	4,78	6,26	7,56
Mewujudkan Akses dan kualitas kesehatan merata	Akses dan kualitas kesehatan merata	Indeks Kesehatan	0,81	0,815	0,88
		Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,58	74,91	80,04
		Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	113,72	98,47	15,88
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	20,9	17,54	4,95
		Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	84,45	91	100
		Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis	79,63	91	100



Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator	Baseline 2023	Target	
				2025	2045
		(treatment success rate) (%)			
		Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	81	83	95
Meningkatkan Pembangunan Kepemudaan	Pembangunan Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda		55,83	80
Berkurangnya Kesenjangan	Kesenjangan berkurang	Tingkat Kemiskinan	13,65	12,4 - 11,26	0,94 - 0,28
		Indeks Gini	0,352	0,35	0,28
		Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	29,08	23,83	89,92
		Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)		68	100

Berdasarkan Arah Pembangunan diatas, berikut merupakan arah kebijakan pada misi 1 berdasarkan arah Pembangunan Kabupaten Pacitan:

Tabel 5. 2 Arah Kebijakan Misi 1

Arah Pembangunan	Arah Kebijakan
Pemerataan Akses dan Kualitas Kesehatan	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan.
	Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal.
	Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan *)
	Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya *)
	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan *)
	meningkatkan Cakupan dan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan
	Perkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus tenaga kesehatan, terutama untuk tenaga Kesehatan*)
	Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas *)
	Percepatan Penanganan dan Pencegahan Stunting



Arah Pembangunan	Arah Kebijakan
	Peningkatan ketahanan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.
	Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan *)
Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) *)
	Pemerataan Akses dan Infrastruktur Pendidikan
	Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi *)
	Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar *)
	Peningkatan kualitas sistem Pendidikan
	Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah *)
	Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) *)
	Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik *)
	Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga Kependidikan *)
	Peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan *)
	Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas *)
	Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) *)
	Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK *)
	Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama*)
Pengurangan Kesenjangan	Penuntasan kemiskinan dengan satu system regsosek dan perlindungan social adaptif terintegrasi *)

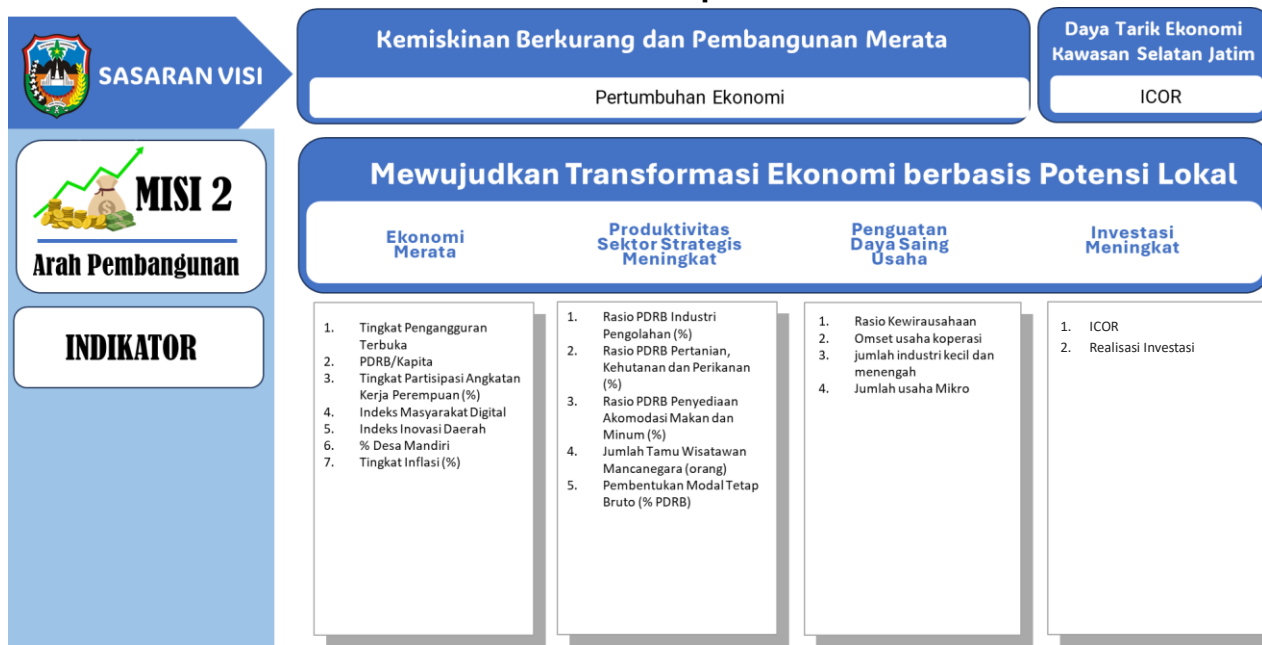


Arah Pembangunan	Arah Kebijakan
	Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion *)
	data rumah tangga miskin yang belum berlistrik untuk pemasangan instalasi rumah dan sambungan rumah bagi rumah tangga miskin *)
	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia
	Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.
	Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya.
	Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat
	Perluasan akses Perlindungan sosial yang tepat sasaran
	Perlindungan sosial yang merata diseluruh lapisan masyarakat dan berkeadilan
	Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi.
	Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah
Pembangunan Kepemudaan	Pembinaan kepemudaan
	Pemberdayaan terhadap pemuda untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah
	Pemenuhan infrastruktur kepemudaan

5.2.2. Arah Pembangunan Misi 2

Sasaran pokok Misi 2 berkaitan dengan Transformasi Ekonomi Berbasis Potensi Lokal diarahkan pada Pemerataan Ekonomi, Produktivitas Sektor Strategis dan Penguatan Daya Saing Usaha.

Gambar 5. 8 Sasaran Pokok Misi 2 RPJPD Kabupaten Pacitan Tahun 2025 – 2045



Tabel 5. 3 Indikator Sasaran Pokok Misi 2 disertai Target

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator	Baseline 2023	Target	
				2025	2045
Mewujudkan Pemerataan Ekonomi	Ekonomi Merata	Tingkat Pengangguran Terbuka	1,83	1,68 - 1,46	1,03 - 0,65
		PDRB/Kapita	33.148.630	34.500.000 - 38.000.000	80.000.000 - 100.000.000
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	73,91	77,69	80,12
		Indeks Masyarakat Digital	42,19	43	70
		Indeks Inovasi Daerah	46,14	55 - 60	70 - 75
		Persetase Desa Mandiri	29	10,78 - 30	32,34 - 50
		Tingkat Inflasi (%)	2,58	2,55	1,82
Meningkatkan Produktivitas Sektor Strategis	Produktivitas Sektor Strategis Meningkat	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	7,35	7,50 - 7,66	7,97 - 8,67



Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator	Baseline 2023	Target	
				2025	2045
		Rasio PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	27,00	27,00 - 27,25	27,30 - 27,50
		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	2,4	2,32 - 3,72	4,83 - 8,03
		Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (orang)*	425	500	1.750
		Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)		42,12 - 42,72	40,11 - 41,02
Mewujudkan Daya Saing Usaha	Penguatan Daya Saing Usaha	Proporsi jumlah usaha Mikro	25.033	25.600	35.000
		jumlah industri kecil dan menengah	12.106	12.500	15.136
		Rasio Kewirausahaan		3 - 3,5	6
		Omset usaha koperasi	246.000.000.000	250.000.000.000	500.000.000.000
Meningkatkan Investasi	Investasi Meningkat	ICOR	9	7,73	5,34
		Realisasi Investasi (Triliyun Rupiah)	0,945	0,12	0,15

Berdasarkan Arah Pembangunan diatas, berikut merupakan arah kebijakan pada misi 2 berdasarkan arah Pembangunan Kabupaten Pacitan:

Tabel 5. 4 Arah Kebijakan Misi 2

Arah Pembangunan	Arah Kebijakan
Pemerataan Ekonomi	Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja.
	Pelatihan untuk masyarakat sesuai bidang kompetensi
	Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui <i>upskilling</i> maupun <i>reskilling</i> .
	Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat di Daerah



Arah Pembangunan	Arah Kebijakan
	Menjaga Stabilitas Harga dan Ketersediaan Bahan Pokok
Produktivitas sektor Strategis Meningkat	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan water prosperity melalui pengembangan kawasan strategis pertanian *)
	Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya). *)
	Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global *)
	Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis *)
	Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform. *)
	Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian.
	Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian. *)
	Pengembangan closed loop model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian *)
	Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah *)
	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak. *)



Arah Pembangunan	Arah Kebijakan
	Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh nelayan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui digital marketplace/platform. *)
	Perluasan akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi nelayan dan petambak.
	Pengembangan <i>closed loop model</i> perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan & petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan <i>market, bank</i> , dan asuransi perikanan.
	Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan *)
	Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif *)
	Modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan. *)
	Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya *)
	Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah(industri bahan konstruksi, industri makanan dan minuman, industri consumer goods & general manufactures, industri kayu dan barang dari kayu,industri alat angkutan dan kendaraan. *)
	Pengembangan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan Kabupaten Pacitan
	Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary services, aktivitas, available packages) terutama pada kawasan Geopark Gunung Sewu, Monumen Panglima Besar Jenderal Sudirman dan kawasan Agrowisata*)



Arah Pembangunan	Arah Kebijakan
	Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif *)
	Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha *)
	Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif *)
	Penguatan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon.
	Pengembangan Agropolitan terutama di wilayah Kecamatan Bandar dan Nawangan. *)
	Peningkatan nilai tambah agroindustri. *)
	Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok. (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital <i>skill</i> (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital.
	Produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan.
	Percepatan pelaksanaan reforma agraria.
	Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas <i>researcher</i> , peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri.
	Peningkatan produktivitas BUMD*)



Arah Pembangunan	Arah Kebijakan
Penguatan Daya Saing Usaha	City beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan *)
	Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.
	Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha. *)
	Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis *)
	Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan,
Investasi Meningkat	Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (<i>unique & high-value economy</i>), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi di Daerah, guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat di Daerah
	Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah.
	Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global
	Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke <i>green/low-cost financing</i> , bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi



5.2.3. Arah Pembangunan Misi 3

Sasaran pokok Misi 3 berkaitan dengan Tata Kelola yang Efektif dan Adaptif diarahkan pada Reformasi Birokrasi yang efektif, ASN yang Profesional dan Pelayanan Publik.

Gambar 5. 9 Sasaran Pokok Misi 3 RPJPD Kabupaten Pacitan Tahun 2025 – 2045



Tabel 5. 5 Indikator Sasaran Pokok Misi 3 disertai Target

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator	Baseline 2023	Target	
				2025	2045
Mewujudkan Efektivitas Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi Efektif	Indeks Reformasi Hukum	66,17	70	90
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,34	4,23	5
		Indeks Profesionalisme Aparatur	65	70	82,60
Mewujudkan Efektivitas Layanan Publik	Efektivitas Layanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	3,66	3,8	5,1
		SPI	80,45	83	93,38

Berdasarkan Arah Pembangunan diatas, berikut merupakan arah kebijakan pada misi 3 berdasarkan arah Pembangunan Kabupaten Pacitan:

Tabel 5. 6 Arah Kebijakan Misi 3

Arah Pembangunan	Arah Kebijakan
Reformasi Birokrasi Efektif	Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan*)
	Penataan kelembagaan yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah *)



Arah Pembangunan	Arah Kebijakan
	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb.), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.
	Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan <i>blended finance</i> .
	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.
	Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW
	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional.
	Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb.).
	Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN, menuju penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional dan bebas korupsi.
	Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, <i>reward</i> , dan <i>punishment</i> , termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.
	Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat.
Efektivitas Layanan Publik	Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital
	Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.
	Penguatan pengendalian inflasi daerah.
	Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan

Arah Pembangunan	Arah Kebijakan
	pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan.
	Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah.

5.2.4. Arah Pembagnunan Misi 4

Sasaran pokok Misi 4 berkaitan dengan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi diarahkan pada Kondusifitas Daerah, Ketahanan Pangan, Kesenjangan Gender, Kualitas Keluarga, Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana

Gambar 5. 10 Sasaran Pokok Misi 4 RPJPD Kabupaten Pacitan Tahun 2025 – 2045



Tabel 5. 7 Indikator Sasaran Pokok Misi 4 disertai Target

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator	Baseline 2023	Target	
				2025	2045
Meningkatkan Kondusifitas Daerah	Kondusifitas Daerah	Indeks Kerukunan Umat Beragama		65 - 66	75-80
Mewujudkan Ketahanan Pangan	Ketahanan Pangan	Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)		10,51	0,64
Meningkatkan Kesenjangan Gender dan Perlindungan Anak	Kesenjangan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Ketimpangan Gender		0,422 – 0,421	0,20 - 0,19
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	61,16	63	70
Mewujudkkn Lingkungan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	63,97	70,46	72,04



Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator	Baseline 2023	Target	
				2025	2045
Hidup yang Berkualitas	Lingkungan Hidup Berkualitas	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	2,04	2,5	71
		Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	42,13	42,5	100
		Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%);	8,31	8,31 - 15,46	87
		Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT);	7,53	7,53 – 15,93	100
Mewujudkan Ketahanan Bencana	Ketahanan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,71	0,73	0,97
		Indeks Risiko Bencana (IRB)	106,98	100 - 113,64	96,78 - 82,3

Berdasarkan Arah Pembangunan diatas, berikut merupakan arah kebijakan pada misi 4 berdasarkan arah Pembangunan Kabupaten Pacitan:

Tabel 5. 8 Arah Kebijakan Misi 4

Arah Pembangunan	Arah Kebijakan
Kondusifitas Daerah Meningkat	Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat *)
	Penguatan integritas partai politik
	Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas.
	Dukungan terhadap pengembangan pusat pendidikan & pelatihan militer/pangkalan komposit/pangkalan/pos militer/sarana & prasarana pertahanan lainnya di Daerah
	Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila *)
	Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan Golongan *)
Ketahanan Pangan Meningkat	Menjamin Pemenuhan kualitas dan Kebutuhan pangan daerah
	Pengembangan alternatif Pangan Daerah
	Peningkatan ketahanan pangan pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.



Arah Pembangunan	Arah Kebijakan
	Perluasan penyediaan bantuan sosial peningkatan ketahanan pangan terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat
Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.
	Pemberdayaan sosial dan ekonomi untuk perempuan
	Menjamin akses perempuan ke layanan dasar
	meningkatkan kesadaran bahayanya Pernikahan Usia Dini
	penguatan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan
	Pendidikan Parenting untuk keluarga baru dan yang bermasalah
Lingkungan Hidup Berkualitas	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.
	Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis.
	Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami *)
	Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air *) Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy *)



Arah Pembangunan	Arah Kebijakan
	Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.
	Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir.
	meningkatkan kualitas hidup dengan pendekatan partisipatif
	Pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan
	Perlibatan berbagai stakeholders dalam pelestarian lingkungan
	Kebijakan yang tegas dan adaptif terhadap pelestarian lingkungan
Ketahanan Bencana	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.

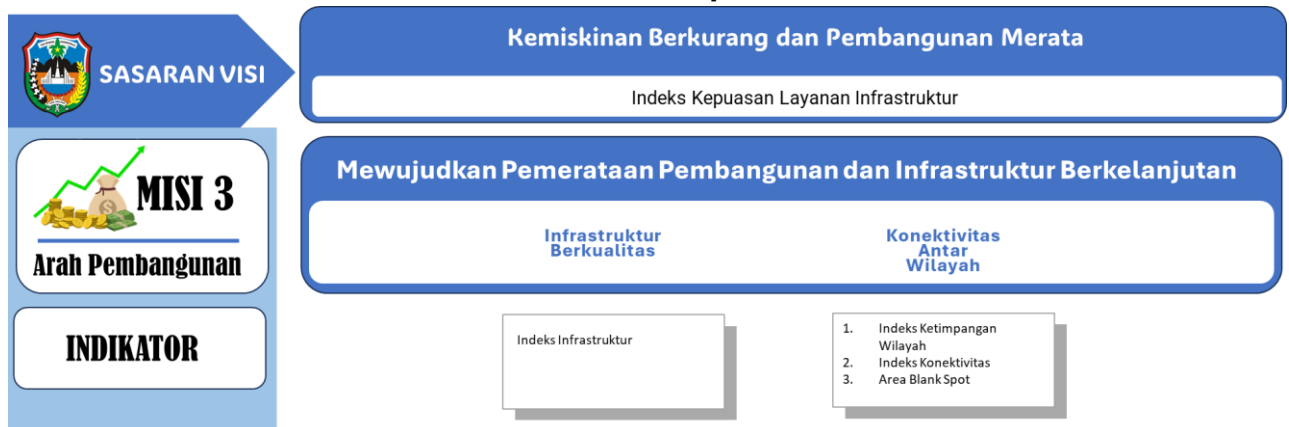


Arah Pembangunan	Arah Kebijakan
	Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan <i>hybrid (green & grey infrastructure)</i>
	penguatan kapasitas masyarakat tangguh bencana
	Peningkatan sistem peringatan dini terhadap bencana
	Kebijakan Pembangunan yang memperhatikan aspek kebencanaan
	Penyediaan infrastruktur kebencanaan yang memadai
	Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana
	Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim.

5.2.5. Arah Pembangunan Misi 5

Sasaran pokok Misi 5 berkaitan dengan Pemerataan Pembangunan dan Infrastruktur Berkelanjutan diarahkan pada Infrastruktur yang Berkualitas dan Konektivitas Antar Wilayah.

Gambar 5. 11 Sasaran Pokok Misi 5 RPJPD Kabupaten Pacitan Tahun 2025 – 2045



Tabel 5. 9 Indikator Sasaran Pokok Misi 5 disertai Target

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator	Baseline 2023	Target	
				2025	2045
Mewujudkan Infrastruktur Berkualitas	Infrastruktur Berkualitas	Indeks Infrastruktur	73,99	75	85
Meningkatkan Konektivitas Antar Wilayah	Konektivitas Antar Wilayah	Indeks Ketimpangan Wilayah	0,54	0,53	0,33
		Indeks Konektivitas	0,88	0,895	0,91
		Area Blank Spot	59	55	15



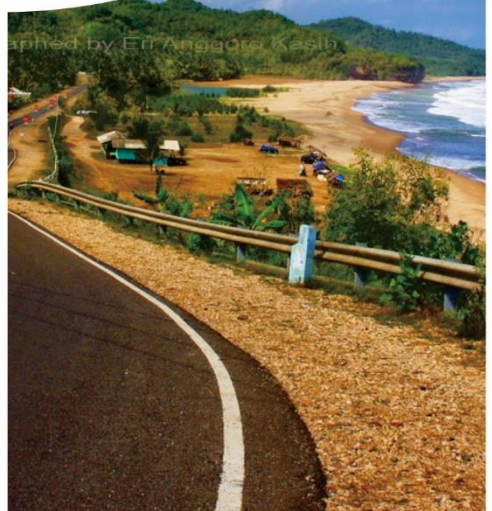
Berdasarkan Arah Pembangunan diatas, berikut merupakan arah kebijakan pada misi 5 berdasarkan arah Pembangunan Kabupaten Pacitan:

Tabel 5. 10 Arah Kebijakan Misi 5

Arah Pembangunan	Arah Kebijakan
Infstruktur Berkualitas	Percepatan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (<i>Land Acquisition and Resettlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated</i>) yang disusun secara kolaboratif & partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, <i>trust</i> , dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas
Konektivitas Antar Wilayah	Pengembangan/peningkatan <i>government-induced activities</i> dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang, yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi
	Peningkatan <i>coverage</i> dan kecepatan akses internet melalui penggelaran <i>fixed connection</i> dan/atau pembangunan infrastruktur <i>mobile connection</i> pada area-area <i>weak coverage</i>
	Pembangunan dan perluasan <i>coverage</i> sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi
	Peningkatan tata kelola, aksesbiilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal
	Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan
	Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa
	Fasilitasi pengadaan tanah untuk mendukung pembangunan Jalan Tol Trans Jawa pada wilayah Jawa Timur sebagai pendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada ruas Surakarta-Sukoharjo-Wonogiri-Pacitan dan ruas Tulungagung – Trenggalek
	Pembangunan jalan sirip penghubung rencana Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa pada wilayah Jawa Timur pada ruas Surakarta-Sukoharjo-Wonogiri-Pacitan dan ruas Tulungagung - Trenggalek

BAB VI

PENUTUP





6.1. Pedoman Transisi

Dalam kegiatan pembangunan di Kabupaten Pacitan, fungsi RPJPD adalah sebagai pedoman sekaligus rambu-rambu yang menentukan arah jangka panjang pembangunan yang ingin dicapai atau diwujudkan. Dengan kata lain, RPJPD Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2045 yang telah berhasil disusun ini bukan saja berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, tetapi juga sekaligus sebagai koridor dalam penyusunan RPJMD di setiap tahapan pembangunan jangka menengah (lima tahunan).

Namun demikian terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan dalam rangka menindaklanjuti penyusunan RPJPD Kabupaten Pacitan sebagai berikut:

1. Sebagaimana mandat dalam rangka melakukan penyelarasan antar dokumen perencanaan di Indonesia maka perlu adanya proses sinkronisasi periode perencanaan pada RPJMD dan RTRW daerah.
2. Sebagaimana fungsi Rencana Pembangunan jangka Panjang daerah yang digunakan sebagai acuan dalam Pembangunan dalam 20 tahun kedepan, maka perlu kiranya dilakukan penjabaran arah pembangunan jangka panjang ke dalam tahapan-tahapan rencana pembangunan jangka menengah
3. RPJPD dijadikan acuan dalam perumusan visi, misi dan program pembangunan atau *platform* politik calon kepala daerah.

6.2. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan sebagai landasan bagi pelaksanaan pembangunan Kabupaten Pacitan 20 tahun kedepan. Untuk menjamin adanya konsistensi pembangunan dalam 20 tahun kedepan, maka perlu dilakukan upaya untuk menjamin konsistensi perencanaan pada perencanaan jangka menengah dan jangka pendek daerah dengan memperhatikan beberapa point berikut:

1. Perencanaan dan pendanaan;
2. Akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan pencapaian sasaran prioritas nasional;
3. Kerangka pengendalian melalui manajemen risiko, sistem insentif;
4. Mekanisme perubahan;
5. Komunikasi publik;
6. Mekanisme pembiayaan pembangunan daerah;
7. Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan;
8. Pengembangan pembiayaan inovatif termasuk Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan *Blended Finance*.



6.3. Kerangka Pengendalian

Dalam rangka menjamin tercapainya sasaran pembangunan daerah, diperlukan pengendalian yang kontinu dan partisipatif dengan memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan. Pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan manajemen risiko yang dilakukan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Aktivitas pengendalian didukung oleh sistem elektronik yang terintegrasi dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Sistem elektronik terpadu juga diintegrasikan dengan tata kelola data pembangunan yang mendorong kebijakan pembangunan berbasis bukti. Pengendalian RPJP Kabupaten Pacitan dilaksanakan melalui pengendalian jangka menengah dan jangka pendek yang hasilnya disampaikan kepada Bupati. Pengendalian perencanaan

1. Pengendalian pada tahap perencanaan bertujuan memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, meningkatkan kualitas desain prioritas pembangunan, serta menjamin ketersediaan alokasi anggaran baik dari pemerintah maupun non pemerintah. Pengendalian ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.
2. Pengendalian pelaksanaan. Pengendalian pada tahap pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek. Pemantauan dan evaluasi tersebut mencakup:

Pengendalian pembangunan tersebut perlu didukung dengan tatanan regulasi agar pelaksanaannya berjalan dengan efektif. Tatanan regulasi tersebut menyinergikan regulasi terkait pemantauan, evaluasi, pengendalian, manajemen risiko pembangunan, dan manajemen kinerja. Sinergi regulasi diperlukan untuk konsistensi pelaksanaan pengendalian dengan kinerja perangkat daerah terkait yang akan menjadi salah satu dasar pengaturan sistem manajemen kinerja pemerintah. Kerangka kelembagaan pengendalian yang komprehensif juga diperlukan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini, diperlukan kelembagaan pengendalian yang mengoordinasikan pengendalian lintas dan internal perangkat daerah.